



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD)

KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

TAHUN 2023-2026



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
2022



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 10 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2023-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya kebijakan nasional mengenai pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah yang dilaksanakan secara serentak pada tahun 2024, sehingga menyebabkan terjadinya kekosongan perencanaan pembangunan jangka menengah Daerah bagi Daerah yang Kepala Daerahnya berakhir di Tahun 2022;
- b. bahwa sebagai pelaksanaan dari Diktum Kedua Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022, maka Daerah yang Kepala Daerahnya berakhir Tahun 2022 wajib menyusun Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa karena Bupati dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan telah berakhir masa jabatannya Tahun 2022 yang bersamaan dengan berakhirnya pula dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022, maka Pemerintah Daerah wajib menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 ditetapkan dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang

Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2006-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai

Kepulauan Tahun 2007 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2006-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019 Nomor 4);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2023-2026.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banggai Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
3. Bupati adalah Bupati Banggai Kepulauan.
4. Penjabat Bupati yang selanjutnya disebut Pj. Bupati adalah Pj. Bupati Banggai Kepulauan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan penelitian Pengembangan yang selanjutnya disebut Bappeda dan Litbang adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan.

7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2005-2025, yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
9. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016-2036 yang selanjutnya disebut RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arah kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional dan pulau/kepulauan ke dalam struktur dan pola ruang wilayah.
10. Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut RPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 3 (tiga) tahun terhitung sejak tahun 2023 sampai dengan tahun 2026.
11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan Daerah.
12. Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 3 (tiga) tahun terhitung sejak tahun 2023 sampai dengan tahun 2026.
13. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

- (1) RPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang memuat tujuan, sasaran, strategi dan arah Kebijakan serta program prioritas yang disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif untuk periode 2023-2026 yang disusun berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN.
- (2) RPD Tahun 2023-2026 merupakan dokumen perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 yang akan digunakan oleh Penjabat Bupati sebagai pedoman untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah tahun 2023-2026.

Pasal 3

RPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 berfungsi sebagai:

- a. pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah; dan
- b. pedoman Pemerintah Daerah dalam menyusun RKPD.

Pasal 4

(1) Dokumen RPD di sajikan dengan sistematika sebagai berikut:

- a. BAB I : Pendahuluan;
- b. BAB II : Gambaran Umum;
- c. BAB III : Gambaran Keuangan Daerah;
- d. BAB IV : Permasalahan dan Isu Strategis;
- e. BAB V : Tujuan dan Sasaran;
- f. BAB VI : Strategi, Arah Kebijakan dan Program Program Prioritas;
- g. BAB VII : Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah;
- h. BAB VIII : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
- i. BAB IX : Penutup

(2) RPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

(1) Kepala Bappeda dan Litbang bertanggung jawab atas pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023-2026.

(2) Dalam melakukan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bappeda dan Litbang berkoordinasi dengan Perangkat Daerah lainnya.

Pasal 6

RPD Tahun 2023-2026 dapat dilakukan perubahan apabila :

- a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara asumsi perencanaan dengan kondisi eksisting;
- b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara target dan pencapaian kinerja sampai dengan tahun berkenaan;
- c. terjadi perubahan yang mendasar;
- d. perubahan RPD tahun 2023-2026 dapat dilakukan tanpa melalui tahapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

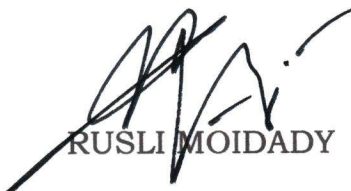
Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 14 Maret 2022

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


RAIS D. ADAM

Diundangkan di Salakan
pada tanggal 15 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,


RUSLI MOIDADY

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2022 NOMOR 10

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat serta karunia-Nya, penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023-2026 dapat diselesaikan. Penyusunan RPD Tahun 2023-2026 dilakukan sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan Bupati Banggai Kepulauan pada tahun 2022. Pembuatan RPD Tahun 2023-2026 ini dilakukan sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2022.

RPD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023-2026 dilakukan guna tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Banggai Kepulauan selama 1(satu) periode yaitu tahun 2023 sampai dengan tahun 2026. RPD disusun untuk menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah terkait implementasi program/ kegiatan melalui penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan Perencanaan Pembangunan Tahunan. Dengan demikian, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pemangku kepentingan yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen RPD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023-2026.

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN



RAIS D. ADAM



Daftar Isi

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	v
Daftar Gambar	xv
Daftar Grafik	xvi
 Bab I Pendahuluan	 I-1
1.1 Latar Belakang	I-2
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	I-2
1.3 Hubungan Antar Dokumen	I-5
1.3.1 Hubungan RPD Kabupaten Banggai Kepulauan dengan RPJPD, RKPD, Renstra PD dan Renja PD	I-6
1.3.2 Hubungan RPD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023-2026 dengan RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026	I-6
1.3.3 Hubungan RPD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023-2026 dengan RPJMN Tahun 2021-2026	I-7
1.3.4 Hubungan RPD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023-2026 dengan RTRW Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016-2036	I-7
1.3.5 Hubungan RPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	I-7
1.3.5 Hubungan RPD dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa)	I-8
1.4 Maksud dan Tujuan	I-8
1.4.1 Maksud Penyusunan	I-8
1.4.2 Tujuan Penyusunan	I-8
1.5 Sistematika Penulisan	I-9
 Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah	 II-1
2.1 Aspek Geografi Dan Demografi	II-1
2.1.1 Aspek Geografis	II-1
2.1.2 Aspek Demografi	II-26
2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-30
2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi	II-31
2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial	II-48
2.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga	II-56
2.3 Aspek Pelayanan Umum	II-56
2.3.1 Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan	II-57

Dasar	
2.3.2 Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib non Pelayanan Dasar	II-64
2.3.3 Fokus Layanan Urusan Pilihan	II-78
2.3.4 Unsur Pendukung / Penunjang Pemerintahan	II-84
2.4 Aspek Daya Saing Daerah	II-88
2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah	II-89
2.4.2 Fokus Wilayah/Infrastruktur	II-89
2.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi	II-90
2.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia	II-90
2.5 Hasil Evaluasi Capaian RPJMD Tahun 2017-2022	II-92
 Bab III Gambaran Keuangan Daerah	 III-1
3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu	III-2
3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD	III-2
3.1.2 Neraca Daerah	III-13
3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu	III-20
3.2.1 Analisis Kesehatan Keuangan Daerah	III-21
3.2.2 Proporsi Penggunaan Anggaran	III-23
3.2.3 Analisis Pembiayaan Daerah	III-27
3.3 Kerangka Pendanaan	III-28
3.3.1 Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banggai Kepulauan	III-29
3.3.2 Perhitungan Kerangka Pendanaan	III-33
3.3.3 Sumber Pendanaan Pembangunan Lainnya	III-34
 Bab IV Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Daerah	 IV-1
4.1 Permasalahan Pembangunan Daerah	IV-1
4.1.1 Identifikasi Permasalahan Layanan Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	IV-3
4.1.2 Layanan Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	IV-9
4.1.3 Layanan Urusan Pilihan	IV-22
4.1.4 Unsur Penunjang, Pendukung, Pengawasan Urusan Pemerintahan, serta Unsur Kewilayahan dan Pemerintahan Umum	IV-27
4.2 Isu-Isu Strategis	IV-34
4.2.1 Isu Strategis Global/International	IV-35
4.2.2 Isu Strategis Nasional di dalam RPJMN 2020-2024	IV-37
4.2.3 Isu Strategis Provinsi Sulawesi Tengah	IV-40
4.2.4 Isu Strategis Jangka Panjang Kabupaten Banggai Kepulauan dalam RPJPD Tahun 2005-2025	IV-58



4.2.5 Penetapan Isu Strategis Kabupaten Banggai Kepulauan	IV-59
Bab V Tujuan dan Sasaran	V-1
5.1 Telaah RPJPD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2005-2025	V-1
5.2 Tujuan dan Sasaran	V-9
Bab VI Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Prioritas	VI-1
6.1 Program Prioritas Daerah Tahun 2023-2026	VI-8
Bab VII Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah	VII-1
7.1 Kerangka Pendanaan Pembangunan	VII-1
7.2 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan pada RPD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023-2026	VII-2
Bab VIII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	VIII-1
Bab IX Penutup	IX-1
9.1 Pedoman Transisi	IX-1
9.2 Kaidah Pelaksanaan	IX-2

Daftar Tabel

		Halaman
Tabel	2.1 Jumlah desa dan Kelurahan Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021	II - 3
Tabel	2.2 Kondisi Topografi rata-rata per Kecamatan dan Jarak ke Ibukota Kabupaten di Kabupaten Banggai Kepulauan (km) Tahun 2021	II - 6
Tabel	2.3 Distribusi Sungai dan Danau berdasarkan Satuan Ekoregion di Kabupaten Banggai Kepulauan	II - 7
Tabel	2.4 Pengamatan Unsur Iklim Menurut Bulan di Stasiun Syukuran Aminudin Amir Luwuk, Tahun 2021	II - 9
Tabel	2.5 Hubungan Antara Ekoregion, Tanah dan Penggunaan Lahan di Kabupaten Banggai Kepulauan, 2021	II - 10
Tabel	2.6 Sebaran Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya di Kabupaten Banggai Kepulauan	II - 13
Tabel	2.7 Sebaran Sentra Pengembangan Tanaman Pangan per Kecamatan di Kabupaten Banggai Kepulauan	II - 17
Tabel	2.8 Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk, Distribusi Persentase, Kepadatan, Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021	II - 28
Tabel	2.9 Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017-2021	II - 33
Tabel	2.10 PDRB Kabupaten Banggai Kepulauan Atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha (Milyar) Tahun 2017-2021	II - 35
Tabel	2.11 PDRB Kabupaten Banggai Kepulauan Atas Dasar Harga Konstan menurut Lapangan Usaha (Milyar) Tahun 2017-2021	II - 36
Tabel	2.12 Distribusi PDRB menurut Lapangan Usaha Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017-2021	II - 38
Tabel	2.13 Distribusi PDRB ADHB menurut Komponen Pengeluaran Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017-2021	II - 39
Tabel	2.14 Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017-2021	II - 40
Tabel	2.15 Tingkat Inflasi Kota Luwuk Menurut Kelompok Pengeluaran Tahun 2021	II - 41
Tabel	2.16 Perkembangan Indikator Pembentuk IPM Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017-2021	II - 48
Tabel	2.17 Data Penyakit Menular dan Tidak Menular di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017-2021	II - 55

		Halaman
Tabel	2.18 Perkembangan capaian Bidang Olahraga tahun 2017-2021	II - 56
Tabel	2.19 Capaian Indikator Kinerja Urusan Pendidikan di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017-2020	II - 57
Tabel	2.20 Capaian Indikator Kinerja Urusan Kesehatan di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016-2020	II - 59
Tabel	2.21 Capaian Indikator Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017-2020	II - 61
Tabel	2.22 Capaian Indikator Kinerja Urusan Perumahan di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017-2020	II - 62
Tabel	2.23 Capaian Indikator Kinerja Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017-2020	II - 63
Tabel	2.24 Capaian Indikator Kinerja Urusan Sosial di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017-2020	II - 64
Tabel	2.25 Capaian Indikator Kinerja Urusan Ketenagakerjaan di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017-2020	II - 65
Tabel	2.26 Capaian Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018-2020	II - 66
Tabel	2.27 Capaian Indikator Kinerja Urusan Pangan di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017-2020	II - 66
Tabel	2.28 Capaian Indikator Kinerja Urusan Pertanahan di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019-2020	II - 67
Tabel	2.29 Capaian Indikator Kinerja Urusan Lingkungan Hidup di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017-2020	II - 68
Tabel	2.30 Capaian Indikator Kinerja Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017-2020	II - 68
Tabel	2.31 Capaian Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017-2020	II - 70
Tabel	2.32 Capaian Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017-2020	II - 71
Tabel	2.33 Capaian Indikator Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017-2020	II - 72
Tabel	2.34 Capaian Indikator Kinerja Urusan Perhubungan di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018-2020	II - 73

		Halaman
Tabel	2.35 Capaian Indikator Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017-2020	II - 73
Tabel	2.36 Capaian Indikator Kinerja Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017-2020	II - 74
Tabel	2.37 Capaian Indikator Kinerja Urusan Pananaman Modal di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017-2020	II - 75
Tabel	2.38 Capaian Indikator Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017-2020	II - 75
Tabel	2.39 Capaian Indikator Kinerja Urusan Statistik di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016-2020	II - 76
Tabel	2.40 Capaian Indikator Kinerja Urusan Kebudayaan di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017-2020	II - 77
Tabel	2.41 Capaian Indikator Kinerja Urusan perpustakaan di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017-2020	II - 77
Tabel	2.42 Capaian Indikator Kinerja Urusan Layanan Kearsipan di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017-2020	II - 78
Tabel	2.43 Capaian Indikator Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017-2020	II - 79
Tabel	2.44 Capaian Indikator Kinerja Urusan Pariwisata di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017-2020	II - 79
Tabel	2.45 Obyek Wisata dengan sarana dan prasarannya Di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020	II - 80
Tabel	2.46 Capaian Indikator Kinerja Urusan Pertanian di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017-2020	II - 81
Tabel	2.47 Jumlah Sarana Perdagangan menurut jenisnya di Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2018-2021	II - 82
Tabel	2.48 Capaian Indikator Kinerja Urusan Perdagangan di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017-2020	II - 82
Tabel	2.49 Capaian Indikator Kinerja Urusan Perindustrian di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017-2020	II - 83
Tabel	2.50 Capaian Indikator Kinerja Urusan Perencanaan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017-2021	II - 85
Tabel	2.51 Capaian Indikator Kinerja Urusan Keuangan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017-2020	II - 86
Tabel	2.52 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021	II - 87

		Halaman
Tabel	2.53 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017-2020	II - 90
Tabel	2.54 Rasio Lulusan S1/S2/S3 Tahun 2017-2022	II - 91
Tabel	2.55 Rasio Ketergantungan Kab. Banggai Kepulauan Tahun 2017-2021	II - 92
Tabel	2.56 Capaian Indikator Kinerja Pembangunan Daerah RPJMD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017-2022	II - 94
Tabel	3.1 Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017-2021	III - 4
Tabel	3.2 Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017-2021	III - 9
Tabel	3.3 Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017-2021	III - 12
Tabel	3.4 Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017-2020	III - 15
Tabel	3.5 Analisis Rasio Lancar Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017-2020	III - 17
Tabel	3.6 Rasio Cepat Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017-2020	III - 18
Tabel	3.7 Rasio Hutang Terhadap Total Aset Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017-2020	III - 19
Tabel	3.8 Rasio Hutang Terhadap Total Modal Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017-2020	III - 19
Tabel	3.9 Realisasi PAD Terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017-2021	III - 25
Tabel	3.10 Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018-2021	III - 26
Tabel	3.11 Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018-2021	III - 26
Tabel	3.12 Surplus/Defisit Riil APBD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017-2021	III - 28
Tabel	3.13 Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017-2021	III - 28
Tabel	3.14 Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023-2026	III - 31
Tabel	3.15 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023-2026	III - 33
Tabel	4.1 Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Pendidikan	IV - 3

		Halaman
Tabel	4.2 Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Kesehatan	IV - 5
Tabel	4.3 Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	IV - 7
Tabel	4.4 Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	IV - 8
Tabel	4.5 Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Sosial	IV - 9
Tabel	4.6 Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Tenaga Kerja	IV - 10
Tabel	4.7 Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	IV - 10
Tabel	4.8 Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Pangan	IV - 11
Tabel	4.9 Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Pertanian	IV - 12
Tabel	4.10 Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Lingkungan Hidup	IV - 12
Tabel	4.11 Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	IV - 13
Tabel	4.12 Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	IV - 14
Tabel	4.13 Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	IV - 14
Tabel	4.14 Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Perhubungan	IV - 15
Tabel	4.15 Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Komunikasi dan Informatika	IV - 16
Tabel	4.16 Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	IV - 17
Tabel	4.17 Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Penanaman Modal	IV - 17
Tabel	4.18 Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Kepemudaan dan Olahraga	IV - 18
Tabel	4.19 Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Statistik	IV - 19
Tabel	4.20 Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Persandian	IV - 20
Tabel	4.21 Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Kebudayaan	IV - 20
Tabel	4.22 Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Perpustakaan	IV - 21
Tabel	4.23 Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Kearsipan	IV - 22
Tabel	4.24 Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Perikanan dan Kelautan	IV - 22



		Halaman
Tabel	4.25 Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Pariwisata	IV - 23
Tabel	4.26 Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Pertanian	IV - 24
Tabel	4.27 Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Perindustrian	IV - 26
Tabel	4.28 Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Perdagangan	IV - 27
Tabel	4.29 Permasalahan Pembangunan Daerah Unsur Penunjang Perencanaan	IV - 28
Tabel	4.30 Permasalahan Pembangunan Daerah Unsur Penunjang Keuangan	IV - 29
Tabel	4.31 Permasalahan Pembangunan Daerah Unsur Penunjang Kepegawaian	IV - 29
Tabel	4.32 Permasalahan Pembangunan Daerah Unsur Penunjang Pendidikan dan Pelatihan	IV - 30
Tabel	4.33 Permasalahan Pembangunan Daerah Unsur Penunjang Penelitian dan Pengembangan	IV - 31
Tabel	4.34 Permasalahan Pembangunan Daerah Unsur Pengawasan	IV - 31
Tabel	4.35 Permasalahan Pembangunan Daerah Unsur Pendukung Sekretariat DPRD	IV - 32
Tabel	4.36 Permasalahan Pembangunan Daerah Unsur Pendukung Sekretariat Daerah	IV - 32
Tabel	4.37 Permasalahan Pembangunan Daerah Unsur Kewilayahan	IV - 33
Tabel	4.38 Permasalahan Pembangunan Daerah Unsur Pemerintahan Umum- Kesatuan Bangsa dan Politik	IV - 34
Tabel	5.1 Keterkaitan Visi Nasional, Provinsi dan Kabupaten dalam RPJPD	V - 2
Tabel	5.2 Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2005-2025	V - 5
Tabel	5.3 Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023-2026	V - 9
Tabel	5.4 Rumusan Tujuan, Sasaran Dan Indikator RPD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023-2026	V - 12
Tabel	6.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023-2026	VI - 2
Tabel	6.2 Program Prioritas Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023-2026	VI - 9
Tabel	6.3 Program Prioritas Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023-2026 disertai pagu indikatif	VI - 17



		Halaman
Tabel	7.1 Indikasi Rencana Program Perangkat Daerah disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023-2026	VII - 3
Tabel	8.1 Penyelarasan Target Indikator Makro RPD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023-2026, RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 dan RPJMN Tahun 2020-2024	VIII - 1
Tabel	8.2 Indikator Kinerja Utama Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023-2026	VIII - 2
Tabel	8.3 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023-2026	VIII - 4



Daftar Gambar

		Halaman
Gambar 1.1	Hubungan antar dokumen	I - 5
Gambar 2.1	Peta Administrasi Kabupaten Banggai Kepulauan	II - 2
Gambar 2.2	Peta Topografi Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	II - 5
Gambar 2.3	Stratigrafi Geologi Kabupaten Banggai Kepulauan	II - 7
Gambar 4.1	Kerangka Logis Perumusan Permasalahan Pembangunan	IV - 2
Gambar 6.1	Tema Pembangunan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023-2026	VI - 8

Daftar Grafik

		Halaman
Grafik 2.1	Luas Daerah Menurut Kecamatan (km ²) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021	II - 3
Grafik 2.2	Curah hujan di stasiun Meteorologi Syukran Aminudin Amir Luwuk, 2021	II - 8
Grafik 2.3	Suhu Udara Maksimum dan Minimum di stasiun Meteorologi Aminudin Amir Luwuk, 2021	II - 9
Grafik 2.4	Perkembangan Jumlah penduduk Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2015-2021	II - 26
Grafik 2.5	Persentase Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Banggai Kepulauan, 2021	II - 27
Grafik 2.6	Struktur Penduduk Kabupaten Banggai Kepulauan Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2021	II - 29
Grafik 2.7	Struktur Penduduk Kabupaten Banggai Kepulauan berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2021	II - 30
Grafik 2.8	Trend Laju Pertumbuhan Ekonomi Kab. Banggai Kepulauan Tahun 2017-2021	II - 31
Grafik 2.9	Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2017-2021	II - 32
Grafik 2.10	PDRB Perkapita Kab. Banggai Kepulauan Tahun 2017-2021 (juta Rp)	II - 42
Grafik 2.11	Rasio Gini Bangkep, Sulteng dan Nasional Tahun 2017-2021	II - 42
Grafik 2.12	Jumlah Penduduk miskin dan Garis kemiskinan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017-2021	II - 43
Grafik 2.13	Jumlah Penduduk miskin dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017-2021	II - 44
Grafik 2.14	Jumlah Penduduk Miskin Kab/Kota se Sulawesi Tengah Tahun 2021	II - 44
Grafik 2.15	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017-2021	II - 45
Grafik 2.16	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kab/ Kota Se Sulawesi Tengah Tahun 2019	II - 46
Grafik 2.17	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kab/ Kota Se Sulawesi Tengah Tahun 2019	II - 46

		Halaman
Grafik 2.18	Perkembangan IPM Bangkep, Sulteng dan Nasional Tahun 2017-2021	II - 47
Grafik 2.19	Perbandingan IPM Kab/kota se- Sulawesi Tengah Tahun 2021	II - 48
Grafik 2.20	Perkembangan Angka Harapan Hidup Kab. Bangkep dan Prov Sulteng Tahun 2017-2021	II - 49
Grafik 2.21	Angka Rata-rata lama sekolah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017-2021	II - 50
Grafik 2.22	Angka Partisipasi Kasar Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017-2021 (%)	II - 51
Grafik 2.23	Angka Partisipasi Murni Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017-2021 (%)	II - 52
Grafik 2.24	Angka Kematian Bayi Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017-2020	II - 53
Grafik 2.25	Angka Kematian Ibu Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017-2020	II - 54
Grafik 2.26	Perkembangan Usia Harapan Hidup Bangkep dan Sulteng tahun 2017-2021	II - 54
Grafik 3.1	Persentase Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017-2021	III - 2
Grafik 3.2	Persentase Kontribusi Komponen PAD terhadap Total PAD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017-2021	III - 5
Grafik 3.3	Persentase Kontribusi Pendapatan Transfer terhadap Total Pendapatan Transfer Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017-2021	III - 6
Grafik 3.4	Persentase Kontribusi Komponen Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017-2020	III - 7
Grafik 3.5	Persentase Pertumbuhan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017-2021	III - 11
Grafik 3.6	Realisasi PAD Terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017-2021	III - 21
Grafik 3.7	Realisasi Belanja Modal terhadap Total Belanja Kabupaten Banggai Kepulauan 2017-2021	III - 22
Grafik 3.8	Realisasi Belanja Pegawai terhadap Total Belanja Kabupaten Banggai Kepulauan 2017-2021	III - 23

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Perencanaan pembangunan baik nasional maupun daerah diperlukan untuk menjamin agar kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien dan tepat sasaran. Pemerintah Daerah sebagai bagian tak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, dalam menyusun perencanaan pembangunan, berkewajiban mempedomani dan mengacu pada perencanaan pembangunan nasional serta mengintegrasikan perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan nasional.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perencanaan pembangunan bertujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar fungsi pemerintah, maupun antara Pusat dan Daerah. Selain itu, perencanaan pembangunan juga bertujuan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, pengoptimalan partisipasi masyarakat dan menjamin tercapainya penggunaan sumber daya yang efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Sehubungan dengan diterbitkannya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada tahun 2022, maka Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan berkewajiban menyusun dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah tahun 2023-2026 yang akan digunakan oleh penjabat (Pj) kepala daerah sebagai pedoman untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah tahun 2023-2026.

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023-2026 ini merupakan bagian dari RPJPD Kabupaten Banggai Kepulauan tahun

2005-2025, yakni tahapan IV RPJPD. Oleh karena itu, RPD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023-2026 tidak bisa dipisahkan dari RPJMD Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2017-2022, dalam artian bahwa RPD Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2023-2026 disusun dengan memperhatikan capaian-capaian yang telah diwujudkan oleh RPJMD 2017-2022 dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan RPJMD tahun 2017-2022.

Tahapan penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2023-2026 dilaksanakan sesuai Instruksi Menteri Dalam negeri Nomor 70 Tahun 2021 terdiri atas tahapan penyusunan rancangan, pelaksanaan konsultasi publik, perumusan rancangan akhir dan tahap penetapan RPD.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar Hukum Penyusunan RPD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Banggai Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020

- tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6323);
 12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta

- Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Tehnis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
 18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 19. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada tahun 2022;
 20. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 6 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2009 Nomor 7);
 21. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013 Nomor 51, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 37);
 22. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026;
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 9);

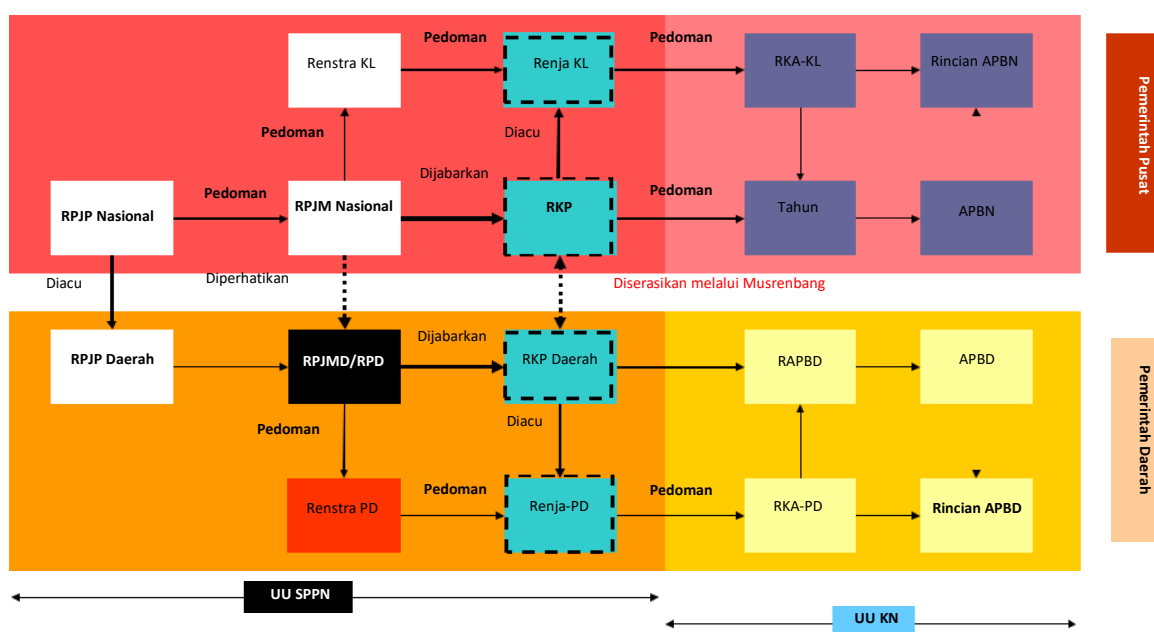
24. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 9);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 112);

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional secara substansi menegaskan bahwa perencanaan pembangunan di Indonesia adalah sebuah sistem. Keterkaitan dan keselarasan antara komponen perencanaan pembangunan baik dalam skala lokal, regional maupun nasional dan dokumen-dokumen lainnya menjadi kata kunci untuk mewujudkan keberhasilan pembangunan.

RPD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023-2026 disusun dengan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2005-2025; RTRW Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016-2036, RPJMN Tahun 2020 - 2024; serta RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026.

Gambar 1.1
Hubungan Antar Dokumen Perencanaan



Berdasarkan bagan di atas, dapat di gambarkan hubungan antara RPD Kabupaten Banggai Kepulauan dengan dokumen perencanaan lainnya sebagai berikut:

1.3.1 Hubungan RPD Kabupaten Banggai Kepulauan dengan RPJPD, RKPD, Renstra PD dan Renja PD

Dokumen RPJPD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2005-2025 yang memuat visi, misi dan arah kebijakan pembangunan daerah selama 20 tahun ke depan merupakan pedoman bagi penyusunan RPJMD/RPD. RPD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023-2026 berpedoman pada arah kebijakan pembangunan tahap ke IV dari RPJPD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2005-2025.

RPD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023-2026 menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2023-2026. Renstra PD merupakan rencana kerja jangka menengah yang menjabarkan perencanaan kerja dan kinerja tahunan perangkat daerah untuk menunjang pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah sebagaimana termuat dalam RPD serta penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten.

RPD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023-2026 kemudian akan di jabarkan dalam perencanaan tahunan yaitu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang akan di susun setiap tahun mulai dari RKPD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 s/d RKPD Tahun 2026. Yang selanjutnya menjadi acuan bagi Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) pada setiap tahun anggaran. Renja PD juga disusun berpedoman pada Renstra PD.

1.3.2 Hubungan RPD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023-2026 dengan RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026

Didalam instruksi menteri dalam negeri nomor 70 tahun 2021 tentang tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada tahun 2022 bahwa penyusunan RPD kabupaten/ kota tahun 2023-2026 memperhatikan RPJMD/ RPD Provinsi. Hal ini dilakukan dengan penyelarasan isu strategis, penyelarasan indikator makro, tujuan, sasaran dan program prioritas.

1.3.3 Hubungan RPD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023-2026 dengan RPJMN Tahun 2020-2024

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, bahwa penyusunan RPJMD memperhatikan RPJM Nasional. Hal ini dilakukan melalui penyelarasan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan serta Prioritas Daerah yang termuat dalam RPD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023-2026 dengan Agenda Prioritas Pembangunan Nasional 2020-2024 beserta arah kebijakan, indikator serta target pencapaiannya.

1.3.4 Hubungan RPD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023-2026 dengan RTRW Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016-2036

Penyusunan RPD Kabupaten Banggai kepulauan tahun 2023-2026 memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai pola dan struktur tata ruang yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016-2036, sebagai acuan dalam penentuan lokasi kegiatan dan penyusunan program pembangunan yang berkaitan pemanfaatan ruang kawasan.

Dalam menyusun RPD berpedoman juga pada RTRW guna tercipta sinkronisasi dan sinergi pembangunan jangka menengah daerah antar kabupaten/kota serta keterpaduan struktur dan pola ruang kabupaten/kota lainnya, terutama yang berdekatan atau yang ditetapkan sebagai satu kesatuan wilayah pembangunan kabupaten/kota, dan atau yang memiliki hubungan keterkaitan atau pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

1.3.5 Hubungan RPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Perencanaan pembangunan tidak saja berdasar pada jangka waktu, namun juga merespon berbagai isu strategis, merespon kebijakan nasional, maupun perencanaan yang secara fokus akan mengelola pembangunan sektor tertentu. Perencanaan dalam konteks ini perlu bersinergi dengan Rencana Pembangunan Daerah untuk memastikan implementasinya dan bersinergi dengan penganggaran daerah.

1.3.6 Hubungan RPD dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa)

Desa berkedudukan di wilayah kabupaten/kota, sehingga perencanaan pembangunan desa harus sinergis dengan perencanaan Pembangunan Daerah. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengamanatkan bahwa pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota. Oleh karena itu, RPJMD/RPD berperan sebagai instrumen penyelarasan RPJM Desa dengan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten.

1.4. Maksud dan Tujuan

1.4.1 Maksud Penyusunan

RPD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023-2026 dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan di daerah (pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya) dalam mewujudkan cita-cita masyarakat Kabupaten Banggai Kepulauan sesuai dengan tujuan, sasaran dan program pembangunan yang akan digunakan oleh penjabat (Pj) Kepala Daerah sebagai pedoman untuk penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026, sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh pelaku pembangunan bersifat sinergis, koordinatif, dan saling melengkapi satu dengan yang lainnya di dalam satu pola sikap dan pola tindak.

1.4.2 Tujuan Penyusunan

Tujuan penyusunan RPD Kabupaten Banggai kepulauan Tahun 2023-2026 adalah:

- a. Tersusunnya dokumen rencana pembangunan daerah yang menjabarkan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan serta program prioritas yang disertai pendanaan yang bersifat indikatif periode tahun 2023-2026;
- b. Tersusunnya dokumen perencanaan jangka menengah daerah yang menjadi pedoman bagi pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan tahunan;
- c. Tersusunnya dokumen perencanaan jangka menengah yang menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah.

1.5. Sistematika Penulisan

RPD Tahun 2023-2026 disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I **Pendahuluan**

Memberikan gambaran tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen perencanaan, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan dokumen RPJMD.

Bab II **Gambaran Umum**

Memberikan gambaran tentang aspek geografi dan demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah sebagai dasar pengembangan rencana pemerintahan yang disesuaikan dengan target pembangunan.

Bab III **Gambaran Keuangan Daerah**

Menguraikan tentang gambaran dan kebijakan keuangan daerah yang telah dilaksanakan dan memberikan rumusan kebijakan rencana ke depan di bidang pendapatan, belanja, serta pembiayaan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah untuk periode 2023-2026.

Bab IV **Permasalahan dan Isu Strategis**

Memberikan gambaran tentang permasalahan- permasalahan yang dihadapi oleh Kabupaten Banggai kepulauan dalam berbagai urusan pemerintahan serta isu-isu strategis yang menjadi basis pengembangan perencanaan daerah dalam jangka menengah.

Bab V **Tujuan dan Sasaran**

Pada bagian ini menjelaskan tujuan dan sasaran pembangunan daerah untuk menjawab isu-isu strategis daerah.

Bab VI **Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas**

Menguraikan strategi yang dipilih untuk mencapai tujuan, sasaran pembangunan daerah, dan arah kebijakan dari setiap strategi terpilih, sebagai rumusan perencanaan komprehensif pemerintah daerah, yang disertai dengan program pembangunan daerah dalam mencapai sasaran pembangunan.

Bab VII **Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah**

Memuat kerangka pendanaan untuk mendanai belanja daerah selama

kurun waktu 2023-2026 yang disertai dengan program perangkat daerah yang disajikan berdasarkan urusan pemerintah daerah yang menjadi kewenangan Kabupaten Banggai Kepulauan.

Bab VIII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Berisi tentang uraian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang dirumuskan kedalam Indikator Kinerja Utama Daerah, Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah, dan Indikator Kinerja Kunci.

Bab IX Penutup

BAB II**GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH****2.1 ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI**

Analisis pada aspek geografi dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai karakteristik lokasi dan wilayah, potensi pengembangan wilayah dan kerentanan wilayah terhadap bencana. Sedangkan gambaran kondisi demografi antara lain mencakup perubahan penduduk, komposisi dan populasi masyarakat secara keseluruhan atau kelompok dalam waktu tertentu. Analisis dan pendeskripsian terhadap gambaran umum kondisi Kabupaten Banggai Kepulauan dilakukan berdasarkan sejumlah data yang disajikan dalam bentuk data *time series* dan *cross section*.

2.1.1 Aspek Geografi

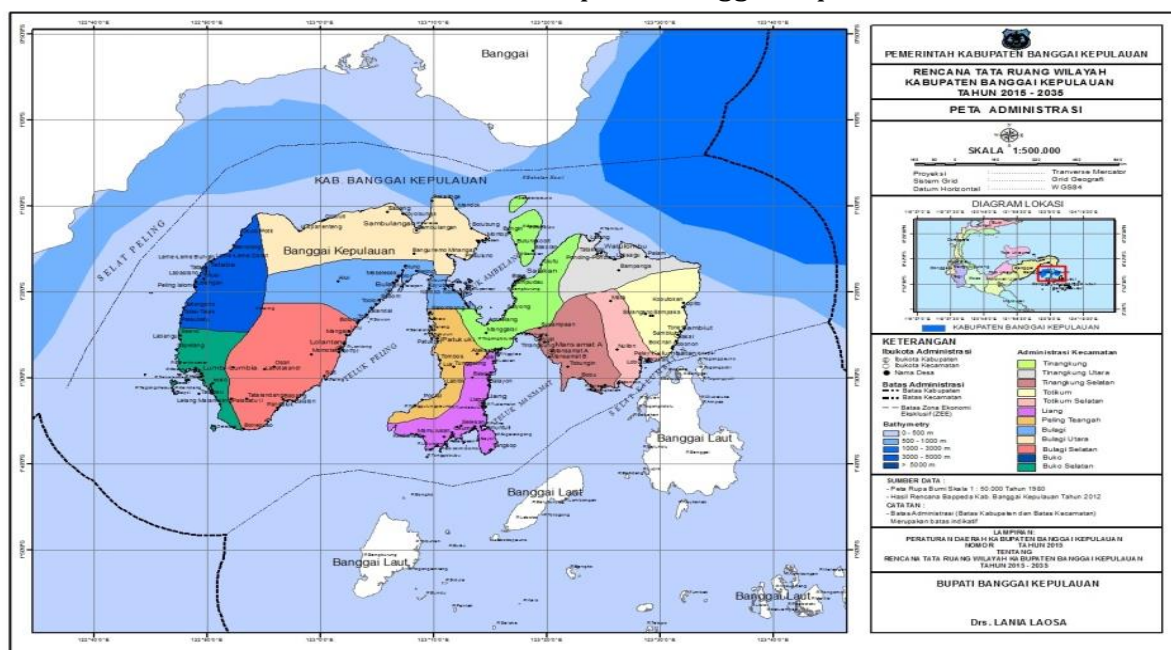
Analisis pada aspek geografi dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai karakteristik lokasi dan wilayah, potensi pengembangan wilayah dan kerentanan wilayah terhadap bencana. Untuk data perubahan penduduk, komposisi dan populasi masyarakat secara keseluruhan atau kelompok dalam waktu tertentu merupakan data pendukung yang menggambarkan kondisi demografi.

2.1.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah**2.1.1.1.1 Letak dan Luas Wilayah Administrasi**

Kabupaten Banggai Kepulauan beribukota di Salakan, secara astronomis terletak antara 1° 06' 30" - 1° 35' 58" Lintang Selatan dan 122° 37' 6,3" - 123° 40' 1,9" Bujur Timur. Setelah pemekaran pada tahun 2013, Kabupaten Banggai Kepulauan secara administratif memiliki batas- batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Maluku;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Banggai Laut;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Peling;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Banggai.

Gambar 2.1
Peta Administrasi Kabupaten Banggai Kepulauan



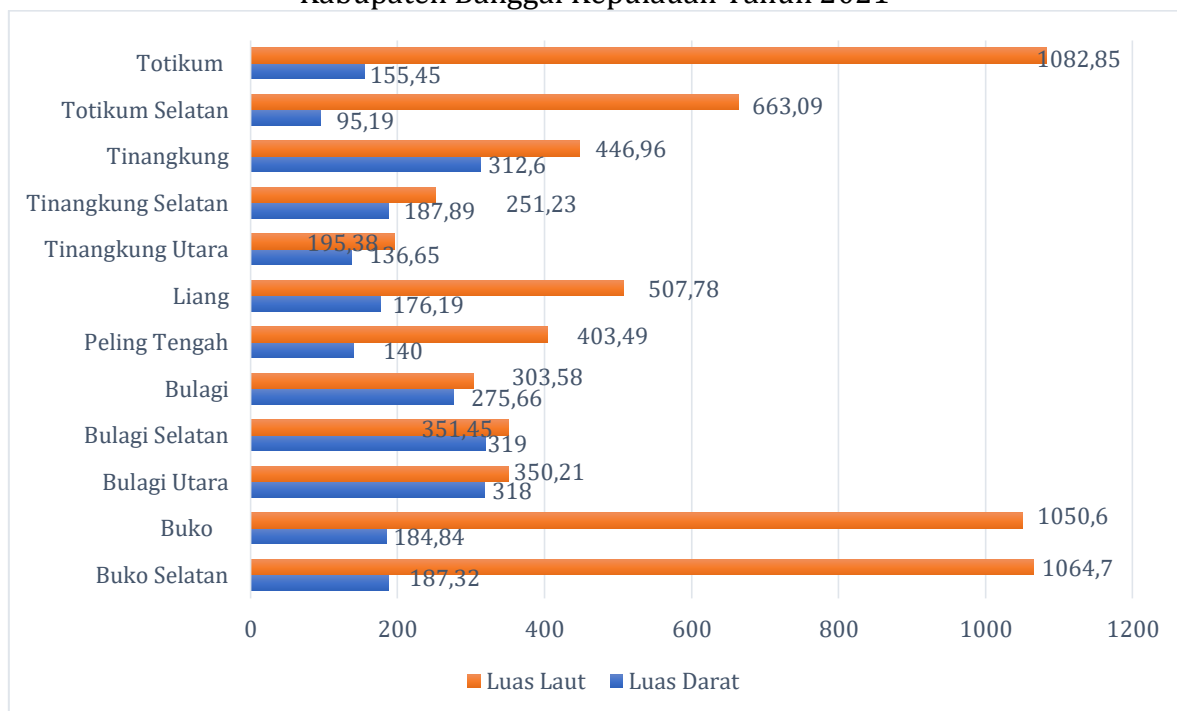
Sumber: BPS Kabupaten Banggai Kepulauan, 2022

Kabupaten Banggai Kepulauan merupakan daerah kepulauan/bahari yang mempunyai gugusan atau rangkaian pulau – pulau berukuran sedang dan kecil sejumlah lebih kurang 121, dari jumlah tersebut lima diantaranya berukuran sedang, sisanya berukuran kecil – kecil bahkan ada yang berwujud batu karang yang mencuat ke permukaan laut. Luas wilayah laut Kabupaten Banggai Kepulauan lebih besar dibandingkan dengan luas daratan, dimana luas wilayah darat sekitar 2.488,79 Km² atau sekitar 27,17% dan luas wilayah laut sekitar 6.671,32 km² atau sekitar 72,83% dari luas keseluruhan serta memiliki total panjang pantai mencapai 1.714,218 km.

Kabupaten Banggai Kepulauan memiliki persentase 4,02% (persen) dari seluruh luas Provinsi Sulawesi Tengah. Kabupaten Banggai Kepulauan merupakan satu dari dua kabupaten di Sulawesi Tengah yang merupakan Kabupaten yang letaknya terpisah dari Pulau Sulawesi secara keseluruhan. Jarak antara ibukota Kabupaten ke ibukota Provinsi Sulawesi Tengah yaitu ;

- Salakan ke Luwuk = 61 Kilo Meter/38 Mil Laut
- Salakan ke Banggai = 53 Kilo Meter
- Salakan ke Palu = 671 Kilo Meter
- Salakan ke Ampaña = 309 Kilo Meter
- Salakan ke Poso = 449 Kilo Meter

Grafik 2.1
Luas Daerah Menurut Kecamatan (km²)
Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021



Sumber: BPS Kabupaten Banggai Kepulauan, 2022

Kecamatan Bulagi Selatan merupakan kecamatan yang memiliki wilayah darat paling luas diantara 12 kecamatan lainnya, yaitu 319 km². Sementara Kecamatan Totikum Selatan merupakan Kecamatan yang memiliki luas wilayah paling kecil 95,19 km². Sedangkan Kecamatan Totikum memiliki wilayah laut paling luas sebesar 1082,85 km² dan Kecamatan Tinangkung Utara memiliki wilayah laut paling sedikit yaitu 195,38 km².

Kabupaten Banggai Kepulauan terbagi dalam 12 Kecamatan dengan ibu kota Kabupaten berada di Kota Salakan, Kecamatan Tinangkung. Jumlah desa dan kelurahan menurut kecamatan di Kabupaten Banggai Kepulauan, diuraikan secara rinci dalam tabel berikut:

Tabel 2.1
Jumlah Desa dan Kelurahan Berdasarkan Kecamatan
di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021

No	Kecamatan	Ibu Kota Kecamatan	Desa	Kelurahan
1	Totikum	Sambuit	11	-
2	Totikum Selatan	Kalumbatan	8	-
3	Tinangkung	Salakan	10	1
4	Tinangkung Selatan	Mansamat	9	-

No	Kecamatan	Ibu Kota Kecamatan	Desa	Kelurahan
5	Tinangkung Utara	Batu Lombu	6	-
6	Liang	Saleati	16	-
7	Peling Tengah	Patukuki	11	-
8	Bulagi	Bulagi	15	1
9	Bulagi Selatan	Lolantang	20	-
10	Bulagi Utara	Sambulangan	11	1
11	Buko	Tataba	13	-
12	Buko Selatan	Lumbi - Lumbia	11	-
Banggai Kepulauan			141	3

Sumber: Kabupaten Banggai Kepulauan Dalam Angka Tahun 2022

Jumlah desa di Kabupaten Banggai Kepulauan sampai dengan tahun 2021 berjumlah 141 desa dan ketinggian daratan di wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan dari permukaan laut yaitu sebesar 98,61 % berada kurang dari 500 Mdpl dan 1,39 % berada pada ketinggian lebih dari 500 Mdpl.

2.1.1.1.2 Letak dan Kondisi Geografis

Berdasarkan astronomisnya, Kabupaten Banggai Kepulauan terletak pada posisi antara 1° 06" – 1° 35' Lintang selatan dan 122° 37' 6,3" – 123° 40' 1,9' Bujur Timur. Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan dibatasi oleh laut Maluku, bagian selatan berbatasan dengan Kabupaten Banggai Laut, bagian barat berbatasan dengan selat Peling, dan bagian utara berbatasan dengan Kabupaten Banggai. Kabupaten Banggai Kepulauan merupakan kabupaten bahari dengan luas laut sekitar 6.671,32 km² atau sekitar 72,83% dari luas keseluruhan.

2.1.1.1.3 Topografi

Berdasarkan tinjauan bentuk muka bumi yang ditunjukkan oleh Topografi atau morfologi, struktur, dan proses pembentukan, wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan dapat dibagi menjadi 4 satuan utama, yaitu :

a. Pegunungan/perbukitan struktural

Pegunungan struktural terdapat di bagian barat Pulau Peling, memanjang dengan pola selatan – utara dengan ketinggian lebih dari 700 Mdpl, lereng curam hingga sangat curam dengan kemiringan ≥ 40 %. Morfologi ini terdapat di sekitaran perbatasan Kecamatan Buko, Kecamatan Buko Selatan, Kecamatan Bulagi Selatan dan Kecamatan Bulagi. Perbukitan struktural terdapat hampir diseluruh pulau, dengan ketinggian mulai ± 200 hingga ± 700 meter di atas

permukaan laut, dengan lereng relatif miring (15-30 %) hingga berbukit curam (30-40 %), yang terdapat di Pulau Peling. Puncak-puncak bukit terdapat di Bukit Babasal di Pulau Peling bagian timur.

b. Pegunungan/perbukitan karst

Perbukitan dan pegunungan karst menempati sebagian besar Pulau Peling, dan secara lokal-lokal pada pulau-pulau lainnya. Ciri khas morfologi ini adalah pola kerucut dan lembah karst, dolin, goa, ponor, dan sungai bawah tanah. Puncak terdapat di Gunung Tinakong (558 meter) dan Bukit Balombong di Pulau Peling.

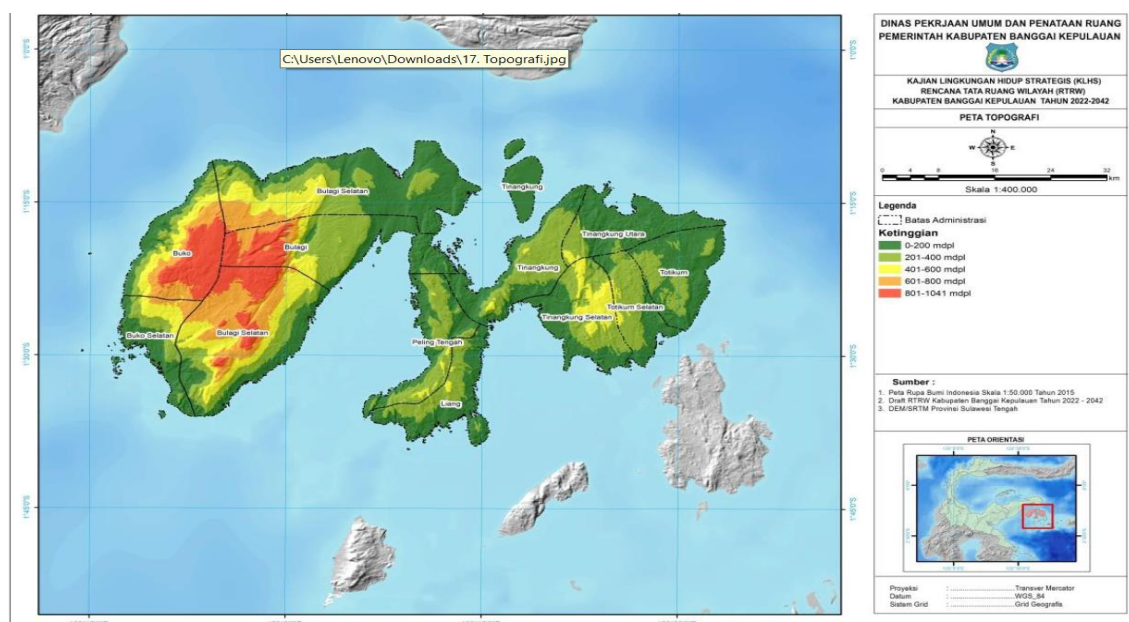
c. Perbukitan intrusiv

Daerah ini merupakan perbukitan yang terbentuk karena penerobosan batuan gunung kompleks Banggai berupa granodiorite dan diorite, yang menempati secara local local di Totikum, Peling Tengah, Liang, Buko dan Buko Selatan.

d. Dataran rendah

Dataran rendah terbentang di sepanjang wilayah pesisir dan lembah-lembah antar perbukitan atau pegunungan, yang sebagian besar dijumpai di bagian utara Pulau Peling, dan sebagian kecil di Selatan Pulau Peling meliputi Kecamatan Tinangkung Utara, Kecamatan Liang, Kecamatan Totikum Selatan, Kecamatan Liang, Kecamatan Buko.

Gambar 2.2
Peta Topografi Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan



Sumber: KLHS-RTRW Kab Banggai Kepulauan 2022 - 2042

Rincian kondisi tinggi rata-rata dari permukaan laut di tiap Kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2

Kondisi Topografi rata-rata per Kecamatan dan Jarak ke Ibukota Kabupaten di Kabupaten Banggai Kepulauan (km) Tahun 2021

No	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Tinggi DPL (m)	Jarak ke Ibukota Kabupaten (km)
1	Totikum	Sambiut	10	64
2	Totikum Selatan	Kalumbatan	2	54
3	Tinangkung	Salakan	3	0
4	Tinangkung Selatan	Mansamat A	3	24
5	Tinangkung Utara	Batulumbu	1	25
6	Liang	Liang	2	43
7	Peling Tengah	Patukuki	2	30
8	Bulagi	Bulagi 1	3	60
9	Bulagi Selatan	Lolantang	5	78
10	Bulagi Utara	Sambulangan	5	62
11	Buko	Tataba	2	121
12	Buko Selatan	Lumbi-Lumbia	3	134

Sumber: Kabupaten Banggai Kepulauan Dalam Angka Tahun 2022

Secara umum penduduk Kabupaten Banggai Kepulauan tinggal di pesisir pantai dikarenakan sebagian besar penduduk bermata pencaharian sebagai nelayan sehingga rata rata letak ibukota kecamatan hanya berkisar 1 – 10 DPL diatas permukaan laut.

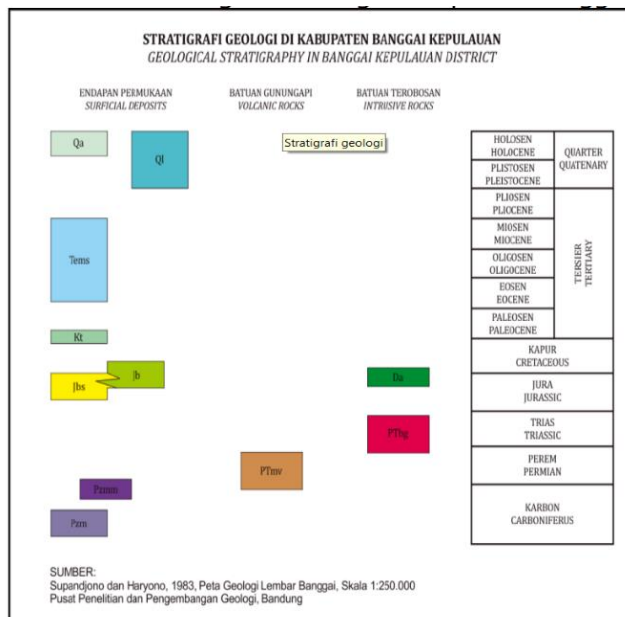
Mengenai jarak ibukota kecamatan yang paling jauh ke ibukota Kabupaten yaitu kecamatan Buko Selatan mencapai 134 km dengan jarak tempuh sekitar 3 – 4 jam perjalanan, dimana kendala yang ditemui belum ada angkutan mobil umum yang mempunyai rute tetap dari ibukota Kecamatan ke ibukota Kabupaten sehingga menyulitkan dalam pelayanan umum dan tarif angkutan masih mahal karena masih harus menggunakan sistim carter.

2.1.1.1.4 Geologi

Secara geologi regional, akibat sejarah geotektonik yang terjadi, maka batuan yang mengalasi wilayah kajian adalah batuan malihan, granit, dan batuan gunungapi. Batuan tertua berupa Kompleks Batuan Malihan (PZm) yang terdiri atas sekis, gneis, dan kuarsit. Kemudian menyusul Formasi Menanga (Cmm) yang terbentuk dari

perselingan batu gamping hablur, batu pasir malihan, batusabak, dan filit, dengan penarikan radiometri menyatakan berumur Karbon (tidak terdapat di Kabupaten Banggai Kepulauan).

Gambar 2.3
Stratigrafi Geologi Kabupaten Banggai Kepulauan



Era	Periode atau Zaman	Kala	Lama (Juta tahun)	Umur (Juta tahun)	Orogenik
KENOZOKIUM	Kwartir	Holosen	10.000 thn		
		Pleistosen	2	2	
	Tersier	Pliosen	3	5	
		Miosen	19	24	
		Oligosen	13	37	
		Eosen	21	58	
MESO-ZOKIUM	Kretasius		8	66	
			78	144	
			64	208	
	Triasik		37	245	
PALEOZOKIUM	Permian		41	286	
	Karbon	Pennsylvanian	34	320	
		Mississippian	40	360	
	Devon		48	408	
	Silur		30	438	
	Ordo		67	505	
PRE-KAMBRIUM	Kambrium		65	570	
	Pre-Kambrium Akhir		0.3 - 0.4	0.9 - 1.0	
	Pre-Kambrium Tengah		0.6 - 0.8	1.6 - 1.7	
	Pre-Kambrium Awal		0.7 - 0.9	2.4 - 2.5	
			0.9 - 1.0		
				3.6 - 3.8	
				4.6 - 4.7	
				17 - 18	

Sumber: KLHS RTRW Kab Banggai Kepulauan 2022-2042

2.1.1.1.5 Hidrologi

Jika ditinjau dari ketersediaan air permukaan, di Kabupaten Banggai Kepulauan terdapat beberapa sungai, yang jika ditinjau berdasarkan sifat pengalirannya dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu: (a) sungai perennial, sungai yang mengalir sepanjang tahun, yang biasanya bersumber dari mataair berdebit besar dan permanen sepanjang tahun, dan (b) sungai intermitten, sungai yang mengalir ketika musim hujan saja. Selain sungai-sungai tersebut, terdapat pula potensi air permukaan berupa danau yang airnya dapat pula dimanfaatkan untuk sesuatu keperluan yang potensial. Tabel di bawah ini menyajikan sebaran sungai dan danau yang ada di Kabupaten Banggai Kepulauan berdasarkan satuan ekoregionnya.

Tabel 2.3
Distribusi Sungai dan Danau berdasarkan Satuan Ekoregion di Kabupaten Banggai Kepulauan

No	Nama Danau dan Sungai	Satuan Ekoregion
1	Danau Alani, Buko Selatan	Perbukitan dan Pegunungan Struktural Patahan Kelompok Batuan Malihan Sekis,Gneis, dan

No	Nama Danau dan Sungai	Satuan Ekoregion
2	Danau Tendetung, Totikum Selatan	Batunapal Perbukitan dan Pegunungan Karst Batugamping Terumbu
3	Sungai Patukuki, Peling Tengah	Perbukitan dan Pegunungan Struktural Patahan Kelompok Batuan Malihan Sekis, Gneis, dan Batunapal
4	Sungai Malanggong, Buko	Perbukitan dan Pegunungan Struktural Patahan Kelompok Batuan Malihan Sekis, Gneis, dan Batunapal
5	Sungai Kambani, Bulagi Selatan	Perbukitan dan Pegunungan Struktural Patahan Kelompok Batuan Malihan Sekis, Gneis, dan Batunapal
6	Sungai Manggalai, Tinangkung	Lembah antar Perbukitan atau Pegunungan material Aluvium
7	Sungai Tatakalai, Tinangkung Utara	Dataran Aluvial Pesisir material Aluvium
8	Sungai Babasal Kombutokan, Totikum	Dataran Aluvial Pesisir material Aluvium

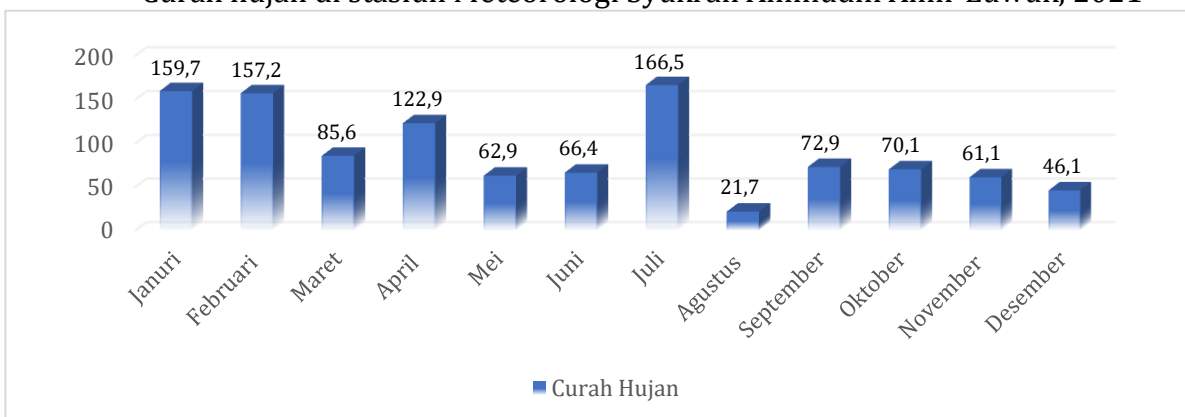
Sumber: Geotek LIPI (2003) dalam Perubahan RPJPD Kab. Banggai Kepulauan (2018)

2.1.1.1.6 Klimatologi

Kondisi iklim di Kabupaten Banggai Kepulauan dipengaruhi oleh dua musim yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Musim hujan ini dapat digolongkan menjadi tiga jenis berdasarkan frekuensi curah hujan, yaitu tinggi, sedang, dan rendah. Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Juli sekitar 166,5 mm³ dan curah hujan terendah pada bulan Agustus 21,7 mm³. Sepanjang tahun 2021, suhu udara terendah yaitu 26,7°C terjadi pada bulan Juli dan tertinggi sebesar 3°C pada bulan Februari.

Grafik 2.2

Curah hujan di stasiun Meteorologi Syukran Aminudin Amir Luwuk, 2021



Sumber: Banggai Kepulauan Dalam Angka, 2022

Tabel 2.4

Pengamatan Unsur Iklim Menurut Bulan di Stasiun Syukuran Aminudin Amir Luwuk, Tahun 2021

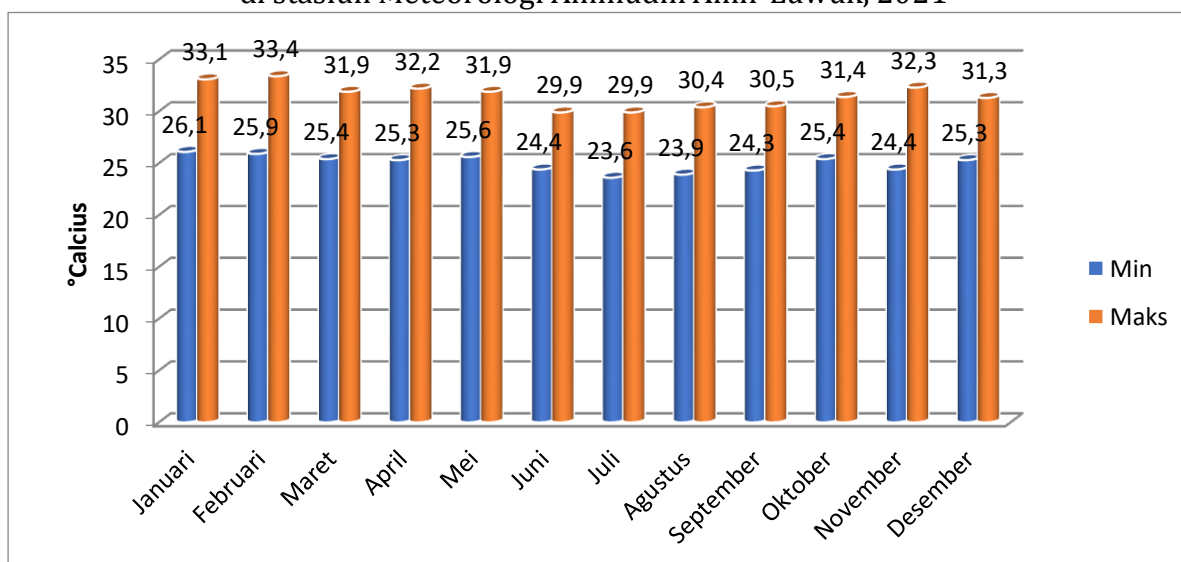
Bulan	Jumlah Curah Hujan (mm)	Jumlah Hari Hujan (day)	Penyinaran Matahari (%)	Kelembapan (%)		
				Minimum	Rata rata	Maksimum
Januari	159,7	14	44,4	59,0	80,0	95,0
Februari	157,2	12	38,8	57,0	79,2	97,0
Maret	85,6	16	47,1	59,0	79,4	98,0
April	122,9	17	50,4	61,0	79,3	100,0
Mei	62,9	11	41,1	59,0	79,7	96,0
Juni	66,4	13	23,4	58,0	78,4	97,0
Juli	166,5	14	32,2	59,0	80,3	98,0
Agustus	21,7	13	53,8	64,0	79,7	95,0
September	72,9	10	40,6	55,0	80,3	98,0
Oktober	70,1	6	61,8	55,0	76,9	98,0
November	61,1	11	52,8	54,0	78,5	95,0
Desember	46,1	10	44,8	53,0	76,7	96,0

Sumber: *Banggai Kepulauan Dalam Angka, 2022*

Sementara untuk kecepatan angin di Kabupaten Banggai Kepulauan tertinggi terjadi pada bulan Agustus sebesar 4,3 knot sedangkan terendah terjadi bulan Desember sebesar 1,6 knot. Untuk kelembaban udara di Kabupaten Banggai Kepulauan selama tahun 2020 tertinggi terjadi pada bulan Juli dan Desember sebesar 95% dan terendah 37% pada bulan Januari selanjutnya untuk penyinaran matahari terbanyak pada bulan Oktober yaitu 70% dan terendah Juli sebesar 31%.

Grafik 2.3

Suhu Udara Maksimum dan Minimum di stasiun Meteorologi Aminudin Amir Luwuk, 2021



Sumber: *Banggai Kepulauan Dalam Angka, 2022*

2.1.1.1.7 Penggunaan Lahan

Kesesuaian penggunaan lahan adalah penilaian mengenai informasi yang menggambarkan mengenai pemanfaatan lahan di Kabupaten Banggai Kepulauan. Selain itu, juga dilakukan peninjauan terhadap faktor-faktor yang menghambat penggunaannya untuk tujuan-tujuan tertentu sehingga daya dukungnya dapat terpelihara dalam jangka waktu tidak terbatas. Secara terinci hubungan antara satuan ecoregion dan penggunaan lahan di Kabupaten Banggai Kepulauan, disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.5

Hubungan Antara Ekoregion, Tanah dan Penggunaan Lahan di Kabupaten Banggai Kepulauan, 2021

No	Satuan Ekoregion dan Material	Jenis Tanah	Penggunaan Lahan
1.	Wilayah Pesisir Endapan Aluvium Marin	Aluvial (<i>Entisols</i>)	Pemukiman, Wisata Pantai dan hutan lindung
2.	Dataran Aluvial Rawa Endapan Aluvium	Aluvial (<i>Entisols</i>)	Pemukiman, Rawa dan Sawah
3.	Lembah antar Perbukitan Endapan Aluvium	Aluvial (<i>Entisols</i>)	Pemukiman atau Perkarangan
4.	Lereng kaki Perbukitan Endapan Koluvium	Latosol (<i>Oxisols</i>), Podsolik (<i>Utisols</i>)	Pemukiman atau pekarangan, kebun campuran dan semak belukar
5.	Perbukitan Intrusif Batuan Vulkanik Tua Granit Banggai (Granit, Diorit, Granodiorit)	Podsolik (<i>Utisols</i>)	Hutan (dominan), semak belukar dan kebun
6.	Perbukitan dan Pegunungan Karst Batu Gamping Terumbu dan Gamping Napalan	Latosol (<i>Oxisols</i>),	Hutan (dominan), semak belukar dan kebun
7.	Perbukitan Struktural Patahan Batuan Vulkanik Tua Kelompok Diabas, Serpih, Konglomerat, Batupasir	Podsolik (<i>Utisols</i>)	Hutan (dominan), semak belukar
8.	Perbukitan dan Pegunungan Struktural Patahan Kelompok Batuan Malihan Sekis-Gnesis dan Batunapal	Kambisol (<i>Inceptisols</i>) Latosol (<i>Oxisols</i>)	Hutan (dominan) dan semak belukar
9.	Terumbu Karang dan Padang Lamun	-	Wisata Bahari (<i>Diving, Snorkling</i>)

Sumber: RPPLH Banggai Kepulauan (2022)

Berdasarkan klasifikasi tutupan atau jenis penggunaan lahan menurut SNI 7645 – 2010, maka di Kabupaten Banggai Kepulauan terdapat 10 (sepuluh) jenis tutupan lahan atau penggunaan lahan yaitu :

- | | |
|--------------------------------|---------------------------------|
| (a) Permukiman atau pekarangan | (f) Hutan Lahan Kering Primer |
| (b) Persawahan | (g) Hutan Lahan Kering sekunder |
| (c) Tegalan atau ladang | (h) Hutan Mangrove |

(d) Kebun

(i) Danau atau Telaga

(e) Campuran

(j) Rawa – rawa

1. Kawasan Lindung

Kawasan lindung merupakan wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. Berdasarkan RTRW Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016-2036, kawasan Lindung terdiri atas:

- a. kawasan hutan lindung;
- b. kawasan yang memberi perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- c. kawasan perlindungan setempat;
- d. kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya;
- e. kawasan rawan bencana alam; dan
- f. kawasan lindung lainnya.

Kawasan Hutan Lindung dengan luas kurang lebih 26.739 Ha terdapat di beberapa kecamatan berikut ini:

- a. Kecamatan Tinangkung, dengan luasan kurang lebih 2.025,920 Ha;
- b. Kecamatan Tinangkung Utara, dengan luasan kurang lebih 248,190 Ha;
- c. Kecamatan Bulagi, dengan luasan kurang lebih 8.318,105 Ha;
- d. Kecamatan Bulagi Utara, dengan luasan kurang lebih 810,621 Ha;
- e. Kecamatan Bulagi Selatan, dengan luasan kurang lebih 14.487,200 Ha;
- f. Kecamatan Peling Tengah, dengan luasan kurang lebih 852,564 Ha;
- g. Kecamatan Totikum Selatan, dengan luasan kurang lebih 200,655 Ha;
- h. Kecamatan Buko Selatan, dengan luasan kurang lebih 40,690 Ha.

Kawasan yang memberi perlindungan terhadap kawasan bawahannya terdiri atas kawasan resapan air yang tersebar di seluruh kecamatan Kabupaten Banggai Kepulauan dengan luasan 237.842 Ha.

Kawasan perlindungan setempat terdiri atas kawasan sempadan pantai, kawasan sempadan sungai, kawasan sekitar danau/waduk, kawasan sekitar mata air; dan Kawasan ruang terbuka hijau.

Kawasan sempadan pantai terdapat di seluruh pulau di Kabupaten Banggai Kepulauan, dengan panjang pantai kurang lebih 789,58 km. Kawasan sempadan sungai meliputi:

- a. Sungai Paisu Bebek dan Sungai Balayon di Kecamatan Liang;

- b. Sungai Ndudukan, Sungai Lomou, Sungai Tutung, di Kecamatan Totikum;
- c. Sungai Tobing, Sungai Tobungin, Sungai Nipah, Sungai Mandoni di Kecamatan Tinangkung Selatan
- d. Sungai Manggalai, Sungai Ambelang di Kecamatan Tinangkung
- e. Sungai Luksagu, Sungai Tatakalai dan Sungai Palam di Kecamatan Tinangkung Utara.

Kawasan sekitar danau terletak di:

- a. Danau Tendetung di Kecamatan Totikum Selatan
- b. Danau Ndudukan di Kecamatan Totikum;
- c. Danau Alani di Kecamatan Buko;
- d. Danau Kuakon di Kecamatan Tinangkung; dan
- e. Danau Emeluk di Kecamatan Bulagi Selatan;

Berdasarkan Kepres Nomor 32 Tahun 1990 tentang pengelolaan kawasan lindung ditetapkan kawasan lindung sekitar danau sekurang-kurangnya 50 meter dari titik pasang tertinggi. Danau yang ada di Kabupaten Banggai Kepulauan terdapat di Kecamatan Totikum dan Kecamatan Totikum Selatan yakni Danau Tendetung dan Danau Ndudukan, serta di Kecamatan Buko yakni Danau Alani.

Kawasan mata air adalah kawasan tertentu di sekeliling danau, hulu sungai serta tebing-tebing sungai yang mempunyai manfaat untuk mempertahankan kelestarian mata air yang ditetapkan sekurang-kurangnya 200 meter di sekitar mata air. Mata air di Kabupaten Banggai Kepulauan terdapat pada hulu sungai serta tebing sungai, tetapi debit airnya tidak cukup besar, sehingga untuk mengetahui kontinuitas dan besaran debit mata air perlu dilakukan penelitian lebih lanjut. Karena kebutuhan air dengan jumlah dan kualitas yang baik sangat diperlukan guna menunjang kegiatan rumah tangga, industri serta kegiatan di masa mendatang sehingga perlu dijaga dan dilestarikan. Kawasan sekitar mata air meliputi mata air atas Paisu Sinangkal, Lalanday, Bangunemo, Manggalai dan Lukpanenteng.

Kabupaten Banggai Kepulauan juga memiliki Kawasan Ruang Terbuka Hijau yang ditetapkan di kawasan lapangan monumen Trikora dan Alun-alun di Kota Salakan. Kawasan Rawan Bencana Alam, tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Banggai Kepulauan, yang meliputi: kawasan rawan gempa bumi, rawan tsunami, dan rawan tanah longsor.

2. Kawasan Budidaya

Kawasan Budidaya merupakan wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. Kawasan budidaya pada hakekatnya adalah tempat di mana suatu wilayah dapat mengolah ruang sedemikian rupa menjadi peruntukan-peruntukan tersendiri sehingga dapat dipergunakan untuk mencukupi kebutuhan dan memberikan kemakmuran kepada penduduknya namun tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Berbagai macam kawasan budidaya di Kabupaten Banggai Kepulauan tidak akan dideskripsikan secara mendetail, hanya akan dijabarkan beberapa kawasan saja yang terkait erat dengan potensinya sebagai tolok ukur penting untuk pembangunan, namun juga memiliki potensi untuk merusak kestabilan kondisi lingkungan apabila tidak direncanakan dan dikelola dengan matang. RTRW Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016-2036 mencatat Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya terdiri atas kawasan pantai berhutan bakau kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.

Tabel 2.6
Sebaran Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya
di Kabupaten Banggai Kepulauan

Kecamatan	Kawasan Pantai Berhutan Bakau (Ha)	Konservasi Laut (Ha)	Kawasan Cagar Budaya
Tinangkung	153,37		Monumen Trikora Bonua Lua Benteng Bebengetan
Tinangkung Selatan	439,71		
Tinangkung Utara	17,22		Rumah Satu Tiang Luksagu
Liang	65,55	32.359,35	
Peling Tengah	125,2		
Bulagi	42,35		Makam Raja Dallu, Makam Raja Boas, keramat Kombolon, Mustika Putih
Bulagi Utara	432,82		Batu Masigi, Batu Duangan
Bulagi Selatan	3,98	58.092,62	Tengkorak Manusia Zaman Dulu Desa Osan, Makam Lipuadino (Penyebar Islam), Peta Alam Desa Lolantang, Pusat Pembuatan Periuk
Buko	76,08		
Buko Selatan	226,06		Sanggar Batu Mesea

Sumber: Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2016 Tentang RTRW Kabupaten Banggai Kepulauan (2016-2036)

2.1.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah

2.1.1.2.1 Kawasan Peruntukkan Perikanan

Jenis perikanan yang berkembang di Kabupaten Banggai Kepulauan adalah perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Dalam pengelolaan jenis perikanan laut di Kabupaten Banggai Kepulauan dapat diarahkan sebagai berikut:

1. Pengembangan jenis perikanan laut sesuai dengan permintaan tertinggi di pasaran.
2. Penentuan skala pemasaran hasil produksi.
3. Penanganan sistem pengelolaan pasca produksi untuk menjaga kualitas.

Kawasan perikanan tangkap adalah kawasan bagi kegiatan memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun. Kegiatan ini juga termasuk menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan atau mengawetkannya. Kawasan pengembangan perikanan tangkap di Kabupaten Banggai Kepulauan diarahkan dan dibagi dalam tiga jalur dengan klasifikasi area dan peralatan.

Sementara itu kawasan perikanan budidaya adalah kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan memelihara, membesarkan, dan atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan atau mengawetkannya. Kriteria penetapan kawasan perikanan budidaya meliputi: a) Perairan laut pasang surut yang terlindung pasir, kerakal dan atau berbatu; b) Perairan laut yang semi terlindung dan atau perairan yang terlindung dari aksi gelombang ekstrim; c) Di luar kawasan pelabuhan dan atau jalur pelayaran; d) Salinitas air relatif konstan dalam kisaran normal air laut; e) Aksesibilitas kawasan mudah dicapai, dekat pemukiman masyarakat pesisir dan tidak dalam pengaruh oeh air limbah; f) Perairan laut di luar zona inti kawasan perlindungan; serta g) Perairan laut di luar areal terumbu karang dan Padang Lamun, h) Kualitas air memenuhi baku mutu air laut untuk budidaya ikan.

Jenis perikanan Laut yang ada di Kabupaten Banggai Kepulauan berkembang di Kecamatan yang berada di wilayah pesisir. Pengembangan perikanan laut di Kabupaten Banggai Kepulauan mencakup kegiatan penangkapan ikan laut jenis Kakap, Tongkol, Tuna, Cumi-cumi, Ikan Kerapu, Ikan Napoleon dan Sotong. Kegiatan budidaya hasil laut mencakup budidaya Lobster, Kerapu, Cardinal Fish, Mutiara, dan

Rumput laut. Dalam pengembangannya untuk jenis perikanan ini perlu ditingkatkan baik dari segi kualitas maupun cara pemasaran yang lebih baik sehingga produk perikanan di Kabupaten Banggai Kepulauan akan lebih dikenal.

Kawasan peruntukan perikanan budidaya di Kabupaten Banggai Kepulauan terdiri atas:

1. Kawasan peruntukan budidaya laut
2. Keramba Jaring Tangkap (KJT) di perairan laut Kecamatan Liang;
3. Keramba Jaring Apung (KJA) di perairan laut Kecamatan Liang;
4. Budidaya teripang di perairan laut Kecamatan Liang;
5. Budidaya Mutiara di perairan laut Kecamatan Tinangkung Selatan, Kecamatan Liang; dan
6. Budidaya rumput laut di perairan laut Kecamatan Bulagi, Liang, Bulagi Utara, Peling Tengah, Tinangkung Selatan, Buko Selatan, Totikum Selatan, Bulagi Selatan, Tinangkung, Buko, dan Tinangkung Utara.

Kawasan peruntukan perikanan budidaya di Kabupaten Banggai Kepulauan terdiri atas:

1. Bagan apung di perairan laut Kecamatan Tinangkung, Kecamatan Peling Tengah, Liang, Bulagi, Bulagi Selatan dan Kecamatan Tinangkung Selatan;
2. Rumpon di perairan laut Kecamatan Tinangkung Utara;
3. Gill Net tersebar di perairan laut seluruh kecamatan di Kabupaten Banggai Kepulauan;
4. Hand line tersebar di perairan laut seluruh kecamatan di Kabupaten Banggai Kepulauan;
5. Long Line tersebar di perairan laut seluruh kecamatan di Kabupaten Banggai Kepulauan;
6. Sero di perairan laut Kecamatan Peling Tengah, Bulagi Selatan dan Kecamatan Liang;
7. Kapal Perikanan tersebar di perairan laut seluruh kecamatan di Kabupaten Banggai Kepulauan; dan
8. Mesin Katinting tersebar di perairan laut seluruh kecamatan di Kabupaten Banggai Kepulauan.

2.1.1.2.2 Kawasan Peruntukkan Pertanian

1. Kawasan Pertanian Tanaman Pangan

Kegiatan pertanian masih menjadi kegiatan utama masyarakat Kabupaten Banggai Kepulauan selain kegiatan perkebunan dan perikanan. Kegiatan pertanian tersebut berkembang mulai dari wilayah dengan ketinggian 30 – 1000 meter dpl dengan bermacam komoditi yang dihasilkan, pengembangan kawasan budidaya ini didasarkan pada potensi dan SDA yang terkandung di setiap wilayah. Adapun yang memiliki potensi sebagai pengembangan pertanian tanaman pangan adalah (1) Budidaya Ubi Banggai, (2). Budidaya Ubi Jalar dan (3). Budidaya Rumpul Laut. Dalam peningkatan produktifitas pertanian tanaman pangan yang dikembangkan pada wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan dengan potensi sumber daya alam pendukung yang dapat dikelola, baik peningkatan management pertanian atau melalui sistem pengembangan irigasi teknis. Peningkatan produksi tanaman pangan pada saat ini, terutama tanaman pangan padi, sebab padi merupakan salah satu tanaman dengan tingkat produksi yang masih stabil.

Pengembangan yang dilakukan dalam mengatasi penurunan tingkat produktifitas tanaman pangan padi dapat dicegah dengan memberikan penyuluhan, pembinaan, dan pengembangan potensi tanah yang ditunjang dengan program intensifikasi dan ekstensifikasi termasuk jaringan irigasi serta penerapan pengembangan tanaman padi organik dan berwawasan lingkungan. Perkembangan lahan pertanian di wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan saat ini belum dimanfaatkan secara optimal, dengan kondisi seperti ini akan membangkitkan perkembangan lahan terbangun yang nantinya akan dapat menggusur lahan pertanian tanaman pangan potensial.

Untuk mengantisipasi hal ini, maka untuk kawasan pertanian diarahkan sebagai berikut:

1. Mempertahankan fungsi kawasan pertanian yang sudah ada, sesuai dengan peruntukannya terutama di wilayah Kecamatan Tinangkung dan Kecamatan Totikum.
2. Membatasi kegiatan pembangunan disekitar kawasan pertanian potensial, dengan menyusun perda sebagai satu dasar hukum yang mengatur pembatasan kegiatan pembangunan disekitar kawasan pertanian potensial

3. Mengupayakan ekstensifikasi pertanian yang masih memungkinkan untuk dilaksanakan pada beberapa beberapa kawasan dengan mempertimbangkan aspek daya dukung tanah, daya dukung pengairan/irigasi, dan produktivitas lahan pertanian yang ada saat ini. Upaya ekstensifikasi ini dapat dilakukan melalui peningkatan kelas lahan perkebunan menjadi lahan pertanian produktif.
4. Mengembangkan sentra produksi tanaman pertanian pada masing-masing wilayah Kecamatan sesuai dengan jenis tanaman yang sesuai dengan jenis tanaman yang cocok dan produksi yang dominan.

Dalam perkembangannya untuk wilayah kecamatan yang ada di Kabupaten Banggai Kepulauan dapat dikembangkan berdasarkan sentra jenis tanaman pangan yang dihasilkan, yaitu:

Tabel 2.7
Sebaran Sentra Pengembangan Tanaman Pangan per Kecamatan di
Kabupaten Banggai Kepulauan

Kecamatan	Sentra Pengembangan Tanaman Pangan
Tinangkung	Jagung, Rumput Laut, Ubi Kayu, Ubi Jalar
Tinangkung Selatan	Jagung, Padi, Kacang Tanah
Tinangkung Utara	Jagung, Padi, Ubi Kayu
Buko	Jagung, Kacang Tanah, Ubi Banggai
Buko Selatan	Jagung, Kacang Tanah, Ubi Banggai
Bulagi	Jagung, Ubi Banggai, Ubi Kayu, Ubi Jalar, Keladi, Rumput Laut
Bulagi Utara	Jagung, Ubi Kayu, Ubi Banggai, Ubi Jalar, Keladi, Rumput Laut
Bulagi Selatan	Jagung, Ubi Banggai, Ubi Kayu, Ubi Jalar, Keladi, Rumput Laut
Peling Tengah	Jagung, Ubi Banggai, Ubi Kayu
Liang	Jagung, Kacang Tanah, Ubi Kayu, Ubi Jalar, Keladi, Rumput Laut
Totikum	Jagung, Padi, Kacang Tanah
Totikum Selatan	Jagung, Kacang Tanah, Ubi Kayu, Keladi

Sumber: RTRW Kabupaten Banggai Kepulauan (2016-2036)

Hasil produksi tanaman pangan di Banggai Kepulauan, ditinjau dari sisi permintaan, berpotensi dapat memenuhi permintaan di dalam negeri, terutama lokal kabupaten dan Provinsi Sulawesi Tengah. Berdasarkan peluang dan pesaing dalam pasokan hasil produksi pertanian tanaman pangan, terutama komoditas unggulan seperti kacang tanah, ubi jalar, ubi banggai dan jagung dapat berperan serta dalam pemenuhan kebutuhan dalam lingkup provinsi.

Penggunaan tanah untuk pertanian tiap tahun mengalami penyusutan luasan atau alih fungsi. Kondisi ini apabila dibiarkan dan tidak dilakukan upaya pencegahan alih fungsi, akan menjadi ancaman (hambatan) pembangunan sektor pertanian dimasa akan datang yang meliputi berkurangnya jumlah produksi dan produktivitas yang berpotensi mengakibatkan hambatan dalam mewujudkan swasembada pangan. Usaha- usaha yang harus dilakukan adalah mengembangkan area pertanian tanaman pangan dengan menyusun strategi pengelolaan sumberdaya lahan pertanian secara berkelanjutan dan pencegahan berkurangnya lahan produktif.

2. Kawasan Perkebunan

Ditinjau dari segi karakteristik tanah, maka wilayah dengan potensi sebagai kawasan budidaya pengembangan tanaman perkebunan di Kabupaten Banggai Kepulauan cukup mempunyai andil dalam meningkatkan pemasukan daerah, apabila dikelola secara berkelanjutan.

Pengembangan sentra produksi komoditi hortikultura pada masing-masing wilayah sesuai dengan jenis tanaman yang paling cocok untuk dikembangkan pada wilayah tersebut. Adapun jenis tanaman perkebunan dan hortikultura yang ada di Kabupaten Banggai Kepulauan adalah, Kelapa, cengkeh, kakao, kopi, pala, lada, Jambu mete, kapuk, vanili, kemiri, sagu dan jahe. Sedangkan penyebarannya berdasarkan RTRW Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2026-2036, hampir keseluruhan wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan dan mempunyai luas 29.210,47 Ha, yang lokasinya diarahkan tersebar disetiap kecamatan, meliputi:

1. Kecamatan Tinangkung, luas 2.600 Ha;
2. Kecamatan Tinangkung Utara, luas 2.155,24 Ha;
3. Kecamatan Tinangkung Selatan, luas 4.584,80 Ha;
4. Kecamatan Totikum, luas 5.575 Ha;
5. Kecamatan Totikum Selatan, luas 1.596,80 Ha;
6. Kecamatan Liang, luas 2.531,24 Ha;
7. Kecamatan Peling Tengah, luas 7.715,00 Ha;
8. Kecamatan Bulagi, luas 3.717,7 Ha;
9. Kecamatan Bulagi Utara, luas 1.860,0 Ha;
10. Kecamatan Bulagi Selatan, luas 1.454,8 Ha;
11. Kecamatan Buko, luas 4.156,40 Ha;

12. Kecamatan Buko Selatan, luas 1.982,15.

Perkembangan budidaya tanaman perkebunan dan hortikultura di Kabupaten Banggai Kepulauan perlu ditingkatkan untuk merespon kebutuhan lokal dan regional, dengan cara peningkatan kualitas dan kuantitas produksi melalui sistem intensifikasi kegiatan perkebunan dan hortikultura, disamping itu perlu dikembangkan sistem kemitraan antara petani dengan pihak swasta. Dengan pola kemitraan ini diharapkan mampu mengangkat pendapatan petani di wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Dengan adanya pengembangan berbagai jenis komoditi tanaman perkebunan dan buah-buahan ini, maka dalam perkembangannya untuk wilayah kecamatan yang ada di Kabupaten Banggai Kepulauan dapat dikembangkan berdasarkan sentra jenis komoditi yang dihasilkan, yaitu:

1. Sentra Pengembangan Kelapa di Kecamatan Totikum, Tinangkung, Tinangkung Utara, Tinangkung Selatan dan Buko.
2. Sentra Pengembangan Cengkeh di Kecamatan Peling Tengah, Bulagi, Bulagi Selatan dan Buko.
3. Sentra Pengembangan Kakao di Kecamatan Liang, Tinangkung Selatan dan Bulagi Selatan.
4. Sentra Pengembangan Kopi di Kecamatan Tinangkung, Bulagi Selatan dan Buko.
5. Sentra Pengembangan Tanaman Jambu Mete di Kecamatan Liang dan Bulagi.
6. Sentra Pengembangan Kapuk di Kecamatan Buko.
7. Sentra pengembangan tanaman Vanili di Kecamatan Liang.
8. Sentra Pengembangan tanaman Kemiri di Kecamatan Bulagi, Bulagi Selatan dan Buko.
9. Sentra Pengembangan tanaman sagu di Kecamatan Buko.

2.1.1.2.3 Kawasan Peruntukkan Pariwisata

Sektor pariwisata merupakan sektor yang potensial menciptakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta mampu memberikan *multiplier effect* bagi berkembangnya sektor-sektor terkait, seperti pertanian (bunga, buah, perikanan), industri kerajinan, perdagangan (misalnya rumah makan), dan jasa (penginapan, pemandu wisata, transportasi, dan sebagainya). Berkembangnya sektor ini diharapkan dapat meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat, terutama yang tinggal di sekitar kawasan wisata.

Pengembangan obyek wisata yang diarahkan dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan sekaligus memperluas kesempatan kerja dan wirausaha. Maka perlu diupayakan pengembangan pariwisata, pemeliharaan obyek dan benda bersejarah, peningkatan promosi dan pengembangan event-event budaya serta yang paling utama adalah pembangunan pelabuhan Salakan yang memenuhi syarat sebagai pintu masuk ke Kabupaten Banggai Kepulauan. Adapun kawasan peruntukkan wisata yang dikembangkan di Kabupaten Banggai Kepulauan meliputi:

Kawasan peruntukkan pariwisata sejarah dan budaya yang terdiri atas:

1. Monumen Trikora Salakan, Bonua Lua dan Benteng Bebungketan di Kecamatan Tinangkung;
2. Mesjid Tua di Kombutokan dan Benteng Bungkuo Pusaka di Sambut Kecamatan Totikum;
3. Benteng Lipuadino, Makam Tua Imam Puadino, Makam Tua Imam Sya'ban, dan Peta Alam di Lolantang Kecamatan Bulagi Selatan;
4. Perkampungan Suku Bajo di Kalumbatan dan masuknya Injil pertama di Nulion Kecamatan Totikum Selatan;
5. Museum Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;
6. Tradisi Penguburan Mayat, pusat pembuatan periuk tanah liat, tradisi suku Sea – Sea di Osan Kecamatan Bulagi;

Kawasan peruntukkan pariwisata alam terdiri atas:

1. Danau Kuakon di Kecamatan Tinangkung;
2. Air Terjun Paisu Mondoni Mansamat di Kecamatan Tinangkung Selatan;
3. Air Terjun Tembang di Luksagu, Kecamatan Tinangkung Utara;
4. Danau Paisu Mtono Lalong di Kecamatan Tinangkung Utara;
5. Danau Tendetung di Kanali Kecamatan Totikum Selatan;
6. Gua Pentu di Kecamatan Liang;
7. Danau Lemelu di Kecamatan Bulagi Selatan;
8. Batu Mesea Lumbia-Lumbia dan Danau Alani di Kecamatan Buko Selatan;
9. Gagak Peling di Okulo dan Tatendeng Kecamatan Buko;
10. Banggai Cardinal Fish di Kecamatan Liang, Kecamatan Tinangkung dan Kecamatan Totikum Selatan;
11. Pemandian Pantai Lomboan di Kecamatan Tinangkung Selatan;
12. Pemandian Pantai Teduang Ambelang di Kecamatan Tinangkung;

13. Pantai Tebeabul di Pulau Bakalan Kecamatan Tinangkung;
14. Pantai Bone Uluno di Abason Kecamatan Totikum;
15. Pemandian Pantai Lalanday di Kecamatan Bulagi;
16. Kawasan Agrowisata Pulau Banyak di Kecamatan Tinangkung;
17. Danau Paisu Pok/Danau Cermin di Kecamatan Bulagi Utara;
18. Pantai Poganda di Kecamatan Bulagi Utara;
19. Teluk Kerikil di Kecamatan Peling Tengah; dan
20. Wisata Mangrove Tatalalai.

2.1.1.2.4 Kawasan Peruntukkan Permukiman

Kabupaten Banggai Kepulauan memiliki kawasan pemukiman perkotaan dan kawasan pemukiman perdesaan. Kebijakan pengembangan permukiman pedesaan dilakukan dengan menciptakan sentra-sentra produksi yang prospektif dalam penyerapan tenaga kerja dan peningkatan pendapatan. Sejalan dengan itu perlu diciptakan saling keterhubungan antara sentra produksi dengan pusat pemasarannya sehingga dapat saling menunjang sistem perwilayahan.

Kawasan permukiman adalah kawasan diluar kawasan lindung yang diperlukan sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian masyarakat yang berada di daerah perkotaan atau pada daerah perdesaan. Adapun kriteria dari kawasan permukiman adalah kawasan yang secara teknis dapat digunakan untuk permukiman yang aman dari bahaya bencana alam, sehat dan mempunyai akses untuk kesempatan berusaha, dan kawasan yang apabila digunakan untuk permukiman dapat memberikan manfaat seperti: meningkatkan ketersediaan permukiman dan mendayagunakan fasilitas yang ada disekitarnya dan meningkatkan perkembangan kegiatan sektor dan ekonomi yang ada disekitarnya, tidak mengganggu fungsi lindung, tidak mengganggu upaya kelestarian sumber daya alam, meningkatkan pendapatan masyarakat, meningkatkan pendapatan nasional dan daerah, menyediakan kesempatan kerja.

Pengelolaan kawasan permukiman dilakukan untuk menyediakan tempat bermukim yang sehat dan aman dari bencana alam serta dapat memberikan lingkungan yang sesuai untuk pengembangan masyarakat dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

1. Permukiman Perkotaan

Kawasan permukiman perkotaan adalah kawasan yang digunakan untuk kegiatan permukiman dengan kegiatan utama non pertanian dan pada umumnya ditunjang oleh sarana dan prasarana transportasi yang memadai, fasilitas peribadatan, pendidikan, perdagangan dan jasa, perkantoran dan pemerintahan.

Di Kabupaten Banggai Kepulauan wilayah yang didefinisikan sebagai kawasan permukiman perkotaan adalah Ibukota Kabupaten Banggai Kepulauan, yaitu Kota Salakan Kecamatan Tinangkung serta kecamatan sesuai dengan peraturan daerah tentang penetapan batas wilayah kota di lingkungan Kabupaten Banggai Kepulauan. Pada wilayah ini kegiatannya didominasi oleh jenis kegiatan yang bersifat kekotaan dan merupakan orientasi pergerakan bagi penduduk yang ada pada wilayah sekitarnya. Berdasarkan kondisi yang ada di kota-kota tersebut, maka dalam pengembangan pemukiman perkotaan diarahkan untuk mencapai suatu kondisi aman, nyaman, sehat, sehingga dalam penanganannya diarahkan sebagai berikut:

1. Menghindari pola perkembangan pemukiman yang sifatnya linier sesuai dengan kondisi jalan, untuk mengantisipasi perkembangan wilayah yang memusat, maka pola perkembangan pemukiman dibuat menyebar dengan ketersediaan fasilitas penunjang yang memadai sesuai standar kebutuhan kota.
2. Penentuan Garis Sempadan Bangunan yang jelas pada kawasan yang belum dibangun pemukiman guna mengantisipasi kebutuhan pengembangan jaringan jalan kota pada masa mendatang. Berdasarkan kecenderungan perkembangan saat ini, pola pemukiman di wilayah kota dan Kabupaten Banggai Kepulauan secara umum berkembang secara alami sesuai dengan ruas jalan, sehingga dikhawatirkan akan semakin memakan badan jalan.
3. Peningkatan kualitas bangunan dan lingkungan sekitar pemukiman pada daerah-daerah terbelakang/kampung kota melalui program P3KT mencakup kegiatan gentengisasi, betonisasi, penyediaan sanitasi/MCK yang lebih baik, hal ini diarahkan untuk mengubah citra kampung kota menjadi lebih baik.

Permukiman perkotaan di Kabupaten Banggai Kepulauan terdiri dari:

- a. Permukiman perkotaan kepadatan sedang

Kawasan permukiman perkotaan kepadatan sedang yang diarahkan untuk permukiman/hunian sedang, industri berbasis tenaga kerja non polutan, jasa, dan perdagangan, serta perkantoran dengan penyebaran meliputi kawasan Ibukota Kabupaten Banggai Kepulauan yaitu Kota Salakan.

b. Permukiman perkotaan kepadatan rendah

Kawasan permukiman perkotaan kepadatan rendah adalah kawasan untuk permukiman/hunian kepadatan rendah yang mendukung kegiatan jasa perdagangan dan industri berbasis bahan baku lokal dan berorientasi tenaga kerja, dengan penyebaran meliputi seluruh ibukota kecamatan di Kabupaten Banggai Kepulauan, yaitu:

- a. Bulagi Satu di Kecamatan Bulagi
- b. Sambulangan di Kecamatan Bulagi Utara
- c. Lolantang di Kecamatan Bulagi Selatan
- d. Tataba di Kecamatan Buko
- e. Lumbia-lumbia di Kecamatan Buko Selatan
- f. Ponding-ponding, Tatakalai dan Luksagu di Kecamatan Tinangkung Utara
- g. Mansamat di Kecamatan Tinangkung Selatan
- h. Liang di Kecamatan Liang
- i. Patukuki di Kecamatan Peling Tengah
- j. Sambiut di Kecamatan Totikum
- k. Kalumbatan di Kecamatan Totikum Selatan

2. Permukiman Perdesaan

Kawasan permukiman perdesaan adalah suatu kawasan untuk permukiman yang pada lokasi sekitarnya masih didominasi oleh lahan pertanian, tegalan, perkebunan dan pemanfaatan lahan lainnya. Dimana untuk kawasan permukiman perdesaan di Kabupaten Banggai Kepulauan persentasenya lebih tinggi dibanding dengan permukiman pada kawasan perkotaan, hal ini disebabkan karena mayoritas wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan termasuk dalam kawasan perdesaan.

Pada kawasan ini peningkatan kegiatannya diarahkan untuk permukiman dengan fasilitas penunjangnya, dan terdapat kawasan pertanian untuk kegiatan usaha. Maka sistem pengelolaan kawasan permukiman di wilayah perdesaan ditempuh dengan:

1. Mengarahkan pengembangan permukiman agar membentuk pola menyebar
2. Membatasi perkembangan permukiman disepanjang jalan utama dengan membuat ketentuan GSB yang ideal untuk mengantisipasi pengembangan jaringan jalan pada masa mendatang.

3. Pengaturan terhadap luas tanah terbangun dan tidak terbangun pada kawasan pengembangan permukiman.
4. Perlu adanya pencadangan tanah kosong atau pekarangan pada masing-masing unit rumah, yang dapat digunakan untuk kegiatan seperti bercocok tanam dan sebagainya, sehingga lebih bernilai ekonomis.
5. Pemisahan antara perumahan dan tempat hunian ternak untuk menjamin tingkat kesehatan penghuni rumah.
6. Perluasan areal yang akan digunakan untuk permukiman sedapat mungkin menggunakan tanah yang tidak termasuk tanah subur atau beririgasi teknis dan $\frac{1}{2}$ teknis.
7. Untuk pemukiman yang berada di daerah selatan, dalam upaya untuk menjaga ketersediaan air, maka dapat dikembangkan sistem resapan air yang dapat dikembangkan baik secara komunal atau secara individual pada masing-masing rumah.

Kawasan permukiman perdesaan di Kabupaten Banggai Kepulauan merupakan kawasan permukiman yang diarahkan untuk hunian rendah sampai sangat rendah/jarang, berorientasi terhadap lingkungannya (pertanian, peternakan dan perikanan, kehutanan, agrowisata dan pariwisata) dengan bangunan yang tidak memiliki beban berat terhadap tanah, yang penyebarannya meliputi seluruh desa diluar ibukota kecamatan.

2.1.1.2 Wilayah Rawan Bencana

Kawasan Rawan Bencana Alam adalah kawasan yang sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana. Kawasan rawan bencana alam terdiri atas kawasan rawan gempa bumi, kawasan rawan tsunami, kawasan rawan banjir, kawasan rawan abrasi, kawasan rawan gerakan tanah. Perlindungan terhadap kawasan rawan bencana dilakukan untuk melindungi manusia dan kegiatannya dari bencana yang disebabkan oleh alam maupun secara tidak langsung oleh perbuatan manusia. Kriteria kawasan rawan bencana alam adalah kawasan yang diidentifikasi sering dan berpotensi tinggi mengalami bencana alam seperti letusan gunung berapi, gempa bumi, dan tanah longsor.

Bencana alam yang harus diantisipasi di wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan adalah bencana geologi berupa gempa bumi, gerakan tanah dan tsunami. Secara geologi wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan terletak disepanjang zona

tumbukan antara lempeng mikro kontinen Banggai-Sula dengan jalur ofiolit Sulawesi Timur. Tumbukan antara kedua lempeng tersebut merupakan fenomena tektonik yang dicirikan dengan pergerakan sistem sesar Sorong yang bergerak ke arah barat dan bersifat mendatar (Hamilton, 1979). Terdapat dua tipe pada sistem sesar sorong ini, yaitu sesar Sorong utara dan sesar Sorong selatan. Pergerakan sesar Sorong yang masih aktif hingga saat ini telah menyebabkan gempa bumi dengan magnitudo yang cukup besar.

Karena letaknya diantara sesar Sorong Utara dan Sesar Sorong Selatan, maka kawasan pesisir wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan sangat rawan terjadi gelombang tsunami. Tsunami disebabkan terjadinya gelombang air laut pasang tinggi yang terbentuk oleh adanya gempa bumi di laut.

Rencana konstruksi bangunan dalam mengurangi risiko tsunami pada lokasi rawan tsunami, penanggulangan yang paling efektif adalah dengan menempatkan bangunan baru jauh dari wilayah yang berpotensi tersapu tsunami misalnya rumah sakit, kantor pemadam kebakaran dan sekolah harus dibangun dengan standara yang lebih tinggi ketimbang akomodasi pariwisata. Penerapan strategi rancang dan bangun sebagai berikut:

- a. Menerapkan standar-standar rancangan dan peraturan bangunan yang memadai, khususnya standar bangunan tanah tsunami.
- b. Memastikan aturan-aturan dan standar-standar tersebut telah memperhatikan seluruh potensi ancaman.
- c. Menerapkan informasi setempat tentang ancaman tsunami yang digunakan untuk memutuskan apakah izin konstruksi bisa diberikan pada lokasi tersebut.

Strategi penggunaan lahan untuk mengurangi resiko bahaya tsunami dilakukan sebagai berikut :

- a) Membuat sistem peringatan dini
- b) Membuat bangunan pelindung atau menanam Kembali bakau yang telah rusak
- c) Memetakan daerah landau yang mungkin terlanda tsunami
- d) Membangun lokasi penyelamatan (lokasi dengan ketinggian tertentu)
- e) Menempatkan pemukiman pada suatu ketinggian tertentu yang dalam sejarah wilayah tersebut tidak pernah terlanda hantaman tsunami.

2.1.2 Aspek Demografi

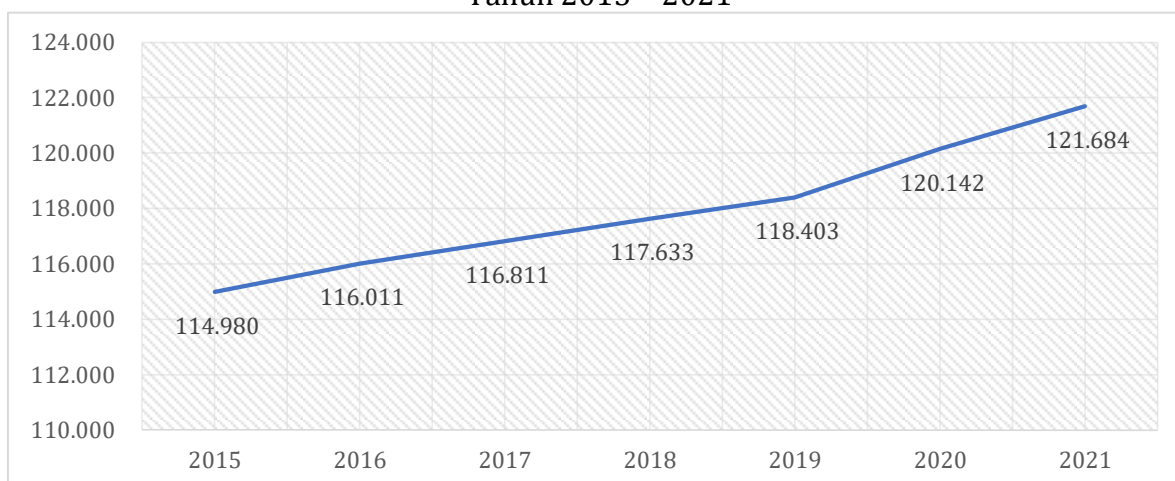
Kondisi demografis Kabupaten Banggai Kepulauan dapat dianalisis dengan menggunakan 2 (dua) indikator utama yaitu jumlah penduduk dan struktur penduduk sebagai berikut :

2.1.2.1 Jumlah Penduduk

Penduduk merupakan prioritas utama dalam pelaksanaan pembangunan, karena permasalahan kependudukan tidak hanya menyangkut kelahiran, kematian dan migrasi, tetapi juga menyangkut masalah sosial budaya, ekonomi, politik, pertahanan dan keamanan yang sangat berpengaruh dalam upaya peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu data kependudukan yang akurat dan tepat waktu sangat dibutuhkan dalam upaya penyelesaian masalah- masalah tersebut.

Jumlah penduduk di Kabupaten Banggai Kepulauan di tahun 2021 sebesar 121.684 jiwa yang tersebar di 12 kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk 48,27 jiwa/km². Jika dihitung berdasarkan peningkatan pertahun, maka jumlah penduduk tumbuh rata – rata dibawah 1% (persen). Pada tahun 2015, jumlah penduduk Kabupaten Banggai Kepulauan terhitung sebesar 114.980 jiwa dan meningkat secara perlahan – lahan ke angka 121.684 jiwa pada tahun 2021. Meskipun pertumbuhan penduduk secara umum dilihat masih cukup rendah tetapi ini tetap menjadi bahan analisis yang akan mempengaruhi berbagai aspek seperti pendidikan, kesehatan dan juga ketenagakerjaan.

Grafik 2.4
Perkembangan Jumlah penduduk Kabupaten Banggai Kepulauan
Tahun 2015 – 2021

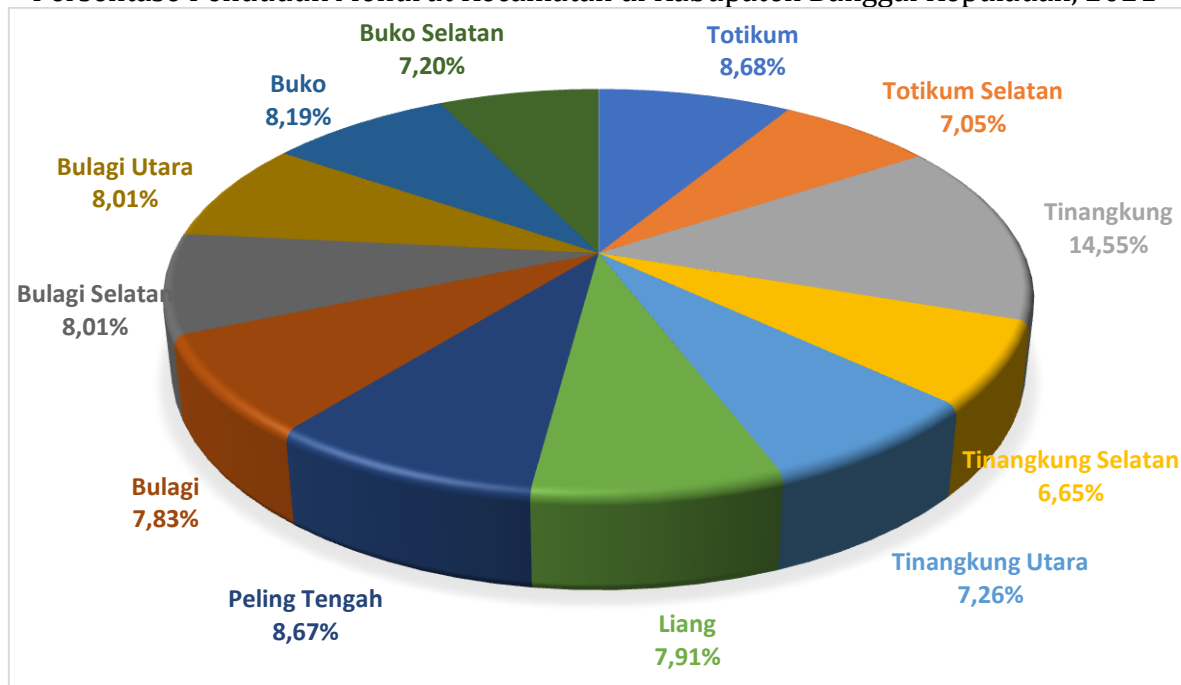


Sumber: BPS Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022

Grafik di atas menunjukkan peningkatan jumlah penduduk Kabupaten Banggai Kepulauan setiap tahunnya dengan rata – rata peningkatan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir sebesar 0,86 persen. Pertumbuhan penduduk tertinggi terjadi pada tahun 2020 sebesar 1,45 persen atau sebesar 1.739 jiwa. Peningkatan jumlah penduduk juga disebabkan oleh faktor angka harapan hidup yang terus meningkat tiap tahunnya.

Grafik 2.5

Persentase Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Banggai Kepulauan, 2021



Sumber: BPS Kabupaten Banggai Kepulauan, 2022

Jumlah penduduk di Kabupaten Banggai Kepulauan cenderung meningkat walau tidak mengalami kenaikan secara signifikan dan persebaran hampir merata di 12 Kecamatan meskipun kepadatan sangat variatif. Pada tahun 2021 sebagian besar penduduk terpusat tinggal di Kecamatan Tinangkung sebesar 14,55% atau sejumlah 17.699 jiwa, kemudian Kecamatan Totikum 8,68% atau sejumlah 10.568 jiwa dan paling sedikit di Kecamatan Tinangkung Selatan sebesar 6,65 persen atau sejumlah 8.096 jiwa. Kepadatan penduduk tertinggi terjadi di Kecamatan Totikum Selatan, yaitu 90 orang per km² dengan luas wilayah hanya 3,82% dari total Kabupaten Banggai Kepulauan. Kepadatan penduduk terendah terjadi di Kecamatan Bulagi Selatan dan Bulagi Utara.

Tabel 2.8

Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk, Distribusi Persentase, Kepadatan, Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Ribu)	Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2020-2021 (%)	Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk per km ²	Rasio Jenis Kelamin Penduduk
1.	Totikum	10 568	0,58	8,68	67,98	105
2.	Totikum Selatan	8 754	0,54	7,05	90,07	103
3.	Tinangkung	17 699	2,59	14,55	56,62	103
4.	Tinangkung Selatan	8 096	1,01	6,65	43,09	102
5.	Tinangkung Utara	8 829	1,22	7,26	64,61	106
6.	Liang	9 629	0,80	7,91	54,65	99
7.	Peling Tengah	10 551	1,14	8,67	75,36	104
8.	Bulagi	9 524	0,00	7,83	34,55	102
9.	Bulagi Selatan	9 745	0,00	8,01	30,55	105
10.	Bulagi Utara	9 748	0,79	8,01	30,65	102
11.	Buko	9 965	0,53	8,19	53,91	100
12.	Buko Selatan	8 756	0,90	7,20	46,74	102
Total		121 684	0,96	100,0	48,89	103

Sumber: Kabupaten Banggai Kepulauan Dalam Angka Tahun 2022

Pada tahun 2021, rasio jenis kelamin penduduk Kabupaten Banggai Kepulauan sebagian besar sudah diatas 100. Dimana hampir semua kecamatan sudah menunjukkan angka diatas 100, untuk Kecamatan Tinangkung Utara angka nya 106 dan yang dibawah angka 100 adalah kecamatan Liang. Ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk laki – laki di Kabupaten Banggai Kepulauan lebih banyak daripada jumlah penduduk perempuan.

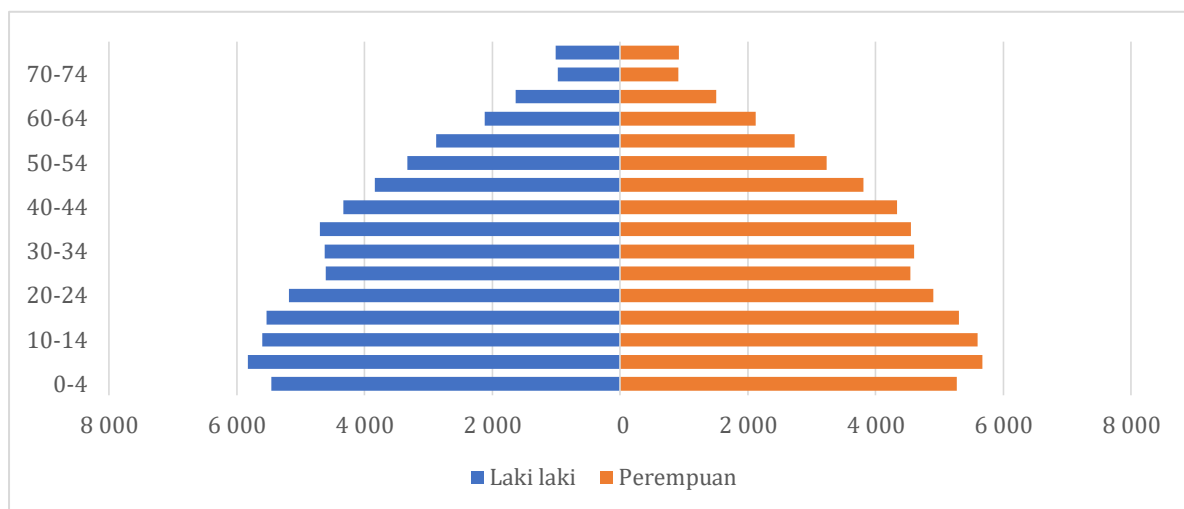
Dari aspek demografis dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan penduduk secara keseluruhan tergolong rendah sekitar 0,96% pertahun. Hal ini bisa menjadi peluang dan tantangan untuk merencanakan pembangunan ke depan. Kedua, kepadatan penduduk di tiap kecamatan tidak merata dan terkonsentrasi hanya di beberapa Kecamatan seperti Totikum Selatan, Totikum, Peling Tengah sehingga perlu menjadi acuan dalam pengambilan kebijakan terutama pembangunan manusia. Hal berikutnya, dari sisi distribusi penduduk, penduduk Kabupaten Banggai Kepulauan tersebar kurang merata di 12 kecamatan dan terkonsentrasi terbesar di Kecamatan Tinangkung. Oleh karena itu, data ini bisa menjadi bahan rujukan dalam merumuskan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah.

2.1.2.2 Struktur Penduduk

Kondisi demografi Kabupaten Banggai Kepulauan dapat dilihat dari struktur penduduk yaitu jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur. Berdasarkan data tahun 2021.

Grafik 2.6

Struktur Penduduk Kabupaten Banggai Kepulauan Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2021



Sumber: Kabupaten Banggai Kepulauan dalam Angka Tahun, 2022

Komposisi penduduk Kabupaten Banggai Kepulauan seperti yang ditunjukkan Grafik 2.6 menunjukkan bahwa usia 0 – 14 tahun mencapai 33.323 jiwa atau sekitar 27,74% dari total penduduk Banggai Kepulauan sebesar 121.684 jiwa. Kelompok berikutnya yaitu usia produktif antara 15 – 29 tahun mencapai 30.088 jiwa atau 24,73% dari total keseluruhan. Kelompok usia 30 hingga 49 tahun juga memiliki jumlah yang lebih banyak 34.800 jiwa atau 28,60% disusul kelompok usia 50 – 64 tahun sebanyak 16.419 jiwa atau 13,49%. Kemudian kelompok terakhir usia lebih dari 65 tahun memiliki jumlah sebanyak 6.948 jiwa atau 5,71% dari total jumlah seluruh penduduk. Berdasarkan pola peningkatan usia lansia, pada 5 – 10 tahun kedepan jumlah lansia diprediksi akan bertambah, sehingga dibutuhkan perencanaan pemerintah daerah mengenai pelayanan kepada lansia terkait dengan kesehatan dan fasilitas ramah lansia.

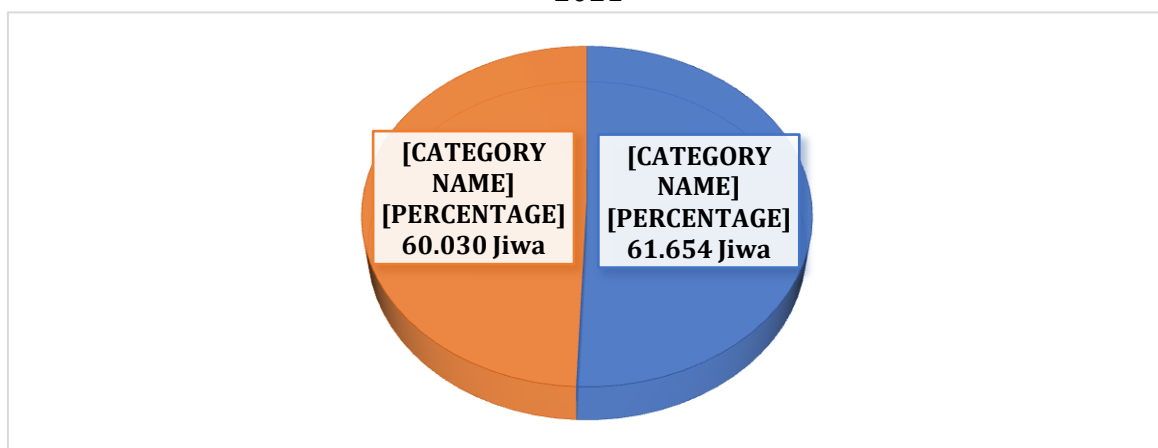
Secara keseluruhan bahwa struktur penduduk Kabupaten Banggai Kepulauan di dominasi oleh kelompok usia produktif dan penduduk usia sekolah sehingga dibutuhkan kebijakan terkait Pendidikan dan ketenaga kerjaan. Kondisi dimana jumlah penduduk yang berusia produktif meningkat (15-64) tahun meningkat

sedangkan jumlah tidak produktif menurun dapat dikatakan bahwa Kabupaten Banggai Kepulauan berada dalam bonus demografi dimana itu terjadi saat proporsi penduduk usia produktif lebih dari 50% dari total seluruh populasi berpotensi untuk memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Kondisi ini perlu dikelola secara optimal oleh Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia yang dimulai dari peningkatan kualitas Pendidikan usia dini karena bisa menjadi tulang punggung pembangunan yang berkualitas pada masa yang akan datang.

Analisis penduduk berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada Gambar 2.7 dibawah menunjukkan pada tahun 2021, rasio jenis kelamin penduduk Kabupaten Banggai Kepulauan sebagian besar sudah diatas 100. Ini berarti bahwa jumlah penduduk laki – laki lebih banyak daripada jumlah penduduk perempuan sebesar 1.624 jiwa. Secara keseluruhan, bisa disimpulkan bahwa struktur penduduk Kabupaten Banggai Kepulauan berdasarkan jenis kelamin cukup berimbang.

Grafik 2.7

Struktur Penduduk Kabupaten Banggai Kepulauan berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2021



Sumber: BPS Kabupaten Banggai Kepulauan, 2022

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek kesejahteraan masyarakat berisi tentang capaian makro pembangunan yang mengindikasikan tentang kondisi tingkat kesejahteraan masyarakat. Aspek ini terdiri atas focus pemerataan ekonomi, kesejahteraan social serta seni budaya dan olahraga. Penjelasan mengenai analisis pada aspek kesejahteraan masyarakat adalah sebagai berikut :

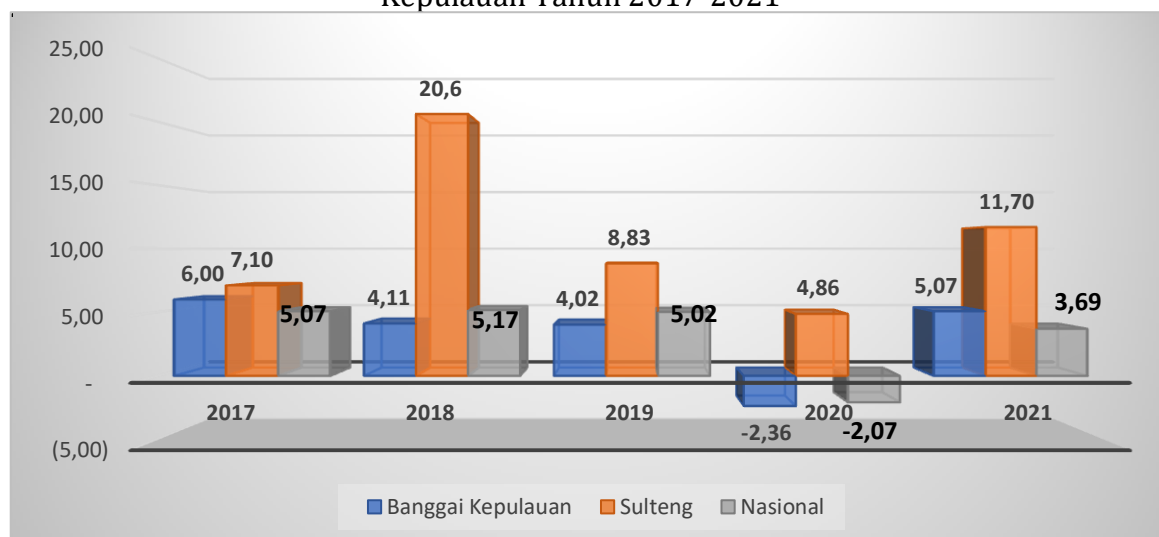
2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Aspek kesejahteraan masyarakat ini dapat dilihat dari aspek kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, dimana hal ini mengindikasikan beberapa indikator makro seperti PDRB, laju inflasi, indeks gini dan IPM.

2.2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Banggai Kepulauan, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2017 – 2021 memiliki trend fluktuatif. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2019 naik sebesar 6,23% dari 6,19% dari tahun sebelumnya. Namun pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi sampai -2,98 persen pada tahun 2020 disebabkan adanya bencana pandemi covid 19 menyebabkan pembatasan aktivitas produksi dan aktivitas masyarakat. Kemudian pada tahun 2021 pertumbuhan ekonomi kembali membaik menjadi 5,07% hal ini disebabkan adanya program pemulihan ekonomi. Trend laju pertumbuhan ekonomi dapat dilihat pada gambar berikut.

Grafik 2.8
Trend Laju Pertumbuhan Ekonomi Kab. Banggai
Kepulauan Tahun 2017-2021

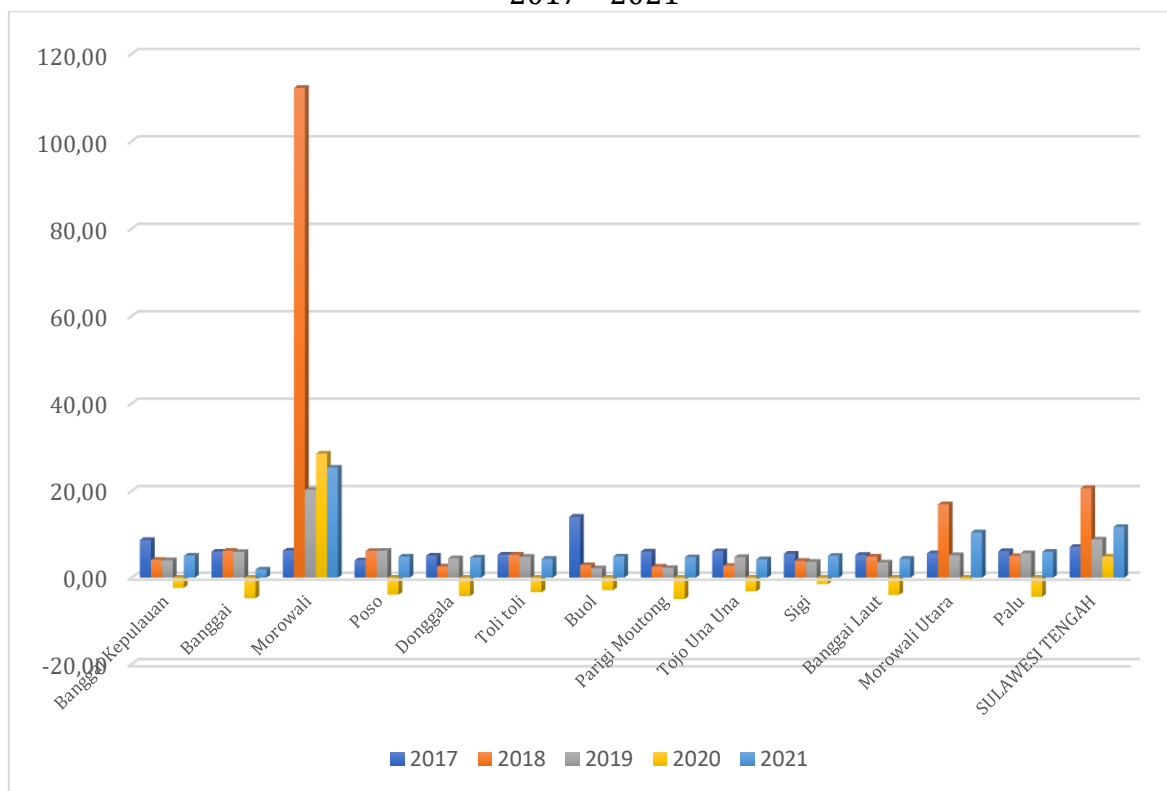


Sumber: BPS Kabupaten Banggai Kepulauan, 2022

Jika dibandingkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2021 cenderung bagus yaitu sebesar 5,07% karena sudah melampaui pertumbuhan ekonomi Nasional sebesar 3,69%. Hal tersebut karena sumber daya alam khususnya pertanian dan perikanan yang cukup berkembang. Namun, kondisi perekonomian

baik skala daerah maupun nasional mengalami kontraksi, khusus Provinsi Sulawesi Tengah tidak mengalami kontraksi hanya mengalami penurunan akibat kebijakan pemerintah dalam rangka mengurangi penyebaran Covid-19 selama tahun 2020. Untuk perbandingan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banggai Kepulauan dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah masih cenderung dibawah tetapi sudah menunjukkan pertumbuhan yang positif.

Grafik 2.9
Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah Tahun
2017 – 2021



Sumber: BPS Kabupaten Banggai Kepulauan, 2022

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banggai Kepulauan jika dibandingkan dengan Kabupaten sekitarnya yaitu Kabupaten Banggai Laut dan Kabupaten Banggai pada tahun 2020 menunjukkan angka -2,36% lebih positif dibandingkan Kabupaten Banggai sebesar -4,79% dan Kabupaten Banggai Laut sebesar -3,97%. Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh Kabupaten Morowali sebesar 28,51, hal ini dipengaruhi oleh adanya perusahaan migas berskala internasional di kabupaten tersebut. Pada tahun 2021 setelah mengalami kontraksi akibat bencana pandemic Covid-19 menunjukkan perbaikan kearah yang lebih positif tumbuh menjadi 5,07% dan merupakan urutan ke empat pertumbuhan ekonomi tertinggi di Sulawesi Tengah.

Dilihat dari pertumbuhan masing- masing sektor ekonomi pada tahun 2021, laju pertumbuhan tertinggi adalah sektor jasa keuangan dan asuransi, diikuti sektor penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 12,35 persen kemudian sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 9,64 persen. Sementara laju pertumbuhan negatif pertambangan dan penggalian, secara rinci laju pertumbuhan menurut lapangan usaha kabupaten Banggai Kepulauan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.9
Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha
Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017-2021

Uraian		2017	2018	2019*	2020*	2021**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5,96	4,86	3,23	-1,79	3,41
B	Pertambangan dan Penggalian	9,25	1,13	13,22	-17,21	-3,46
C	Industri Pengolahan	6,87	6,33	5,78	0,55	2,25
D	Pengadaan Listrik dan Gas	8,11	11,47	5,92	12,72	4,48
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,80	3,96	0,23	3,02	4,32
F	Konstruksi	9,12	2,93	17,59	-15,97	3,11
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,47	1,99	3,28	-5,47	9,64
H	Transportasi dan Pergudangan	5,87	2,65	4,67	-23,38	5,02
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,38	2,50	6,27	-8,89	12,35
J	Informasi dan Komunikasi	7,67	9,59	8,22	8,88	8,38
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	11,48	7,92	5,31	13,45	14,14
L	Real Estate	2,50	2,80	2,70	0,37	2,43
M,N	Jasa Perusahaan	3,79	2,90	5,10	0,99	2,36
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,59	3,52	4,66	0,27	4,41
P	Jasa Pendidikan	5,40	1,10	0,15	0,77	1,25
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9,90	5,04	9,65	6,89	5,23
R,S,T,U	Jasa lainnya	5,52	7,41	2,73	1,32	5,72
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		6,00	4,11	4,02	-2,36	5,07

Sumber: BPS Kab. Banggai Kepulauan, 2022

*Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah nilai keseluruhan barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu wilayah dalam suatu jangka waktu tertentu. Kajian perkembangan PDRB dapat mengungkap kinerja pembangunan dan transformasi struktural perekonomian Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Selama periode tahun 2017 – 2021, nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ADHB dan PDRB ADHK di Kabupaten Banggai Kepulauan selalu mengalami pertumbuhan. Nilai PDRB ADHB terhitung sebesar Rp 3.299,74 Milyar pada tahun 2017 naik sebesar 4.128,83 Milyar pada tahun 2021. PDRB ADHB pada tahun 2020 yaitu sebesar 3.833,55 Milyar menurun dibandingkan capaian pada tahun 2019 yaitu sebesar 3.865,67 Milyar begitu juga dengan PDRB ADHK dimana capaian pada tahun 2020 yaitu sebesar 2.603,27 Milyar dan pada tahun 2019 sebesar 2.666,09 Milyar, terjadi penurunan capaian disebabkan oleh dampak pandemic Covid-19. Kontraksi PDRB ADHK pada tahun 2020 didominasi oleh penurunan di sektor transportasi dan perdagangan sebesar -23,38% dan sektor pertambangan dan penggalan sebesar -17,21%. Nilai PDRB Kabupaten Banggai Kepulauan kategori ADHB tahun dasar 2010 dan ADHK tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.10

PDRB Kabupaten Banggai Kepulauan Atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha (Milyar) Tahun 2017-2021

No	Lapangan Usaha	2017		2018		2019		2020*		2021**	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1 615,67	48,96	1 767,97	49,08	1 843,33	47,68	1 836,92	47,92	1 958,16	47,43
B	Pertambangan dan Penggalian	31,52	0,96	32,96	0,90	38,56	1,00	32,48	0,85	34,23	0,83
C	Industri Pengolahan	83,55	2,53	91,81	2,55	101,01	2,61	104,86	2,74	110,75	2,68
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,41	0,01	0,50	0,01	0,54	0,01	0,61	0,02	0,64	0,02
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,64	0,11	4,12	0,11	4,34	0,11	4,51	0,12	4,82	0,12
F	Konstruksi	85,96	2,61	96,42	2,68	117,84	3,05	102,98	2,69	107,44	2,60
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	639,06	19,37	683,88	18,99	755,05	19,53	727,22	18,97	812,59	19,68
H	Transportasi dan Pergudangan	102,65	3,11	110,23	3,06	123,05	3,18	101,27	2,64	107,64	2,61
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	13,45	0,41	15,45	0,43	16,65	0,43	15,86	0,41	18,13	0,44
J	Informasi dan Komunikasi	98,40	2,98	109,95	3,05	119,66	3,10	128,42	3,35	140,48	3,40
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	74,34	2,25	84,24	2,34	90,75	2,35	103,06	2,69	122,47	2,97
L	Real Estate	57,31	1,74	61,95	1,72	66,95	1,73	68,49	1,79	70,71	1,71
M,N	Jasa Perusahaan	2,76	0,08	3,52	0,10	3,71	0,10	3,82	0,10	3,94	0,10
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	175,30	5,31	194,65	5,40	213,98	5,54	218,31	5,69	231,03	5,60
P	Jasa Pendidikan	189,67	5,75	201,69	5,60	208,44	5,39	212,78	5,55	216,68	5,25
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	78,03	2,36	89,04	2,47	103,93	2,69	113,05	2,95	126,41	3,06
R,S,T,U	Jasa lainnya	48,02	1,46	54,20	1,50	57,87	1,50	58,92	1,54	62,70	1,52
PDRB		3 299,74	100,00	3 601,97	100,00	3 865,67	100,00	3 833,55	100,00	4 128,83	100,00
PDRB NON MIGAS		3 299,74	100,00	3 601,97	100,00	3 865,67	100,00	3 833,55	100,00	4 128,83	100,00

Sumber: BPS Kab. Banggai Kepulauan, 2022

Tabel 2.11

PDRB Kabupaten Banggai Kepulauan Atas Dasar Harga Konstan menurut Lapangan Usaha (Milyar) Tahun 2017-2021

No	Lapangan Usaha	2017		2018		2019		2020*		2021**	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1 202,11	5,96	1 260,51	4,86	1 301,25	3,23	1 277,96	(1,79)	1 321,56	3,41
B	Pertambangan dan Penggalian	21,16	9,25	21,40	1,13	24,23	13,22	20,06	(17,21)	20,75	3,46
C	Industri Pengolahan	62,78	6,87	66,75	6,33	70,61	5,78	71,00	0,55	72,60	2,25
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,40	8,11	0,45	11,47	0,47	5,92	0,53	12,72	0,56	4,48
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,69	5,80	2,80	3,96	2,81	0,23	2,89	3,02	3,02	4,32
F	Konstruksi	53,15	9,12	54,71	2,93	64,33	17,59	54,06	(15,97)	55,74	3,11
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	481,35	5,47	490,95	1,99	507,04	3,28	479,28	(5,47)	525,48	9,64
H	Transportasi dan Pergudangan	79,16	5,87	81,26	2,65	85,06	4,67	65,17	(23,38)	68,45	5,02
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	11,85	7,38	12,14	2,50	12,90	6,27	11,76	(8,89)	13,21	12,35
J	Informasi dan Komunikasi	83,33	7,67	91,32	9,59	98,82	8,22	107,60	8,88	116,61	8,38
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	49,46	11,48	53,37	7,92	56,21	5,31	63,77	13,45	72,78	14,14
L	Real Estate	48,45	2,50	49,80	2,80	51,15	2,70	51,34	0,37	52,59	2,43
M,N	Jasa Perusahaan	2,44	3,79	2,51	2,90	2,64	5,10	2,67	0,99	2,73	2,36
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	130,39	3,59	134,97	3,52	141,26	4,66	141,65	0,27	147,89	4,41
P	Jasa Pendidikan	140,48	5,40	142,03	1,10	142,24	0,15	143,33	0,77	145,12	1,25
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	58,54	9,90	61,49	5,04	67,42	9,65	72,07	6,89	75,83	5,23
R,S,T,U	Jasa lainnya	34,13	5,52	36,65	7,41	37,65	2,73	38,15	1,32	40,33	5,72
PDRB		2 461,85	6,00	2 563,11	4,11	2 666,09	4,02	2 603,27	(2,36)	2 735,24	5,07
PDRB NON MIGAS		2 461,85	6,00	2 563,11	4,11	2 666,09	4,02	2 603,27	(2,36)	2 735,24	5,07

Sumber: BPS Kab. Banggai Kepulauan, 2021

Jika dilihat dari persebaran lapangan usaha, PDRB Kabupaten Banggai Kepulauan dihasilkan utamanya dari sektor industri pertanian, kehutanan, perikanan, dimana lapangan usaha tersebut mampu menghasilkan sekitar 47,81% dari total keseluruhan PDRB Kabupaten Banggai Kepulauan. Lapangan usaha lain yang berkontribusi besar terhadap perekonomian di Kabupaten Banggai Kepulauan adalah sector perdagangan besar eceran; reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 18,99% dari PDRB keseluruhan. Sektor - sektor tersebut merupakan lapangan usaha unggulan yang menjadi penopang ekonomi di Kabupaten Banggai Kepulauan selama kurun lima tahun terakhir. Pada tahun 2020 dan 2021 walau terjadi pandemic Covid-19 tetapi pada PDRB ADHB tidak terjadi penurunan secara signifikan.

Sektor usaha yang belum mengalami perkembangan signifikan terdapat di sektor pertambangan dan penggalan, sektor pengadaan listrik dan gas, sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum dan sektor jasa perusahaan. Sektor – sektor tersebut perlu menjadi perhatian Pemerintah Daerah dalam mengambil kebijakan untuk mendorong pencapaian di sektor tersebut.

Nilai PDRB ADHK pada tahun 2020 mengalami kontraksi, hal ini disebabkan adanya pandemic Covid-19 yang berimbas ke berbagai sektor yang terjadi secara merata bukan hanya di Kabupaten Banggai Kepulauan saja tetapi di daerah lain di Sulawesi Tengah kecuali Kabupaten Morowali juga di Indonesia secara umum. Jika dilihat pertumbuhan persektor, maka terdapat sektor - sektor yang mengalami pertumbuhan negative dan positif. beberapa sektor yang mengalami pertumbuhan negative antara lain sektor pertambangan, sektor konstruksi, sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, transportasi perdagangan, perdagangan besar eceran. Kondisi tersebut semakin membaik di tahun 2021 dimana pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banggai Kepulauan tumbuh positif (5,07%).

Tabel 2.12

Distribusi PDRB menurut Lapangan Usaha Kabupaten Banggai Kepulauan
Tahun 2017-2021

Uraian		2017	2018	2019	2020*	2021**
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	48,96	49,08	47,68	47,81	47,843
B	Pertambangan dan Penggalian	0,96	0,90	1,00	0,85	0,83
C	Industri Pengolahan	2,53	2,55	2,61	2,75	2,83
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,01	0,01	0,01	0,02	2,68
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,11	0,11	0,11	0,12	0,12
F	Konstruksi	2,61	2,68	3,05	2,68	2,60
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	19,37	18,99	19,53	18,99	19,68
H	Transportasi dan Pergudangan	3,11	3,06	3,18	2,59	2,61
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,41	0,43	0,43	0,43	0,44
J	Informasi dan Komunikasi	2,98	3,05	3,10	3,38	3,40
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,25	2,34	2,35	2,70	2,97
L	Real Estate	1,74	1,72	1,73	1,77	1,71
M,N	Jasa Perusahaan	0,08	0,10	0,10	0,10	0,10
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,31	5,40	5,54	5,68	5,60
P	Jasa Pendidikan	5,75	5,60	5,39	5,57	5,25
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,36	2,47	2,69	3,02	3,06
R,S,T,U	Jasa lainnya	1,46	1,50	1,50	1,54	1,52
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS Kab. Banggai Kepulauan, 2022

*Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

Tabel 2.13

Distribusi PDRB ADHB menurut Komponen Pengeluaran
Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017-2021

Komponen		2017	2018	2019*	2020**	2021**
(1)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	60,67	62,84	60,82	65,47	63,30
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	0,85	0,87	0,85	0,91	0,96

Komponen		2017	2018	2019*	2020**	2021**
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	16,28	15,49	16,21	16,18	16,18
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	34,87	33,22	35,00	37,00	31,95
5	Perubahan Inventori	0,33	0,65	0,32	-0,22	0,01
6	Net Ekspor Barang dan Jasa	-12,99	-13,07	-13,20	-19,35	(12,40)
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS Kab. Banggai Kepulauan, 2022

*Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

Dilihat dari distribusi PDRB komponen pengeluaran, selama periode 2016-2021 struktur PDRB Kabupaten Banggai Kepulauan masih didominasi oleh komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga dimana tahun 2021 dengan kontribusi sebesar 63,30 persen, setelah itu komponen pembentukan modal tetap bruto dan pengeluaran konsumsi pemerintah dengan kontribusi masing-masing 31,95 persen dan 16,18 persen.

Dilihat dari pertumbuhan masing-masing sektor ekonomi pada tahun 2021, laju pertumbuhan tertinggi adalah sektor jasa keuangan dan asuransi 14,14 persen, diikuti sektor penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 12,35 persen kemudian sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 9,64 persen. Secara rinci laju pertumbuhan menurut lapangan usaha kabupaten Banggai Kepulauan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.14
Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha
Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017-2021

Uraian		2017	2018	2019	2020*	2021**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5,96	4,86	3,23	(1,79)	3,41
B	Pertambangan dan Penggalan	9,25	1,13	13,22	(17,21)	3,46
C	Industri Pengolahan	6,87	6,33	5,78	0,55	2,25
D	Pengadaan Listrik dan Gas	8,11	11,47	5,92	6,62	4,48
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,80	3,96	1,30	5,85	4,32
F	Konstruksi	9,12	2,93	17,59	(15,97)	3,11
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,47	1,99	3,28	(5,47)	9,64
H	Transportasi dan	5,87	2,65	4,67	(23,38)	5,02

Uraian		2017	2018	2019	2020*	2021**
	Pergudangan					
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,38	2,50	6,27	(8,89)	12,35
J	Informasi dan Komunikasi	7,67	9,59	8,22	8,88	8,38
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	11,48	7,92	5,31	13,45	14,14
L	Real Estate	2,50	2,80	2,70	0,37	2,43
M,N	Jasa Perusahaan	3,79	2,90	5,10	0,99	2,36
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,59	3,52	4,66	0,27	4,41
P	Jasa Pendidikan	5,40	1,10	0,15	0,77	1,25
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9,90	5,04	9,65	6,89	5,23
R,S,T,U	Jasa lainnya	5,52	7,41	2,73	1,32	5,72
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	6,00	4,11	4,02	(2,36)	5,07
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS	6,00	4,11	4,02	(2,36)	5,07

Sumber: BPS Kab. Banggai Kepulauan, 2022

*Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

Dengan demikian, aktifitas perekonomian di Kabupaten Banggai Kepulauan seperti tergambar dari nilai PDRB masih perlu ditingkatkan ke titik yang maksimal. Kabupaten Banggai Kepulauan masih memiliki banyak sektor potensia; yang dapat mendorong peningkatan PDRB. Data – data ini perlu dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan dokumen perencanaan lima tahunan.

2.2.1.2 Laju Inflasi

Secara sederhana inflasi diartikan sebagai kenaikan harga secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas (atau mengakibatkan kenaikan harga) pada barang lainnya. Kebalikan dari inflasi disebut deflasi. Inflasi di Kabupaten Banggai Kepulauan diukur berdasarkan inflasi yang dikeluarkan Kota Luwuk yang dihitung menurut kelompok pengeluaran, ditahun-tahun sebelumnya inflasi diukur berdasarkan inflasi yang dikeluarkan oleh Kota Palu. Laju Inflasi Kota Luwuk dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.15
Tingkat Inflasi Kota Luwuk Menurut Kelompok Pengeluaran
Tahun 2021

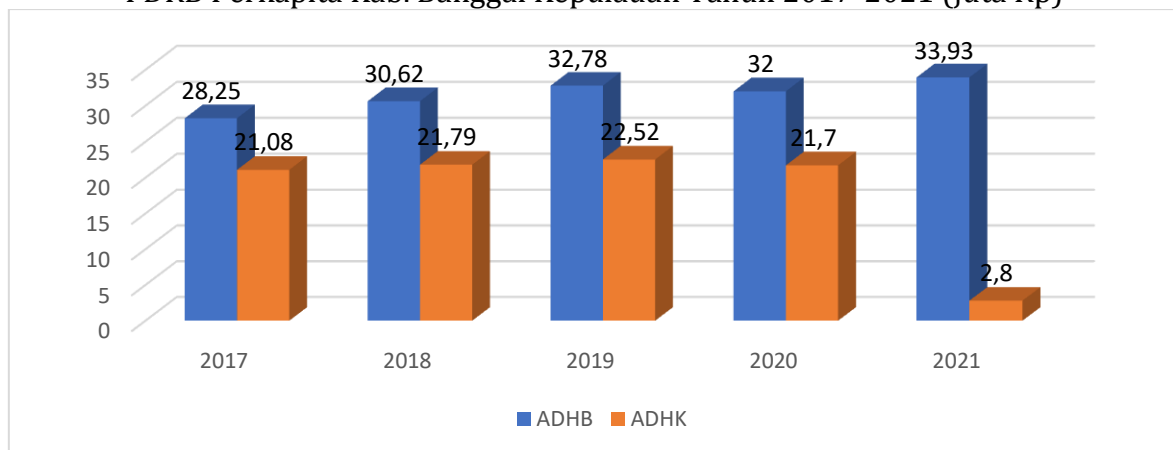
No	Kelompok/Sub Kelompok	Tingkat Inflasi	
		2020	2021
Indeks Umum/ <i>General Index</i>		- 0,26	0,84
1	Makanan, Minuman dan Tembakau	- 0,42	1,78
2	Pakaian dan Alas Kaki	0,00	-0,25
3	Perumahan, Air, Listrik dan Bahan Bakar Rumah Tangga	0,00	0,54
4	Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	0,00	0,30
5	Kesehatan	0,00	0,24
6	Transportasi	- 0,81	-1,80
7	Informasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan	0,00	-0,71
8	Rekreasi, Olahraga dan Budaya	0,00	1,14
9	Pendidikan	0,00	0,03
10	Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	0,00	0,32
11	Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	- 0,36	-0,01

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tengah, 2022

2.2.1.3 PDRB Perkapita

PDRB per kapita merupakan gambaran pendapatan yang diterima oleh masing-masing penduduk sebagai keikutsertaannya dalam proses produksi, besaran PDRB perkapita diperoleh dari output yang dihasilkan pada tahun tertentu dibagi jumlah penduduk pada tahun tersebut. Semakin besar angka PDRB per kapita, semakin sejahtera penduduk wilayah tersebut. Variabel lain juga dapat dipakai untuk mengetahui tingkat kesejahteraan umum masyarakat adalah perkembangan nilai pengeluaran perkapita disesuaikan yang dipakai dalam perhitungan Indeks Pembangunan Manusia.

Grafik 2.10
PDRB Perkapita Kab. Banggai Kepulauan Tahun 2017-2021 (juta Rp)

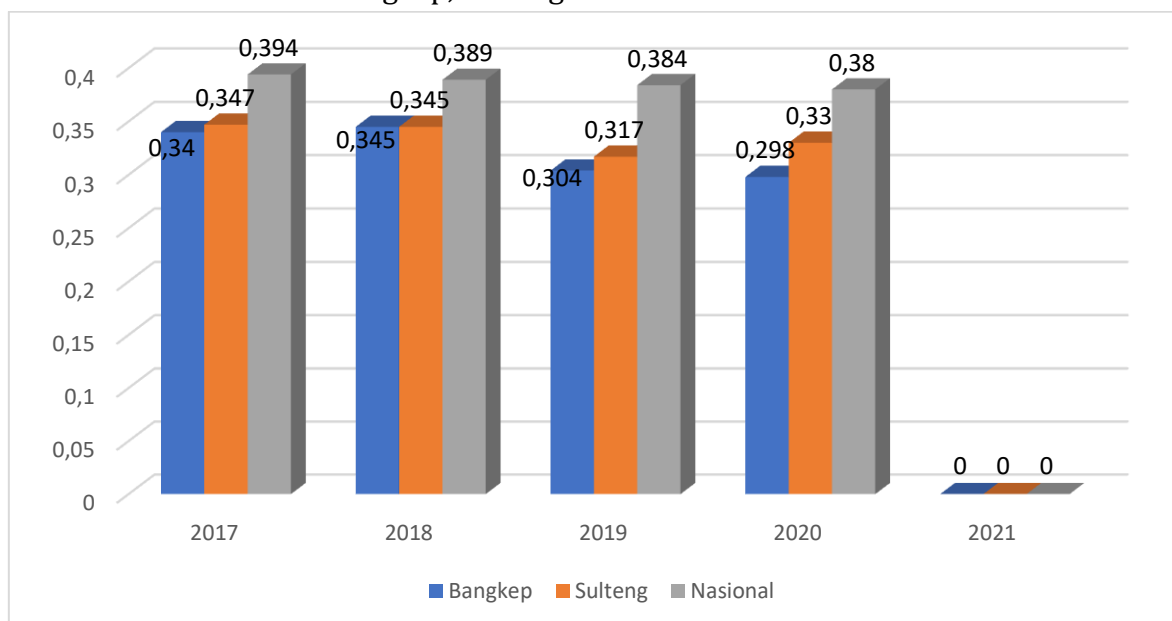


Sumber: BPS Kab. Banggai Kepulauan, 2022

2.2.1.4 Ketimpangan

Rasio Gini atau koefisien Gini adalah salah satu indikator untuk mengetahui distribusi dan ketimpangan pendapatan penduduk. Rasio Gini memiliki kisaran 0 sampai 1. Nilai 0 menunjukkan distribusi yang sangat merata yaitu setiap orang memiliki jumlah penghasilan atau kekayaan yang sama persis. Nilai 1 menunjukkan tidak merata sempurna yaitu satu orang memiliki segalanya dan orang lain tidak memiliki apa-apa.

Grafik 2.11
Rasio Gini Bangkep, Sulteng dan Nasional Tahun 2017-2021



Sumber: BPS Kabupaten Banggai Kepulauan, 2022

Selama periode tahun 2016-2021 rasio gini di Kabupaten Banggai Kepulauan menunjukkan tingkat pemerataan pendapatan dan kekayaan dalam kondisi sedang, pada tahun 2016 indeks gini Kabupaten Banggai Kepulauan sebesar 0,302 meningkat menjadi 0,340 pada tahun 2017 dan 0,345 pada tahun 2018, kemudian pada tahun 2019 turun menjadi 0,304 dan di tahun 2020 menjadi 0,298 masih lebih rendah di bandingkan dengan provinsi maupun nasional. Dan di tahun 2021 rasio gini Kabupaten Banggai Kepulauan sebesar 0,279.

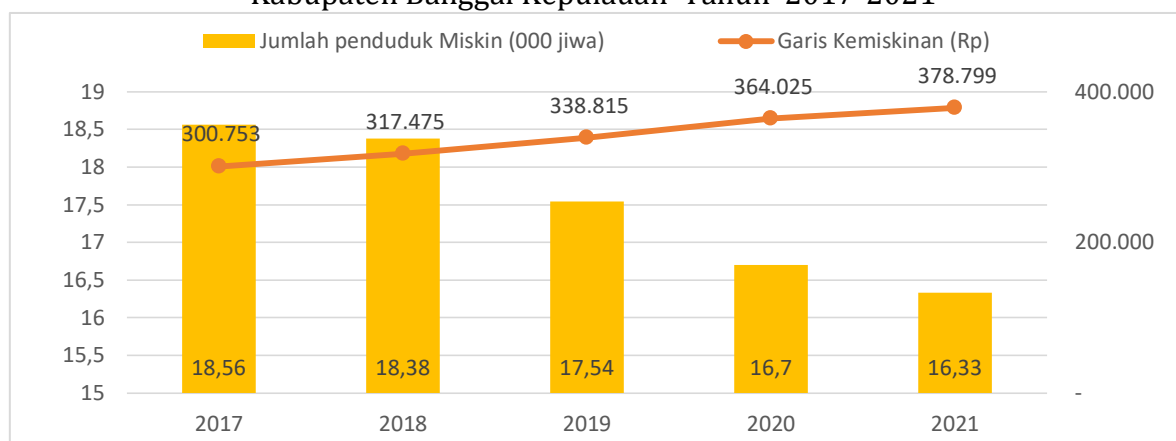
2.2.1.5 Kemiskinan

Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan

dan kesehatan. Kemiskinan merupakan permasalahan kompleks dan krusial dalam pembangunan di suatu wilayah.

Dalam menentukan penduduk kategori miskin, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Angka kemiskinan merupakan indikator makro untuk melihat sejauh mana tingkat kesejahteraan masyarakat dalam suatu daerah. Garis kemiskinan merupakan penjumlahan dari garis kemiskinan makanan dan garis kemiskinan non makanan. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin.

Grafik 2.12
Jumlah Penduduk miskin dan Garis kemiskinan
Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017-2021

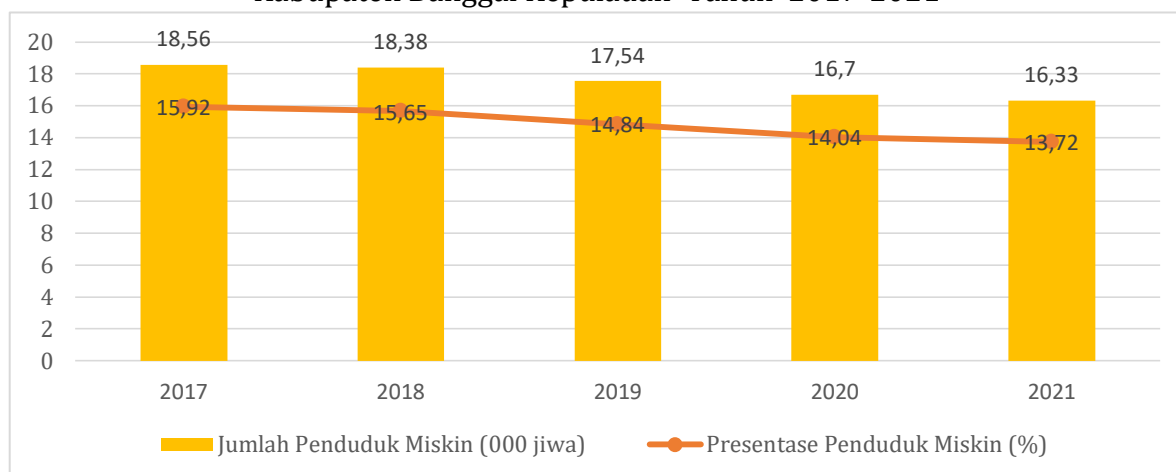


Sumber: BPS Kabupaten Banggai Kepulauan, 2022

Selama periode 5 tahun (2017-2021), persentase kemiskinan di Kabupaten Banggai Kepulauan mengalami penurunan sekitar 2%. Tingkat kemiskinan selama tahun 2017-2021 menunjukkan trend penurunan dari 15,92% pada tahun 2017 menjadi 13,72% pada tahun 2021. Pada tahun 2020 walau terjadi pandemi Covid-19 persentase tidak mengalami kenaikan dan cenderung turun dari 14,84% di tahun 2019 menjadi 14,04% di tahun 2020.

Grafik 2.13

Jumlah Penduduk miskin dan Persentase Penduduk Miskin
Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017-2021

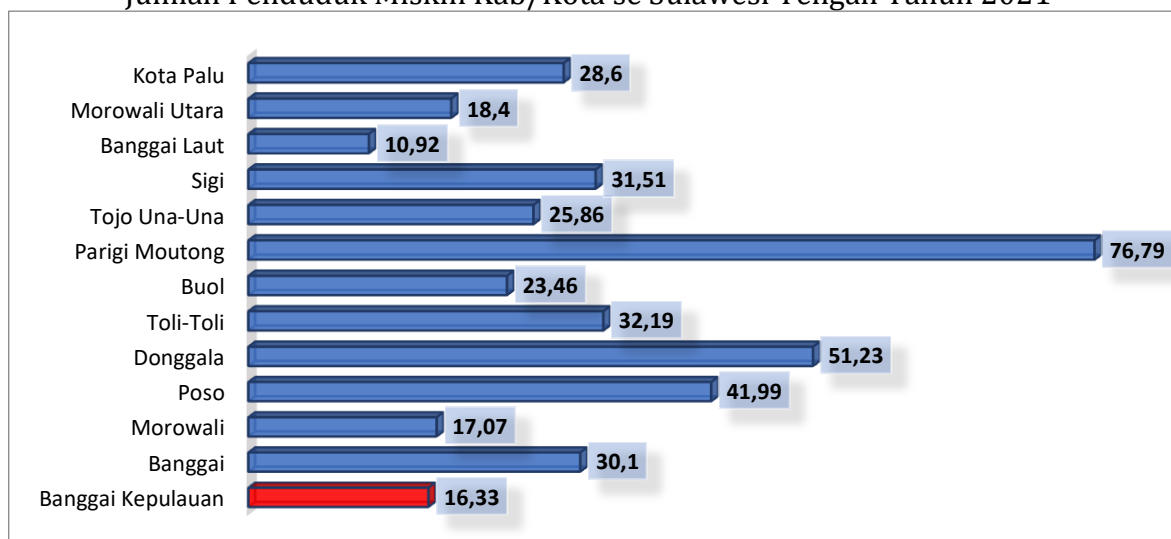


Sumber: BPS Kabupaten Banggai Kepulauan, 2022

Kabupaten Banggai Kepulauan berada pada peringkat terendah kedua se-Provinsi Sulawesi Tengah yaitu sebesar 16,33% dibawah Kabupaten Banggai Laut yaitu sebesar 10,92%. Angka kemiskinan tertinggi berada di Kabupaten Parigi Moutong sebesar 76,79%.

Grafik 2.14

Jumlah Penduduk Miskin Kab/Kota se Sulawesi Tengah Tahun 2021

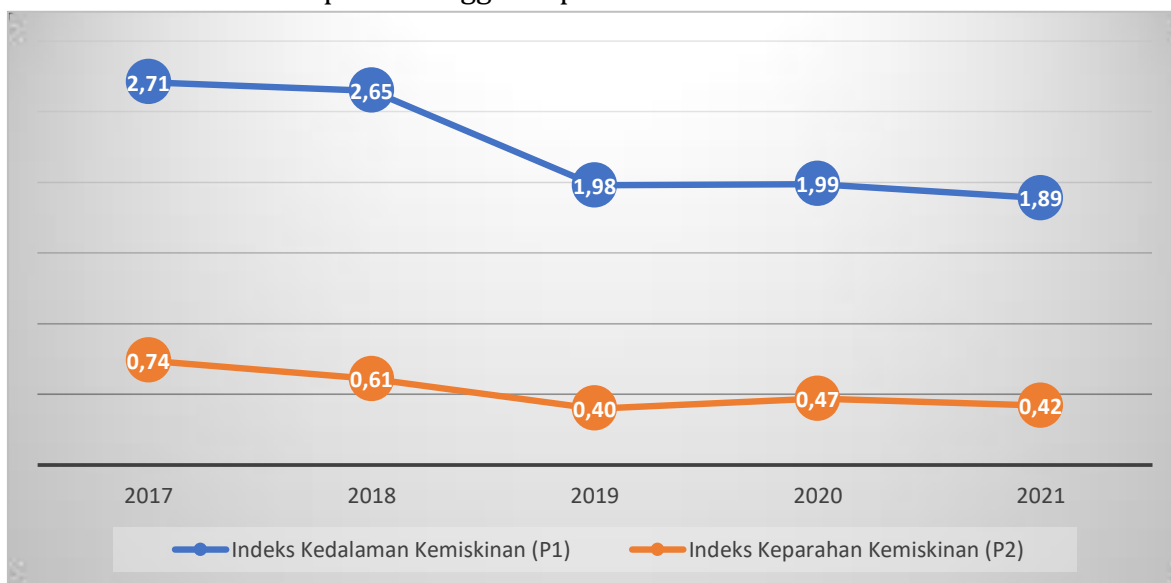


Sumber: BPS Kabupaten Banggai Kepulauan, 2022

Kemiskinan bukan hanya masalah jumlah jiwa atau proporsi penduduk miskin (P0) tetapi juga menyangkut kedalaman kemiskinan (P1) dan keparahan kemiskinan (P2). Indeks Kedalaman (P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, dimana semakin tinggi nilai P1, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan disuatu daerah. Nilai Indeks Keparahannya (P2) memberikan gambaran mengenai

penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin di wilayah tersebut.

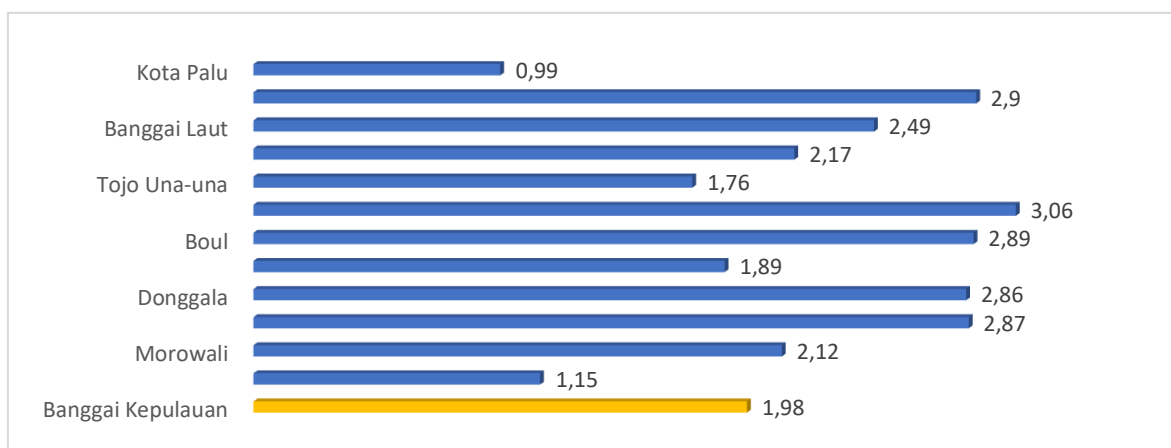
Grafik 2.15
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)
Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017-2021



Sumber: BPS Kabupaten Banggai Kepulauan, 2022

Jika dibandingkan Indeks Kedalaman (P1) dan Indeks Keparahan (P2) di 13 (tiga belas) Kabupaten Kota se-Sulawesi Tengah Tahun 2019 Kabupaten Banggai berada di peringkat ke 2 (dua) setelah kota Palu dengan Indeks Kedalaman (P1) sebesar 0,99 dan Indeks Keparahan (P2) sebesar 0,22. Lebih rinci dapat di lihat pada gambar berikut :

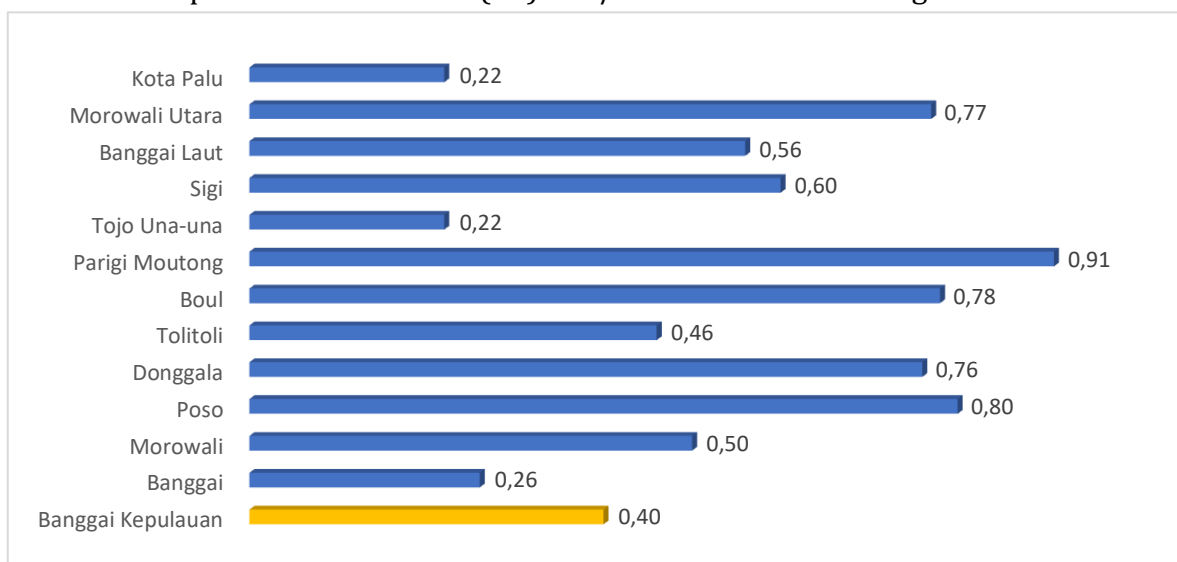
Grafik 2.16
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kab/ Kota Se Sulawesi Tengah Tahun 2019



Sumber: BPS Kabupaten Banggai Kepulauan, 2021

Grafik 2.17

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kab/ Kota Se Sulawesi Tengah Tahun 2019

*Sumber: BPS Kabupaten Banggai Kepulauan, 2021*

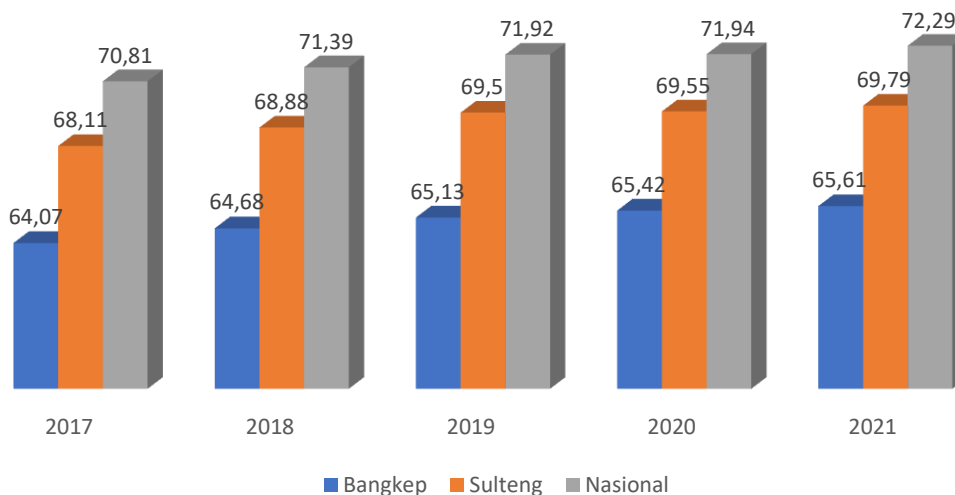
2.2.1.6 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia atau Human Development Index (HDI) merupakan indeks pembangunan manusia yang dipergunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan kualitas hidup manusia, dalam hal ini berarti kualitas hidup masyarakat/penduduk yang disajikan sebagai salah satu ukuran kinerja di masing-masing daerah. Ukuran pencapaian keberhasilan suatu daerah dilihat melalui 3 dimensi dasar pembangunan yaitu (1) lamanya hidup, (2) pengetahuan/tingkat pendidikan dan (3) Stándar hidup layak. Indikator yang mewakili ketiga dimensi tersebut yaitu Angka Harapan Hidup (AHH) untuk mengukur peluang hidup, Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata lama sekolah (RLS) untuk mengukur status tingkat pendidikan, serta pengeluaran riil per kapita disesuaikan untuk mengukur kualitas pembangunan manusia dari dimensi pemenuhan stándar hidup layak.

Berdasarkan data BPS, IPM Kabupaten Banggai Kepulauan selama periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 terus mengalami tren peningkatan, pada tahun 2017 capaian IPM Kabupaten Banggai Kepulauan sebesar 64,07 terus meningkat samapai dengan tahun 2021 menjadi sebesar 65,61 atau meningkat sebesar 1,54 poin. Meskipun demikian, IPM Kabupaten Banggai Kepulauan masih lebih rendah jika dibandingkan dengan IPM Provinsi Sulawesi Tengah maupun IPM Nasional.

Grafik 2.18

Perkembangan IPM Bangkep, Sulteng dan Nasional Tahun 2017-2021

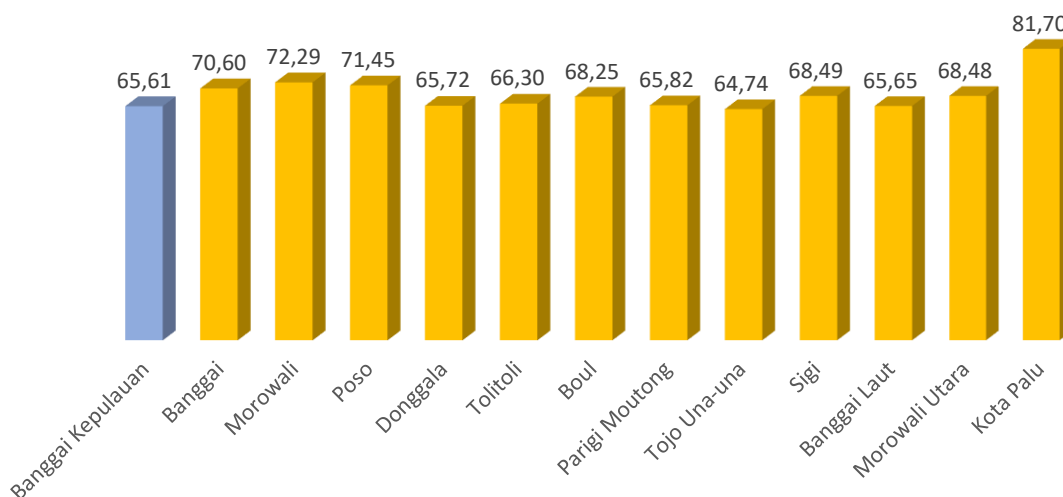


Sumber: BPS Sulteng, 2022

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2021 IPM dari 13 (tiga belas) Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah IPM tertinggi dicapai oleh Kota Palu sebesar 81,70 sebaliknya IPM terendah dicapai oleh Kabupaten Tojo Una-Una sebesar 64,74 sedangkan capaian IPM Kabupaten Banggai Kepulauan terendah ke 2 (dua) sebesar 65,61, secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut.

Grafik 2.19

Perbandingan IPM Kab/kota se- Sulawesi Tengah Tahun 2021



Sumber: BPS Sulteng, 2022

Indikator pembentuk IPM Kabupaten Banggai Kepulauan, meliputi usia harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah dan pengeluaran perkapita yang disesuaikan. Pencapaian indikator tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.16

Perkembangan Indikator Pembentuk IPM Kabupaten Banggai Kepulauan
Tahun 2017-2021

Tahun	Angka Harapan Hidup (Tahun)	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	Rata- rata Lama Sekolah (Tahun)	Pengeluaran Perkapita (Juta Rupiah)
2017	64,53	13,034	7,99	7,44
2018	65,12	13,04	8,14	7,55
2019	65,71	13,05	8,19	7,62
2020	66,31	13,06	8,43	7,43
2021	66,59	13,07	8,44	7,45

Sumber: BPS Kabupaten Banggai Kepulauan, 2022

2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

Untuk mengetahui perkembangan tingkat kesejahteraan sosial di Kabupaten Banggai Kepulauan, di lakukan analisis terhadap beberapa indikator yang digunakan untuk mengukurnya yaitu Angka Harapan Lama Sekolah, Angka rata-rata lama sekolah, Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Kematian Bayi, Angka Kematian Ibu, dan Angka Usia Harapan Hidup.

2.2.2.1 Angka Harapan Lama Sekolah

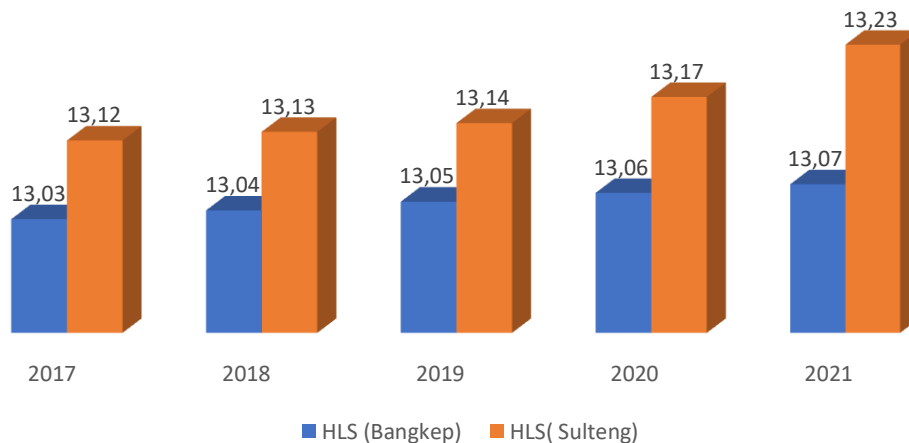
Angka Harapan Lama Sekolah merupakan indikator kinerja daerah dalam bidang pendidikan. Angka Harapan Lama Sekolah digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan bidang pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

Gambar 2.40 menunjukkan bahwa Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Banggai Kepulauan pada tahun 2021 sebesar 13,07 tahun. Apabila dibandingkan dengan Provinsi Sulawesi Tengah, Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Banggai Kepulauan masih dibawah Provinsi Sulawesi Tengah (13,23). Capaian tersebut dapat diartikan bahwa lamanya sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada

umur tertentu (tujuh tahun ke atas) di masa mendatang adalah selama 13,07 tahun atau setara dengan mengenyam pendidikan sampai perguruan tinggi jenjang Diploma I.

Grafik 2.20

Perkembangan Angka Harapan Hidup Kab. Bangkep dan Prov Sulteng Tahun 2017-2021



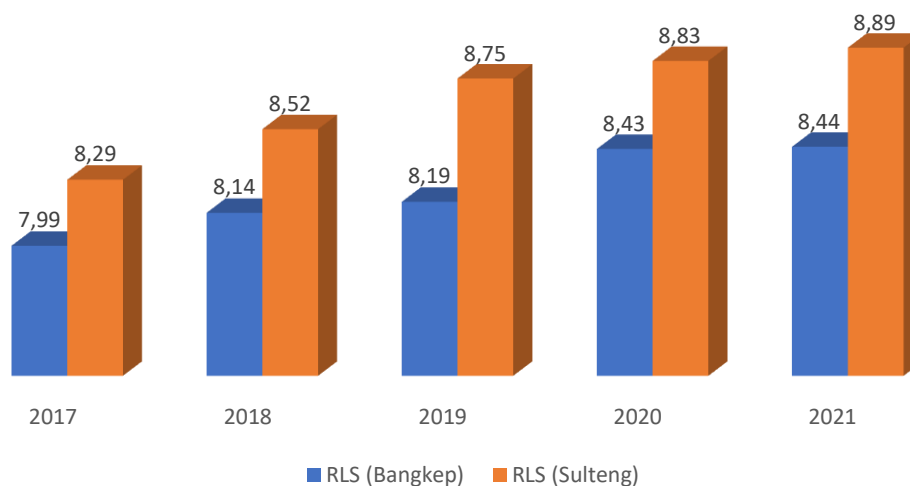
Sumber: BPS Kab. Banggai Kepulauan, 2022

2.2.2.2 Rata-rata Lama Sekolah

Angka rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Banggai Kepulauan terus mengalami peningkatan, dari 7,99 tahun pada tahun 2017 menjadi 8,44 pada tahun 2021. Hal ini menunjukkan minat penduduk usia 15 tahun ke atas untuk menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi semakin meningkat, meskipun angka ini menunjukkan bahwa rata-rata penduduk di Kabupaten Banggai Kepulauan bersekolah hanya setingkat SLTP. Untuk itu, program wajib belajar sembilan tahun perlu ditingkatkan. Secara lebih rinci perkembangan rata-rata lama sekolah Kabupaten Banggai Kepulauan dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 dapat dilihat pada gambar berikut.

Grafik 2.21

Angka Rata-rata lama sekolah Kabupaten Banggai Kepulauan
Tahun 2017-2021

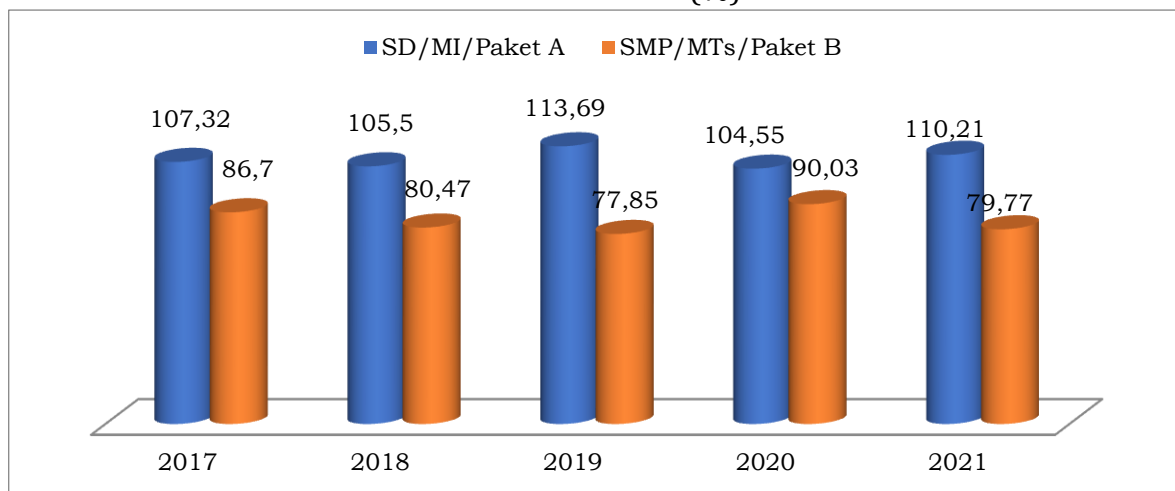


Sumber: BPS Kab. Banggai Kepulauan, 2022

2.2.2.3 Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) berguna untuk melihat partisipasi penduduk yang sedang mengenyam pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya. APK merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan (berapapun usianya) terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. APK digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. Nilai APK suatu jenjang pendidikan bisa lebih dari 100 % karena masih terdapat siswa yang berusia di luar batasan usia sekolah baik yang lebih tua maupun yang lebih muda.

Grafik 2.22
Angka Partisipasi Kasar Kabupaten Banggai Kepulauan
Tahun 2017-2021 (%)



Sumber: BPS Kab. Banggai Kepulauan, 2022

Pada jenjang pendidikan SD/MI/Paket A seperti dapat dilihat pada grafik II.12 diatas, angka partisipasi kasar masih cukup tinggi meski mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Nilainya masih melebihi 100%, sementara pada jenjang pendidikan SMP/MTS mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya dari 77,85% meningkat menjadi 90,03% ditahun 2020. Seiring dengan meningkatnya angka partisipasi kasar pada jenjang selanjutnya yaitu SMA/SMK/MA.

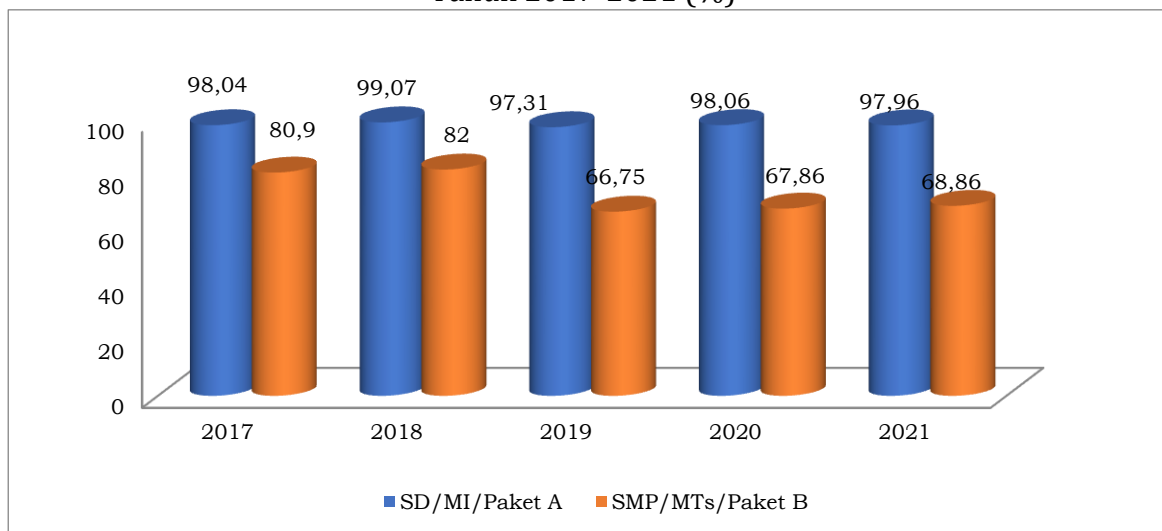
2.2.2.4 Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan persentase jumlah anak pada kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan. Bila APK digunakan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan disuatu jenjang pendidikan tertentu tanpa melihat berapa usianya, maka APM mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat waktu.

Bila seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu, maka APM akan mencapai nilai 100, Secara umum, nilai APM akan selalu lebih rendah dari APK karena nilai APK mencakup anak di luar usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan.

Grafik 2.23

Angka Partisipasi Murni Kabupaten Banggai Kepulauan
Tahun 2017-2021 (%)



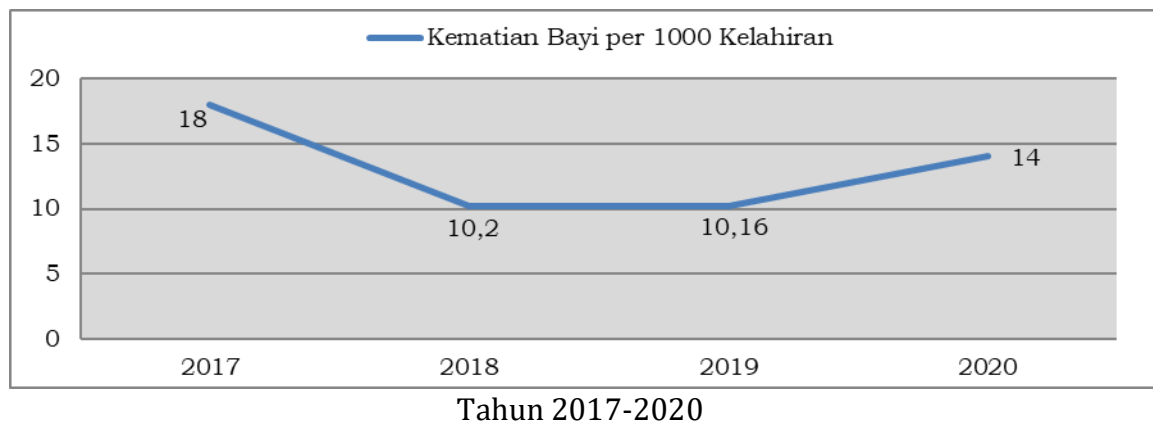
Sumber: BPS Kab. Banggai Kepulauan, 2022

Angka partisipasi murni pada Kabupaten Banggai Kepulauan dijenjang pendidikan SD cenderung naik dengan nilai 98,06% ditahun 2020. Angka Partisipasi Murni Tertinggi pada jenjang Pendidikan SD terjadi pada tahun 2018 dengan nilai 99,07%. Pada jenjang pendidikan SMP/MTs ini, tahun 2017 ke tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 1,1% kemudian mengalami penurunan pada tahun 2019 menjadi 66,75% dan ditahun 2020 mengalami kenaikan sedikit sebesar 67,86% hal ini dipengaruhi pertumbuhan ekonomi serta adanya wabah pandemic Covid-19.

2.2.2.5 Angka Kematian Bayi

Indikator ini dapat menunjukkan dimensi sosial dan kesehatan masyarakat dengan bertitik tolak pada pandangan bahwa penduduk yang rentan terhadap perubahan sosial ekonomi dan kualitas lingkungan adalah mereka yang berumur kurang dari satu tahun. Kualitas kehidupan bayi sangat tergantung dari kondisi sosial ekonomi orang tua atau orang yang mengasuh, dengan kecenderungan bahwa semakin baik kondisi sosial dan ekonomi orang tua, makin besar pula peluang seorang bayi memperoleh kualitas hidup lebih baik serta berumur panjang.

Grafik 2.24
Angka Kematian Bayi Kabupaten Banggai Kepulauan



Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Bangkep, 2021

Dari grafik diatas terlihat bahwa sejak tahun 2017 hingga tahun 2019 sempat terjadi penurunan angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup. Namun pada tahun 2020 terjadi peningkatan kembali angka kematian bayi dari 10,16 menjadi 14. Dapat dikatakan bahwa penurunan kondisi perekonomian kabupaten banggai kepulauan dan dampak dari terjadinya pandemi sedikit banyak berpengaruh terhadap angka kematian bayi per kelahiran hidup ini. Seperti diketahui secara umum bahwa tahun 2020 memang cukup berat baik secara social maupun secara ekonomi. Penurunan indikator ekonomi yang terjadi cukup signifikan terjadi pada tahun 2020. Kondisi ini menjadi salah satu penyebab dari meningkatnya kembali angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup di tahun 2020.

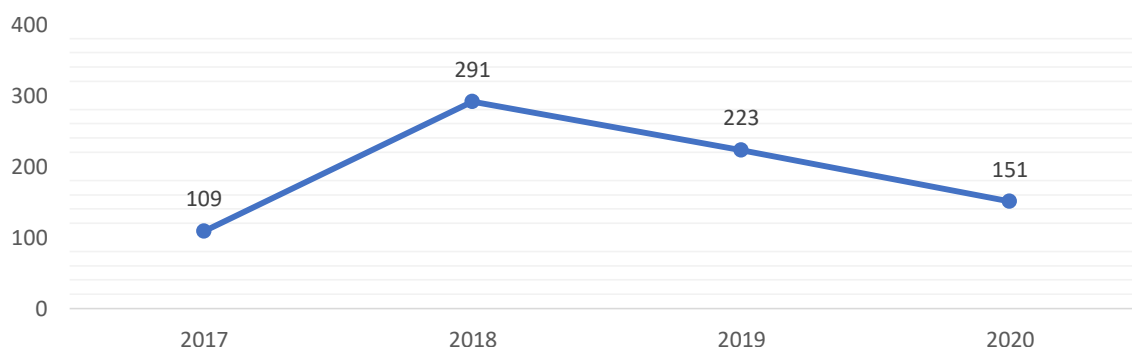
2.2.2.6 Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka kematian ibu adalah kematian perempuan yang terjadi saat kehamilan atau dalam 42 hari pasca melahirkan. Kematian ibu menjadi salah satu indikator SDGs atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yaitu mengurangi angka kematian ibu hingga 70 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2030.

Grafik 2.25

Angka Kematian Ibu Kabupaten Banggai Kepulauan
Tahun 2017-2020

Angka Kematian Ibu per 100.000 KH



Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Bangkep, 2021

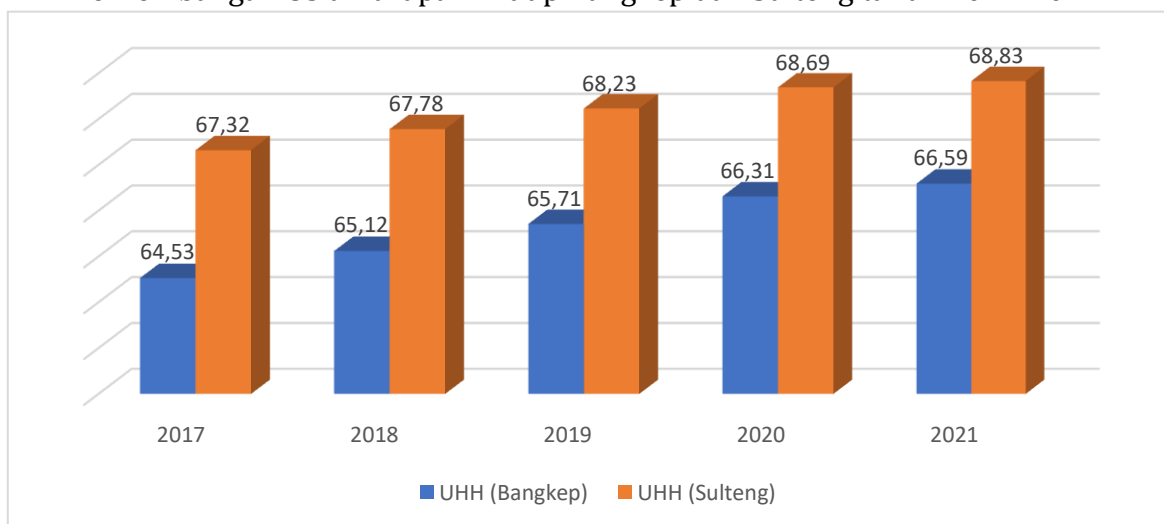
Angka Kematian Ibu (AKI) di Banggai Kepulauan mengalami tren yang menurun sejak tahun 2018 hingga 2020. Jumlah angka tersebut masih jauh dari target indikator TPB yaitu 70 per 100.000 kelahiran hidup.

2.2.2.7 Usia Harapan Hidup

Umur Harapan Hidup Kabupaten Banggai Kepulauan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Gambar berikut menunjukkan UHH Kabupaten Banggai Kepulauan pada tahun 2021 yaitu 66,59 tahun meningkat dari tahun 2020 sebesar 66,31 tahun. Peningkatan UHH ini dipengaruhi oleh multifactor antara lain Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi, Prevalensi Balita Gizi Buruk, Prevalensi HIV /AIDS, dan Angka Kesakitan (Incidence Rate/ IR) DBD.

Grafik 2.26

Perkembangan Usia Harapan Hidup Bangkep dan Sulteng tahun 2017-2021



Sumber: BPS Kab. Banggai Kepulauan, 2022

Penyakit Tidak Menular (PTM) juga mempengaruhi pencapaian indikator UHH. Kelompok Penyakit Tidak Menular (PTM), seperti stroke, Diabetes Mellitus, kanker, hipertensi merupakan kelompok penyakit penyebab kematian terbanyak di Indonesia, dengan kecenderungan meningkat. Peningkatan PTM jelas berdampak negatif pada produktivitas masyarakat. Di sisi lain, penyakit menular masih merupakan masalah kesehatan. Kondisi morbiditas dan mortalitas PTM makin meningkat disertai dengan masih banyaknya penyakit menular di masyarakat, akan menjadikan beban ganda dalam pelayanan kesehatan sekaligus tantangan yang harus dihadapi dalam pembangunan bidang kesehatan di Indonesia. Untuk itu penanganan penyakit menular dan tidak menular harus dilakukan secara komprehensif dan sistematis.

Data penyakit menular dan tidak menular di Kabupaten Banggai Kepulauan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.17

Data Penyakit Menular dan Tidak Menular di Kabupaten Banggai Kepulauan
Tahun 2017-2021

No	Angka Kesakitan	Jumlah Kasus				
		2017	2018	2019	2020	2021*
A	Penyakit Menular					
	1. Tuberkulosis (TB) BTA Positif	69	152	91	149	145
	2. HIV/ IMS	0	11	15	18	14
	3. Malaria	26	0	0	13	1
	4. Filariasis	1	0	0	0	0
	5. Demam Berdarah Dengue (DBD)	3	31	50	7	3
	6. Kusta	10	10	10	4	11
	7. Diare	1505	1141	1309	1292	773
	8. Hepatitis B	0	0	12	45	50
	9. ISPA (Pneumonil)	214	78	117	53	67
	10. rabies	77	100	71	97	64
B	Penyakit Tidak Menular					
	1. Diabetes	528	623	720	902	1452
	2. Hypertensi	1021	1608	1352	1570	4907
	3. Gangguan Jiwa	180	251	260	265	270
	4. Gangguan Penglihatan	-	-	201	286	382
	5. Gangguan Pendengaran	-	-	1021	1086	2434

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Banggai Kepulauan, 2022

2.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Fokus seni budaya dan olahraga menjabarkan tentang indikator-indikator yang berkaitan dengan kondisi seni budaya dan olahraga di Kabupaten Banggai Kepulauan. Beberapa data yang di analisis meliputi persentase cagar budaya yang dilestarikan, kegiatan seni budaya yang diselenggarakan, berbagai sarana seni budaya yang tersedia, prestasi olahraga, klub olahraga, dan sarana olahraga yang ada di Kabupaten Banggai Kepulauan.

2.2.3.1 Seni Budaya

Pembangunan bidang seni budaya dan olahraga sangat terkait erat dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat. Seni serta budaya merupakan dua hal yang saling berkaitan, setiap seni harus mengandung kebudayaan yang khas dan setiap kebudayaan pasti memiliki nilai seni yang indah.

2.2.3.2 Olahraga

Olahraga merupakan aspek pembangunan sumber daya manusia sekaligus sebagai sarana untuk menguatkan karakter dan kepemimpinan pemuda dalam meningkatkan prestasi olahraga. Pembinaan dibidang olahraga dilakukan dengan mengidentifikasi potensi dan bakat diberbagai cabang olahraga serta menyediakan fasilitas pendukung seperti tenaga pelatih, sarana prasarana dan teknologi.

Tabel 2.18
Perkembangan capaian Bidang Olahraga tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Peringkat PORDA tingka provinsi					
2.	Jumlah klub olahraga					
3.	Jumlah lapangan olahraga					

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Banggai Kepulauan Tahun 2022

2.3 Aspek Pelayanan Umum

Kinerja pembangunan pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan pada aspek pelayanan umum merupakan gambaran dan hasil pelaksanaan pembangunan selama periode 5 tahun terakhir (2017-2021) pada kondisi pelayanan umum yang mencakup fokus layanan urusan wajib dan fokus layanan urusan pilihan. Indikator kinerja pelaksanaan pembangunan pada aspek pelayanan umum selama periode 2017-2021 disampaikan berikut ini.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada pasal 11 disebutkan bahwa urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib terdiri atas urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

2.3.1 Fokus Layanan Urusan Pemerintah Wajib Pelayanan Dasar

2.3.1.1 Urusan Pendidikan

Pembangunan di bidang pendidikan bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Partisipasi seluruh masyarakat dalam dunia pendidikan sangat diharapkan, hal ini berkaitan dengan berbagai program pendidikan yang dicanangkan pemerintah. Peningkatan partisipasi masyarakat di bidang pendidikan tentunya harus diikuti dengan berbagai peningkatan penyediaan sarana fisik pendidikan dan tenaga pendidik yang memadai. Pendidikan di Kabupaten Banggai Kepulauan menjadi prioritas pembangunan yang dicanangkan oleh pemerintah Daerah, demi mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki daya saing. Tabel berikut ini memberikan gambaran capaian pembangunan bidang pendidikan, yang akan terus ditingkatkan kualitasnya.

Hasil rekapitulasi penyelenggaraan urusan pendidikan di Kabupaten Banggai Kepulauan selama tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.19
Capaian Indikator Kinerja Urusan Pendidikan di Kabupaten Banggai Kepulauan
Tahun 2017-2020

No	Indikator	Tahun			
		2017	2018	2019	2020
1	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik (Persen)	74%	82%	106,40%	101,43%
2	Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik (Persen)	90%	93%	88,68%	96,36%
3	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar (Rasio)	01:07	01:06	33,46%	33%
4	Rasio Ketersediaan Sekolah terhadap Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar	-	-	67,35	60%
5	Rasio Ketersediaan Sekolah terhadap Penduduk Usia Sekolah Pendidikan SMP/MTS	01:06	01:06	73,20%	82,34%

No	Indikator	Tahun			
		2017	2018	2019	2020
	Kondisi Bangunan Baik				
6	Rasio Guru terhadap Murid Per Kelas Rata-Rata Sekolah Dasar	01:14	01:18	50,21%	92,61%
7	Rasio Guru terhadap Murid Per Kelas Rata-Rata	-	-	Terkait data SMA& sederajat bukan wewenang Kabupaten	70%
8	Rasio Guru terhadap Murid Sekolah Pendidikan Dasar	01:14	01:38	65,59%	73,15%
9	Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D4	74,1% (SD) 86,8% (SMP)	87% (SD) 92,9% (SMP)	102,73%	100%
10	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	98%	100%	297,55%	112,33%
11	Proporsi Murid Kelas Satu yang Berhasil Menamatkan Sekolah Dasar (Persen)	97%	98%	102,73	
12	Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15 - 24 Tahun (Perempuan dan Laki-Laki) (Persen)	-	-	-	-
13	Penduduk yang Berusia di atas 15 Tahun Melek Huruf (Tidak Buta Aksara)	0,79%	0,80%	-	95,48%
14	Angka Pendidikan yang di Tamatkan	100%	100%	100%	
15	Angka Partisipasi Kasar (APK)	112,6% (SD) 110,6% (SMP)	114,2% (SD) 112,5% (SMP)	89,02% (SD/MI/Paket A) 115,87% (SMP/MTs/Paket B)	94,48%(SD/MI/Paket A) 113,65%(SMP/MTs/Paket B)
16	Angka Partisipasi Murni (APM SD/MI/Paket A)	98,4%	99,7%	87,06%	88,26%
17	Angka Partisipasi Murni (APM SMPD/MTS/Paket B)	80,9%	82%	106,96%	99,65%
18	Angka Partisipasi Sekolah (APS SD/MI/Paket A)	97%	98%	87,3%	92,68%
19	Angka Partisipasi Sekolah (APS SMP/MTS/Paket B)	96%	98%	90,43%	97,38%
20	Angka Putus Sekolah APS SD/MI)	0,20%	0,10%	0,04%	0,02%
21	Angka Putus Sekolah APS SMP/MTS)	0,20%	0,10%	0,19%	0,10%

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021

2.3.1.1 Urusan Kesehatan

Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang tinggi. Perkembangan pada urusan kesehatan selama periode 2016-2020 dapat dilihat pada tabel 2.24.

Tabel 2.20

Capaian Indikator Kinerja Urusan Kesehatan di Kabupaten Banggai Kepulauan
Tahun 2016-2020

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Angka Kematian Bayi Per 1000 Kelahiran Hidup	18	18	10,2	10,16	14
2	Angka Kelangsungan Hidup Bayi	982.36	982	978	990	990
3	Angka Kematian Balita Per 1000 Kelahiran Hidup	18	20	10,7	2,8	2
4	Angka Kematian Neo Natal Per 100 Kelahiran Hidup	-	9.2	9.5	8,3	10
5	Angka Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup	263	109	291	223	151
6	Rasio Posyando Per Satuan Balita	14.44	18.39	19.34	1,5	1,5
7	Rasio Puskesmas Poliklinik Pustu Persatuan Penduduk	0.5	0.49	0.49	0.48	0,48
8	Rasio Rumah Sakit Persatuan Penduduk	0.008	0.008	0.0017	0,002	0,002
9	Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani	52.9	30.35	29	12	146
10	Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan	71.96	70.27	100	86,3	1.861
11	Cakupan Desa/Kelurahan Imunisasi	80.56	86.81	81.94	90,3	-
12	Cakupan Balita Gizi Buruk yang Mendapat Perawatan	100	100	100	100	100
13	Proporsi Penduduk dengan Asupan Kalori di Bawah Tingkat Konsumsi Minimum (2100 KKL Per Kapita Perhari)	-	-	-	-	-
14	Persentase Anak Usia 1 Tahun yang di Imunisasi Campak	-	9.2	9.5	104,4	-
15	Non Polio AFP Rate Per 100.000 Penduduk	89.07	92.7	90.16	-	-
16	Cakupan Balita Pneumonia yang Ditangani	-	-	71,7	85,8	-
17	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penyakit TBC dan BTA	-	-	73,7	79,5	120
18	Tingkat Prelensi TBC (Per 100.000 Penduduk)	87.84	137.83	208.27	128.38	-
19	Tingkat Kematian karena TBC (Per 100.000 Penduduk)	0.87	0.86	4.3	6,1	-
20	Proporsi Jumlah Kasus TBC yang Diobati dan Sembuh dalam Program DOTS	100	100	100	100	-
21	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD	100	100	100	100	-
22	Penderita Diare yang Ditangani	-	-	35,9	100	-

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
23	Angka Kejadian Malaria (Per 100.000 Penduduk)	2.7	0.21	0	0	-
24	Tingkat Kematian Akibat Malaria (Per 000 Penduduk)	-	-	0	0	-
25	Prevalensi HIV AIDS (% dari total Populasi)	0.22	0.27	0.60	0.27	-
26	Penggunaan Kondom pada Hubungan Seks Beresiko Tinggi Terakhir	-	-	-	4,9	-
27	Proporsi Jumlah Penduduk Usia 15-24 Tahun yang Memiliki Pengetahuan Komprehensif Tentang HIV-AIDS	-	-	-	-	-
28	Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukkan Pasien Masyarakat Miskin	-	-	-	-	-
29	Cakupan Kunjungan Bayi Memperoleh Pelayanan Kesehatan Standar	-	-	61.2	101,80	-
30	Cakupan Puskesmas Per Kecamatan	108.33	108.33	108.33	108,33	-
31	Cakupan Pembantu Puskesmas Per Desa	31.25	31.25	31.25	31,25	-
32	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4	-	70.27	79.7	84,7	73
33	Cakupan Pelayanan NIFAS	-	-	100	107,6	-
34	Cakupan Neo Natus yang Ditangani	27.79	71.82	85.05	78,07	-
35	Persentase Penderita Hipertensi Mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100	100	100	100	-
36	Persentase Penyandang Diabetes Melitus (DM) yang Mendapat Pelayanan Sesuai Standar	100	100	100	100	-
37	Persentase Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Jiwa Sesuai Standar	-	3	22	37,5	-
38	Cakupan Pelayanan Anak Balita	100	100	26.69	76,6	-
39	Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI pada Anak Usia 6 - 24 Bulan Keluarga Miskin	-	-	-	-	-
40	Cakupan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin	-	-	-	-	-
41	Rasio Dokter Persatuan Penduduk	17	23.97	9.4	32	-
42	Rasio Tenaga Medis Persatuan Penduduk	-	-	-	-	-
43	Rasio keperawatan per 100000 penduduk	203.67	261.96	262.7	385,9	-
44	Rasio bidan per 100000 penduduk	144,21	197,76	217,6	397,8	-

Sumber: Dinas Kesehatan dan BPS Kab. Bangkep, 2021

2.3.1.2 Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kabupaten Banggai Kepulauan dilalui jalan jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan desa dan jalan lingkungan baik di kelurahan maupun desa. Panjang jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 600/437/2014 tentang Penetapan Status Ruas Jalan sebagai Jalan Kabupaten dan Jalan Desa di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan yakni 896,47 km. Sementara jalan provinsi di wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan memiliki panjang 115,1 km.

Pada urusan tata ruang, capaian Kinerja Urusan Penataan Ruang selain tersediannya dokumen perencanaan tata ruang yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016-2036, juga dilihat dari tersusunnya rencana rinci berupa RDTR kota Salakan. Rasio ruang terbuka hijau persatuan luas wilayah ber HPL/HGB Kabupaten Banggai Kepulauan sebesar 30 %. Sementara itu untuk kasus alih fungsi lahan yang tidak sesuai dengan peruntukan di dalam RTRW juga masih terjadi di Kabupaten Banggai Kepulauan, secara rinci capaian urusan Pekerjaan Umum dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.21

Capaian Indikator Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017-2020

No	Indikator	Tahun			
		2017	2018	2019	2020
1	Proporsi Panjang Jalan Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik (Persen)	58,61	68,59	74,17	76,05
2	Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk	0,77	0,77	0,85	0,80
3	Persentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik (> 40 Km/Jam	58,61	68,59	74,17	76,05
4	Persentase Jalan yang Memiliki Trotoar dan Drainase / Saluran Pembuangan Air (Minimal 1,5 M)	0,96	1,00	1,11	1
5	Persentase Sepadan Jalan yang Dipakai Pedagang Kaki Lima atau Bangunan Rumah Liar	15	1	1	12
6	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi	46,94	70	75	80
7	Persentase Drainase dalam Kondisi Baik / Pembuangan Aliran air tidak Tersumbat	1,07	70	75	20

No	Indikator	Tahun			
		2017	2018	2019	2020
8	Persentase Penduduk Berakses Air Minum	36,74	80	85	82
9	Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik	60	75	80	70,40

Sumber: Badan Pusat Statistik dan Dinas PUPR Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021(data diolah) 2021

2.3.1.3 Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Dalam rangka pengentasan perumahan telah dilakukan penyediaan rumah layak huni dari dana APBN dan APBD. Harapannya ini adalah agar Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang belum mempunyai rumah, dapat memiliki rumah yang layak untuk ditinggali. Capaian indikator kinerja urusan perumahan dan kawasan permukiman Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2017-2020 dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.22
Capaian Indikator Kinerja Urusan Perumahan
di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017-2020

No	Indikator	Tahun			
		2017	2018	2019	2020
1	Rasio Pemukiman Layak Huni	5,13/9	6,3/9	6,48/9	6,65/9
2	Cakupan Ketertersediann Layanan Rumah Layak Huni	57	70	72	73,96
3	Persentase Pemukiman yang Tertata	28,02	75	80	75
4	Persentase Lingkungan Pemukiman Kumuh	2,29	2,29	2,29	2,29
5	Persentase Luasan Pemukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan	56	56	56	42
6	Proporsi Rumah Tangga Kumuh Perkotaan	67,1	67,1	67,1	67,1
7	Penyelesaian izin lokasi				100

Sumber: Badan Pusat Statistik dan Dinas Perumahan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 (data diolah)

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa setiap tahunnya terjadi peningkatan rasio pemukiman rumah tinggal layak huni. Begitu pula dengan cakupan layanan yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Dengan rasio pemukiman layak huni pada tahun 2017 sebesar 5,13/9 meningkat menjadi 6,63/9 pada tahun 2020. Begitu pula dengan cakupan layanan rumah tinggal layak huni yang meningkat dari 57 pada tahun 2017 menjadi 74 pada tahun 2020. Persentase pemukiman yang tertata juga terus mengalami peningkatan bahkan sangat signifikan dari 28,02 persen pada tahun 2017 menjadi 95,74 persen pada tahun 2020.

2.3.1.4 Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman, kondusif dan memperoleh perlindungan serta melaksanakan kegiatan. Urusan keamanan, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat merupakan urusan yang komprehensif meliputi berbagai elemen strategis yang memiliki dampak luas untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta iklim investasi daerah. Capaian indikator dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.23

Capaian Indikator Kinerja Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017-2020

No	Indikator	Tahun			
		2017	2018	2019	2020
1	Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat	87,05%	88,75%	89,38%	89%
2	Persentase Penegakkan PERDA	9,09%	9,09%	1,42%	83,33%
3	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman, dan Keindahan)	83,33%	83,33%	42%	42%
4	Cakupan patroli petugas Satpol PP	9%	113%	39%	
5	Jumlah Polisi Pamong Praja	111	220	220	220
6	Jumlah Linmas	1268	1278	1278	1276
7	Jumlah Pos Siskamling	226	228	228	228
8	Persentase Penanganan Bencana Alam Tuntas				100

Sumber: Badan Kesbangpol Kab. Banggai Kepulauan Tahun 2021

Untuk indikator tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman, dan Keindahan) dan indikator presentase penegakan perda belum mencapai target dikarenakan belum adanya penyidik pegawai negeri sipil atau PPNS dalam penegakan perda dan masih terbatasnya dukungan anggaran dalam pelaksanaan program kegiatan, Adapun solusinya adalah melaksanakan pelatihan dan pengangkatan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) di dalam melaksanakan penegakan perda dan juga dukungan anggaran di dalam melaksanakan program dan kegiatan.

2.3.1.5 Urusan Sosial

Penyelenggaraan Urusan Sosial ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi masyarakat. Permasalahan kesejahteraan sosial dapat dilihat

dari Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Dalam menanggulangi masalah sosial, pada tahun 2021 sasaran pembangunan sosial dititikberatkan pada peningkatan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat dalam penanganan PMKS, dan meningkatnya pelayanan sosial bagi PMKS, capaian indikator dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.24
Capaian Indikator Kinerja Urusan Sosial
di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017-2020

No	Indikator	Tahun			
		2017	2018	2019	2020
1	Cakupan Jumlah Penerima Tunjangan Hari Tua bagi Masyarakat Miskin	50 orang	50 orang	20 orang	0
3	Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial	Rastra 9598 KK, PKH 7031, anak terlantar 1202 org	Rastra 9598 KK, PKH 6823, anak terlantar 1202 org	PKH 6536, Bencana sosial 68 jiwa	99
4	Persentase PMKS yang Tertangani	64,86%	75%	80%	99
5	Persentase Korban Bencana Alam yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat	-	-	97,87%	98
6	Persentase Penyandang Cacat Fisik dan Mental, Serta Lanjut Usia Tidak Potensial yang Telah Menerima Jaminan sosial	11,35%	0,06%	0,03%	0,86
7	Peningkatan perlindungan jaminan sosial bagi keluarga penerima manfaat program keluarga harapan (PKH)				100

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021

2.3.2 Fokus Layanan Urusan Pemerintah Wajib Non Pelayanan Dasar

2.3.2.1 Urusan Tenaga Kerja

Minimnya lapangan pekerjaan dan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi usia angkatan kerja merupakan kondisi yang harus mendapatkan perhatian oleh pemerintah. Capaian indikator dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.25

Capaian Indikator Kinerja Urusan Ketenagakerjaan
di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017-2020

No	Indikator	Tahun			
		2017	2018	2019	2020
1	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	-	80%	85%	-
2	Besaran Pencari Kerja yang Terdaftar yang Ditempatkan	48%	75%	80%	56%
3	Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Masyarakat	-	75%	86,67%	-
4	Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kewirausahaan	-	80%	84,62%	-

Sumber: *Disnakertrans Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021*

2.3.2.2 Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Upaya mewujudkan Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera dengan mengedepankan Kesetaraan dan Keadilan Gender. Peningkatan kualitas hidup perempuan di berbagai bidang telah memperoleh hasil positif. Capaian indikator dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.26

Capaian Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018-2020

No	Indikator	Tahun		
		2018	2019	2020
1	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan	40%	91,39%	98,00%
2	Proporsi Kursi yang Diduduki Perempuan di DPR	16%	15%	20%
3	Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta	53%	55%	65%
4	Rasio KDRT	67,78%	93,33%	0,40
5	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	100%	100%	100%
6	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	100%	100%	100%

Sumber: *DP3P2KB Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021*

2.3.2.3 Urusan Pangan

Hasil produksi pangan di Kabupaten Banggai Kepulauan digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kabupaten Banggai Kepulauan yang berjumlah 120.142 jiwa. Namun produksi beras yang ada belum mencukupi untuk menutupi kebutuhan konsumsi masyarakat sehingga kegiatan impor beras harus dilakukan. Capaian indikator kinerja urusan pangan Kabupaten Banggai Kepulauan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.27
Capaian Indikator Kinerja Urusan Pangan
di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017-2020

No	Indikator	Tahun			
		2017	2018	2019	2020
1	Ketersediaan Pangan Utama				
	a. Energi (Kka/Kap/Hr)	3126	2.135,5	3.922,8	-
	b. Protein (Gram/Kap/Hr)	128	86,0	156,8	-
	c. Ketersediaan Pangan Utama (Beras (Ton)	4.147	4.690	4.690	-
2	Jumlah desa rawan pangan	29	29	27	-
3	Jumlah desa rentan pangan yang tertangani	4	5	4	-
4	Skor Pola Pangan Harapan Tingkat				
	a. Ketersediaan (Kalori)	66,0	68,6	93,05	85
	b. Konsumsi (Kalori)	73,6	75,8	83,0	-
5	Tingkat Konsumsi protein hewani	22,2	22,2	24,6	-
6	Tingkat konsumsi energy	75,6	75,6	77,7	-
7	Cadangan pangan daerah	-	-	-	15.034 kg

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021

2.3.2.4 Urusan Pertanahan

Urusan pertanahan dilaksanakan untuk meningkatkan penataan dan tercapainya perumusan kebijakan dalam urusan pertanahan. Wewenang pemerintah daerah dalam urusan pertanahan terbatas sesuai dengan yang ditetapkan pemerintah pusat diantaranya pemberian Ijin Lokasi. Ijin Lokasi diwajibkan bagi setiap perusahaan baik perorangan maupun badan hukum yang akan menanamkan modal dengan memanfaatkan lahan/tanah di Kabupaten Banggai Kepulauan. Luas tanah di Kabupaten Banggai Kepulauan yang telah bersertifikat mengalami peningkatan dari 9.342.450 m² menjadi 10.243.758 m² dikarenakan adanya Program Nasional Sertifikat Tanah Gratis dari Pemerintah Pusat. Secara rinci capaian indikator dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.28

Capaian Indikator Kinerja Urusan Pertanahan
di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019-2020

No	Indikator	Tahun	
		2019	2020
1	Penyelesaian kasus Tanah Negara	-	1 kasus
2	Penyelesaian Izin Lokasi	100 %	100%

Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021

2.3.2.5 Urusan Lingkungan Hidup

Pelaksanaan pembangunan Daerah harus tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. Oleh karena itu, indikator-indikator terkait lingkungan hidup juga penting untuk diperhatikan guna memastikan terlaksananya pembangunan yang berwawasan lingkungan. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kualitas lingkungan hidup di suatu wilayah. IKLH merupakan indikasi awal yang dapat menggambarkan suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup periode tertentu. Indikator lain yang perlu diperhatikan dalam urusan lingkungan hidup adalah terkait pengelolaan persampahan. Secara rinci capaian indikator dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.29

Capaian Indikator Kinerja Urusan Lingkungan Hidup
di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017-2020

No	Indikator	Tahun			
		2017	2018	2019	2020
1	Tersusunnya RPPLH Kabupaten Banggai Kepulauan	Ada	Ada	ada	Ada
2	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air	49	50,00	54,44	48,57
3	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara	103,2	104,12	103,55	93,309
4	Persentase Cakupan Areal Pelayanan Sampah	3,21	3,21 %	3,21 %	5,38%
5	Persentase luas RTH (taman dan makam) terhadap luas wilayah	-	-	-	-
6	Luas lahan kritis (ha)	-	-	-	-

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan

berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Di Kabupaten Banggai Kepulauan pada tahun 2017 telah terselenggaranya KLHS untuk Kebijakan Rencana dan Program Daerah.

2.3.2.6 Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Banggai Kepulauan hingga saat ini sudah mempunyai basis data kependudukan yang terintegrasi di 12 (Dua belas) Kecamatan secara online. Adapun capaian indikator urusan kependudukan dan catatan sipil sebagai berikut:

Tabel 2.30

Capaian Indikator Kinerja Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017-2020

No	Indikator	Tahun			
		2017	2018	2019	2020
1	Rasio Penduduk Ber KTP Per Satuan Penduduk	0,89	0,91	0,89	0,91
2	Rasio Bayi Berakte Kelahiran	0,37	0,397	0,66	0,48
3	Rasio Pasangan Berakte Nikah	0,02	0,02	0,29	0,51
4	Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	77,288 (86,43%)	78,180 (96,43)	89,11%	90,70%
5	Cakupan Penerbitan Akte Kelahiran	6.267 (37,39%)	17,193 (33,03%)	47,34%	48,20%
6	Cakupan pasangan berakte nikah	-	-	28,97%	50,63%
7	Ketersediaan database kependudukan	1 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	
8	persentase Kepemilikan KK bagi setiap keluarga di Kabupaten Banggai Kepulauan	-	-	80,28%	77,03%
9	Kepemilikan KIA (Kartu Identitas Anak)	-	-	106	230

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk pada tahun 2020 mengalami peningkatan sebanyak 1,39% dari tahun 2019. Begitu pula dengan cakupan pasangan berakte nikah dari tahun 2019 ke tahun 2020 mengalami peningkatan sebanyak 21,66%. Hal ini sesuai dengan Data Konsolidasi Bersih (DKB) semester II Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2020 menunjukkan bahwa jumlah pasangan yang berakte nikah sebanyak

10.906 dari jumlah pasangan menikah yang dilaporkan sebanyak 21.538 ,dengan cakupan persentase sebesar 50,63%. Capaian indikator persentase kepemilikan Kartu Keluarga bagi setiap keluarga di kabupaten Banggai kepulauan sebanyak 77,03%. Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) mengalami peningkatan persentase tetapi secara umum jumlah wajib KIA sebanyak 17.541 jika dibandingkan dengan jumlah Kartu Identitas Anak yang dicetak sebanyak 230 dengan cakupan 1,31%.

2.3.2.7 Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Urusan pemberdayaan masyarakat dan desa memiliki tujuan untuk meningkatkan peran sarana dan prasarana yang ada, meningkatkan kualitas kehidupan rumah tangga miskin, meningkatkan sumber daya manusia dan memberdayakan masyarakat secara aktif untuk bergotong royong. Adapun capaian kinerja urusan pemberdayaan masyarakat dan desa selama tahun 2017-2020 sebagai berikut:

Tabel 2.31

Capaian Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017-2020

No	Indikator	Tahun			
		2017	2018	2019	2020
1	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintah Desa yang Memadai	50	70	90	100
2	Persentase PKK Aktif	100%	100%	100%	100%
3	Swadaya Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat (Rp)	2.374.671.100,-	3.654.084.600,-	4.832.607.700,- (19%)	1.591.473.157 (31,82%)
4	Persentase aparatur desa/ kelurahan telah dilatih manajemen pengelolaan desa/kelurahan	0	0	0	
5	Persentase desa/kelurahan memiliki profil desa/kelurahan	100%	100%	100%	100%
6	Jumlah BUMDes	141	141	141	141

Sumber: Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021

Berdasarkan tabel capaian indikator diatas, sebagian besar telah memenuhi target yang diharapkan. Persentase PKK aktif telah tercapai dengan baik, karena semua desa memiliki dana untuk kegiatan PKK setiap tahun sekalipun jumlahnya terbatas. Swadaya Masyarakat terhadap Pemberdayaan juga berjalan sekalipun

hasilnya belum sesuai harapan dikarenakan peran lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Pembangunan masih kurang, hal ini disebabkan oleh tingkat ketergantungan masyarakat yang tinggi terhadap bantuan dari pemerintah sehingga menghambat kemajuan pembangunan. Hal ini berarti bahwa kemandirian masyarakat desa belum terwujud masih perlu pendampingan dari pemerintah kepada masyarakat setempat. Pendampingan yang dimaksud adalah pendampingan yang tidak hanya sekedar bantuan saja dan masyarakat hanya menerima, namun lebih pada bantuan yang disesuaikan dengan potensi, keadaan dan permasalahan yang ada di desa dan sifatnya menumpuhkan partisipasi masyarakat untuk secara aktif berperan dalam pembangunan desanya. Rendahnya peran serta masyarakat dalam kegiatan pembangunan pedesaan mulai dari kegiatan perencanaan hingga evaluasi pelaksanaan pembangunan desa itu sendiri juga masih dirasakan. Yang dimaksud disini adalah peran serta masyarakat setempat untuk mengetahui potensi lokal dan segala kebutuhan serta permasalahan yang terjadi di desa hanya warga desa sendirilah yang paling tahu sehingga dalam merencanakan pembangunan akan lebih tepat sasaran. Pengawasan pembangunan juga sangat perlu dilaksanakan sebagai penyeimbang dan monitoring agar kegiatan berjalan sesuai dengan yang telah direncanakan.

Tabel 2.32

Capaian Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017-2020

Uraian	Satuan	Tahun			
		2017	2018	2019	2020
PKK Aktif	Desa/Kel	144	144	144	144
Persentase perangkat desa/kelurahan yang menerapkan buku administrasi pemerintahan desa	%	86,80	95,13	98	100
Persentase Kepala Desa dan perangkat desa yang memiliki kompetensi	%	67,37	78,75	86,80	89,64%
Persentase desa yang melaporkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan laporan Alokasi Dana Desa secara tepat waktu	%	65,50	79,86	100	100
Persentase desa yang memiliki profil desa yang Up to date dan akurat	%	86,60	95,13	70	70,92%
Persentase kecamatan yang memiliki POSYANTEKDES	%	0	0	0	0

Uraian	Satuan	Tahun			
		2017	2018	2019	2020
Jumlah kelompok usaha aktif dengan anggota berbeda di setiap desa	Kelompok	0	0	0	0
Persentase desa yang memiliki usaha simpan pinjam kelompok perempuan yang produktif	%	42,55	56,02	56,02	56,02%
Jumlah dana bergulir yang masuk ke setiap desa	Rp	0	0	0	0
Jumlah stimulan dan swadaya masyarakat dalam membangun infrastruktur pedesaan	Rp	0	0	0	0
Persentase desa yang terpelihara sarana dan prasarana desanya	%	86,8	95,02	97,87	100
Jumlah Desa Mandiri Energi	Desa	2	2	2	2

Sumber: Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021

2.3.2.8 Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Tujuan Program Keluarga Berencana secara demografi adalah untuk menurunkan angka kelahiran dan secara filosofis adalah untuk mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera. Jumlah anak dalam keluarga yang dianjurkan oleh pemerintah adalah 2 (dua) anak lebih baik. Untuk cakupan wilayah pedesaan juga di bentuk Pos Pelayanan KB yang hingga saat ini berjumlah 144 buah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2015, pasangan usia subur berjumlah 21.286 orang. Alat/cara kontrasepsi yang paling diminati pasangan usia subur aktif adalah pil yang mencapai 7.392 akseptor, diikuti yang menggunakan suntikan yang mencapai 3.482 akseptor, pengguna jenis Implan 2.331 Akseptor, pengguna jenis UID 380 akseptor, pengguna jenis kondom 132 akseptor, yang menggunakan jenis MOW 8 akseptor sedangkan yang terendah adalah yang menggunakan alat kontrasepsi berupa MOP. Adapun capaian indikator urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai berikut:

Tabel 2.33

Capaian Indikator Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017-2020

No	Indikator	Tahun			
		2017	2018	2019	2020
1	Laju Pertumbuhan Penduduk	-	58,60%	55%	50%
2	Persentase Penggunaan Alat Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	-	10%	30%	32,46%

No	Indikator	Tahun			
		2017	2018	2019	2020
3	Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi	-	50%	75%	80%
4	Cakupan ketersediaan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	-	100%	100%	110%
5	Total Fertilitas Rate (TFR)	-	1,73	3,25	1,07
6	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	-	100%	100%	100%
7	Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKB) ber-KB	-	86,4%	83,36%	83,46%
8	Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKB) ber-KB	-	40%	75,55%	83,62%
9	Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKB) ber-KB	-	-	-	-

Sumber: DP3P2KB Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021

2.3.2.9 Urusan Perhubungan

Sektor transportasi di Kabupaten Banggai Kepulauan hanya berupa transportasi darat dan transportasi laut sebagai penghubung wilayah untuk menunjang, mendorong dan menggerakkan pembangunan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sesuai kondisi wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan sebagai daerah kepulauan, urusan transportasi laut perlu mendapat perhatian guna melancarkan keinginan masyarakat dengan waktu yang efisien.

Tabel 2.34

Capaian Indikator Kinerja Urusan Perhubungan
di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018-2020

No	Indikator	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum	221.050	231.843	165.046	157.000	164.522
2	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	7	12	12	13	13
3	Persentase Layanan Angkutan Darat	5,53	4,05	4,09	8,5	8,76
4	Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan	896,47/536	996,5/14058	1077,49/15377	1193,2/715,50	
5	Jumlah Orang/Barang yang Terangkut	87.620	95.278	37.642	402.501	45.981

No	Indikator	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
	angkutan Umum					
6	Jumlah Orang/Barang Melalui Dermaga/Bandara/Terminal Per Tahun	133.430	136.565	110.683	121.520	126.358

Sumber: Dishub Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021

2.3.2.10 Urusan Komunikasi dan Informatika

Telekomunikasi sangat bermanfaat untuk memperpendek jarak dan waktu antar wilayah sehingga informasi dapat disampaikan secara cepat.

Tabel 2.35

Capaian Indikator Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017-2020

No	Indikator	Tahun			
		2017	2018	2019	2020
1	Cakupan Layanan Telekomunikasi (persen)	39	72	74	74

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021

Berdasarkan data diatas, sarana komunikasi yang dimanfaatkan oleh masyarakat Kabupaten Banggai Kepulauan adalah layanan jaringan Telkomsel yang meliputi hampir seluruh wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan. Layanan Telkomsel BAKTI yang merupakan hasil kerja sama antara Telkomsel dan Badan Aksesibilitas dan Informasi (BAKTI) juga telah dinikmati oleh sebagian wilayah perdesaan yang selama ini tidak terjangkau oleh pelayanan jaringan Telkomsel. Telkomsel BAKTI ini telah juga telah menggunakan jaringan broadband 4G LTE sehingga dapat memberikan akses internet yang cukup baik bagi masyarakat.

2.3.2.11 Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Koperasi dan UKM memiliki peran yang cukup signifikan dalam ekonomi kerakyatan yang ada di Kabupaten Banggai Kepulauan. Capaian indikator urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebagai berikut:

Tabel 2.36

Capaian Indikator Kinerja Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017-2020

No	Indikator	Tahun			
		2017	2018	2019	2020
1	Persentase Koperasi Aktif	96	96	75	95
2	Persentase UKM Non BPR/LKM aktif	0	0	0	0

No	Indikator	Tahun			
		2017	2018	2019	2020
3	Persentase UKM BPR/LKM aktif	0	0	0	0
4	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	86	87	87	2,12

Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi UMKM Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021

2.3.2.12 Urusan Penanaman Modal

Penanaman modal atau investasi merupakan salah satu variabel penting dalam menghitung pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Kehadiran investor baik internasional maupun domestik sangat diperlukan dalam pembentukan modal daerah. Penyerapan tenaga kerja, peningkatan output, penghematan devisa atau bahkan penambahan devisa, merupakan multiplier effect dari kegiatan investasi di suatu daerah. Peningkatan investasi baik Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) menjadi tujuan utama dalam pembangunan penanaman modal di Kabupaten Banggai Kepulauan. Capaian indikator urusan Penanaman Modal sebagai berikut:

Tabel 2.37
Capaian Indikator Kinerja Urusan Pananaman Modal
di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017-2020

No	Indikator	Tahun			
		2017	2018	2019	2020
1	Jumlah investor berskala nasional	18	21	23	26
2	Jumlah nilai realisasi investasi berskala nasional	3.659.938.296	2.405.260.000	35.017.314.000	38.549.494.000
3	Jumlah jenis pelayanan secara Online	-	-	235	-
4	Sistem informasi Pelayanan Perijinan	-	-	Ya (oss)	Ya
5	Terimplementasikannya Sistem Pelayanan Informasi dan Perijinan Investasi Secara Elektronik	-	-	Ya	Ya

Sumber: DPMP2TSP Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021

2.3.2.13 Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Dalam rangka meningkatkan kualitas Sumber daya manusia maka diperlukan pembentukan karakter, pembentukan kapasitas dan daya saing pemuda serta mewujudkan masyarakat yang sehat dan berprestasi di bidang olahraga. Maka dari itu diperlukan komitmen serta kerjasama dari berbagai pihak, baik dari unsur

pemerintah dan swasta agar pembangunan pemuda dan olahraga dapat terwujud. Capaian indikator urusan Kepemudaan dan Olahraga adalah sebagai berikut:

Tabel 2.38
Capaian Indikator Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga
di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017-2020

No	Indikator	Tahun			
		2017	2018	2019	2020
1	Cakupan Pembinaan Olah Raga	61%	61%	100%	0%
2	Jumlah pemuda berprestasi	2 orang (12%)	37 orang	28 orang	
3	Presentase organisasi kepemudaan yang telah dibina	100%	100%	100%	100%
4	Jumlah Organisasi pemuda yang memiliki legalitas organisasi dari Pemerintah Kabupaten	-	-	-	-
5	Persentase Wirausaha Muda	58%	58%	20%	
6	Jumlah medali tingkat provinsi yang diperoleh	3	2	-	-
7	Gelanggang/ balai Remaja (selain milik swasta)	0	0	0	0
8	Lapangan olahraga	20	-	23	42

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021

2.3.2.14 Urusan Statistik

Peran statistik sangat penting artinya bagi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan aspek kehidupan masyarakat dalam pembangunan. Data statistik mampu memberikan arah yang obyektif bagi kebijakan pemerintah. Pembangunan akan jauh lebih mahal apabila tanpa data yang menunjang. Maka dari itu ketersediaan data yang tepat, akurat dan up to date sangat dibutuhkan demi menunjang proses penentuan kebijakan dalam proses perencanaan pembangunan. Capaian indikator urusan Statistik adalah sebagai berikut:

Tabel 2.39
Capaian Indikator Kinerja Urusan Statistik di Kabupaten Banggai Kepulauan
Tahun 2016-2020

No	Indikator	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Tersedianya system data dan statistik yang terintegrasi	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
2	Buku "Kabupaten Dalam Angka"	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

3	Buku " PDRB" Kabupaten	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
---	------------------------	-----	-----	-----	-----	-----

Sumber: Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021

2.3.2.15 Urusan Kebudayaan

Pembangunan kebudayaan pada prinsipnya menyangkut nilai-nilai budaya, dan pengelolaan kekayaan seni dan budaya daerah. Nilai-nilai budaya Banggai masih melekat di masyarakat Kabupaten Banggai Kepulauan, namun perlu terus dilestarikan. Beberapa kesenian daerah juga masih lestari hingga saat ini. Beberapa kesenian yang masih sangat populer dan menjadi ikon Kabupaten Banggai Kepulauan adalah seni Balatindak, Ode, Paupe, Toluni, Ridan, dll. Kesenian daerah ini telah melekat di masyarakat pedesaan Kabupaten Banggai Kepulauan. Kesenian ini juga menjadi identitas dan kebanggaan rakyat, dan biasanya dipertontonkan pada saat penyambutan tamu dan kegiatan lainnya, sehingga saat ini masih tetap bertahan berdampingan dengan seni-seni tradisional yang lain. Pencapaian indikator kinerja urusan kebudayaan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.40
Capaian Indikator Kinerja Urusan Kebudayaan
di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017-2020

No	Indikator	Tahun			
		2017	2018	2019	2020
1	Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	1	-	1	0
2	Benda, Situs, dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan	2	2	2	2
3	Jumlah Karya Budaya yang direvitalisasi dan Inventarisasi	2			2
4	Jumlah Cagar Budaya yang Dikelola Secara Terpadu	4			0

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021

2.3.2.16 Urusan Perpustakaan

Pembangunan dan pengembangan pendidikan harus didukung oleh sarana maupun prasarana dari pendidikan tersebut. Salah satu yang harus dikelola dengan

baik dalam rangka meningkatkan pendidikan adalah pembangunan dan pengembangan perpustakaan. Perpustakaan Daerah merupakan mengembangkan pelayanan untuk meningkatkan minat baca masyarakat dengan telah dibangunnya taman baca di Kabupaten Banggai Kepulauan yang akan melayani pengunjung dengan fasilitas dan sarana gedung kantor yang belum memadai. Pemerintah terus berupaya untuk mensosialisasikan minat baca di Kabupaten Banggai Kepulauan dalam mendukung program Nasional. Adapun capaian yang telah dilaksanakan oleh pihak Dinas Perpustakaan Daerah terkait dengan urusan indikator kinerja urusan perpustakaan sebagai berikut:

Tabel 2.41

Capaian Indikator Kinerja Urusan perpustakaan
di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun			
			2017	2018	2019	2020
1	Koleksi buku yang di perpustakaan milik daerah	Eksemplar	2735	950	1953	700
2	Pengunjung perpustakaan/pemustaka rata-rata per bulan	Orang	697,167	612	314	162
3	Persentase desa/kelurahan yang memiliki layanan perpustakaan	Desa	40,98%	45,14 %	52,09 %	53,90 %
4	Persentase ragam buku perpustakaan yang sesuai dengan potensi wilayahnya	Eksemplar	23%	26%	30%	21%
5	Jumlah perpustakaan binaan		161	167	179	180
	Perpustakaan Khusus	Perpustakaan	1	1	1	1
	Perpustakaan keluarahan	Perpustakaan	3	3	3	3
	Perpustakaan desa	Perpustakaan	59	65	75	76
	Perpustakaan Sekolah	Perpustakaan	98	98	100	100
6	Jumlah promosi gemar membaca yang diselenggarakan	Kegiatan	8	4	9	4

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kab. Banggai Kepulauan Tahun 2021

2.3.2.17 Urusan Kearsipan

Kearsipan adalah segala kegiatan yang berkenaan dengan pengurusan arsiparsip, baik arsip dinas maupun arsip pribadi, dari mulai penerimaan, pencatatan, pengiriman, penyingkiran maupun pemusnahan surat menyurat atau berbagai macam warkat lainnya. Urusan kearsipan Adapun capaian urusan kearsipan dalam kurun waktu 2017-2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.42

Capaian Indikator Kinerja Urusan Layanan Kearsipan
di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun			
			2017	2018	2019	2020
1	Penerapan pengelolaan arsip secara baku	PD	33	38	38	-
2	Kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan	PD	39 orang	26 orang	3 Keg.	0 Keg.
3	Persentase kelengkapan dokumen, dokumentasi dan arsip daerah	KPAD	16,85%	13,58	12,74%	15,00%
4	Pembinaan Arsip Desa	Desa	3 Kec	5 Kec.	4 Desa di 4 Kec.	4 desa di 4 kec.
5	Penyelamatan dan pelestarian arsip	PD	33	38	38	-

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021

2.3.3 Fokus Layanan Urusan Pilihan

Analisis kinerja atas layanan urusan pilihan dilakukan terhadap indikator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan pilihan pemerintahan daerah terdapat 8 urusan pilihan yaitu bidang urusan: (i) Kelautan dan perikanan, (ii) pariwisata, (iii) Pertanian, (iv) Kehutanan, (v) Energi dan Sumber Daya Mineral, (vi) Perdagangan, (vii) Perindustrian, dan (viii) Ketransmigrasian. Gambaran dari masing-masing penjelasan urusan pilihan tersebut adalah sebagai berikut:

2.3.3.1 Urusan Kelautan dan Perikanan

Sektor Kelautan dan Perikanan merupakan salah satu sektor unggulan di Kabupaten Banggai Kepulauan.

Tabel 2.43

Capaian Indikator Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan
di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017-2021

No	Indikator	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Produksi Rumput laut	6.698,94	6.348,28	6.750,78	6.919,01	4.420,99
2	Produksi Perikanan Tangkap	11.738,00	12.592,80	11.827,00	9.902,00	10.210,00
3	Produksi perikanan budidaya	456,00	569,31	380,91	368,20	12.961,00
4	Konsumsi Ikan	61 kg/kap/th	61 kg/kap/th	61 kg/kap/th	60,6 kg/kap/th	61 kg/kap/th
5	Cakupan Bina Kelompok Nelayan	75	79	84	85	88
6	Proporsi Tangkapan ikan yang Berada Dalam Batasan Biologis yang Aman	9.610,50	2.074,25	9.829,60	7.382,00	10.741,90
7	Rasio Kawasan Lindung Perairan terhadap Total	-	25	30	-	-

No	Indikator	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
	Luas Perairan Teritorial					
8	Jumlah Produk hasil olahan ikan	7,2	8,1	12,5	10,2	10,7

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021

2.3.3.2 Urusan Pariwisata

Pariwisata menjadi industri baru yang dapat menambah pertumbuhan ekonomi yang cepat dalam menyediakan lapangan pekerjaan. Pengelolaan tempat-tempat wisata daerah dapat meningkatkan pendapatan daerah pada sektor pariwisata. Kabupaten Banggai Kepulauan memiliki potensi wisata yang beragam dan unik, khususnya wisata bahari. Daerah ini memiliki keindahan khas wilayah maritim, baik obyek wisata pantai pasir putih maupun bawah laut.

Tabel 2.44
Capaian Indikator Kinerja Urusan Pariwisata
di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017-2020

No	Indikator	Tahun			
		2017	2018	2019	2020
1	WISNU	10.477	68.049	102.248	39.572
2	WISMAN	12	25	29	4
3	Lama Kunjungan Wisata	-	0	204	155
4	PAD Sektor Pariwisata	Belum dikelola	Belum dikelola	Belum dikelola	Belum dikelola
5	Jumlah Usaha Biro Jasa Pariwisata	Belum ada	Belum ada	Belum ada	Belum ada
6	Jumlah Usaha Industri Kreatif Bidang Pariwisata	12 pokdarwis	0	20	16
7	Persentase obyek wisata yang dipromosikan	-	53	53	-
8	Jumlah obyek wisata unggulan	-	28	28	16
9	Jumlah restoran	74	86	90	-
10	Jumlah penginapan/hotel	15	18	20	-

Sumber: Dinas Pariwisata Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021

Kunjungan wisatawan mancanegara ke Kabupaten Banggai Kepulauan mengalami fluktuatif periode 2016-2019. Pada Tahun 2017, jumlah kunjungan 12 orang, hingga Tahun 2019 menjadi 29 orang wisatawan, namun pada Tahun 2020 jumlah kunjungan wisatawan mancanegara mengalami penurunan yang sangat tajam yaitu 4 orang. Penurunan kunjungan wisatawan mancanegara yang terjadi pada Tahun 2020 di sebabkan oleh adanya pandemi Covid-19 yang dampaknya tidak

hanya dirasakan pada Kabupaten Banggai Kepulauan saja melainkan pada seluruh wilayah Indonesia.

Tabel 2.45

Obyek Wisata dengan sarana dan prasarananya
Di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020

No	Obyek Wisata	Lokasi	Fasilitas Umum			Air Bersih	Pengelolaan Sanitasi	Persampahan	Layanan Informasi	Pos Kesehatan	Listrik	Sarana Komunikasi
			Tempat Ibadah	Parkir	Ruang Terbuka							
1	Pantai Poganda	Luk Panenteng	Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Tidak	Tidak	Tidak	Ada
2	Pantai Tebeabul	Bakalan	Tidak	Ada	Ada				Tidak	Tidak	Tidak	
3	Pantai Bone Uluno	Abason	Tidak	Ada	Ada				Tidak	Tidak	Tidak	
4	Danau Tendetung	Peley	Tidak	Ada	Ada				Tidak	Tidak	Tidak	
5	Danau Paisu Pok	Luk Panenteng	Tidak	Ada	Tidak				Tidak	Tidak	Tidak	
6	Monumen Trikora	Kel. Salakan	Tidak	Ada	Ada				Tidak	Tidak	Tidak	
7	Air Terjun Tembang	Luksagu	Ada	Ada	Ada				Tidak	Tidak	Tidak	
8	Air Terjun Batu Alambung	Kambani	Tidak	Ada	Ada				Tidak	Tidak	Tidak	
9	Goa Pentu	Liang	Tidak	Ada	Ada				Tidak	Tidak	Tidak	
10	Air Terjun Tokiap	Bonepuso	Tidak	Ada	Ada				Tidak	Tidak	Tidak	
11	Pantai Kerikil	Patukuki	Tidak	Ada	Ada				Tidak	Tidak	Tidak	
12	Pantai Lalandai	Lalandai	Tidak	Ada	Ada				Tidak	Tidak	Tidak	
13	Permandian Paisu Matano	Kautu	Tidak	Ada	Ada				Tidak	Tidak	Tidak	
14	Pantai Mandel	Kombutokan	Tidak	Ada	Ada				Tidak	Tidak	Tidak	
15	Pantai Teduang	Ambelang	Tidak	Ada	Ada				Tidak	Tidak	Tidak	
16	Pantai Palam	Palam	Tidak	Ada	Ada				Tidak	Tidak	Tidak	

Sumber: Dinas Pariwisata Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021

2.3.3.3 Urusan Pertanian

Pencapaian pembangunan di bidang pertanian yang memiliki keunggulan komparatif dalam perekonomian Kabupaten Banggai Kepulauan dimana sebagian besar penduduk di Kabupaten Banggai Kepulauan bermata pencaharian di sektor ini. Selain untuk pemenuhan kebutuhan pangan keluarga, juga dapat dilakukan untuk meningkatkan pendapatan keluarga yang berdampak mengurangi kemiskinan. Pencapaian indikator kinerja urusan pertanian dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.46

Capaian Indikator Kinerja Urusan Pertanian
di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017-2020

No	Indikator	Tahun			
		2017	2018	2019	2020
1	Kontribusi Sektor Pertanian /Perkebunan terhadap PDRB	48,96	48,68	47,87	48,98

No	Indikator	Tahun			
		2017	2018	2019	2020
2	Kontribusi Sektor Pertanian (Palawija) terhadap PDRB	2,38	2,45	2,45	2,45
3	Kontribusi Sektor Pertanian (Tanaman Keras) terhadap PDRB	13,67	13,78	12,93	13,76
4	Padi Sawah	-	-	1.992,98 Ton	1.436,0 2 Ton
6	Jagung	-	-	7.144,49 Ton	2.328,1 Ton
8	Kacang Tanah	-	-	2.603,24 Ton	596,06 Ton
9	Kacang Hijau	-	-	7,52 ton	7,82 ton
10	Ubi Kayu	-	-	3.695 Ton	3.654,6 Ton
11	Ubi Jalar	-	-	1.110,76 Ton	1.087,6 3 Ton
12	Ubi Banggai	-	-	10.581,3 1 Ton	6.940,2 9 Ton
13	Cakupan Bina Kelompok Petani	-	-	-	-
16	Produksi Peternakan				
17	Sapi	18.247 Ekor	19.829 Ekor	18.672 Ekor	21.411 Ekor
18	Kambing	27.534 Ekor	29.167 Ekor	27.639 Ekor	30.000 Ekor
19	Babi	25.605	32.643	25.655	39.681
20	Ayam buras	81.960	89.146	81.960	89.102
21	Ayam Petelur	700	14.998	4.000	13.050
22	Ayam ras pedaging	11.685	14.450	11.685	-
23	Itik	17.914	20.136	13.153	14.907

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021

2.3.3.4 Urusan Perdagangan

Perdagangan membantu semua warga negara dalam menjalankan usaha-usaha pembangunan mereka melalui promosi serta pegutamaan sektor-sektor ekonomi yang mengandung keuntungan komperatif, maka salah satu mesin pertumbuhan (engine of growth) ekonomi suatu daerah adalah sektor perdagangan. Sektor ini berperan dalam mendorong peningkatan pendapatan masyarakat, mengurangi pengangguran dan menurunkan angka kemiskinan, selain juga mampu menciptakan dan mempertahankan stabilitas ekonomi dalam mengendalikan inflasi. Selain itu, jumlah sarana perdagangan di Kabupaten Banggai Kepulauan terdiri dari 14 toko, 1.623 kios, dan 489 warung.

Tabel 2.47
Jumlah Sarana Perdagangan menurut jenisnya di Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2018-2021

Jenis Sarana Perdagangan	2018	2019	2020	2021
Pasar	36	38	38	38
Toko	13	32	20	14
Kios	619	1039	1351	1623
Warung	25	34	141	489
Jumlah	693	1143	1512	2126

Sumber: *Banggai Kepulauan Dalam Angka, 2022*

Tabel 2.48
Capaian Indikator Kinerja Urusan Perdagangan di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017-2020

No	Indikator	Tahun			
		2017	2018	2019	2020
1	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	19,37	18,99	19,53	18,99
2	Cakupan Bidang Kelompok Pedagang/Usaha Informal	-	-	31,48	31,48
3	Jumlah Pasar	36	36	38	39
4	Jumlah Pasar Yang Diawasi	-	-	-	-
5	persentase Pasar Yang Diawasi	-	-	94,7	94,7
6	Persentase pasar tradisional yang memenuhi syarat kenyamanan dan kesehatan	-	-	13,8	13,8
9	Persentase lokasi PKL yang tertata	-	-	1	1

Sumber: *Dinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi UKM, Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021*

2.3.3.5 Urusan Perindustrian

Salah satu tujuan pembangunan di sektor industri ialah untuk memperluas lapangan kerja, pemerataan kesempatan berusaha, peningkatan ekspor yang menunjang pembangunan daerah terutama dalam pemanfaatan SDA dan SDM yang ada. Secara rinci capaian indikator kinerja urusan perindustrian di Kabupaten Banggai Kepulauan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.49
Capaian Indikator Kinerja Urusan Perindustrian di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017-2020

No	Indikator	Tahun			
		2017	2018	2019	2020

No	Indikator	Tahun			
		2017	2018	2019	2020
1	Cakupan Bidang Kelompok Pengrajin Industri	-	-	0	154
2	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Kelompok Usaha (Jumlah Pelaksanaan Palatihan)	-	-	1	-
3	Jumlah Industri	709	878	931	931
4	Jumlah IKM	709	878	931	931
5	Persentase Pertumbuhan Industri	-0,14	19,24	5,69	
6	Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB	2,53	2,55	2,61	2,75
7	Sumbangan IKM Terhadap PDRB Sektor Industri	-	-	-	-
8	Persentase IKM memiliki Izin Usaha Industri Kecil Melalui P-IRT dan Halal	1,01	1,19	1,19	1,19
9	Persentase IKM yang telah mengikuti pameran promosi produk	0,98	0,71	0,75	0,75
10	Persentase peningkatan omset penjualan produk IKM	-1,108	92,91	98,18	-

Sumber: Dinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi UKM, Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021

2.3.3.6 Urusan Transmigrasi

Sebagai salah satu bentuk pelaksanaan amanat konstitusi, hingga kini pemerintah masih berkepentingan untuk menempatkan transmigrasi sebagai satu model pembangunan. Hal ini berarti bahwa transmigrasi masih dipandang relevan sebagai suatu pendekatan pembangunan guna mencapai tujuan kesejahteraan, pemerataan pembangunan daerah, serta perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Transmigrasi juga relevan sebagai salah satu bentuk perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar manusia (human rights), yaitu perlindungan negara atas hak-hak warga (negara) untuk berpindah dan menetap di dalam batas-batas wilayah negara-bangsanya. Oleh karena itu, Pemerintah tetap memberikan dukungan kepada pemerintah provinsi dan atau kabupaten/kota untuk menyelenggarakan transmigrasi, sepanjang tersedia Sumber Data dan Sumber daya yang mendukungnya.

2.3.4 Unsur Pendukung/ penunjang Pemerintahan

2.3.4.1 Perencanaan

Perencanaan pembangunan merupakan urusan penunjang dalam pelaksanaan urusan pilihan dan wajib. Perencanaan pembangunan memiliki kewenangan untuk menyusun perencanaan daerah dalam bentuk dokumen RPJMD dan RKPD. Dalam urusan perencanaan, ketersediaan dan akurasi arah pembangunan menjadi fokus utama. Guna memastikan sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan pembangunan maka koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat perlu dilakukan.

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah saat ini dituntut untuk semakin berkualitas dan kompetitif, baik dalam hal pelayanan publik maupun akuntabilitas berbasis kinerja. Kondisi tersebut berdampak pada kualitas penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang harus baik dan tepat dengan melibatkan seluruh stakeholders pembangunan secara komprehensif. Integrasi antara perencanaan, penganggaran dan evaluasi dalam penerapan e-government menjadi salah satu upaya untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang berkualitas. Berikut adalah capaian bidang perencanaan Kabupaten Banggai Kepulauan.

Tabel 2.50
Capaian Indikator Kinerja Urusan Perencanaan
Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017-2021

No.	Indikator	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2.	Tersedianya Dokumen Perencanaan: RPJMD yang Telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3.	Tersedianya Dokumen Perencanaan: RKPD yang Telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
4.	Tersedianya Dokumen RTRW yang Telah Ditetapkan dengan PERDA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
5.	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke Dalam RKPD	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
6.	Penjabaran Konsistensi Program RKPD ke Dalam APBD	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
7.	Kesesuaian Rencana Pembangunan dengan RTRW	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai
8.	Ketersediaan data untuk perencanaan pembangunan daerah	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
9.	Ketersediaan hasil evaluasi RKPD	Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada
10.	Ketersediaan perencanaan wilayah strategis dan cepat tumbuh	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
11.	Persentase perencana PD yang memahami penyusunan dokumen perencanaan PD	65	74	80	80	80

No.	Indikator	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
12.	Persentase PD memiliki Renstra PD yang selaras dengan RPJMD	90	90	90	90	90

Sumber: Bappeda dan Litbang, Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021

Meskipun ketersediaan dokumen perencanaan di Kabupaten Banggai Kepulauan sudah terpenuhi, masih perlu dilakukan optimalisasi. Salah satu upaya untuk mengoptimalkan perencanaan pembangunan di Kabupaten Banggai Kepulauan adalah perlu dilakukannya penyesuaian antara dokumen-dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra, RKPD, dan Renja), Anggaran (KUA-PPAS, RKA/DPA) dan kinerja (Rencana Kerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja) secara bertahap sesuai siklus perencanaan.

Selain dokumen perencanaan, dokumen hasil evaluasi terhadap RPJMD dan RKPD juga sudah terpenuhi. Kondisi tersebut dapat dicapai karena adanya asistensi dan pendampingan yang dilakukan oleh Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan kepada seluruh perangkat daerah

2.3.4.2 Keuangan

Urusan keuangan daerah dalam pembangunan berkaitan dengan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah. berkaitan dengan pendapatan daerah, kinerja keuangan dapat dilihat dari peningkatan Pendapatan Asli daerah (PAD). Secara umum kinerja pengelolaan keuangan dan aset daerah dapat dilihat dari capaian opini BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah. pengelolaan keuangan daerah bertumpu pada upaya peningkatan efisiensi, efektifitas, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan publik baik dalam hal pendapatan maupun belanja. Berikut adalah kinerja urusan pengelolaan keuangan dan aset daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Tabel 2.51
Capaian Indikator Kinerja Urusan Keuangan
Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017-2020

No.	Indikator	Tahun			
		2017	2018	2019	2020
1.	Opini BPK	WDP	WDP	WTP	Disclaimer
2.	Persentase SILPA	-	7,08	3,79	64,5
3.	Penetapan APBD	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tidak Tepat Waktu
4.	Persentase Program yang	0	0	0	0,23%

	Tidak Terlaksana				
5.	Persentase Kegiatan yang Tidak Terlaksana	0	0	0	1,25%
6.	Capaian PAD	40.841.50	23.922.23	31.558.305.280	36.101.186.762,27

Sumber: Bappeda dan Litbang, Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021

2.3.4.3 Kepegawaian

Urusan kepegawaian merupakan unsur penunjang yang memiliki fungsi mengelola ASN. Urusan kepegawaian erat kaitannya dengan beberapa aspek seperti manajemen kepegawaian, pengadaan calon ASN, mutasi, promosi, dan pemberhentian ASN, serta pengembangan kompetensi dan kapasitas ASN. Salah satu kinerja urusan kepegawaian dapat dilihat dari persentase jabatan yang diisi sesuai dengan kompetensi pegawai.

Jumlah ASN di kabupaten Banggai Kepulauan pada tahun 2021 sebanyak 3.122 orang dengan komposisi 1.549 orang laki-laki dan 1.573 orang perempuan. Berikut jumlah pegawai menurut jabatan dan jenis kelamin.

Tabel 2.52
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021

Jabatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Fungsional Tertentu	794	1.071	1.865
Fungsional Umum	478	332	810
Eselon IV	136	111	247
Eselon III	114	50	164
Eselon II	27	9	36
Eselon I	-	-	-
Jumlah	1.549	1.573	3.122

Sumber: Banggai Kepulauan Dalam Angka, 2022

Upaya peningkatan pelayanan publik dilakukan dengan meningkatkan kualitas pemberi layanan. Beberapa hal yang menjadi fokus pengembangan adalah efektifitas dan produktivitas kinerja aparatur, peningkatan kapasitas tersebut dilakukan melalui pendidikan maupun pelatihan serta pembinaan pegawai. Upaya peningkatan kapasitas aparatur dilakukan guna mewujudkan penempatan jabatan sesuai kompetensi yang dimiliki pegawai. Persentase pejabat struktural yang lulus dalam

pendidikan dan pelatihan kepemimpinan sesuai tingkatan mengalami tren yang fluktuatif sejak tahun 2017 hingga 2021. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat pejabat struktural yang belum mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan kepemimpinan sesuai tingkatan di Kabupaten Banggai Kepulauan.

2.3.4.4 Penelitian dan Pengembangan

Peningkatan daya saing antar daerah merupakan agenda penting dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Kolaborasi antara stakeholders menjadi faktor kunci dalam meningkatkan daya saing. Instansi yang terkait memiliki tugas untuk melaksanakan penelitian dan pengembangan dalam bidang pemerintahan dalam negeri. Tugas tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas regulasi dan kebijakan pemerintah serta daya saing daerah melalui penelitian dan pengembangan.

Penelitian dan pengembangan merupakan pendukung perencanaan dalam memberikan rekomendasi bagi pengambil kebijakan. Beberapa fungsi kelitbangan antara lain adalah menyusun kebijakan teknis, program, anggaran penelitian, melaksanakan kelitbangan, memberikan rekomendasi kebijakan dan regulasi serta melaksanakan administrasi kelitbangan. Berikut adalah gambaran hasil penelitian dan pengembangan yang diimplementasikan.

2.3.4.5 Unsur Pengawasan

Salah satu fungsi penunjang pemerintahan adalah pengawasan. Fungsi pengawasan terkait pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang bertujuan memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Capaian fungsi pengawasan di Kabupaten Banggai Kepulauan dengan beberapa indikator makro (*outcome*), terutama Maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP.

2.3.4.5 Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah bagian dari urusan penunjang pemerintahan yang mendukung efektivitas tata kelola pemerintahan di Kabupaten Banggai Kepulauan. Sekretariat Daerah tidak lepas dari tugas dan fungsi koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi berbagai kebijakan Bupati dan Wakil Bupati. Perangkat daerah tersebut menjadi koordinator pencapaian beberapa indikator kinerja makro

(outcome), salah satunya adalah capaian nilai Reformasi Birokrasi. Reformasi birokrasi berupaya mencapai sasaran terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas birokrasi, serta terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik.

2.3.4.5 Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD memiliki fungsi untuk memfasilitasi anggota DPRD dalam membuat kebijakan daerah dan penyusunan produk hukum daerah. Dalam menjalankan fungsinya, Sekretariat Dewan memiliki tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan DPRD.

2.3.4.5 Kewilayahan

Unsur kewilayahan dijalankan oleh kecamatan yang memiliki tugas berupa koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan. Salah satu kinerja outcome kecamatan direpresentasikan oleh capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). IKM mengukur kualitas pelayanan publik atau penerapan standar pelayanan publik. IKM sekaligus representasi akuntabilitas sosial instansi pemerintah kepada masyarakat. Hal ini diharapkan menjadi representasi nyata dari perbaikan kualitas pelayanan publik yang dijalankan oleh kecamatan.

2.3.4.5 Pemerintahan Umum

Unsur Pemerintahan Umum merupakan pelaksanaan tugas dan fungsi urusan Kesatuan Bangsa dan Politik. Beberapa capaian kinerja di Kabupaten Banggai Kepulauan, antara lain berupa cakupan konflik antar kelompok masyarakat yang ditangani, yang memiliki kinerja pada 2020 belum memenuhi target RPJMD, yakni 85,71% dengan target 100%.

2.4 Aspek Daya Saing Daerah

Bagian ini mengungkap daya saing daerah yang didasarkan pada Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Aspek daya saing daerah dalam naskah ini terpilah menjadi fokus berikut: (a) Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah, (b) Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur, (c) Fokus Iklim Berinvestasi, (d) Fokus Sumber Daya Manusia.

2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Kemampuan ekonomi daerah dalam kaitannya dengan daya saing daerah adalah kapasitas ekonomi daerah harus memiliki daya tarik (*attractiveness*) bagi pelaku ekonomi yang telah berada didalam dan akan masuk ke suatu daerah untuk menciptakan multiplier effect bagi peningkatan daya saing daerah.

A. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita

Pengeluaran rata-rata per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan baik yang berasal dari pembelian, pemberian maupun produksi sendiri dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga dalam rumah tangga tersebut. Pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita Kabupaten Banggai Kepulauan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.53
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita
Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017-2020

Uraian	2017	2018	2019	2020*	2021**
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	1.501,24	1.578,06	1.626,66	1.600,76	1.638,16

Sumber : BPS Kab. Banggai Kepulauan, 2022

2.4.2 Fokus Wilayah/ Infrastruktur

Aspek daya saing daerah pada fokus fasilitas wilayah/ infrastruktur diarahkan untuk meninjau indikator-indikator yang menunjukkan kondisi fasilitas maupun infrastruktur yang tersedia di sebuah daerah. Ketersediaan fasilitas dan infrastruktur daerah sangat diperlukan untuk mendukung kelancaran mobilitas orang serta barang dan jasa guna mendorong kegiatan perekonomian.

2.4.2.1 Perhubungan

Keberhasilan pembangunan pada urusan perhubungan salah satunya dapat dilihat dari sejauh mana pemerintah dapat menekan angka kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas dapat disebabkan oleh banyak faktor seperti kurangnya perlengkapan dan keamanan jalan, kepatuhan pengemudi/human error, dan kondisi kendaraan yang digunakan. Kejadian kecelakaan yang fatal bahkan dapat mengakibatkan kematian. Oleh karena itu penting untuk melihat data mengenai angka kecelakaan lalu lintas.

2.4.2.2 Sarana Perekonomian

Infrastruktur kewilayahan lain yang menjadi fokus pembangunan adalah terkait sarana perekonomian. Infrastruktur penunjang perekonomian perlu menjadi perhatian guna dapat mendukung pariwisata di Kabupaten Banggai Kepulauan. Beberapa sarana perekonomian yang dapat mendukung pariwisata di Kabupaten Banggai Kepulauan adalah hotel dan restoran. Jumlah rumah makan/ restoran di Kabupaten Banggai Kepulauan menurut data BPS tahun 2020 sejumlah 151 buah yang tersebar di berbagai kecamatan terutama yang berada di perkotaan.

Seiring dengan bertambahnya jumlah restoran/ rumah makan di Kabupaten Banggai Kepulauan, fasilitas penginapan juga terus meningkat. Peningkatan jumlah sarana perekonomian tersebut sangat berdampak positif terhadap upaya peningkatan pariwisata di Kabupaten Banggai Kepulauan.

2.4.2.3 Jaringan Listrik

Fokus pengembangan infrastruktur kewilayahan yang lain adalah terkait jaringan kelistrikan. Kebijakan tersebut diupayakan agar setiap desa memiliki sumber kelistrikan yang dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan yang lainnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa desa yang masih belum teraliri listrik. Beberapa kendala yang dihadapi dalam pemenuhan kebutuhan listrik di desa-desa adalah terkait lokasi geografis beberapa distrik yang sulit dijangkau atau terhalang kawasan hutan lindung. Upaya lain yang dapat dilakukan guna memenuhi kebutuhan listrik di desa-desa adalah dengan membangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).

2.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi

Upaya untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif merupakan salah satu fokus pembangunan Kabupaten Banggai Kepulauan. Sinkronisasi peraturan baik pusat maupun daerah terkait investasi, perbaikan pelayanan, dan penyederhanaan birokrasi masih perlu untuk terus ditingkatkan guna mewujudkan iklim investasi yang semakin kondusif.

2.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia

2.4.4.1 Kualitas Tenaga Kerja

Tenaga kerja adalah modal bagi geraknya roda pembangunan. Jumlah dan komposisi tenaga kerja akan terus mengalami perubahan seiring dengan

berlangsungnya proses demografi. Proporsi pekerja yang berpendidikan S1/S2/S3 di Kabupaten Banggai Kepulauan dapat di lihat pada tabel berikut.

Tabel 2.54
Rasio Lulusan S1/S2/S3 Tahun 2017-2020

Uraian	Tahun			
	2017	2018	2019	2020
Jumlah lulusan S1/S2/S3				
Jumlah Penduduk	116.811	117.633	118.403	120.142
Rasio (x10.000)				

Sumber: BPS Kabupaten Banggai Kepulauan, 2021

2.4.4.2 Rasio Ketergantungan

Aspek saing daerah pada fokus sumber daya manusia dapat dilihat melalui indikator rasio ketergantungan. Rasio ketergantungan merupakan perbandingan antara jumlah penduduk bukan angkatan kerja (kelompok usia 0-14 tahun dan kelompok usia lebih dari 64 tahun) dibandingkan dengan jumlah angkatan kerja (usia 15-64). Semakin tinggi angka Rasio Ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk usia produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sementara itu, semakin rendah Rasio Ketergantungan menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk usia produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Tabel 2.55
Rasio Ketergantungan Kab. Banggai Kepulauan Tahun 2017-2021

Uraian	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Penduduk < 15 Tahun	35.424	36.073	35.627	33.323	33.429
Jumlah Penduduk > 65 Tahun	13.858	5.866	6.109	6.604	6.948
Jumlah Penduduk tidak Produktif	49.282	41.939	41.736	39.927	40.377
Jumlah Penduduk 15-64 tahun	67.529	75.694	76.667	80.215	81.307
Rasio ketergantungan	72,98	55,41	54,44	49,77	49,66

Sumber: BPS Kabupaten Banggai Kepulauan, 2022 (diolah)

2.4.4.2 Penduduk yang Bekerja Menurut Pendidikan yang Ditamatkan

Tingkat pendidikan dapat mengindikasikan kualitas dan produktivitas tenaga kerja. Pada tahun 2021, penduduk bekerja masih didominasi oleh mereka yang berpendidikan SD/ sederajat yaitu sebanyak 43,69 persen. Sementara tenaga kerja yang berpendidikan tinggi yaitu diploma dan universitas sebesar 16,88 persen. Dibandingkan dengan tahun 2020, tenaga kerja yang berpendidikan SD dan Diploma mengalami penurunan masing- masing -5,46 persen poin dan -22,87 persen poin. Sedangkan pertumbuhan tertinggi terjadi pada tenaga kerja yang berpendidikan universitas dan disusul oleh masyarakat yang berpendidikan SMK. Hal ini mengindikasikan adanya perbaikan kualitas pekerja yang ada di Kabupaten Banggai Kepulauan dimana tingkat pendidikan pekerja semakin membaik walaupun masih terdapat pengangguran didalamnya.

2.5 Hasil Evaluasi Capaian RPJMD Tahun 2017-2022

Tabel 2.56
Capaian Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
RPJMD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017-2022

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	2022	Capaian Kinerja					% Capaian 2021 terhadap target akhir	Interpretasi
		Target	2017	2018	2019	2020	2021		
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT									
Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi									
1	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian								
1	PDRB (ADHK)	3.590.220,00	2.461.853,51	2.563.110,00	2.666.090,00	1.603.270,00	2.735.240,00	76,19	=
2	PDRB (ADHB)	5.909.590,00	3.299.736,46	3.601.970,00	3.865.670,00	3.833.550,00	4.128.830,00	69,87	=
3	Pertumbuhan PDRB	8,76	6	4,11	4,02	2,36	5,07	57,88	<
4	Laju inflasi	1,5	4,33	6,46	2,3	2,3	-	0	N/A
5	PDRB per kapita	29,47	21,08	21,79	32,78	32	33,93	115,13	>
6	Indeks Gini	0,32	0,338	0,345	0,32	0,32	0,32	100	>
9	Persentase penduduk diatas garis kemiskinan	90,5	84,08	84,35	85,19	85,19	13,72	95,34	>
12	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	68	64,07	64,68	65,13	65,42	65,61	96,49	>
13	Angka melek huruf	100	94,67	97,28	95,84	97,45	96,38	96,38	>
14	Angka rata-rata lama sekolah	9,2	7,99	8,14	8,19	7,94	2,93	91,74	>
15	Angka usia harapan Angka hidup	68,32	64,53	65,12	65,71	66,31	66,59	97,47	>
16	Persentase balita gizi buruk	0,33	2,4	1,85	0,84	0,5	0,79	239,39	>
20	Tingkat Partisipasi angkatan kerja	78,96	70,72	70,18	73,55	72,97	71,98	91,16	>
21	Tingkat pengangguran Terbuka	1,7	3,24	3,6	2,02	2,46	2,95	173,53	>
22	Rasio penduduk yang bekerja	99,66	96,76	96,39	98	98		-	N/A
28	Persentase PAD terhadap pendapatan	3,56	1,41	2,50	3,57	4,38	4,09	114,89	>
29	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	WTP	WDP	WDP	WTP	Disclimer	Sementara	-	N/A

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	2022	Capaian Kinerja					% Capaian 2021 terhadap target akhir	Interpretasi
		Target	2017	2018	2019	2020	2021		
33	Kontribusi Sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	28,42	48,96	49,08	47,68	47,92	47,43	166,89	>
39	Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB	3,04	48,96	49,08	47,68	47,92	47,43	3,04	<
40	Kontribusi Sektor Pertambangan terhadap PDRB (*B)	0,92	0,96	0,92	0,93	0,93	0,83	90,22	>
42	Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap PDRB	12,89	15,21	15,55	16,62	15,68	47,43	367,96	>
43	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB (*G)	20,19	19,37	19,11	19,53	19,52	19,68	97,47	>
44	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB (*C)	2,89	2,53	2,52	2,61	2,74	2,68	92,47	>
ASPEK DAYA SAING DAERAH									
1	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita	853,5	2020,33	2250,93	422,89	440,247			N/A
3	Persentase pengeluaran konsumsi non pangan perkapita	452,56	302,081	361,475	344,892	45,19			N/A
4	Produktivitas total daerah	56,09	43,53	46,48	45,97	43,88	43,49	77,54	=
9	Angka kriminalitas yang tertangani	7,4	37,67	55,85	45,27	46,03	22,02	297,57	>
10	Rasio ketergantungan	0,44	72,98	55,41	54,44	49,77	49,66	11286,36	>
ASPEK PELAYANAN UMUM									
	Layanan Urusan Wajib Dasar								
1	Pendidikan								
1.1	1.1. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	4.170,00	4.010,16	13.140,00	12.259,00	4.662,00	4.662,00	111,80	>
1.2	1.2. Angka partisipasi kasar	100	112,6	114,2	89,02	99,68	110,21	100,21	>
1.3	1.3. Angka pendidikan yang ditamatkan		100	100	100	-	-	-	N/A
1.4	1.4. Angka Partisipasi Murni								

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	2022	Capaian Kinerja					% Capaian 2021 terhadap target akhir	Interpretasi
		Target	2017	2018	2019	2020	2021		
1.5	1.4.1 Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	100	98,4	99,7	87,06	105,13	86,94	86,94	=
1.6	1.4.2. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	100	80,9	82	106,96	84,7	84,7	84,7	=
1.8	1.5. Angka partisipasi sekolah								
1.9	1.5.1 Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A	100	97	98	87,3	99,2	92	92	>
1.10	1.5.2 Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B	97,75	96	98	90,43	91,05	91,05	95,34	>
1.12	1.6. Angka Putus Sekolah:								
1.13	1.6.1. Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	0,00	0,2	0,1	0,04	0,02	0,02	0,02	<
1.14	1.6.2. Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	0,00	0,2	0,1	0,19	0,19	0,10	0,00	<
1.16	1.7. Angka Kelulusan								
1.17	1.7.1. Angka Kelulusan (AL) SD/MI	100	100	100	100	100	100	100	>
1.18	1.7.2. Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	99,73	100	100	100	100	100	100,27	>
1.19	1.7.3. Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	99,91	100	100	100	100	100	100,09	>
1.23	1.9. Fasilitas Pendidikan:								
1.24	1.9.1. Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	90,56	74	82	106,4	142	15	9,38	<
1.25	1.9.2. Sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik	90,91	90	93	88,68	53	29	52,73	<
1.26	1.10. Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar	342	01,07	0,045	33,46	113,03	113,03	33,05	<
1.27	1.11. Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah	135	01,06	01,06	73,2	120,06	120,06	88,93	=

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	2022	Capaian Kinerja					% Capaian 2021 terhadap target akhir	Interpretasi
		Target	2017	2018	2019	2020	2021		
	pendidikan menengah								
1.28	1.12. Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar	696,50	01,14	01,18	50,21	644,60	644,60	92,55	>
1.33	1.17. Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun, perempuan dan laki-laki	100	0,79	0,8	95,84	97,45	96,38	96,38	>
1.34	1.18. Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)	100,00	0,79	0,80	-	95,15	84,74	84,74	=
1.35	1.19. Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	85	74,1	87	102,73	80,2	83	97,65	>
2	2. Kesehatan								
2.1	2.1. Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	22	3,26	5,33	1,05	2,19	2,16	9,82	<
2.2	2.2. Angka kelangsungan hidup bayi	978	99,67	99,46	99,89	99,78	99,78	10,20	<
2.3	2.3. Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	23	31,81	0,49	1,05	2,19	0	0	<
2.4	2.4. Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	19	17,95	9,22	9,44	11,48	0	0	<
2.5	2.5. Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	102	109	291	223	223	176	172,55	>
2.6	2.6. Rasio posyandu per satuan balita	16	18,39	19,24	20,14	20,13	21,13	132,06	>
2.7	2.7. Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	0,11	0,49	0,49	0,48	0,48	0,48	436,36	>
2.8	2.8. Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	0,02	0,008	0,0017	96	0,002	0,01	50	<
2.9	2.9. Rasio dokter per satuan penduduk	20,003	0,26	0,31	0,35	0,4	0,21	1,05	<
2.10	2.10. Rasio tenaga medis per satuan penduduk	2,82	4,6	4,77	783,7	0	0,28	9,93	<

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	2022	Capaian Kinerja					% Capaian 2021 terhadap target akhir	Interpretasi
		Target	2017	2018	2019	2020	2021		
2.11	2.11. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	85	30	59	12	146	356	418,82	>
2.12	2.12. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	100	70,3	100	13,7	13,7	76	76	=
2.13	2.13. Cakupan Desa/kelurahan <i>Universal Child Immunization</i> (UCI)	95	90	88	90,3	140	63,3	66,63	=
2.14	2.14. Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	100	100	100	90,3	100	100	100	>
2.19	2.19. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	100	100	73,7	85,8	100	86,14	86,14	=
2.24	2.24. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	100	100	100	100	100	100	100	>
2.33	2.33. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	1	0	24,28	0	3,2	1	100	>
2.34	2.34. Cakupan kunjungan bayi	100	0	61,2	101,8	100	100	100	>
2.35	2.35. Cakupan puskesmas	100	108,33	108,33	101,8	108,33	100	100	>
2.36	2.36. Cakupan pembantu puskesmas	31,44	31,25	31,25	108,33	31,25	31,25	99,4	>
2.37	2.37. Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	100	70,27	79,7	31,25	1922	100	100	>
2.38	2.38. Cakupan pelayanan nifas	100	0	100	84,7	100	100	100	>
3.1.1	3.1.1. Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	94,39	58,61	72,48	78,38	74,17	77,73	82,35	=
3.1.2	3.1.2. Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk	1,24	0,77	0,77	0,85	0,75	0,75	60,48	<
3.1.4	3.1.4. Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	94,39	58,61	72,48	78,38	74,17	77,73	82,35	=
3.1.12	3.1.12. Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	95	60	75	80	80	80	95	>

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	2022	Capaian Kinerja					% Capaian 2021 terhadap target akhir	Interpretasi
		Target	2017	2018	2019	2020	2021		
3.1.14	3.1.14. Persentase penduduk berakses air minum	65,55	36,74	80	85	77,83	86,27	133,65	>
4.1	4.1. Rasio rumah layak huni	6,5	1	5,13	4	6,65	6,78	6,5	<
Layanan Urusan Wajib Non Dasar									
1	1. Tenaga Kerja								
1.3	1.3. Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	87,71	48	75	80	83,33	93,94	87,71	=
2.5	2.3. Partisipasi perempuan di lembaga swasta	81,09	79,09	83,09	88,09	83,42	84,87	104,66	>
2.7	2.4. Rasio KDRT	0,05	0,041	0,039	0,038	0,034	0,026	52,54	<
2.9	2.5. Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur	0,3215	32,40	32,35	32,3	32,35	32,33	10057,02	>
2.11	2.6. Partisipasi angkatan kerja perempuan	5,41	95,19	94,61	95,98	95,80	96,47	1783,27	>
2.13	2.7. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	100	100	100	100	100	100	100	>
02.27	2.14. Rasio APM perempuan/laki-laki di SD	1,05	102,84	99,83	98,06	99,23	97,48	9283,81	>
2.29	2.15. Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP	0,98	109,36	107,4	110,28	98,22	103,67	10578,57	>
2.31	2.16. Rasio APM perempuan/laki-laki di SMA	1,23	102,09	113,01	113,99	112,23	108,17	8794,31	>

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	2022	Capaian Kinerja					% Capaian 2021 terhadap target akhir	Interpretasi
		Target	2017	2018	2019	2020	2021		
6.1	6.1. Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	85,16	79,22	87,28	89,11	90,7	99,53	116,87	>
06.02	6.2 .Rasio bayi berakte kelahiran	90	31,43	39,04	65,89	57,69	39,60	44	<
6.3	6.3. Rasio pasangan berakte nikah	94,09	28	35	28,97	50,63	41,35	43,94	<
7.4	7.4. Persentase LSM aktif	100	100	100	100	100	100	100	>
7.6	7.6. Persentase PKK aktif	100	100	100	100	100	100	100	>
9	9. Perhubungan								
9.1	9.1. Jumlah arus penumpang angkutan umum	84.567,00	221.050	231.843	165.046	157.000	164.522	84.567,00	>
9.2	9.2. Rasio ijin trayek								N/A
9.3	9.3. Jumlah uji kir angkutan umum	181	0	0	0	0	0	0	<
9.4	9.4. Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	13	7	12	12	13	13	100	>
9.5	9.5. Persentase layanan angkutan darat	8,91	2,98	4,05	4,09	8,5	8,76	98,36	>
9.7	9.7. Pemasangan Rambu-rambu	156,8	0	196	590	168	2	1,28	<
9.8	9.8. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	0,04	1,67252	0,0708849	0,0700715	0,0700715	0,0700715	0,04	<
11.1	11.1. Persentase koperasi aktif	100	100	100	100	100	101	101	>
11.2	11.2. Persentase UKM non BPR/LKM aktif	0,07	01.40	0	0	16.725.187	0	6	<
11.3	11.3. Persentase BPR/LKM aktif	6,7	2	4	0	0	0	6,7	<

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	2022	Capaian Kinerja					% Capaian 2021 terhadap target akhir	Interpretasi
		Target	2017	2018	2019	2020	2021		
11.4	11.4. Persentase Usaha Mikro dan Kecil	99,80	0	16	41	20	2,03	2,03	<
12.4	12.4. Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	113,97	0	0	0	0	0	-	N/A
14.1	14.1. Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	>
14.2	14.2. Buku "kabupaten dalam angka	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	>
14.3	14.3. Buku "PDRB"	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	>
16	16. Kebudayaan								
16.1	16.1. Penyelenggaraan festival seni dan budaya	1	1	1	1	1	0	0	<
16.2	16.2. Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	4	0	0	0	2	0	0	<
17.1	17.1. Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	55,1	697,167	115,88	35,72	22,84	84,05	152,54	>
17.2	17.2. Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	204.576,50	2.735	950	1.953	1.953	788	0,39	<
17.3	17.3. Rasio perpustakaan persatuan penduduk	0,02	0	0,11	0,09	0,01	0,81	4050	>
17.4	17.4. Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun	6.785,47		4.635,00	1.786,00	1.142,00	5.043,00	74,32	=
	Layanan Urusan Pilihan								
2	Pertanian								
2.1	Kontribusi Pertanian/ Perkebunan terhadap PDRB (%)	22,75	21,83	21,22	47,87				N/a
2.3	Kontribusi Sektor Perkebunan (Tanaman keras) terhadap PDRB (%)	61,79	13,42	13,2					N/a
2.4	Kontribusi Produksi Kelompok Petani terhadap PDRB (%)								
	Padi Sawah (Ton/ha)	6,323	2,103	4,86	3,04	3,02	3,19	50,45	<

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	2022	Capaian Kinerja					% Capaian 2021 terhadap target akhir	Interpretasi
		Target	2017	2018	2019	2020	2021		
	Jagung (Ton/ha)	4,867	2,413	0,31	3,25	3,02	1,87	38,42	<
	Kacang Tanah (Ton/ha)	11,698	907	1,30	1,29	1,29	1,07	9,15	<
	Kacang Hijau (Ton/ha)	6,68	4,5	0,74	0	1,25	0	0,00	<
	Kedelai (Ton/ha)	10,015	3	0,01	0	0	0	0,00	<
	Ubi Kayu (Ton/ha)	20,771	4	20,74	24,15	23,85	10,15	48,87	<
	Ubi Jalar (Ton/ha)	9,214	821	8,89	12,48	12,22	7,93	86,06	=
2.6	Cakupan Bina Kelompok Petani								
	Perkebunan								
	Luas Area (Ha) Perkebunan								
	Kelapa Dalam	13990,235	13.979,75	20.044	20.028	20.028	10.200,05	72,91	=
	Kakao	4327,889	3.547,23	6.551	6.530	6.530	2.952	68,21	=
	Kopi Robusa	29,722275	29,7	47	47,05	47,05	0	0	<
	Cengkeh	2959,8883	2.957,670	4.247	4.276	4.276	107.846	3643,57	>
	Jambu Mete	421,81	2.584,34	5.541	5.565	5.565	0	0	N/A
	Kemiri	201,93	631,31	1.671	1.681	1.681	0	0	N/A
	Vanili	2,53	46,49	70	79,08	79,08	0	0	N/A
	Lada	4,062233	3,964	19	20,51	20,51	0	0	<
	Pala	266,1463	266	1.743	1.956	1.956	94,102	35,36	<
	Kapuk	14,307865	3,3	4	9,2	9,2	0	0	N/A
	Produksi Perkebunan Di Kabupaten Banggai Kepulauan (ton)								
	Kelapa Dalam	10293,789	9.287,25	10.033	10.236,76	10.236,76			N/a
	Kakao	2492,66	946,63	278	277,5	277,5			N/a
	Kopi Robusa	2,969	0,52	1	1,7	1,7			N/a
	Cengkeh	879,27	127,03	227	374,3	374,3			N/a

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	2022	Capaian Kinerja					% Capaian 2021 terhadap target akhir	Interpretasi
		Target	2017	2018	2019	2020	2021		
	Jambu Mete	421,806	185,81	331	358,21	358,21			N/a
	Kemiri	201,941	164,53	0	246,46	246,46			N/a
	Vanili	2,5313	1,76	1	0,92	0,92			N/a
	Lada	3,3885	0,31	1	0,94	0,94			N/a
	Pala	62,2504	46,76	89	93,48	93,48			N/a
	Kapuk	4,1509	1,03	1	1	1			N/a
5	Perdagangan								
5.2	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal (%)	23,38	19	19	31,48	0	0		N/a
8	Kelauatan dan Perikanan								
8.1	Produksi Perikanan (TON)	8.927,17	12.318,71	13.049,73	5.788,40	9,902.00	10,210.00	8.927,17	>
8.2	Produksi Rumput Laut	712.584	669.894	634,828,30	675.078	832,768	442,099	712.584	>

Keterangan :

> : Tercapai/melampaui

< : Tidak Tercapai

= : Akan Tercapai

N/a : Tidak ada target capaian

BAB III

GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Kondisi keuangan daerah menjadi faktor penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 menyatakan bahwa gambaran keuangan daerah dimaksudkan untuk menjelaskan tentang kapasitas dan kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.

Pengelolaan keuangan daerah diselenggarakan sesuai dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Selain itu, berkaitan tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah maupun struktur APBD, dokumen ini merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 70 Tahun 2019, Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Permendagri Nomor 70 Tahun 2020 tentang Pedoman Tehnis Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 0505889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang mengatur secara rinci Pengelolaan Keuangan Daerah.

Selanjutnya beberapa prinsip yang digunakan oleh Pemerintah Daerah dalam penyusunan anggaran daerah yaitu :

1. Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional, yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja;
2. Penganggaran pengeluaran harus didukung oleh kepastian penerimaan daerah dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang

belum tersedia atau tidak mencukupi anggaran dalam APBD/ perubahan APBD; dan

3. Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD dan dibukukan dalam rekening Kas Umum Daerah.

3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu

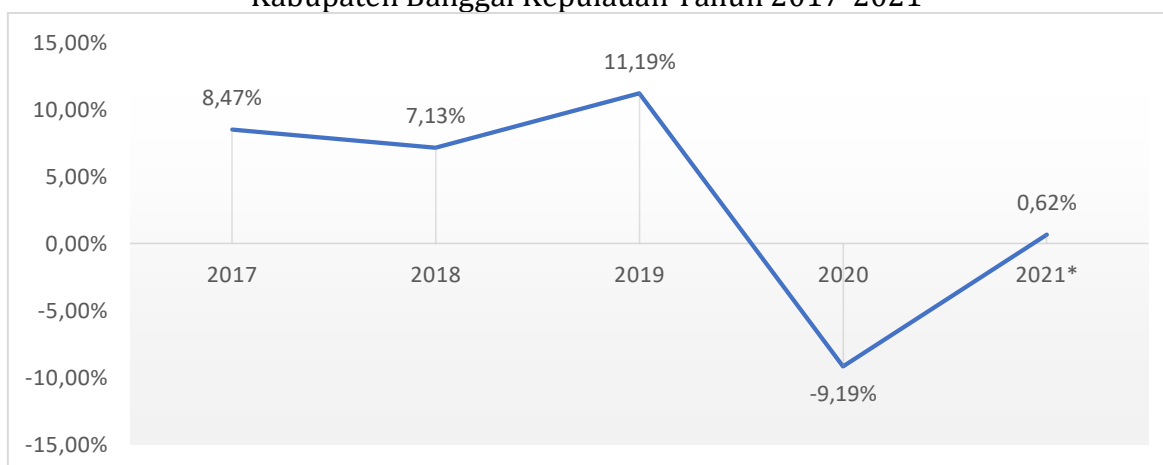
Gambaran kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan selang tahun 2017–2021 dapat ditunjukkan dengan pertumbuhan dan proporsi komponen APBD berupa pengelolaan pendapatan daerah, kinerja pengelolaan belanja daerah dan kinerja pengelolaan pembiayaan daerah serta neraca daerah.

3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD

Kinerja pelaksanaan APBD mencerminkan kinerja pemerintah dalam kemampuannya untuk mengelola keuangan dan pendanaan pada periode tertentu. Kinerja pelaksanaan APBD ini dalam melihat seberapa besar pemerintah memiliki kemandirian, kemampuan mengoptimalkan pendapatan, serta kemampuan dalam menekan pengeluaran, serta kemampuan dalam menyerap anggaran.

Kinerja pelaksanaan APBD Kabupaten Banggai Kepulauan meliputi pencapaian kinerja pendapatan daerah, perkembangan belanja daerah dan pembiayaan daerah tahun 2017–2021, secara rinci dapat di lihat pada grafik berikut.

Gambar 3.1
Persentase Pertumbuhan Pendapatan Daerah
Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017-2021*



Sumber: Laporan APBD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017-2021*, diolah

*Angka sementara (sebelum audit BPK)

3.1.1. 1 Kinerja Pengelolaan Pendapatan Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dan dipungut sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah. Adapun obyek pendapatan daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan pemerintah tersebut meliputi : (1). Pendapatan Asli Daerah (PAD); (2) Pendapatan Transfer; (3) Lain- lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Dari tahun 2017 hingga 2021, pertumbuhan pendapatan daerah Kabupaten Banggai Kepulauan mengalami perkembangan yang fluktuatif dimana tahun 2020 pendapatan daerah mengalami tekanan penurunan yang sangat signifikan dengan persentase perlambatan pertumbuhan pendapatan sebesar -9,19 persen. Hal ini diakibatkan oleh menurunnya pendapatan transfer sebesar 10 persen. Persoalan ini terjadi disebabkan oleh kasus pandemi covid-19 yang melanda Indonesia yang memaksa keuangan negara mengalami refokusing.

Analisis kinerja pendapatan daerah juga dapat dilihat dari kontribusi masing-masing komponen pendapatan terhadap pendapatan daerah. Kontribusi masing-masing komponen pendapatan daerah ini menunjukkan seberapa besar pengaruh masing-masing komponen pendapatan daerah terhadap total pendapatan daerah. Berikut ini adalah uraian kontribusi masing-masing komponen pendapatan terhadap pendapatan daerah di Kabupaten Banggai Kepulauan yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.1

Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017-2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021*	Rata-rata Pertumbuhan
PENDAPATAN –LRA	764.650.292.158,46	819.184.420.108,54	910.888.768.858,00	827.151.804.218,27	832.294.901.037,34	2,44
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	40.841.502.554,46	23.922.233.075,54	34.231.612.395,00	36.213.331.404,27	28.768.140.497,34	-3,28
Pendapatan Pajak Daerah	5.679.623.690,24	5.632.812.335,50	6.940.777.172,80	4.800.752.408,75	5.630.410.617,25	2,21
Pendapatan Retribusi Daerah	5.131.212.160,00	8.267.732.595,00	14.740.563.898,00	19.998.042.156,00	16.216.053.738,00	39,04
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	735.421.199,00	1.155.602.301,00	1.319.993.123,00	1.703.694.094,00	2.588.375.499,55	38,09
Lain-lain PAD Yang Sah	29.295.245.505,22	8.866.085.844,04	11.230.278.201,20	9.710.842.745,52	4.333.300.642,54	-27,99
PENDAPATAN TRANSFER – LRA	721.528.793.714,00	775.307.567.033,00	846.179.994.463,00	761.008.452.814,00	803.526.760.540,00	3,03
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	595.065.929.286,00	658.206.305.626,00	714.364.855.849,00	627.257.913.024,00	666.339.460.234,00	3,29
Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	19.386.830.751,00	28.346.510.453,00	21.370.899.434,00	37.792.595.883,00	56.044.929.192,00	36,69
Dana Alokasi Umum (DAU)	453.262.455.000,00	465.346.799.000,00	490.735.851.000,00	444.960.480.000,00	440.660.646.000,00	-0,54
Dana Alokasi Khusus	122.416.643.535,00	164.512.996.173,00	202.258.105.415,00	144.504.837.141,00	169.633.885.042,00	11,54
Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	108.556.288.000,00	99.213.710.000,00	113.132.741.000,00	114.114.949.000,00	114.089.949.000,00	1,57
Transfer Pemerintah Provinsi	17.906.576.428,00	17.887.551.407,00	18.682.397.614,00	19.635.590.790,00	23.097.351.306,00	6,77
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LRA	2.279.995.890,00	19.954.620.000,00	30.477.162.000,00	29.930.020.000,00	-	275,38
Pendapatan Hibah	2.082.711.700,00	19.739.520.000,00	30.297.162.000,00	27.899.800.000,00	-	297,78
Pendapatan Lainnya	197.284.190,00	215.100.000,00	180.000.000,00	2.030.220.000,00	-	340,2

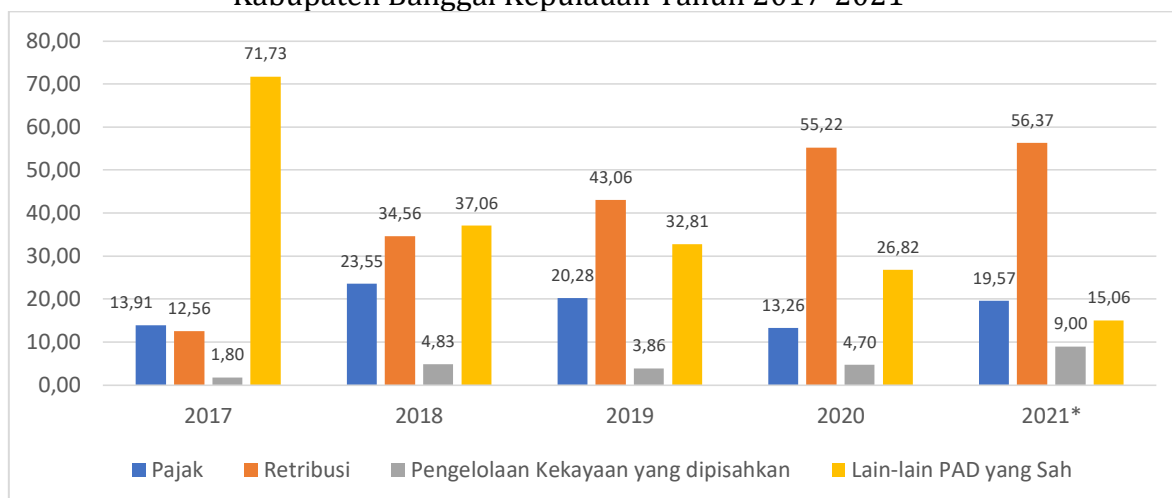
Sumber: Laporan APBD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017-2021*, diolah

Secara umum, rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah Kabupaten Banggai Kepulauan sebesar 2,44 persen. Komponen pendapatan daerah yang pertumbuhannya paling tinggi yaitu berasal dari lain-lain pendapatan daerah yang sah, diikuti pendapatan transfer. Meskipun rata-rata pertumbuhan pendapatan transfer sangat rendah, namun memiliki kontribusi terhadap pendapatan daerah paling besar, yaitu dengan besaran proporsi rata-rata selama 5 tahun terakhir sebesar 94,09 persen, diikuti oleh PAD sebesar 3,97 persen, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 1,94 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan transfer terutama transfer dari pusat masih menjadi komponen utama dalam penyusunan pendapatan daerah Kabupaten Banggai Kepulauan. Ketergantungan terhadap pendapatan transfer tersebut berasal dari dana perimbangan.

a) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Dari ketiga komponen pembentuk pendapatan daerah, PAD memiliki rata-rata pertumbuhan sudah baik. Pertumbuhan PAD ini tentu saja didukung oleh kontribusi dari masing-masing komponen PAD itu sendiri. Berikut adalah grafik persentase kontribusi komponen PAD terhadap total PAD Kabupaten Banggai Kepulauan.

Grafik 3.2
Persentase Kontribusi Komponen PAD terhadap Total PAD
Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017-2021*



Sumber: Laporan APBD Kabupaten Banggai Kepulauan 2017-2021*, diolah

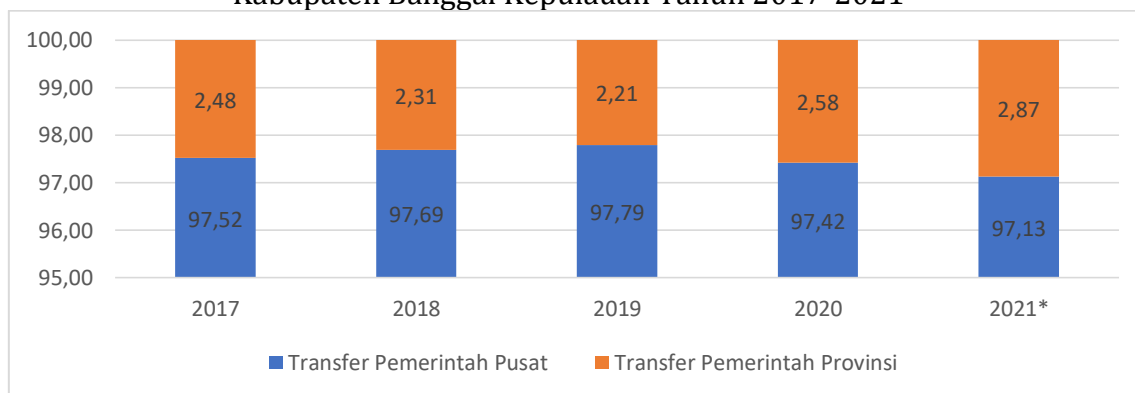
Rata-rata kontribusi komponen PAD terhadap total PAD paling tinggi dan cenderung meningkat setiap tahunnya berasal dari retribusi, diikuti oleh pajak daerah, dan kemudian pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Hal lain yang penting untuk diperhatikan dari kontribusi masing-masing komponen PAD adalah tingkat pertumbuhan seluruh komponen tersebut masih berjalan fluktuatif. Selain itu, pajak daerah dan retribusi daerah mengalami penurunan, sementara pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah mengalami peningkatan pada tahun 2020. Kondisi ini terjadi karena masih belum optimalnya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber PAD dan masih lemahnya data terkait sumber-sumber PAD, seperti pajak dan retribusi. Hal ini perlu diantisipasi karena bisa berdampak pada penurunan PAD yang selanjutnya berpengaruh pada pendapatan daerah itu sendiri.

b) Pendapatan Transfer

Kontribusi pendapatan transfer masih menjadi komponen utama dalam pendapatan daerah Kabupaten Banggai Kepulauan. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh pendapatan transfer terhadap kapasitas keuangan daerah masih signifikan. Berikut ini adalah gambaran kontribusi masing-masing komponen pendapatan transfer Kabupaten Banggai Kepulauan yang dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 3.3

Persentase Kontribusi Pendapatan Transfer terhadap Total Pendapatan Transfer Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017-2021*



Sumber: Laporan APBD Kabupaten Banggai Kepulauan 2017-2021*, diolah

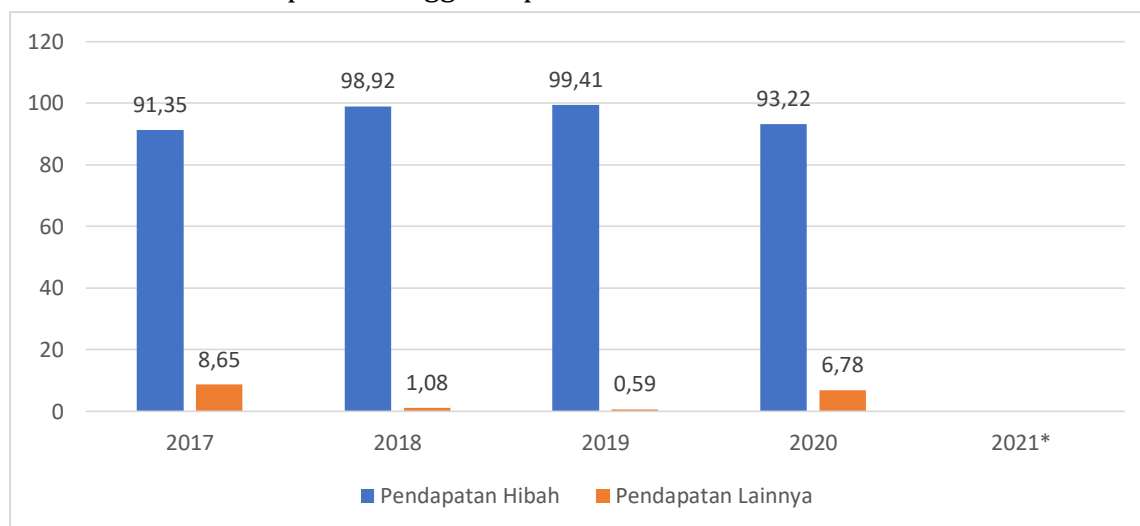
Persentase kontribusi komponen pendapatan transfer masih didominasi oleh transfer pemerintah pusat yang berasal dari dana perimbangan, seperti Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan sebagainya. Rata-rata pertumbuhan seluruh komponen pendapatan transfer mengalami trend fluktuatif dan cenderung menurun pada tahun 2020, seperti dana perimbangan DAU dan DAK. Kondisi ini perlu diantisipasi karena alokasi dana dari pemerintah pusat sangat tergantung pada kondisi APBN, yang sebagian besar masih difokuskan untuk penanganan masalah pandemik covid-19.

c) Lain- Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain pendapatan Daerah yang Sah dari tahun 2017 hingga tahun 2020 mengalami kenaikan yang cukup signifikan, ini terjadi karena berpindahnya akun pendapatan hibah dana BOS yang sebelumnya pada komponen PAD berpindah ke pendapatan Hibah pada komponen Lain- lain Pendapatan Daerah yang sah, hal ini dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 3.4

Persentase Kontribusi Komponen Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017-2020*



Sumber: Laporan APBD Kabupaten Banggai Kepulauan 2017-2021*, diolah

3.1.1.2 Kinerja Pengelolaan Belanja Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah merupakan semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dalam



periode tahun anggaran berkenaan. Belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Berikut ini adalah gambaran pertumbuhan belanja daerah Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel. 3.2

Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017-2021

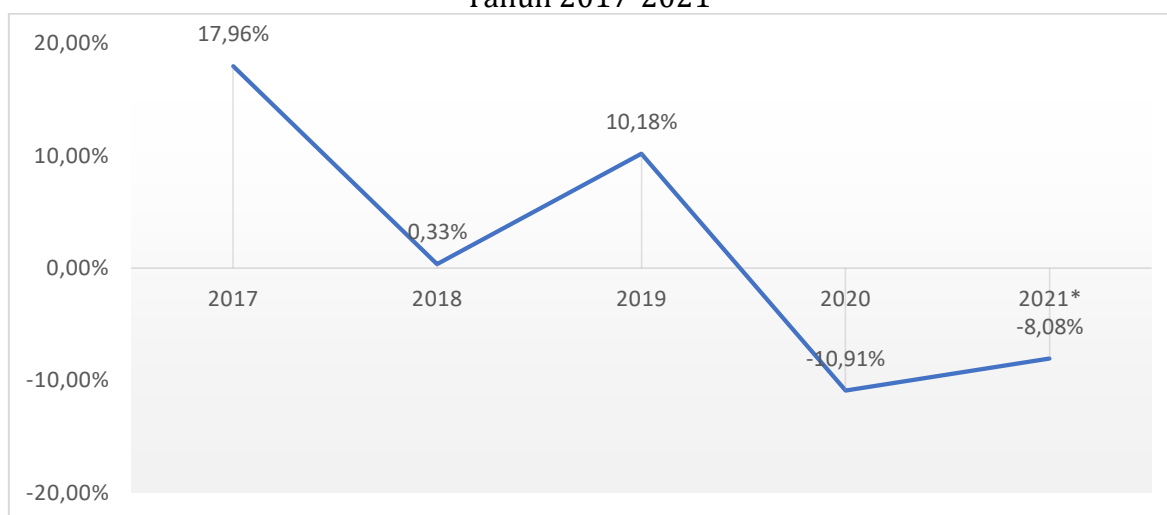
Uraian	2017	2018	2019	2020	2021*	Rata-Rata Pertumbuhan
BELANJA	821.976.102.236,00	824.687.940.203,82	908.657.144.730,09	809.516.707.063,00	744.103.665.687,00	-2,12
BELANJA OPERASI	578.853.138.449,00	622.789.820.431,82	661.507.470.902,52	635.396.093.386,00	627.217.167.217,00	2,14
Belanja Pegawai	269.644.524.031,00	301.857.820.080,00	324.273.559.302,00	339.825.146.471,00	302.747.113.916,00	3,31
Belanja Barang	145.395.228.894,00	167.465.858.799,82	168.442.690.661,52	127.104.053.110,00	147.727.319.989,00	1,86
Belanja Hibah	1.840.000.000,00	3.380.400.000,00	3.140.000.000,00	5.702.450.000,00	13.019.725.912,00	71,63
Belanja Bantuan Sosial	360.000.000,00	369.000.000,00	270.000.000,00	180.750.000,00	1.879.400.000,00	220,6
Belanja Bantuan Keuangan	161.613.385.524,00	149.716.741.552,00	165.381.220.939,00	162.583.693.805,00	161.843.607.400,00	0,24
BELANJA MODAL	239.828.160.787,00	200.283.688.196,00	245.022.680.227,57	161.199.586.177,00	114.248.231.504,00	-14,37
Belanja Modal Tanah	10.923.096.400,00	4.838.337.050,00	8.163.836.600,00	6.264.729.869,97	888.391.800,00	-24,01
Belanja Peralatan dan Mesin	38.053.238.818,00	33.181.453.261,00	36.993.201.705,00	38.025.287.462,00	38.862.544.893,00	0,92
Belanja Bangunan dan Gedung	47.066.607.770,00	60.300.953.295,00	80.824.230.451,00	38.870.366.448,03	43.292.955.773,00	5,41

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021*	Rata-Rata Pertumbuhan
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	139.499.446.153,00	99.572.093.503,00	113.609.246.646,57	76.801.434.436,00	31.133.379.038,00	-26,6
Belanja Aset Tetap Lainnya	4.285.771.646,00	2.390.851.087,00	5.432.164.825,00	1.237.767.961,00	70.960.000,00	-22,12
BELANJA TAK TERDUGA	1.500.000.000,00	702.134.058,00	749.020.000,00	10.799.143.123,00	232.517.371,00	299
Belanja Tak Terduga	1.500.000.000,00	702.134.058,00	749.020.000,00	10.799.143.123,00	232.517.371,00	299
TRANSFER	1.794.803.000,00		1.377.973.600,00	2.121.884.377,00	2.405.749.595,00	17,31
Transfer Bagi hasil ke Kab/ Kota/Desa	1.794.803.000,00	912.297.518,00	1.377.973.600,00	2.121.884.377,00	2.405.749.595,00	17,31
Bagi Hasil Pajak	1.222.399.000,00	412.013.518,00	561.813.390,00	639.612.562,00	450.305.195,00	-11,42
Bagi Hasil Retribusi	572.404.000,00	500.284.000,00	816.160.210,00	1.482.271.815,00	1.955.444.400,00	41,02

Sumber: Laporan APBD Kabupaten Banggai Kepulauan 2017-2021*, diolah

Dari tahun 2017 hingga 2021, rata-rata pertumbuhan belanja daerah Kabupaten Banggai Kepulauan mengalami kontraksi, yaitu -2,12 persen. Hal ini terjadi disebabkan oleh penurunan belanja daerah pada tahun 2020 yang berasal dari belanja operasi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Grafik 3.5
Persentase Pertumbuhan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
Tahun 2017-2021*



Sumber: Laporan APBD Kabupaten Banggai Kepulauan 2017-2021*, diolah

Dari tahun 2017 hingga 2021, persentase pertumbuhan belanja di Kabupaten Banggai Kepulauan mengalami fluktuatif dan cenderung menurun. Pertumbuhan belanja daerah paling rendah yaitu pada tahun 2020, yaitu -10,91 persen atau dengan kata lain terjadi penurunan sebesar 21,09 persen dari tahun sebelumnya.

3.1.1.3 Kinerja Pengelolaan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Komponen pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Analisis terhadap pembiayaan daerah digunakan untuk mendapatkan gambaran pengaruh kebijakan pembiayaan daerah Kabupaten Banggai Kepulauan pada tahun-tahun sebelumnya terhadap surplus maupun defisit belanja daerah sebagai dasar untuk menentukan kebijakan pembiayaan di masa depan. Adapun hasil analisis pembiayaan daerah Kabupaten Banggai Kepulauan dapat dilihat pada tabel berikut di bawah ini.

Tabel. 3.3
Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017-2021*

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021*
PEMBIAYAAN					
PENERIMAAN DAERAH	110.613.754.703,62	48.912.944.626,08	36.534.424.530,80	35.516.048.658,71	12.768.619.550,98
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	110.613.754.703,62	48.912.944.626,08	36.534.424.530,80	35.516.048.658,71	12.768.619.550,98
PENGELUARAN DAERAH	4.375.000.000,00	6.875.000.000,00	3.250.000.000,00	3.360.000.000,00	3.360.000.000,00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	4.375.000.000,00	6.875.000.000,00	3.250.000.000,00	3.360.000.000,00	3.360.000.000,00
PEMBIAYAAN NETTO	106.238.754.703,62	42.037.944.626,08	33.284.424.530,80	32.156.048.658,71	9.408.619.550,98

Sumber: Laporan APBD Kabupaten Banggai Kepulauan 2017-2021*, diolah

3.1.2 Neraca Daerah

Sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, neraca daerah merupakan salah satu laporan keuangan yang harus dibuat oleh setiap pemerintah daerah. Laporan keuangan dimaksud sangat penting bagi manajemen pemerintah daerah, tidak hanya dalam rangka memenuhi kewajiban peraturan perundang-undangan yang berlaku saja, tetapi juga sebagai dasar untuk pengambilan keputusan dalam rangka pengelolaan sumberdaya ekonomi yang dimiliki oleh daerah secara efisien dan efektif.

Neraca daerah merupakan data dan informasi tentang gambaran berbagai hal tentang Aset (aset lancar, aset tetap dan aset lainnya), Kewajiban (jangka pendek dan jangka panjang) dan Ekuitas suatu pemerintahan daerah. Gambaran umum perkembangan neraca daerah Kabupaten Banggai Kepulauan pada periode tahun 2017-2020 menunjukkan bahwa jumlah nilai total aset daerah mengalami fluktuasi. Pada tahun 2017, nilai total aset daerah mencapai sebesar Rp. 3.172.362.151.701,97 yang meningkat menjadi sebesar Rp. 3.379.753.325.041,02 pada tahun 2020.

Aset memberikan informasi tentang sumber daya yang dimiliki dan dikuasai oleh pemerintah daerah yang dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi pemerintah daerah maupun masyarakat di masa datang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, serta dapat diukur dalam satuan moneter.

Kewajiban memberikan informasi tentang utang pemerintah daerah kepada pihak ketiga atau klaim pihak ketiga terhadap arus kas pemerintah daerah. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu yang dalam penyelesaiannya membutuhkan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang. Kewajiban Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan, dalam kurun waktu 4 tahun (2017-2020) mengalami fluktuasi yang cukup signifikan. Fluktuasi nilai kewajiban dengan pihak ketiga dapat dilihat sebagai hal yang wajar selama manajemen pengelolaan keuangan daerah semakin profesional dan digunakan secara tepat untuk program yang relevan.

Ekuitas adalah nilai kekayaan bersih yang dimiliki oleh Pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah. Selama periode 2017-2020, nilai ekuitas Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan terus mengalami



peningkatan. Adapun Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Periode Tahun 2017-2020 dapat dilihat pada tabel 3.4 dibawah ini.

Tabel 3.4
Rata- rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017-2020

Uraian	2017	2018	2019	2020	Rata-rata Pertumbuhan
ASET					
ASET LANCAR					
Kas di Kas Daerah	50.509.864.812,14	34.770.358.503,68	36.312.961.383,81	20.344.359.122,38	(23,57)
Kas di Bendahara Penerimaan	41.048.500,00	166.672.039,00	629.169.346,30	550,00	161,18
Kas di Bendahara Pengeluaran	632.792.516,00	296.923.372,00	249.353.490,00	53.648.665,00	(49,19)
Kas di Puskesmas / FKTP	795.409.617,00	1.674.037.624,00	490.689.402,00	309.494.336,00	0,95
Kas di Bendahara BOS	2.303.777.752,94	3.714.202.374,12	607.816.026,60	6.434.529.395,60	312,07
Kas Lainnya		-	401.648.388,00	1.070.185.527,00	
Piutang Pendapatan	3.884.499.707,00	3.523.239.181,00	6.708.732.858,00	5.399.266.416,95	20,53
Penyisihan Piutang	(371.168.728,53)	(713.759.620,79)	(908.757.109,91)	(963.038.748,85)	41,86
Beban Dibayar Dimuka	236.250.000,00	251.250.000,00	236.250.000,00	226.250.000,00	(1,28)
Persediaan	10.653.909.913,10	14.731.090.267,61	19.676.622.344,75	11.022.231.212,53	9,29
JUMLAH ASET LANCAR	68.686.384.089,65	58.414.013.740,62	64.404.486.129,55	43.896.926.476,61	(12,18)
INVESTASI JANGKA PANJANG					
Investasi Jangka Panjang Permanen					
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	21.491.269.085,00	27.906.281.420,00	32.757.185.440,00	35.542.536.219,00	18,58
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Permanen	21.491.269.085,00	27.906.281.420,00	32.757.185.440,00	35.542.536.219,00	18,58
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	21.491.269.085,00	27.906.281.420,00	32.757.185.440,00	35.542.536.219,00	18,58
ASET TETAP					
Tanah	1.992.453.130.127,00	1.995.748.788.587,00	1.997.710.539.779,00	2.004.271.195.648,97	0,20
Peralatan dan Mesin	249.945.229.688,38	288.187.390.504,42	316.897.489.731,75	353.664.287.110,75	12,29
Gedung dan Bangunan	456.020.746.724,51	516.534.777.516,51	583.384.291.012,51	628.930.957.128,54	11,34
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.001.491.556.038,67	1.066.223.971.125,67	1.182.069.957.846,24	1.248.380.040.358,24	7,65

Uraian	2017	2018	2019	2020	Rata-rata Pertumbuhan
Aset Tetap Lainnya	7.620.031.198,00	7.604.000.053,00	11.479.679.125,00	12.712.042.186,00	20,50
Konstruksi Dalam Pengerjaan	6.044.416.453,00	41.631.024.603,00	50.998.563.022,00	43.699.072.978,00	198,98
Akumulasi Penyusutan	(667.098.828.646,64)	(751.291.955.690,64)	(1.063.864.990.620,23)	(1.063.864.990.620,23)	18,08
JUMLAH ASET TETAP	3.046.476.281.582,92	3.164.637.996.698,96	3.078.675.529.896,27	3.227.792.604.790,27	2,00
ASET LAINNYA					
Aset Lain-lain	35.708.216.944,40	29.692.081.024,96	33.487.877.171,33	72.521.257.555,14	37,50
JUMLAH ASET LAINNYA	35.708.216.944,40	29.692.081.024,96	33.487.877.171,33	72.521.257.555,14	37,50
JUMLAH ASET	3.172.362.151.701,97	3.280.650.372.884,54	3.209.325.078.637,15	3.379.753.325.041,02	2,18
KEWAJIBAN					
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK					
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.369.948.572,00	4.087.769.382,00	2.773.940.990,00	2.766.186.244,00	(18,77)
Utang Beban		0	8.012.543.827,00	12.025.140.110,00	
Utang Jangka Pendek Lainnya	984.556.774,00	1.762.000.779,00	1.279.077.317,00	14.364.401.288,00	358,19
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	6.354.505.346,00	5.849.770.161,00	12.065.562.134,00	29.155.727.642,00	79,99
JUMLAH KEWAJIBAN	6.354.505.346,00	5.849.770.161,00	12.065.562.134,00	29.155.727.642,00	79,99
EKUITAS					
EKUITAS	3.166.007.646.355,97	3.274.800.602.723,54	3.197.259.516.503,15	3.350.597.597.399,02	1,95
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	3.172.362.151.701,97	3.280.650.372.884,54	3.209.325.078.637,15	3.379.753.325.041,02	2,18

Sumber: Laporan APBD Kabupaten Banggai Kepulauan 2017-2020, diolah

Dari hasil analisis terhadap neraca daerah di atas, selanjutnya dilakukan analisis rasio keuangan. Analisis ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang keadaan dan posisi keuangan Kabupaten Banggai Kepulauan dari satu periode ke periode berikutnya. Instrumen yang digunakan untuk menghitung rasio keuangan, yaitu rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan rasio aktivitas. Berikut ini adalah uraian analisis terhadap masing-masing rasio di atas.

3.1.2.1 Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Rasio likuiditas terdiri dari rasio lancar/current ratio dan rasio cepat/ratio quick. Berikut ini adalah ulasan terkait rasio lancar dan rasio cepat.

a) Rasio Lancar (Current Ratio)

Rasio lancar merupakan kemampuan untuk membayar utang yang segera harus dipenuhi dengan aktiva lancar atau aset lancar. Dengan kata lain, rasio ini menunjukkan apakah Pemda memiliki aset yang cukup untuk melunasi hutangnya. Adapun rumus rasio lancar adalah membandingkan aktiva lancar dengan hutang lancar ($\text{Rasio Lancar} = \text{Aktiva Lancar} / \text{Hutang Lancar}$). Berikut ini adalah hasil analisis rasio lancar Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan, dapat dilihat pada tabel 3.5.

Tabel 3.5
Analisis Rasio Lancar Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan
Tahun 2017-2020

No	Tahun	Aktiva Lancar	Kewajiban Jangka Pendek/ Hutang Lancar	Rasio Lancar
1.	2017	68.686.384.089,65	6.354.505.346,00	10,81
2.	2018	58.414.013.740,62	5.849.770.161,00	9,99
3.	2019	64.404.486.129,55	12.065.562.134,00	5,34
4.	2020	43.896.926.476,61	29.155.727.642,00	1,51

Sumber: Laporan APBD Kabupaten Banggai Kepulauan 2017-2021*, diolah

b) Rasio Cepat (Quick Ratio)

Rasio quick adalah ukuran kemampuan Pemerintah Daerah dalam membayar kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aset yang lebih likuid atau aset yang paling mendekati uang tunai (aset cepat). Rasio ini menunjukkan kekuatan atau kelemahan finansial Pemerintah Daerah. Dengan kata lain, rasio ini digunakan untuk mengetahui seberapa banyak utang jangka pendek Pemerintah Daerah yang dapat

dipenuhi dengan menjual semua aset likuid Pemerintah Daerah dalam waktu yang paling singkat. Semakin besar nilai rasio cepat, maka semakin baik. Adapun rumus rasio cepat adalah aktiva lancar dikurangi persediaan dibagi kewajiban lancar (Rasio Cepat = (Aktiva Lancar – Persediaan) / Kewajiban lancar). Berikut ini adalah hasil analisis rasio cepat Pemerintah Daerah yang disajikan pada tabel 3.6 dibawah ini.

Tabel 3.6
Rasio Cepat Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan
Tahun 2017-2020

No	Tahun	Aktiva Lancar	Persediaan	Kewajiban Jangka Pendek/ Hutang Lancar	Rasio Lancar
1.	2017	68.686.384.089,65	10.653.909.913,10	6.354.505.346,00	9,13
2.	2018	58.414.013.740,62	14.731.090.267,61	5.849.770.161,00	7,47
3.	2019	64.404.486.129,55	19.676.622.344,75	12.065.562.134,00	3,71
4.	2020	43.896.926.476,61	11.022.231.212,53	29.155.727.642,00	1,13

Sumber: Laporan APBD Kabupaten Banggai Kepulauan 2017-2020*, diolah

Perkembangan rasio cepat Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Penurunan ini terjadi karena hutang lancar mengalami kenaikan yang signifikan. Meskipun demikian, secara keseluruhan rasio cepat Pemerintah dalam kondisi baik, karena nilainya diatas 1 (satu). Hal ini menunjukkan bahwa aset lancar yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah lebih besar dibandingkan dengan utang lancar. Dengan demikian Pemerintah Daerah mampu melunasi utang jangka pendeknya melalui pencairan aset lancar.

c) Rasio Solvabilitas

Rasio Solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjangnya. Selain itu, rasio ini juga menunjukkan indikasi tingkat keamanan bagi para pemberi pinjaman. Ada 2 (dua) rasio yang digunakan dalam rasio solvabilitas, yaitu rasio total hutang terhadap total aset dan rasio hutang terhadap modal.

1) Rasio Total Hutang Terhadap Total Aset

Rasio ini mengukur seberapa besar pendanaan pemerintah yang dibiayai oleh utang dibandingkan dengan total aktiva yang dimiliki oleh pemerintah. Utang di sini adalah utang Pemerintah Daerah, baik utang jangka panjang maupun utang jangka pendek. Oleh karena itu, rasio ini menggambarkan seberapa jauh utang dapat ditutupi oleh aktiva. Semakin kecil nilainya, maka semakin baik tingkat keamanannya. Adapun rumus rasio total hutang terhadap aset adalah total hutang

dibagi dengan total aset ($\text{Rasio Hutang Terhadap Total Aset} = \text{Total Hutang} / \text{Total Aset}$). Berikut ini adalah hasil perhitungan rasio hutang terhadap total aset Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.7
Rasio Hutang Terhadap Total Aset Pemerintah Kabupaten
Banggai Kepulauan Tahun 2017-2020

No	Tahun	Total Hutang	Total Aset	Rasio Utang terhadap Total Aset
1.	2017	6.354.505.346,00	3.172.362.151.701,97	0,002
2.	2018	5.849.770.161,00	3.280.650.372.884,54	0,002
3.	2019	12.065.562.134,00	3.209.325.078.637,15	0,004
4.	2020	29.155.727.642,00	3.379.753.325.041,02	0,009

Sumber: Laporan APBD Kabupaten Banggai Kepulauan 2017-2020, diolah

2) Rasio Hutang Terhadap Modal

Rasio hutang terhadap modal digunakan untuk mengukur seberapa perlunya hutang jika dibandingkan dengan kemampuan modal yang dimiliki. Rasio ini sangat penting untuk diperhatikan karena berkaitan dengan kesehatan keuangan daerah saat pemeriksaan. Semakin kecil nilainya, menunjukkan semakin mandiri keuangan daerah atau tidak tergantung pembiayaan dari hutang. Adapun rumus rasio hutang terhadap modal adalah total hutang dibagi dengan modal ($\text{Rasio Hutang Terhadap Modal} = \text{Total Hutang} / \text{Modal}$). Berikut ini hasil perhitungan rasio hutang terhadap modal Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan yang disajikan pada tabel 3.8 dibawah ini.

Tabel 3.8
Rasio Hutang Terhadap Total Modal Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan
Tahun 2017-2020

No	Tahun	Total Hutang	Total Modal	Rasio Utang terhadap Total Modal
1.	2017	6.354.505.346,00	3.166.007.646.355,97	0,002
2.	2018	5.849.770.161,00	3.274.800.602.723,54	0,002
3.	2019	12.065.562.134,00	3.197.259.516.503,15	0,004
4.	2020	29.155.727.642,00	3.350.597.597.399,02	0,009

Sumber: Laporan APBD Kabupaten Banggai Kepulauan 2017-2020*, diolah

d) Rasio Aktivitas

Rasio aktivitas merupakan rasio untuk melihat efektifitas tertentu pada kegiatan pelayanan Pemerintah Daerah. Dengan kata lain, rasio ini mengukur seberapa efektif Pemerintah Daerah menggunakan persediaan, piutang, dan aset tetapnya dalam menyelenggarakan pelayanan publik. Rasio ini diukur melalui rata-rata umur piutang dan rata-rata umur persediaan. Berikut ini adalah hasil perhitungan rata-rata umur piutang dan rata-rata umur persediaan.

1) Rasio Rata-rata Umur Piutang

Rasio rata-rata umur piutang merupakan rasio yang digunakan untuk melihat berapa lama, hari yang diperlukan untuk melunasi piutang atau merubah piutang menjadi kas. Rasio ini dihitung dengan membandingkan 365 hari dibagi perputaran piutang. Perputaran piutang didapatkan dari perhitungan pendapatan daerah dibagi dengan rata-rata piutang pendapatan daerah, di mana rata-rata piutang pendapatan daerah didapatkan dari saldo awal ditambah saldo akhir piutang dibagi 2 (dua).

2) Rasio Rata-rata Umur Persediaan

Rata-rata umur persediaan adalah rasio untuk melihat berapa lama dana yang tertanam dalam bentuk persediaan. Persediaan yang dimiliki digunakan untuk memberikan pelayanan publik. Rasio ini dihitung dengan membandingkan 365 hari dibagi dengan perputaran persediaan.

3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Banggai Kepulauan selama periode 2017–2022 dilaksanakan mendasari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan selanjutnya sebagaimana telah diubah dengan Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan; dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah. Berdasarkan berbagai peraturan di maksud, bahwa pengelolaan

keuangan daerah merupakan suatu rangkaian/siklus APBD yang terintegrasi di mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Analisis ini bertujuan memberikan gambaran kebijakan pengelolaan keuangan daerah masa lalu Pemerintah Daerah. Instrumen yang digunakan untuk melihat kinerja pengelolaan keuangan daerah masa lalu adalah analisis kesehatan keuangan daerah, realisasi kebijakan belanja daerah dan pembiayaan daerah pada periode sebelumnya. Informasi yang diperoleh dari analisis ini digunakan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan di masa akan datang dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi alokasi anggaran untuk pembangunan daerah ke depan.

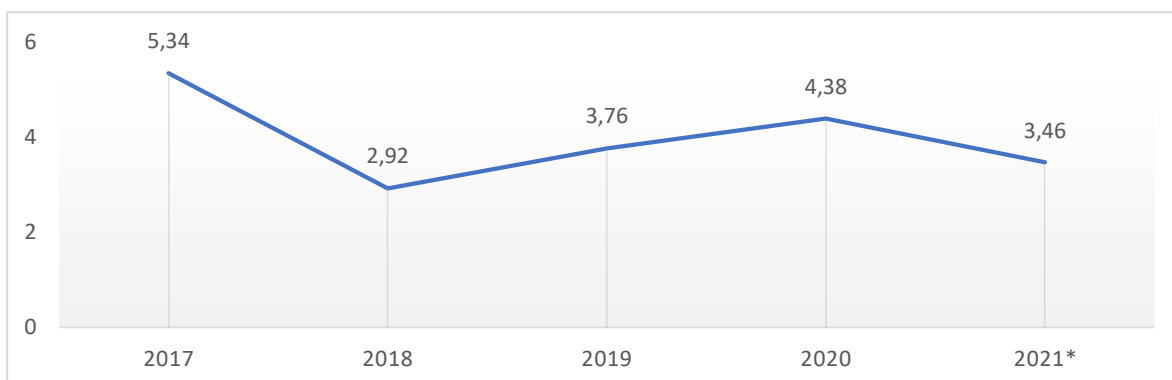
3.2.1 Analisis Kesehatan Keuangan Daerah

Analisis Kesehatan keuangan daerah dapat diukur dari tingkat kemandirian keuangan daerah, ruang fiskal daerah, tax ratio, rasio belanja pegawai, dan rasio belanja modal. Adapun hasil analisis Kesehatan keuangan daerah dapat dilihat pada sub bab berikut ini.

3.2.1.1 Kemandirian Keuangan Daerah

Tingkat kemandirian keuangan daerah dapat diukur dari realisasi PAD terhadap pendapatan daerah. Semakin tinggi realisasi PAD terhadap pendapatan daerah, maka semakin tingkat kemandirian daerah semakin baik, dan sebaliknya. Adapun realisasi PAD terhadap pendapatan daerah Kabupaten Banggai Kepulauan dapat dilihat pada grafik 3.6 berikut ini:

Grafik 3.6
Realisasi PAD Terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
Tahun 2017-2021*



Sumber: Laporan APBD Kabupaten Banggai Kepulauan 2017-2021*, diolah

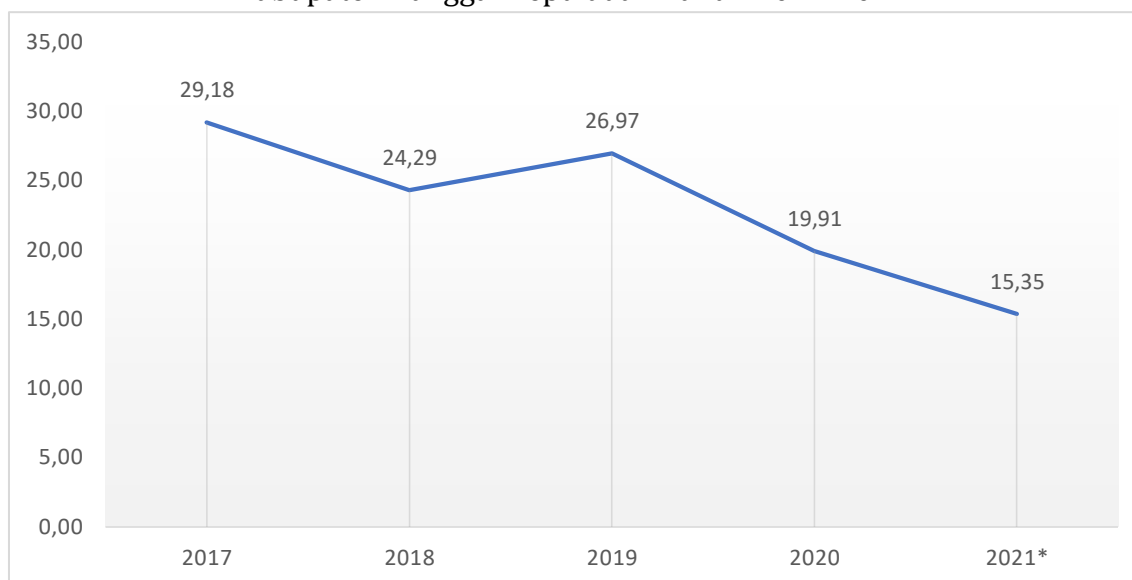
3.2.1.2 Ruang Fiskal Daerah

Ruang fiskal merupakan indikator untuk mengukur fleksibilitas yang dimiliki oleh Pemda dalam mengalokasikan APBD untuk membiayai kegiatan yang menjadi prioritas daerah. Ruang fiskal adalah selisih pendapatan daerah dikurang pendapatan yang bersifat earmarked dan belanja rutin seperti belanja pegawai dan belanja bunga. Semakin tinggi ruang fiskal maka semakin baik karena Pemda memiliki fleksibilitas dalam mengalokasikan APBD untuk pembangunan daerah dan pertumbuhan ekonomi.

3.2.1.3 Realisasi Belanja Modal terhadap Realisasi Total Belanja APBD

Realisasi belanja modal terhadap realisasi total belanja APBD merupakan indikator yang mengukur porsi belanja modal yang dibelanjakan terhadap total belanja daerah dalam rangka pemberian layanan kepada masyarakat. Semakin tinggi realisasi belanja modal terhadap total belanja daerah maka semakin baik. Berikut ini adalah gambaran realisasi belanja modal terhadap realisasi total belanja APBD Kabupaten Banggai Kepulauan yang terlihat pada grafik 3.7 dibawah ini.

Grafik 3.7
Realisasi Belanja Modal terhadap Total Belanja
Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017-2021*



Sumber: Laporan APBD Kabupaten Banggai Kepulauan 2017-2021*, diolah

Realisasi belanja modal terhadap total belanja Kabupaten Banggai Kepulauan kurun waktu tahun 2017-2021 mengalami perkembangan fluktuatif dan cenderung menurun. Penurunan ini terjadi disebabkan tingginya penurunan belanja modal jika

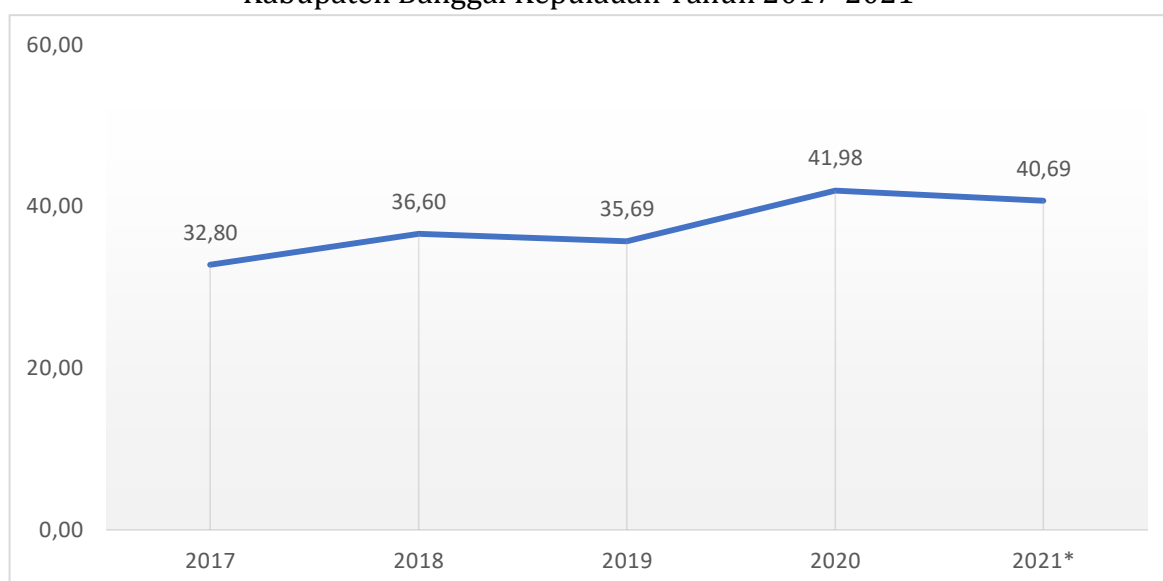
dibandingkan dengan belanja daerah. Kondisi ini menunjukkan bahwa adanya penurunan belanja untuk pelayanan kepada masyarakat.

3.2.1.4 Realisasi Belanja Pegawai terhadap total Belanja APBD

Realisasi belanja pegawai terhadap realisasi total belanja APBD merupakan indikator untuk mengukur seberapa besar porsi belanja pegawai terhadap total belanja. Semakin tinggi porsi belanja pegawai maka kebijakan pengelolaan belanja daerah dinilai kurang proporsional. Hal ini terjadi karena belanja untuk kebutuhan masyarakat akan semakin berkurang. Berikut ini adalah realisasi belanja pegawai terhadap realisasi total belanja APBD yang disajikan pada grafik 3.8 dibawah ini.

Grafik 3.8

Realisasi Belanja Pegawai terhadap Total Belanja
Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017-2021*



Sumber: Laporan APBD Kabupaten Banggai Kepulauan 2017-2021*, diolah

3.2.2 Proporsi Penggunaan Anggaran

Analisis proporsi realisasi terhadap anggaran bertujuan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan Kabupaten Banggai Kepulauan pada periode tahun anggaran sebelumnya. Hasilnya digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan di masa yang akan datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah serta untuk menentukan kebijakan pembelanjaan di masa datang.

Semakin besar belanja daerah diharapkan akan makin meningkatkan kegiatan perekonomian daerah (terjadi ekspansi perekonomian). Di sisi lain, semakin besar

pendapatan yang dihasilkan dari pajak-pajak dan retribusi atau penerimaan-penerimaan yang bersumber dari masyarakat, maka akan mengakibatkan menurunnya kegiatan perekonomian (terjadi kontraksi perekonomian).

3.2.2.1 Proporsi Realisasi Belanja terhadap Anggaran Belanja

Analisis proporsi realisasi belanja terhadap anggaran belanja bertujuan untuk mendapatkan gambaran kinerja pelaksanaan anggaran belanja. Proporsi realisasi belanja terhadap anggaran belanja merupakan perbandingan antara realisasi dengan anggaran (target), yang kemudian diperoleh tingkat realisasi belanja.

Proporsi realisasi belanja terhadap anggaran belanja mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal tersebut juga terjadi pada komponen belanja tidak langsung dan belanja langsung. Kondisi ini menunjukkan bahwa kinerja pelaksanaan anggaran belanja sudah baik karena secara umum peningkatan penyerapan belanja sudah di atas 90%.

Selain proporsi realisasi belanja terhadap anggaran belanja, penting juga melihat proporsi realisasi masing-masing komponen belanja terhadap total belanja. Hal ini diperlukan karena dapat menggambarkan komponen apa saja yang memiliki proporsi paling besar terhadap total belanja. Berikut ini adalah tabel proporsi realisasi komponen belanja terhadap total belanja.

Tabel 3.9
Realisasi PAD Terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017-2021*

Uraian	2017		2018		2019		2020		2021*	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
BELANJA	887.068.020.267,30	821.976.102.236,00	887.490.127.026,08	824.687.940.203,82	971.374.450.350,80	908.657.144.730,09	854.959.059.306,71	809.516.707.063,00	859.798.002.102,98	744.103.665.687,00
BELANJA OPERASI	628.012.659.509,00	578.853.138.449,00	653.681.862.168,94	622.789.820.431,82	688.247.375.401,80	661.507.470.902,52	663.193.036.934,60	635.396.093.386,00	695.724.182.536,00	627.217.167.217,00
Belanja Pegawai	290.124.901.896,00	269.644.524.031,00	312.018.260.714,00	301.857.820.080,00	336.233.044.085,00	324.273.559.302,00	353.311.354.183,00	339.825.146.471,00	321.604.825.812,00	302.747.113.916,00
Belanja Barang	172.777.089.513,00	145.395.228.894,00	187.256.753.754,94	167.465.858.799,82	182.758.132.616,80	168.442.690.661,52	140.711.146.151,60	127.104.053.110,00	196.758.014.563,00	147.727.319.989,00
Belanja Hibah	3.061.352.800,00	1.840.000.000,00	3.861.000.000,00	3.380.400.000,00	3.315.000.000,00	3.140.000.000,00	6.074.150.000,00	5.702.450.000,00	13.345.834.761,00	13.019.725.912,00
Belanja Bantuan Sosial	370.000.000,00	360.000.000,00	570.000.000,00	369.000.000,00	420.000.000,00	270.000.000,00	420.000.000,00	180.750.000,00	2.146.900.000,00	1.879.400.000,00
Belanja Bantuan Keuangan	161.679.315.300,00	161.613.385.524,00	149.975.847.700,00	149.716.741.552,00	165.521.198.700,00	165.381.220.939,00	162.676.386.600,00	162.583.693.805,00	161.868.607.400,00	161.843.607.400,00
BELANJA MODAL	251.713.135.944,00	239.828.160.787,00	231.989.411.958,00	200.283.688.196,00	280.999.101.349,00	245.022.680.227,57	178.603.301.568,14	161.199.586.177,00	149.764.527.766,22	114.248.231.504,00
Belanja Modal Tanah	11.704.891.400,00	10.923.096.400,00	5.323.446.381,00	4.838.337.050,00	9.051.885.800,00	8.163.836.600,00	7.397.814.167,19	6.264.729.869,97	3.735.216.918,00	888.391.800,00
Belanja Peralatan dan Mesin	42.143.151.714,00	38.053.238.818,00	43.567.127.532,00	33.181.453.261,00	46.471.058.898,00	36.993.201.705,00	44.935.788.264,00	38.025.287.462,00	53.825.109.041,22	38.862.544.893,00
Belanja Bangunan dan Gedung	50.810.217.550,00	47.066.607.770,00	66.538.688.596,00	60.300.953.295,00	88.892.364.374,00	80.824.230.451,00	45.612.851.546,12	38.870.366.448,03	54.567.454.264,00	43.292.955.773,00
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	141.513.522.980,00	139.499.446.153,00	112.328.816.203,00	99.572.093.503,00	130.841.545.580,00	113.609.246.646,57	79.364.702.155,83	76.801.434.436,00	37.454.596.628,00	31.133.379.038,00
Belanja Aset Tetap Lainnya	5.541.352.300,00	4.285.771.646,00	4.231.333.246,00	2.390.851.087,00	5.742.246.697,00	5.432.164.825,00	1.292.145.435,00	1.237.767.961,00	182.150.915,00	70.960.000,00
BELANJA TAK TERDUGA	5.313.677.314,30	1.500.000.000,00	885.768.899,14	702.134.058,00	750.000.000,00	749.020.000,00	10.812.720.803,97	10.799.143.123,00	11.827.741.800,76	232.517.371,00
Belanja Tak Terduga	5.313.677.314,30	1.500.000.000,00	885.768.899,14	702.134.058,00	750.000.000,00	749.020.000,00	10.812.720.803,97	10.799.143.123,00	11.827.741.800,76	232.517.371,00
TRANSFER	2.028.547.500,00	1.794.803.000,00			1.377.973.600,00	1.377.973.600,00	2.350.000.000,00	2.121.884.377,00	2.481.550.000,00	2.405.749.595,00
Transfer Bagi hasil ke Kab/Kota/Desa	2.028.547.500,00	1.794.803.000,00	933.084.000,00	912.297.518,00	1.377.973.600,00	1.377.973.600,00	2.350.000.000,00	2.121.884.377,00	2.481.550.000,00	2.405.749.595,00
Bagi Hasil Pajak	1.267.487.500,00	1.222.399.000,00	432.800.000,00	412.013.518,00	561.813.390,00	561.813.390,00	645.800.000,00	639.612.562,00	526.100.000,00	450.305.195,00
Bagi Hasil Retribusi	761.060.000,00	572.404.000,00	500.284.000,00	500.284.000,00	816.160.210,00	816.160.210,00	1.704.200.000,00	1.482.271.815,00	1.955.450.000,00	1.955.444.400,00

Sumber: Laporan APBD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017-2021*

Proporsi rata-rata realisasi belanja operasi masih menjadi komponen yang paling tinggi terhadap total realisasi belanja. Komponen belanja operasi yang paling besar proporsinya adalah belanja pegawai, belanja barang dan jasa, diikuti belanja bantuan keuangan, dan seterusnya. Sementara proporsi belanja operasi terhadap total realisasi belanja sekitar 76%.

3.2.2.2 Proporsi Belanja untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur

Dalam kerangka untuk melaksanakan fungsi pelayanan dan pembangunan daerah, maka pemerintah daerah membutuhkan sumber pembiayaan *overhead cost* bagi sumber daya pegawai maupun barang jasa serta kebutuhan lainnya. Dalam konteks penganggaran daerah, *overhead cost* pemerintah ini diletakkan pada berbagai pos pembelanjaan belanja tidak langsung dan belanja langsung. Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2018-2021 ditunjukkan pada tabel 3.10 sebagai berikut.

Tabel 3.10

Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018-2021*

No	Uraian	Total Belanja Untuk pemenuhan kebutuhan aparatur (Rp)	Total Pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran), Rp	Persentase
1.	Tahun Anggaran 2018	394.712.163.543,00	831.562.940.203,82	47,47
2.	Tahun Anggaran 2019	402.105.607.992,00	911.907.144.730,09	44,10
3.	Tahun Anggaran 2020	430.917.329.753,00	812.876.707.063,00	53,01
4.	Tahun Anggaran 2021	439.510.295.369,00	747.463.665.687,00	58,80

Sumber: Laporan APBD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018-2021*, diolah

Realisasi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur Pemda Kabupaten Banggai Kepulauan menunjukkan trend fluktuatif dan cenderung meningkat. Gambaran tentang belanja daerah yang menginformasikan mengenai proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur Kabupaten Banggai Kepulauan tertuang pada tabel 3.11 sebagai berikut.

Tabel 3.11

Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018-2021*

Uraian	2018	2019	2020	2021*
BELANJA OPERASI	371.075.480.718,00	383.372.460.104,00	406.209.222.241,00	428.362.095.816,00
Belanja Gaji dan Tunjangan	222.771.427.850,00	237.492.319.191,00	281.671.534.916,00	253.039.196.347,00

Uraian	2018	2019	2020	2021*
Belanja Tambahan Penghasilan	28.407.249.220,00	37.967.711.282,00	44.764.099.241,00	46.738.856.319,00
Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH	3.375.000.000,00	162.000.000,00	2.007.900.000,00	2.323.125.000,00
Belanja Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi	417.235.884,00	586.520.500,00	-	645.936.250,00
Belanja Bahan Pakai Habis*	10.894.124.740,00	10.991.198.887,00	9.340.345.359,00	10.406.390.249,00
Belanja Perawatan Kendaraan	3.373.619.718,00	3.131.209.542,00	2.727.353.166,00	1.025.111.214,00
Belanja Cetak dan Penggandaan	4.849.919.450,00	4.948.485.150,00	4.304.530.950,00	
Belanja Honorarium PNS **)	10.969.458.500,00	8.212.161.500,00	9.797.924.500,00	6.615.958.000,00
Belanja Uang Lembur	1.455.797.750,00	1.254.421.000,00	1.510.611.000,00	2.041.727.750,00
Belanja Jasa Kantor*	7.370.803.302,00	8.370.805.239,00	9.074.618.254,00	68.499.311.197,00
Belanja Beasiswa Pendidikan PND	100.000.000,00	100.000.000,00	200.000.000,00	-
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	3.644.743.000,00	1.361.252.900,00	344.633.000,00	315.934.722,00
Belanja premi asuransi kesehatan	2.194.089.000,00	2.151.091.489,00	4.118.945.814,00	5.783.563.636,00
Belanja Sewa Peralatan/Perlengkapan kantor	297.195.000,00	375.180.459,00	52.140.000,00	330.690.000,00
Belanja makanan dan minuman pegawai*	271.358.000,00	158.704.000,00	206.876.000,00	-
Belanja pakaian dinas dan atributnya	470.810.000,00	967.388.000,00	389.000.000,00	525.320.300,00
Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	2.218.961.375,00	1.591.168.000,00	696.771.400,00	
Belanja perjalanan dinas	67.993.687.929,00	63.550.842.965,00	35.001.938.641,00	30.070.974.832,00
BELANJA MODAL	23.636.682.825,00	18.733.147.888,00	24.708.107.512,00	11.148.199.553,00
Belanja Modal (Kantor, Mobil Dinas, Meubelair, peralatan dan perlengkapan dll)	23.636.682.825,00	18.733.147.888,00	24.708.107.512,00	11.148.199.553,00
TOTAL	394.712.163.543,00	402.105.607.992,00	430.917.329.753,00	439.510.295.369,00

Sumber: Laporan APBD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018-2021*, diolah

3.2.3 Analisis Pembiayaan Daerah

Analisis pembiayaan bertujuan untuk memperoleh gambaran dari pengaruh kebijakan pembiayaan daerah pada tahun-tahun anggaran sebelumnya terhadap surplus/defisit belanja daerah sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembiayaan di masa datang dalam rangka penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Surplus/Defisit Riil adalah realisasi pendapatan daerah dikurangi realisasi belanja daerah ditambah dengan pengeluaran pembiayaan daerah. Surplus/Defisit riil APBD Kabupaten Banggai Kepulauan selama kurun waktu tahun 2017-2021 disajikan dalam tabel 3.12 di bawah ini.

Tabel 3.12

Surplus/Defisit Riil APBD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017-2021*

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021*
1.	Realisasi Pendapatan Daerah	764.650.292.158,46	819.184.420.108,54	910.888.768.858,00	827.151.804.218,27	832.294.901.037,34
	dikurangi :					
2.	Realisasi Belanja Daerah	821.976.102.236,00	824.687.940.203,82	908.657.144.730,09	809.516.707.063,00	744.103.665.687,00
	Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah	4.375.000.000,00	6.875.000.000,00	3.250.000.000,00	3.360.000.000,00	3.360.000.000,00
	Surplus/Defisit Riil	(61.700.810.077,54)	(12.378.520.095,28)	(1.018.375.872,09)	14.275.097.155,27	84.831.235.350,34

Sumber: Laporan APBD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017-2021*, diolah

Dari tahun 2017 hingga 2021, defisit riil Kabupaten Banggai Kepulauan yaitu pada tahun 2017, 2018, dan 2019. Defisit riil ini ditutup oleh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa SiLPA memiliki peran yang signifikan dalam pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Banggai Kepulauan. Komposisi penutup defisit riil dapat dilihat pada tabel 3.13 berikut.

Tabel 3.13

Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017-2021*

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021*
1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya	110.613.754.703,62	48.912.944.626,08	36.534.424.530,80	35.516.048.658,71	12.768.619.550,98
2.	Pencairan dana cadangan	-	-	-	-	-
3.	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	-	-	-	-	-
4.	Penerimaan pinjaman daerah	-	-	-	-	-
5.	Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah	-	-	-	-	-
6.	Penerimaan piutang daerah	-	-	-	-	-
	Jumlah Penerimaan Daerah	110.613.754.703,62	48.912.944.626,08	36.534.424.530,80	5.516.048.658,71	12.768.619.550,98

Sumber: Laporan APBD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017-2021*, diolah

3.3 Kerangka Pendanaan

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah selama 1 periode ke depan. Kerangka pendanaan ini dirancang secara efisien untuk mencapai tujuan pembangunan yang efektif, baik dalam konteks

kinerja maupun efisiensi anggaran. Struktur APBD yang digunakan dalam sub bab ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sementara itu, teknik yang digunakan dalam memproyeksi APBD Kabupaten Banggai Kepulauan adalah teknik peramalan (Forecasting). Teknis peramalan adalah suatu proses memperkirakan secara sistematis tentang apa yang akan terjadi pada masa mendatang berdasarkan informasi pada masa lalu dan sekarang yang dimiliki agar kesalahan dapat diminimalisir. Teknik ini tidak memberikan informasi secara pasti, namun berusaha mencari pendekatan tentang apa yang akan terjadi sehingga dapat menentukan kebijakan yang terbaik.

3.3.1 Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banggai Kepulauan

Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah pada dokumen Rancangan RPD tahun 2023-2026 dihitung hingga tahun 2026 dengan nomenklatur sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020. Untuk Pendapatan Daerah dikelompokkan menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, sedangkan Belanja Daerah dikelompokkan menjadi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer.

Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2023-2026 dilakukan dengan teknik *forecasting least square* terhadap masing-masing pos jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah dengan menggunakan data APBD Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2017-2021. Disamping itu juga dilakukan justifikasi kualitatif *expert judgement* secara rasional pada beberapa pos pendapatan dan belanja daerah yang *inline* dengan perkiraan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banggai Kepulauan dalam periode empat tahun yang akan datang.

Proyeksi pendapatan dan belanja periode 2023 – 2026 merupakan proyeksi anggaran yang memperhitungkan rata-rata pertumbuhan selama lima tahun yang lalu, serta asumsi lainnya yang mempengaruhi pertumbuhan dan belanja selama lima tahun kedepan. Asumsi yang di gunakan dalam melakukan proyeksi pendapatan antara lain adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banggai kepulauan yang diproyeksikan akan kembali positif, seiring dengan pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi covid-19. Tahun 2023 diproyeksikan sebesar 2,84 persen dan pada tahun 2026 sebesar 3,19 persen.
2. Kemandirian fiskal Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan masih sangat rendah, hal ini terlihat dari proporsi PAD terhadap total pendapatan selama periode tahun 2017-2021, dengan rata- rata hanya sebesar 3,97 persen.
3. Peningkatan PAD diharapkan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber PAD.
4. Pendapatan daerah yang berasal dari transfer ke daerah dan dana desa diproyeksikan sama dengan APBD tahun 2021 dengan pertimbangan APBN masih difokuskan dalam penanganan covid-19 dan dana perimbangan sifatnya fleksibel.
5. Pada proyeksi komponen lain-lain pendapatan daerah yang sah diproyeksikan mengalami peningkatan

Berdasarkan asumsi- asumsi diatas, diproyeksikan pendapatan daerah Kabupaten Banggai Kepulauan periode 2023-2026 sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 3.14
Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023-2026

Uraian	Baseline tahun 2021	Proyeksi			
		2023	2024	2025	2026
Pendapatan	850.389.382.552,00	886.624.624.601,32	893.945.337.322,62	901.266.050.043,92	908.586.762.765,22
Pendapatan Asli Daerah	34.802.251.751,00	43.898.119.029,49	46.592.321.007,79	49.286.522.986,09	51.980.724.964,39
Pajak Daerah	5.316.500.000,00	9.237.288.105,91	9.867.864.847,19	10.498.441.588,47	11.129.018.329,75
Retribusi Daerah	16.387.500.000,00	20.626.086.434,15	22.081.208.518,50	23.536.330.602,85	24.991.452.687,20
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	2.505.000.000,00	3.202.217.400,95	3.627.617.440,36	4.053.017.479,77	4.478.417.519,18
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	10.593.251.751,00	10.832.527.088,48	11.015.630.201,74	11.198.733.315,00	11.381.836.428,26
Pendapatan Transfer	795.552.575.800,00	802.070.439.800,00	802.070.439.800,00	802.070.439.800,00	802.070.439.800,00
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	658.993.483.000,00	665.511.347.000,00	665.511.347.000,00	665.511.347.000,00	665.511.347.000,00
Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	24.788.958.000,00	31.306.822.000,00	31.306.822.000,00	31.306.822.000,00	31.306.822.000,00
Dana Alokasi Umum (DAU)	440.660.646.000,00	440.660.646.000,00	440.660.646.000,00	440.660.646.000,00	440.660.646.000,00
Dana Alokasi Khusus	193.543.879.000,00	193.543.879.000,00	193.543.879.000,00	193.543.879.000,00	193.543.879.000,00
Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	114.114.949.000,00	114.114.949.000,00	114.114.949.000,00	114.114.949.000,00	114.114.949.000,00
Transfer Pemerintah Provinsi	22.444.143.800,00	22.444.143.800,00	22.444.143.800,00	22.444.143.800,00	22.444.143.800,00
Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	20.034.555.001,00	40.656.065.771,83	45.282.576.514,83	49.909.087.257,83	54.535.598.000,83
Pendapatan Hibah	20.034.555.001,00	38.219.247.333,33	42.299.387.333,33	46.379.527.333,33	50.459.667.333,33
Pendapatan Lainnya	-	2.436.818.438,50	2.983.189.181,50	3.529.559.924,50	4.075.930.667,50

Untuk mewujudkan peningkatan Pendapatan Daerah di Kabupaten Banggai Kepulauan, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan manajemen tata kelola pemungutan dan penerimaan Pendapatan Daerah sesuai dengan mekanisme dan standar baku serta memanfaatkan teknologi terkini.
- b. mengoptimalkan pendapatan daerah melalui peningkatan intensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah.
- c. Pendayagunaan aset daerah.
- d. Optimalisasi Badan Umum Milik Daerah (BUMD) yang ada saat ini agar memberikan kontribusi yang optimal kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada khususnya dan Penerimaan Daerah pada umumnya.
- e. Mengadakan peninjauan kembali atas berbagai Peraturan Daerah yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman dan memperumit birokrasi guna mempermudah investasi.

Rumusan kebijakan belanja daerah, ditetapkan melalui pendekatan belanja proporsional, efisien, efektif, transparan, akuntabel dan dilaksanakan dengan berpedoman pada anggaran berbasis kinerja serta berdasarkan kepada agenda-agenda pembangunan yang secara umum untuk mendanai belanja wajib dan mengikat; serta mendanai kegiatan program prioritas untuk mendukung capaian tujuan pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan dan program prioritas dalam rangka pencapaian target penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai kewenangan, tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Pagu indikatif adalah jumlah dana yang tersedia untuk mendanai program dan kegiatan tahunan yang penghitungannya berdasarkan standar satuan harga yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, dari total proyeksi pendapatan daerah dalam jangka menengah anggaran sebagaimana telah disajikan diatas, selanjutnya akan dipergunakan untuk membiayai belanja selama tahun-tahun ke depan. Proyeksi belanja daerah tersebut memperhatikan asumsi-asumsi sebagai berikut:

- a. Kebutuhan belanja pegawai selalu meningkat setiap tahun sebagai akibat dari kenaikan gaji, tunjangan sertifikasi, dan tunjangan perbaikan penghasilan bagi pegawai serta pengadaan pegawai PPPK.

- b. Kebutuhan belanja publik yang semakin meningkat sebagai upaya pencapaian tujuan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2023-2026;
- c. Penyesuaian terhadap kenaikan harga (inflasi) dengan kebutuhan belanja.

3.3.2 Perhitungan Kerangka Pendanaan

Pembahasan sub bab ini bertujuan untuk mengetahui kapasitas riil kemampuan keuangan daerah dan rencana penggunaannya dalam 1 (satu) periode ke depan. Dalam menghitung kapasitas riil kemampuan daerah, sebelumnya harus diuraikan terlebih dahulu mengenai proyeksi pengeluaran wajib dan mengikat.

Proyeksi terhadap pengeluaran yang bersifat mengikat dan wajib penting untuk dilakukan sebagai bahan untuk menghitung kerangka pendanaan dalam membiayai pembangunan daerah selama 1 (satu) periode ke depan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja yang bersifat mengikat adalah belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan, seperti belanja pegawai, dan belanja barang dan jasa. Sementara belanja yang bersifat wajib adalah alokasi anggaran atau belanja untuk menjamin kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun kapasitas riil kemampuan keuangan daerah disajikan pada tabel 3.16 sebagai berikut.

Tabel 3.15
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
Tahun 2023-2026

No	Uraian	Proyeksi			
		2023	2024	2025	2026
1.	Pendapatan Daerah	886.624.624.601,32	893.945.337.322,62	901.266.050.043,92	908.586.762.765,22
2.	Pencairan Dana Cadangan (sesuai perda)	-	-	-	-
3.	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran				
	Total Penerimaan	886.624.624.601,32	893.945.337.322,62	901.266.050.043,92	908.586.762.765,22
	<i>dikurangi</i>				
4.	Belanja dan Pengeluaran wajib mengikat serta prioritas utama	618.503.929.152,40	641.561.743.516,61	657.188.386.916,37	665.374.172.603,73

No	Uraian	Proyeksi			
		2023	2024	2025	2026
5.	Pengeluaran Pembiayaan	3.360.000.000,00	3.360.000.000,00	3.360.000.000,00	3.360.000.000,00
6.	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan	264.760.695.448,92	249.023.593.806,01	240.717.663.127,56	239.852.590.161,50

Selanjutnya dalam kerangka penyusunan RPD Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2023-2026 dapat menggunakan perhitungan kapasitas riil keuangan daerah ini untuk menentukan kebijakan alokasi dari kapasitas kemampuan keuangan daerah tersebut kedalam tiga kelompok prioritas:

1. Rencana alokasi pengeluaran prioritas I, dialokasikan untuk membiayaan belanja langsung wajib dan mengikat serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar;
2. Rencana alokasi pengeluaran prioritas II, dialokasikan untuk membiayaan belanja pemenuhan pencapaian tujuan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;
3. Rencana alokasi pengeluaran prioritas III, dialokasikan untuk membiayaan belanja penyelenggaraan urusan pemerintah lainnya.

3.3.3 Sumber Pendanaan Pembangunan Lainnya

Tingginya kebutuhan anggaran dalam melaksanakan program pembangunan yang telah disusun oleh Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan sementara ada keterbatasan anggaran dalam APBD maka tidak semua program-program dapat dibiayai dengan APBD Kabupaten. Ada beberapa alternatif pembiayaan non APBD yang dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah dengan tetap memperhatikan Peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh sebab itu di perlukan upaya – upaya lainnya untuk memperkuat integrasi sumber pendanaan pembangunan daerah, melalui antara lain:

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

Dukungan pendanaan melalui APBN di harapkan melalui Dana Tugas Pembantuan yang dapat di kelola/di laksanakan oleh Perangkat Daerah.

b. Kolaborasi APBD Kabupaten/ Kota dan Provinsi

Keterbatasan sumber pembiayaan dalam pembangunan daerah melalui APBD Kabupaten Banggai Kepulauan dalam pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan melalui kolaborasi pembiayaan dengan APBD kabupaten/kota lainnya maupun dengan APBD Propinsi. Kolaborasi sangat diperlukan agar tercipta sinkronisasi dalam menuntaskan program dan kegiatan yang telah

direncanakan, sehingga rencana pembangunan daerah nantinya diharapkan menjadi lebih terarah dan dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Kolaborasi dapat dilakukan dengan syarat bahwa program dan kegiatan provinsi sejalan dan sinergis dengan program dan kegiatan pemerintah kabupaten/kota, sehingga antara provinsi dan kabupaten/kota dapat bekerjasama didalam pelaksanaan program dan kegiatan. Adapun penuntasannya dilakukan dengan sharing pendanaan ataupun pembagian peran pendanaannya.

c. Obligasi Daerah

Obligasi Daerah adalah salah satu sumber pinjaman daerah jangka menengah dan/atau jangka panjang yang bersumber dari Masyarakat. Obligasi Daerah merupakan efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah dan tidak dijamin oleh Pemerintah. Pemerintah Daerah dapat menerbitkan Obligasi Daerah hanya untuk membiayai kegiatan investasi sektor publik yang menghasilkan penerimaan dan memberikan manfaat bagi masyarakat yang menjadi urusan Pemerintah Daerah. Dengan ketentuan tersebut, maka Obligasi Daerah yang diterbitkan Pemerintah Daerah hanya jenis Obligasi Pendapatan (Revenue Bond).

Kelebihan obligasi daerah sebagai alternatif pendanaan pembangunan antara lain mampu menarik minat pemilik dana atau masyarakat untuk berinvestasi dan mampu menyediakan dana dalam jumlah besar. Mekanisme penerbitan obligasi daerah diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penerbitan dan Pertanggungjawaban Obligasi Daerah.

d. Pinjaman Daerah

Dalam pelaksanaan pembangunan, pinjaman daerah dapat dijadikan sebagai sumber pendanaan pembangunan. Konsep dasar pinjaman daerah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah pada prinsipnya diturunkan dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, untuk memberikan alternatif sumber pembiayaan bagi pemerintah daerah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi

daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman. Namun demikian, mengingat pinjaman memiliki berbagai risiko seperti risiko kesinambungan fiskal, risiko tingkat bunga, risiko pembiayaan kembali, risiko kurs, dan risiko operasional, maka Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal nasional menetapkan batas-batas dan rambu-rambu pinjaman daerah. Mengingat risiko di atas sampai sekarang pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan belum pernah menempuh kebijakan ini dalam membiayai pembangunan daerah.

BAB IV

PERMASALAHAN DAN ISU- ISU STRATEGIS DAERAH

Perumusan permasalahan pembangunan daerah dan analisis isu strategis akan menjadi salah satu dasar perumusan kebijakan pembangunan Daerah dan Perangkat Daerah, yaitu tujuan dan sasaran serta perumusan program dan kegiatan pembangunan daerah di masa datang. Permasalahan dan isu-isu strategis daerah merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Isu strategis diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian penting/keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan. Dengan demikian, isu strategis merupakan tantangan atau peluang yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi masyarakat di masa mendatang. Suatu analisis isu-isu strategis menghasilkan rumusan kebijakan yang bersifat antisipatif dan solutif atas berbagai kondisi yang tidak ideal di masa depan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka menengah dan panjang. Sedangkan Permasalahan pembangunan daerah pada hakikatnya menggambarkan kinerja daerah atau kondisi masyarakat yang belum sesuai harapan dengan cita-cita pembangunan.

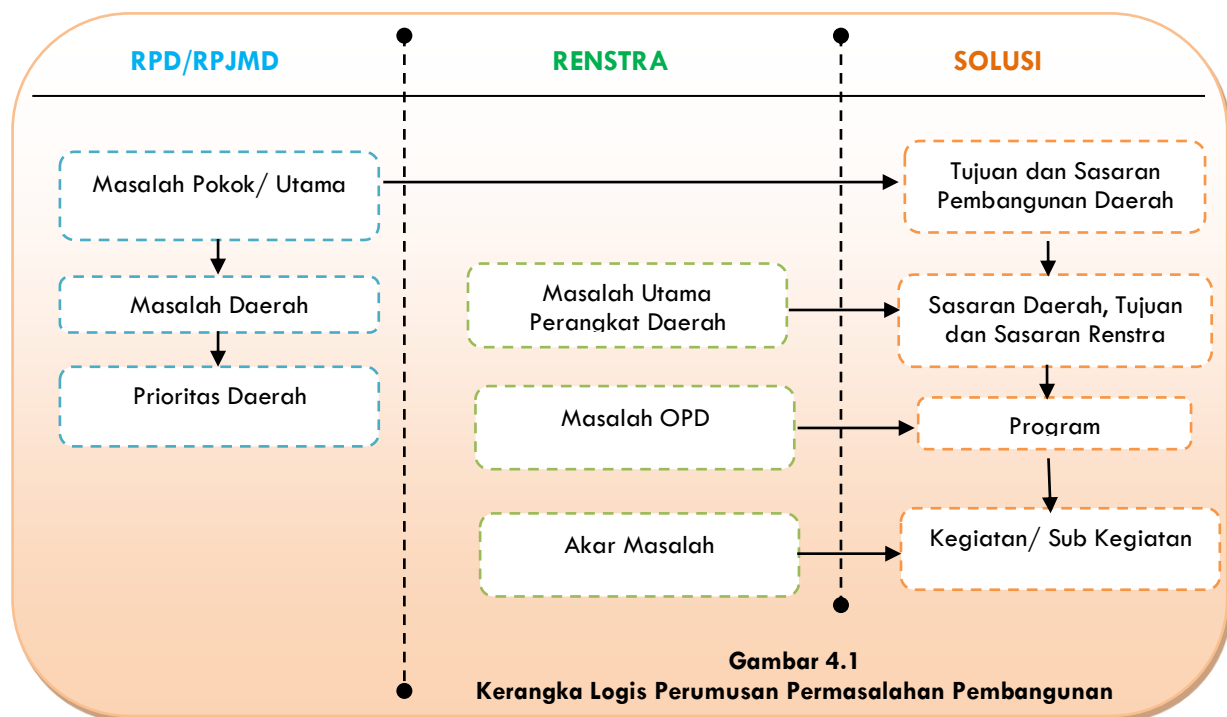
Isu, permasalahan dan tantangan pembangunan baik skala daerah, regional, nasional dan internasional semakin bertambah sebagai implikasi dari adanya pandemi Covid – 19 yang hingga saat ini belum dapat di pastikan kapan akan berakhir atau paling tidak dapat di kendalikan.

4.1 Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah merupakan kesenjangan antara sasaran pembangunan yang ingin dicapai di masa mendatang dengan kondisi riil saat perencanaan pembangunan dilaksanakan. Untuk meminimalisir kesenjangan tersebut dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan daerah, maka diperlukan perumusan yang tepat terkait analisis permasalahan daerah. Analisis permasalahan

diawali dengan analisis data capaian pembangunan sampai dengan tahun 2021 dan permasalahan yang ditemukan dalam rangka penentuan arah kebijakan, yang selanjutnya dilakukan analisis kedalaman masalah dengan melibatkan stakeholder terkait.

Perumusan permasalahan pembangunan daerah sangat berkaitan dengan tahapan atau rumusan dalam Bab – Bab selanjutnya dalam penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Daerah ini, yaitu pada tahapan perumusan Isu strategis Daerah, Perumusan Tujuan, Sasaran, Strategi, arah Kebijakan dan sampai pada perumusan Program Perangkat Daerah yang selanjutnya akan di jabarkankan lebih lanjut ke dalam Kegiatan dan Sub kegiatan pada Renstra Perangkat Daerah.



Olehnya itu, guna memudahkan dalam perumusannya di tetapkan Kerangka Logis perumusan permasalahan pembangunan yang di mulai dari identifikasi masalah pokok/utama, yang akan berkaitan dengan rumusan Misi, Tujuan dan sasaran Daerah, kemudian identifikasi penyebab dari masalah pokok/utama menjadi masalah daerah, yang akan berkaitan dengan rumusan strategi jangka menengah daerah, dan Identifikasi akar masalah, sebagai penyebab dari masalah yang lebih rinci yang akan berkaitan dengan rumusan arah kebijakan daerah. Selanjutnya di lakukan juga identifikasi masalah berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah, sebagai

interpretasi dari capaian pembangunan sesuai urusan pada periode sebelumnya, yang akan berkaitan dengan rumusan program prioritas per urusan atau per perangkat Daerah sesuai nomenklatur dalam Permendagri 90 Tahun 2019, sekaligus menjadi acuan perangkat daerah dalam merumuskan Rencana Strategis masing – masing.

4.1.1 Identifikasi Permasalahan Layanan Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

4.1.1.1 Pendidikan

Pelaksanaan urusan pendidikan masih berhadapan dengan dengan masalah pokok yaitu belum optimalnya akses dan kualitas pendidikan terutama pada tingkat dasar dan menengah. Penyebab utamanya adalah berkaitan dengan belum maksimalnya partisipasi pendidikan pada tingkat PAUD dan juga belum memadainya sarana dan prasarana pendidikan pada tingkat SD dan SMP. Angka melek huruf pada tahun 2020 yaitu 95,15 persen artinya hampir seluruh penduduk kabupaten Banggai Kepulauan mampu membaca dan menulis akan tetapi masih terdapat 4,85 persen penduduk usia 15 tahun keatas yang perlu mendapat perhatian pemerintah. Belum optimalnya capaian APM di jenjang pendidikan dasar baik SD sederajat maupun SMP sederajat. APM SD sederajat tahun 2020 baru mencapai 86,94 persen sedangkan APM SMP sederajat mencapai 84,70 persen. Disamping itu akar masalah utamanya berkaitan dengan kurangnya tenaga pengajar berstatus PNS karena proses sertifikasi yang seringkali terlambat sehingga mendekati usia pensiun. Selain itu, ketersediaan sarana dan sarana sekolah juga memerlukan rehabilitasi karena kualitas yang ada belum setara.

Tabel 4.1
Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Pendidikan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya akses dan kualitas pendidikan tingkat dasar dan menengah	Belum optimalnya partisipasi pendidikan pada tingkat PAUD	Masih rendahnya kualitas pendidik khususnya di jenjang PAUD
		Standardisasi penyelenggaraan PAUD belum terlaksana sesuai standar nasional.
		Kurangnya dorongan pemerintah dalam mendorong partisipasi pendidikan PAUD

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		Belum optimalnya ketersediaan alat peraga pendidikan tingkat PAUD (alat permainan edukatif,dll)
	Belum optimalnya penyelenggaraan pendidikan	Belum optimalnya peran guru PNS pada tingkat sekolah dasar karena pengangkatan seringkali mendekati usia pensiun
		Dorongan bagi siswa SMP untuk melanjutkan ke tingkat berikutnya yang perlu dioptimalkan
		Belum optimalnya upaya akselerasi pendidikan dimasa maupun pasca pandemi Covid-19
		Belum optimalnya penerapan pembelajaran berbasis digital
		Belum optimalnya implementasi revolusi mental dalam penyelenggaraan pendidikan
	Belum optimalnya sarana dan prasarana pendidikan tingkat SD dan SMP	Belum optimalnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan tingkat SD (perlu pembaharuan)
		Masih adanya sarana pendidikan tingkat SMP yang perlu diperbaharui
		Belum optimalnya upaya pengintegrasian data siswa antara sekolah dan dinas
	Belum optimalnya kualitas penyelenggaraan pendidikan kesetaraan	Rendanya partisipasi masyarakat dalam program pendidikan kesetaraan
		Belum optimalnya diversifikasi kompetensi pada sekolah penyetaraan

4.1.1.2 Kesehatan

Urusan kesehatan merupakan salah satu urusan wajib pelayanan dasar yang harus dipenuhi oleh Pemerintah. Kondisi kesehatan masyarakat menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan di suatu daerah, mengingat urusan kesehatan menjadi salah satu komponen yang menunjang ketercapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) baik di level daerah maupun nasional. Upaya pembangunan dalam

bidang kesehatan di Kabupaten Banggai Kepulauan masih menyisakan beberapa permasalahan umum seperti kematian ibu, kematian bayi, penanganan gizi buruk dan penanganan stunting, prevalensi penyakit tidak menular Diabetes melitus, Hipertensi dan penanganan ODGJ. Selain beberapa permasalahan tersebut, bencana global yang terjadi mulai tahun 2020 sampai dengan tahun ini menjadi hal lain yang perlu mendapatkan perhatian di setiap daerah, yaitu terkait pengendalian Covid 19. Berikut adalah rumusan permasalahan dalam bidang kesehatan di Kabupaten Banggai Kepulauan.

Tabel 4.2
Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Kesehatan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya derajat kesehatan masyarakat	Belum optimalnya penanganan gizi buruk dan <i>stunting</i>	Belum optimalnya pemenuhan kebutuhan gizi ibu hamil
		Belum optimalnya pengetahuan masyarakat terhadap pemenuhan gizi anak
		Akses terhadap fasilitas kesehatan belum optimal
	Masih tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB)	Deteksi dini hipertensi dalam kehamilan belum optimal
		Bayi Berat Lahir Rendah masih tinggi
		Sistem rujukan belum optimal
	Tingginya temuan penyakit menular (TBC dan HIV)	Belum optimalnya pemenuhan gizi
		Kesadaran masyarakat untuk memeriksakan diri masih perlu ditingkatkan
		Belum optimalnya pola hidup sehat masyarakat
	Masih tingginya angka prevalensi penyakit tidak menular (Hipertensi, Diabetes Melitus, ODGJ)	Belum optimalnya pola hidup sehat masyarakat
		Belum optimalnya deteksi dini penyakit tidak menular
		ODGJ seringkali dikucilkan dan kurang mendapat perhatian keluarga
	Belum optimalnya pelayanan di fasilitas Kesehatan	Masih kurangnya ketersediaan tenaga Kesehatan
		Belum optimalnya peran swasta dalam pembangunan Kesehatan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		Masih kurangnya dokter spesialis karena rendahnya insentif daerah
		Belum tercukupinya ketersediaan dokter dan nakes untuk beberapa poli
		Komitmen dokter PGDS (Pendayagunaan Dokter Spesialis) perlu ditingkatkan
	Rendahnya kepemilikan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) masyarakat	Belum optimalnya kesadaran masyarakat untuk ikut serta dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
		Adanya data kependudukan dan data kemiskinan yang belum tersinkronisasi secara berkala
		Pembiayaan pelayanan kesehatan belum optimal

4.1.1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pelaksanaan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang di Kabupaten Banggai Kepulauan masih dihadapkan pada tiga permasalahan pokok berkaitan dengan kualitas infrastruktur dasar, air bersih, dan tata ruang serata penataan kawasan ibukota Salakan. Kualitas infrastruktur dasar belum optimal sehingga masih memerlukan intervensi untuk mengoptimalkan kualitas jalan, jaringan irigasi, dan drainase. Masyarakat Kabupaten Banggai Kepulauan juga masih dihadapkan pada terbatasnya akses pada air bersih di beberapa wilayah karena disebabkan oleh kondisi tanah yang bersifat porous dan sarana dan prasarana air minum. Jika ditelusuri lebih lanjut, maka ditemukan bahwa masalah tersebut disebabkan oleh belum optimalnya jaringan air bersih dan belum optimalnya identifikasi sumber air. Di samping itu, kondisi tata ruang juga masih menjadi persoalan di Kabupaten Banggai Kepulauan karena belum optimalnya perencanaan dan pengendalian tata ruang.

Tabel 4.3
Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya kualitas infrastruktur dasar	Belum optimalnya kualitas jaringan jalan	Lambatnya rehabilitasi jalan dan jembatan rusak
		Rendahnya ketaatan pengguna jalan terhadap ketentuan muatan maksimal
		Belum optimalnya monitoring dan pengawasan jaringan jalan
	Belum optimalnya kualitas jaringan drainase	belum adanya masterplan pembangunan drainase
		belum tersedianya data yang valid terkait kondisi drainase
Masih terbatasnya akses masyarakat terhadap air baku	Belum optimalnya pembangunan jaringan air bersih	Kondisi tanah yang bersifat <i>porous</i>
	Belum optimalnya penyediaan sarana dan prasarana air minum	Belum optimalnya identifikasi sumber air
Belum optimalnya akses terhadap sanitasi layak	Belum optimalnya ketersediaan sanitasi layak	Masih rendahnya kesadaran masyarakat terkait pentingnya sanitasi sehat dan layak
Belum optimalnya dukungan pelayanan masyarakat secara prima	Belum optimalnya infrastruktur penunjang pelayanan publik	Belum optimalnya sarana dan prasarana penunjang pelayanan

4.1.1.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman masih mengalami permasalahan dalam hal pemenuhan rumah yang layak huni dan masih adanya kawasan kumuh yang belum tertangani. Data pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 menunjukkan bahwa adanya peningkatan persentase rumah layak huni. Meskipun demikian di Kabupaten Banggai Kepulauan masih terdapat 24,6 persen rumah berkategori tidak layak huni. Sama halnya dengan kawasan kumuh di Kabupaten Banggai Kepulauan, data menunjukkan dari total kawasan kumuh 57 ha

pada tahun 2020. Tantangan dalam urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman antara lain:

Tabel 4.4
Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya akses permukiman layak huni dan kawasan kumuh	Belum optimalnya akses RLH	Masih terdapat kawasan kumuh belum tertata
		Belum optimalnya penataan kawasan permukiman
		Belum optimalnya fasilitasi rumah layak huni
	Belum optimalnya kualitas lingkungan permukiman	Belum optimalnya ketersediaan Prasarana Sarana Utilitas (listrik)
		Belum optimalnya kesadaran masyarakat terhadap perilaku hidup bersih dan sehat dan menjaga lingkungan permukiman agar tidak kumuh

4.1.1.5 Sosial

Urusan kesejahteraan sosial merupakan urusan wajib pelayanan dasar yang harus dilaksanakan oleh masing-masing Pemerintah Daerah. Urusan kesejahteraan sosial dicapai melalui penyelenggaraan pelayanan sosial yang terdiri dari 4 pilar yaitu perlindungan sosial, jaminan sosial, rehabilitasi sosial dan pemberdayaan masyarakat. Secara umum Kabupaten Banggai Kepulauan sudah melaksanakan fungsi pelayanan sosial, namun upaya tersebut masih perlu untuk ditingkatkan. Dilihat dari persentase penduduk miskin mengalami penurunan sebesar 2,2% selama periode 2017-2021. Meskipun mengalami penurunan, jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Kabupaten Banggai Kepulauan masih menunjukkan angka cukup tinggi yakni 6230 jiwa pada tahun 2020. Berikut adalah rumusan permasalahan terkait urusan Kesejahteraan Sosial di Daerah.

Tabel 4.5
Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Sosial

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya pelayanan sosial pada PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial)	Masih adanya penerima bantuan sosial yang tidak tepat sasaran	Validitas DTKS yang masih belum optimal
		Belum optimalnya peranan desa dalam verifikasi dan validasi data
		Belum optimalnya koordinasi dengan instansi vertikal dalam penyediaan data menuju Satu Data Indonesia
		Kurangnya koordinasi lembaga/orang yang terlibat dalam penyaluran bantuan hingga ke tangan masyarakat
		Belum Optimalnya Kapasitas SDM pengelola bantuan sosial
	Banyaknya pengaduan masalah sosial yang belum tertangani (ODGJ, Anak Terlantar, Lansia Terlantar, pengemis, disabilitas)	Belum adanya tempat penampungan sementara bagi PMKS khususnya Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)
		masih kurangnya keterlibatan masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan masalah kerawanan sosial
		Belum optimalnya koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dalam menangani PMKS

4.1.2 Layanan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

4.1.2.1 Tenaga Kerja

Kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Banggai Kepulauan masih belum optimal khususnya dalam serapan tenaga kerja. Jumlah angkatan kerja Kabupaten Banggai Kepulauan sebanyak 62,8 ribu jiwa turun 1560 jiwa dari tahun sebelumnya. Sehingga, dengan penurunan jumlah angkatan kerja, tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) juga turun sebesar 0,99 poin. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) Kabupaten Banggai Kepulauan pada tahun 2021 sebesar 2,95, naik 0,48 persen poin dibandingkan tahun sebelumnya. Selain itu, kualifikasi tenaga kerja yang sedang bekerja pada tahun 2021 didominasi oleh lulusan setara SD sebesar 43,69%, SMP 14,71%, SMK/SMA 24,71%, dan sarjana/diploma 16,88%. Hal tersebut menunjukan

masih adanya tantangan untuk menyerap penduduk usia kerja agar mampu bekerja serta meningkatkan kualifikasi tenaga kerja. Maka dari itu, ada beberapa tantangan urusan ketenagakerjaan yang perlu diperhatikan yaitu:

Tabel 4.6
Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Tenaga Kerja

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya serapan tenaga kerja	Masih adanya kesenjangan kualifikasi/ kompetensi pencari kerja dengan lapangan kerja yang tersedia	Belum tersedianya data yang telah divalidasi dan verifikasi tentang ketersediaan tenaga kerja serta kebutuhan lapangan kerja
		Belum optimalnya fasilitasi pelatihan tenaga kerja
		Adanya ketimpangan antara angkatan kerja dengan ketersediaan lapangan kerja

4.1.2.2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan urusan yang erat kaitannya dengan isu kesetaraan gender dalam program pembangunan nasional. Isu tersebut bertujuan untuk meningkatkan peran dan kualitas hidup perempuan dalam pembangunan. Selain itu, urusan ini memiliki fokus untuk menghapuskan diskriminasi gender serta meningkatkan upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak. Beberapa indikator yang digunakan untuk melihat kualitas pembangunan daerah yang memperhatikan isu gender adalah Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Selain fokus pemberdayaan perempuan, upaya penanganan kekerasan terhadap anak juga masih perlu ditingkatkan.

Tabel 4.7
Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Masih adanya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Belum optimalnya fasilitas pendampingan perempuan dan anak	Terbatasnya SDM layanan, sejauh ini hanya dibantu kader-kader yang sifatnya relawan
		Kapasitas kader dalam pendampingan perlu ditingkatkan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	Belum optimalnya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Belum optimalnya kerjasama antar lembaga dalam pendampingan perempuan dan anak
		Kondisi orang tua/Keluarga yang rentan
		Pergaulan atau lingkungan yang kurang baik
		Kurang optimalnya peran orang tua dalam mendidik anak

4.1.2.3 Pangan

Penyelenggaraan urusan pangan di Kabupaten Banggai Kepulauan masih perlu untuk dioptimalkan. Beberapa permasalahan yang dihadapi adalah masih adanya daerah rawan pangan meskipun dari sisi cadangan pangan tercukupi. Hal lain adalah keterjangkauan pangan masyarakat tidak merata, belum optimalnya penganeekaragaman pangan lokal yang disebabkan oleh beberapa masalah dan akar masalah. Rincian mengenai permasalahan pembangunan pada bidang urusan pangan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.8
Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Pangan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Masih belum optimalnya ketahanan pangan daerah	Masih adanya daerah rawan pangan	Belum optimalnya penanganan daerah rawan pangan
		Perlunya data ketersediaan pangan yang akurat
	Keterjangkauan pangan masyarakat tidak merata	Panjangnya rantai pasok dan jaringan distribusi pangan
		Rendahnya akses pangan pada kondisi tertentu
	Belum optimalnya penganeekaragaman dan keamanan pangan lokal	Belum optimalnya promosi keanekaragaman pangan lokal kepada masyarakat, pengusaha warung makan dan lembaga umum
		Kurangnya pengelolaan lahan pekarangan untuk diversifikasi tanaman pangan
		Sarana dan prasarana untuk menguji keamanan pangan belum memadai

4.1.2.4 Pertanahan

Penyelenggaraan urusan pertanahan di Kabupaten Banggai Kepulauan masih dihadapkan pada adanya konflik pertanahan yang belum terselesaikan. Pada tahun 2020, persentase permasalahan pertanahan yang diselesaikan mencapai 100%. Adapun detail pemetaan permasalahan pada bidang urusan pertanahan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.9
Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Pertanahan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya pengelolaan pertanahan	Masih adanya konflik pertanahan	masih rendahnya kepemilikan sertifikat hak atas tanah bagi masyarakat dan pemerintah daerah
		penguasaan tanah oleh pemerintah daerah bagi pembangunan dan fasilitas umum masih kurang

4.1.2.5 Lingkungan Hidup

Terciptanya kemajuan daerah dengan tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan merupakan salah satu cita-cita pembangunan. Secara umum, kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Banggai Kepulauan masih perlu ditingkatkan (pada tahun 2021 IKLH mencapai 80,66). Nilai IKLH Kabupaten Banggai Kepulauan tersebut menempati predikat cukup baik karena berada pada rentang 80-90, sehingga masih perlu ditingkatkan untuk mencapai predikat baik, agar kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Banggai Kepulauan lebih baik. Beberapa permasalahan yang dihadapi pada bidang urusan lingkungan hidup adalah masih tingginya volume sampah yang belum terkelola dengan baik. Adapun detail permasalahan pembangunan pada bidang urusan lingkungan hidup adalah sebagai berikut.

Tabel 4.10
Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Lingkungan Hidup

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya pengelolaan lingkungan hidup	Volume sampah yang belum tertangani masih tinggi	Kapasitas TPA semakin terbatas
		Belum optimalnya kesadaran masyarakat untuk mengelola sampah secara mandiri

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	Ketersediaan RTH (Publik) masih rendah	Sulitnya mencari lahan milik Pemkab dengan luasan yang memadai
		Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup
	Masih adanya persoalan pencemaran air	perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup

4.1.2.6 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil sangat erat kaitannya dengan penyediaan data kependudukan yang komprehensif sebagai salah satu basis yang digunakan dalam menentukan arah pembangunan daerah. Secara umum, kualitas data kependudukan di Kabupaten Banggai Kepulauan masih belum optimal. Kondisi ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat untuk memiliki dokumen kependudukan dan kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pencatatan pada peristiwa-peristiwa penting seperti kelahiran dan kematian.

Tabel 4.11
Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya pelaksanaan pengadministrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Belum optimalnya kualitas data base kependudukan	kesadaran masyarakat yang rendah untuk <i>update data base</i>
		Belum semua anak usia 0-16 tahun memiliki KIA
		Cakupan kepemilikan akte kelahiran masih rendah

4.1.2.7 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pembangunan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Banggai Kepulauan masih memiliki tantangan berupa peningkatan status desa dari sebagian besar berkembang dan maju menjadi desa mandiri. Optimalisasi potensi desa, penguatan tata kelola pemerintahan desa, serta perluasan Pembangunan Kawasan Perdesaan menjadi agenda mendesak seiring dengan upaya mengurai peta permasalahan sebagai berikut:

Tabel 4.12
Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya kemandirian desa	Belum optimalnya keberdayaan masyarakat desa	Perlunya diversifikasi mata pencaharian masyarakat desa
		Pengembangan potensi desa belum optimal
		Belum optimalnya peran pendamping desa
	Belum optimalnya kualitas tata kelola pemerintahan desa	Belum optimalnya perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan pembangunan desa
		Belum optimalnya sarana dan prasarana kawasan perdesaan, misalnya infrastruktur jalan antar desa/kecamatan
	Perlunya optimalisasi dan perluasan Pembangunan Kawasan Perdesaan	Perlunya sinergi antar perangkat daerah dalam pembangunan kawasan perdesaan dan pembangunan desa

4.1.2.8 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Urusan lain yang perlu menjadi fokus pembangunan adalah terkait pengendalian penduduk dan pelaksanaan program Keluarga Berencana (KB). Program KB merupakan salah satu program nasional yang bertujuan untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk, kelahiran anak dan menekan angka kematian ibu. Beberapa permasalahan terkait pengendalian penduduk dan KB di Kabupaten Banggai Kepulauan adalah terkait partisipasi penduduk dalam program KB yang masih rendah. Berikut adalah rumusan masalah dalam bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan KB.

Tabel 4.13
Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya Penyelenggaraan program KB	Angka putus pakai (<i>Drop Out</i>) kontrasepsinya masih tinggi	Pemakaian kontrasepsi jangka panjang masih rendah

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	Masih tingginya unmeetneed (kebutuhan KB yang tidak terpenuhi)	Persepsi masyarakat terhadap KB masih kurang baik
	Peserta KB aktif belum optimal	Data pencatatan belum optimal
		Masih adanya ketidakpahaman masyarakat tentang KB

4.1.2.9 Perhubungan

Penyelenggaraan urusan perhubungan sangat erat kaitannya dalam upaya menciptakan kenyamanan dan keselamatan transportasi. Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk melihat kondisi tersebut adalah angka kecelakaan. Adapun detail permasalahan pembangunan pada bidang urusan perhubungan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.14
Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Perhubungan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya kenyamanan dan keselamatan transportasi	Belum optimalnya kualitas pelayanan perhubungan darat	Belum meratanya lampu penerangan jalan
		Belum memadainya pemenuhan fasilitas keselamatan di ruas jalan
	Belum memadainya pelayanan transportasi umum	Belum optimalnya kualitas prasarana lalu lintas
		Semakin menurunnya armada yang melayani trayek angkutan
		Belum optimalnya akses masyarakat terhadap transportasi umum
		Terbatasnya sarana dan prasarana pelabuhan salakan

4.1.2.10 Komunikasi dan Informatika

Pelaksanaan urusan komunikasi dan informatika belum maksimal karena pemanfaatan teknologi informasi belum terintegrasi dengan baik. Selain karena sarana pengelolaan jaringan yang belum memadai juga disebabkan oleh jaringan

komunikasi dan pengelolaan data yang terintegrasi. Beberapa persoalan berkaitan dengan sarana dan prasarana jaringan komunikasi berkaitan dengan jaringan fiber optik yang rawan terkena gangguan karena masih menggunakan jalur atas. Selain itu, jaringan fiber optik juga belum mencakup semua desa sehingga pengintegrasian data masih terfragmentasi.

Tabel 4.15
Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Komunikasi dan Informatika

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi yang terintegrasi	Sarana pengelolaan jaringan komunikasi belum optimal	Fiber optik masih menggunakan jalur atas sehingga berisiko terkena gangguan
		Data fiber optik masih terbatas dan tersebar di masing-masing internal Perangkat Daerah
		Jaringan fiber optik belum mencakup semua desa
		Koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dengan sistem data belum dilaksanakan
	Belum optimalnya jaringan komunikasi dan pengelolaan data yang terintegrasi	Penggunaan aplikasi elektronik di kalangan pejabat belum optimal

4.1.2.11 Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah merupakan sektor yang dapat berperan dalam mengembangkan perekonomian masyarakat. Kondisi capaian kinerja dalam urusan koperasi dan UMKM belum menunjukkan kinerja yang optimal. Hal tersebut dapat terlihat dari kondisi kelembagaan koperasi yang masih memerlukan penataan serta pengembangan UMKM yang ada di Kabupaten Banggai Kepulauan yang masih terhambat akibat akses permodalan. Tantangan atau permasalahan kedepan yang dihadapi untuk memperbaiki sektor Koperasi dan UMKM di Kabupaten Banggai Kepulauan antara lain:

Tabel 4.16
Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya kapasitas koperasi	Belum optimalnya kualitas kelembagaan koperasi	Masih banyaknya koperasi yang tidak aktif
		Belum optimalnya kualitas SDM koperasi
	Masih rendahnya kapasitas manajemen keuangan koperasi/ rendahnya proporsi koperasi yang sehat	Belum optimalnya kualitas SDM koperasi
		Adanya kredit yang macet pada koperasi
		Belum optimalnya penilaian kesehatan koperasi secara menyeluruh
		Kurangnya kesadaran koperasi untuk melakukan penilaian kesehatan koperasi
Belum optimalnya kontribusi	Belum optimalnya pertumbuhan dan pengembangan UMKM	Sulitnya mendapatkan standarisasi izin bagi UMKM khususnya standarisasi kesehatan
UMKM terhadap perekonomian daerah		Rendahnya proporsi UKM yang mendapatkan pelatihan
		Kurang optimalnya pengetahuan dan kemampuan kemandirian berwirausaha
		Kurang optimalnya fasilitasi permodalan

4.1.2.12 Penanaman Modal

Beberapa Permasalahan yang perlu diurai untuk melanjutkan arah pembangunan yang pro investasi, yaitu:

Tabel 4.17
Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Penanaman Modal

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Masih adanya fluktuasi realisasi investasi dan jumlah investor	Masih perlunya penciptaan iklim investasi yang kondusif	Belum optimalnya penyediaan ruang untuk investasi dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan
		terbatasnya Sarana dan prasarana pendukung investasi di daerah

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Masih perlunya penguatan kelembagaan perizinan satu pintu	Masih perlunya penguatan tim teknis perizinan dan satgas percepatan berusaha	Belum optimalnya sinergi antar Perangkat Daerah
	Masih perlunya peningkatan kemudahan perizinan berbasis aplikasi	Masih perlunya peningkatan aplikasi perizinan dan pemantauan proses perizinan

4.1.2.13 Kepemudaan dan Olahraga

Tantangan terbesar dalam pelaksanaan urusan kepemudaan adalah belum optimalnya kontribusi pemuda dalam pembangunan yang disebabkan oleh pengembangan pemuda yang belum optimal. Hal itu disebabkan oleh pembinaan organisasi pemuda yang belum optimal karena belum mencakup ke seluruh desa. Selain itu, pengembangan pemuda belum diarahkan pada tema-tema yang sesuai dengan kebutuhan pengembangan masyarakat lokal secara real. Dari sisi keolahragaan, prestasi olahraga Kabupaten Banggai Kepulauan secara keseluruhan juga perlu mendapatkan perhatian khusus. Hal itu disebabkan oleh belum optimalnya sarana dan prasarana keolahragaan karena persebarannya yang kurang merata dan masih terbatas pada jenis olahraga tertentu. Di samping itu, pengembangan SDM belum optimal karena pembibitan atlet belum terstruktur dengan baik serta belum adanya event-event olahraga reguler sebagai sarana pembibitan.

Tabel 4.18
Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya kontribusi pemuda dalam pembangunan	Pengembangan kapasitas pemuda belum optimal	Belum optimalnya pendataan organisasi kepemudaan
		Pembinaan organisasi pemuda belum mencakup seluruh desa
		Pengembangan pemuda belum diarahkan secara tematik dan peningkatan keterampilan, misalnya pada isu-isu tertentu yang sifatnya inovatif
		Diversifikasi peran organisasi kepemudaan belum optimal
Perlu ditingkatkannya prestasi olahraga	Sarana dan prasarana keolahragaan belum	Persebaran fasilitas olahraga tidak merata

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	optimal	Sarana keolahragaan masih terbatas pada olahraga tertentu, seperti sepak bola dan voli
	Pengembangan SDM keolahragaan belum optimal	Pembibitan atlet masih belum terstruktur
		Tidak adanya kompetisi reguler dan berjenjang sebagai sarana pembibitan

4.1.2.14 Statistik

Pelaksanaan urusan statistik di Kabupaten Banggai Kepulauan masih belum optimal. Hingga saat ini, fungsi statistik melekat di Dinas Komunikasi dan Informatika serta pada Bappeda dan Litbang. Seperti tercantum pada tabel di bawah ini, masalah terbesar pelaksanaan urusan Statistik adalah belum optimalnya ketersediaan data statistik yang terintegrasi. Penyebab utama dari masalah pokok tersebut yaitu belum optimalnya kapasitas kelembagaan baik dari sisi kewenangan maupun SDM.

Tabel 4.19
Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Statistik

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya ketersediaan data statistik yang terintegrasi	Belum optimalnya kapasitas kelembagaan statistik	Adanya tumpang tindih kewenangan dengan BPS terutama Seksi Statistik
		Kurangnya kompetensi SDM pengelola statistik
		Belum optimalnya standar pelayanan pengelolaan data statistik sektoral

4.1.2.15 Persandian

Di Kabupaten Banggai Kepulauan, pelaksanaan urusan persandian juga belum menunjukkan progress yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Sama dengan Statistik, urusan Persandian juga masih melekat pada Dinas Komunikasi dan Informatika. Permasalahan pokok yang ada adalah belum optimalnya layanan persandian akibat dari prosedur penggunaan persandian yang masih minim.

Tabel 4.20
Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Persandian

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya layanan persandian	Prosedur penggunaan persandian (seperti tanda tangan elektronik, tata naskah dinas, tanda tangan, kearsipan) belum optimal	Kurangnya SDM yang memadai di bidang persandian
		Masih perlunya penguatan kapasitas dan pemahaman terkait urgensi persandian

4.1.2.16 Kebudayaan

Pada urusan kebudayaan, minimnya upaya menjadikan budaya lokal sebagai katalisator pembangunan daerah menjadi masalah pokok. Hal ini berkaitan dengan bagaimana menjadikan kebudayaan sebagai bahan pengembangan sektor pariwisata. Upaya ini belum tercapai karena situs-situs kebudayaan belum dijadikan sebagai objek pembangunan pariwisata.

Tabel 4.21
Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Kebudayaan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Perlu ditingkatkannya budaya lokal sebagai identitas dan katalisator pembangunan	Belum optimalnya pengelolaan kekayaan budaya	Masih perlu ditingkatkannya fasilitasi terhadap kelompok kesenian
		Masih perlunya revitalisasi nilai tradisi
		Belum optimalnya inventarisasi benda cagar budaya
		Belum optimalnya upaya menjadikan cagar budaya sebagai sarana edukasi

4.1.2.17 Perpustakaan

Berdasarkan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2017 tentang perpustakaan, disebutkan bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat. Perpustakaan memiliki andil besar dalam melestarikan hasil karya manusia, baik berupa karya cetak maupun karya rekam lainnya untuk dapat

dimanfaatkan masyarakat secara luas. Secara umum, kinerja layanan perpustakaan di Kabupaten Banggai Kepulauan sudah cukup baik. Namun, layanan tersebut perlu ditingkatkan dengan mengembangkan perpustakaan berbasis inklusif yakni perpustakaan tidak hanya sebagai tempat membaca tetapi memiliki fungsi lain seperti sebagai tempat diskusi, tempat pelatihan, mini studi dan sebagainya, sehingga semakin memperluas sarana proses belajar masyarakat. Dalam mewujudkan perpustakaan inklusif diperlukan berbagai upaya diantaranya pembangunan sarana prasarana, perluasan layanan, peningkatan kapasitas SDM pengelola dan sebagainya. Berikut adalah rumusan permasalahan terkait urusan Perpustakaan di Kabupaten Banggai Kepulauan.

Tabel 4.22
Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Perpustakaan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya pengembangan literasi	Belum optimalnya cakupan layanan perpustakaan yang inklusif	Perluasan fungsi perpustakaan tidak hanya untuk membaca tetapi ada ruang diskusi, mini studio, tempat pelatihan dan sebagainya
		Perlunya pengembangan perpustakaan hingga level desa
		Perlunya perluasan dan penambahan layanan perpustakaan keliling
		Perlunya peningkatan kapasitas SDM pengelola perpustakaan

4.1.2.18 Kearsipan

Urusan kearsipan diarahkan untuk penyelamatan dan pelestarian arsip daerah serta peningkatan kualitas pelayanan dalam bidang kearsipan. Arsip sebagai bukti terkait terjadinya peristiwa, kebijakan pemerintah dan sebagainya. Kinerja layanan kearsipan dapat dilihat dari indikator cakupan pengelolaan arsip daerah dan persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku. Secara umum, kedua indikator tersebut masih belum menunjukkan kondisi yang baik. Hal tersebut dikarenakan belum semua Perangkat Daerah mengirimkan arsipnya untuk dikelola Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, sarana prasana kearsipan pada level daerah dan satuan kerja masih terbatas, serta SDM pengelola arsip masih kurang. Berikut adalah rumusan permasalahan terkait urusan Kearsipan di Kabupaten Banggai Kepulauan.

Tabel 4.23

Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Kearsipan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya sistem kearsipan daerah	Belum optimalnya pengelolaan depot arsip daerah	Terbatasnya ketersediaan depot arsip daerah
		Belum semua dan Perpustakaan memiliki depot arsip yang baik
		Belum ada berita acara dalam penghapusan arsip sehingga banyak arsip menumpuk (belum ada SOP)
		Belum optimalnya sistem perawatan dan pemeliharaan arsip
		Belum adanya tenaga arsiparis yang bersertifikat.

4.1.3 Layanan Urusan Pilihan

4.1.3.1 Perikanan dan Kelautan

Kabupaten Banggai Kepulauan merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi pada sektor perikanan. Ikan Laut merupakan beberapa produk unggulan yang dimiliki oleh Kabupaten Banggai Kepulauan. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa perikanan bisa menjadi salah satu sektor yang berkontribusi besar terhadap perekonomian daerah. Dukungan serta penyelesaian beberapa permasalahan dalam bidang perikanan menjadi penting untuk dilakukan guna mengoptimalkan potensi yang ada. Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam bidang ini adalah terkait manajemen pengelolaan produk perikanan dan optimalisasi pemasaran produk perikanan.

Tabel 4.24

Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Perikanan dan Kelautan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya pemasaran perikanan di dalam daerah	Tingkat konsumsi ikan masih rendah	Kesadaran masyarakat tentang gizi/protein hewani belum optimal
		belum optimalnya pengelolaan harga ikan lokal
Belum optimalnya tingkat produksi perikanan dan daya saing produk ikan	Kurangnya ketersediaan bibit ikan	Belum adanya Balai Benih Ikan (BBI) di Kabupaten Banggai Kepulauan
	Skala Usaha Pembudidaya Ikan	Pembudidaya ikan di Banggai Kepulauan didominasi oleh pembudidaya skala kecil sehingga porsi biaya tetap yang dikeluarkan menjadi besar.

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		Sebagian besar kualitas SDM pembudidaya ikan masih terbatas
	Akses untuk permodalan bagi pengembangan usaha perikanan budidaya terbatas	Prosedur perbankan yang sulit dipenuhi bagi pembudidaya skala kecil
	Teknologi dan sistem produksi	Akses terhadap teknologi terbatas
		Umumnya masih menerapkan sistem tradisional dan/atau sistem semi-intensif.
		Infrastruktur pendukung masih terbatas

4.1.3.2 Pariwisata

Pariwisata merupakan salah satu sektor potensial di Kabupaten Banggai Kepulauan. Tingginya potensi tersebut belum diimbangi oleh dua penyebab yaitu minimnya sarana dan prasarana wilayah dan juga belum optimalnya dukungan SDM. Kedua aspek tersebut merupakan hal krusial dalam menopang peningkatan kegiatan wisata di Banggai Kepulauan. Minimnya sarana dan prasarana pariwisata dapat dilihat dari beberapa penyebab seperti masih terkonsentrasinya destinasi wisata di beberapa titik. Selain itu, destinasi yang ada saat ini masih sulit diakses bagi wisatawan nasional dan juga diversifikasi paket wisata yang masih kurang. Dari sisi dukungan SDM, pengembangan pariwisata masih terkendala oleh masih lemahnya pola pikir pariwisata di kalangan masyarakat. Akibatnya, upaya-upaya menarik wisatawan berbasis desa/komunitas belum berkembang secara maksimal.

Tabel 4.25
Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Pariwisata

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya potensi kepariwisataan Kabupaten Banggai Kepulauan	Belum optimalnya pengembangan atraksi, amenitas, akomodasi pariwisata	Destinasi wisata yang belum tersebar
		Belum optimalnya sarana dan prasarana pariwisata
		Paket wisata belum terdiversifikasi

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		Belum banyaknya akomodasi pariwisata yang sesuai kebutuhan wisatawan
		Belum optimalnya upaya menarik wisatawan lokal
	Belum optimalnya pengembangan SDM dan kelembagaan pariwisata	Belum optimalnya kompetensi SDM masyarakat desa
		Belum optimalnya integrasi desa wisata dengan pembangunan desa

4.1.3.3 Pertanian

Kabupaten Banggai Kepulauan merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi pada sektor pertanian dan peternakan. Beberapa keunggulan sektor pertanian dan peternakan adalah pada komoditas pertanian pangan, ternak sapi perah, sapi potong dan jagung hibrida, hortikultura sayuran dan buah-buahan. Sektor pertanian di Kabupaten Banggai Kepulauan merupakan penyumbang PDRB terbesar dengan pada tahun 2020 dengan kontribusi sebesar 49,06%. Optimalisasi serta penyelesaian beberapa permasalahan dalam bidang pertanian dan peternakan menjadi penting untuk dilakukan guna mengoptimalkan potensi yang ada. Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam bidang ini adalah terkait manajemen pengelolaan produk hasil pertanian dan peternakan dan optimalisasi pemasaran produk hasil ternak.

Tabel 4.26
Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Pertanian

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Pertanian		
Belum optimalnya kesejahteraan petani	Belum optimalnya kualitas hasil pertanian	Belum optimalnya kapasitas SDM petani
		Belum optimalnya peran kelembagaan petani
		Semakin menurunnya jumlah petani
		Ketersedian sarana prasarana pertanian yang masih kurang
	Belum optimalnya produktivitas lahan	Semakin menurunnya tingkat kesuburan tanah

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	pertanian	Belum optimalnya ketersediaan sumber daya air pertanian
		Belum optimalnya penggunaan pupuk berimbang
		Belum optimalnya kepatuhan penerapan pola tanam petani
	Belum optimalnya pemasaran dan diversifikasi produk pertanian	Perlunya peningkatan minat petani dalam mengolah produk hasil pertanian
		Belum optimalnya fasilitasi akses pasar
Peternakan		
Belum optimalnya produksi,	Keterbatasan ketersediaan bibit ternak unggul	Tingkat pengetahuan peternak dalam usaha perbibitan dan manajemen reproduksi ternak masih kurang
produktivitas ternak, dan daya saing produk hasil ternak		Modal usaha perbibitan ternak yang besar
		Belum berkembangnya kawasan peternakan berupa kluster perbibitan ternak
		Keterbatasan jumlah sarana prasarana Inseminasi Buatan
	Keterbatasan ketersediaan pakan ternak	Keterbatasan lahan dan persaingan penggunaan lahan dengan tanaman pangan
		Belum optimalnya ketersediaan pakan
		Belum optimalnya pemanfaatan teknologi pengawetan pakan ternak
	Tingkat pengetahuan dan SDM Peternak belum optimal	Tingkat pendidikan yang rendah dan sebagian pelaku usaha peternakan dalam katageri usia non produktif
		Kurangnya minat generasi muda dalam usaha peternakan
Skala usaha peternakan belum optimal		Belum optimalnya pendataan kelompok peternak

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		Keterbatasan akses modal
		Belum berkembangnya kelembagaan korporasi peternak
		Kurang akuratnya data <i>supply demand</i> produk hasil ternak
		Belum optimalnya peran kelembagaan asosiasi peternak
		Belum optimalnya kemitraan usaha peternakan
	Terbatasnya ketersediaan sarana prasarana dan pemanfaatan alat mesin peternakan	Keterbatasan ketersediaan air untuk budidaya ternak
		Belum optimalnya pemanfaatan alat mesin peternakan
		Keterbatasan akses pemasaran produk hasil ternak

4.1.3.4 Perindustrian

Perindustrian merupakan salah satu sektor yang menopang perekonomian Kabupaten Banggai Kepulauan. Permasalahan pembangunan yang dihadapi pada sektor perindustrian adalah sebagai berikut:

Tabel 4.27
Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Perindustrian

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya laju pertumbuhan sektor industri terhadap PDRB	Belum optimalnya pembinaan perindustrian	Belum optimalnya koordinasi dan kerjasama antar stakeholder untuk pengembangan perindustrian
		Belum optimalnya peruntukan kawasan industri
		Belum optimalnya penataan industri kecil yang ada di kecamatan
		Kompetensi IKM yang masih perlu ditingkatkan

4.1.3.5 Perdagangan

Pembangunan perdagangan dalam perekonomian memiliki peran strategis untuk mendukung kelancaran penyaluran barang dan jasa, pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat, mendorong pembentukan harga yang wajar, penciptaan lapangan kerja serta peningkatan pendapatan. Secara umum, sektor perdagangan di Kabupaten

Banggai Kepulauan belum memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian daerah. Untuk itu perlu adanya upaya peningkatan perbaikan layanan urusan perdagangan. Selama periode 5 (lima) tahun (2017-2021), kinerja urusan perdagangan cukup baik pada pengelolaan retribusi pasar daerah serta perbaikan sarana prasarana perdagangan (pasar, toko, kios, fasilitas pasar). Namun demikian masih perlu dioptimalkan.

Tabel 4.28
Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Perdagangan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya kontribusi perdagangan terhadap perekonomian daerah	Belum optimalnya pembinaan usaha perdagangan	Belum optimalnya pendataan potensi perdagangan
		Belum optimalnya koordinasi dan kerjasama antar stakeholder untuk pengembangan perdagangan
		Perlu peningkatan kapasitas SDM perdagangan
		Fasilitasi izin usaha perdagangan belum optimal
		Masih perlunya peningkatan upaya promosi usaha perdagangan
	Belum optimalnya pengelolaan UPT	Belum optimalnya peningkatan sewa TERA untuk alat ukur
		Belum optimalnya peningkatan sarana dan prasarana pasar
		Belum optimalnya peningkatan retribusi pasar

4.1.4 Unsur Penunjang, Pendukung, Pengawasan Urusan Pemerintahan, serta unsur Kewilayahan dan Pemerintahan Umum

4.1.4.1 Perencanaan

Perencanaan pembangunan menentukan efektivitas proses pembangunan dan membawa dampak signifikan bagi penerapan akuntabilitas kinerja di Kabupaten Banggai Kepulauan. Capaian fungsi perencanaan belum optimal untuk mendukung SAKIP yang masih berpredikat “CC” hingga tahun 2020. Orientasi pembangunan berbasis kinerja outcome/impact perlu ditingkatkan, serta belum terbangunnya manajemen kinerja yang baik berupa pembagian indikator kinerja yang saling

mendukung dan terkait antara Kepala Daerah dengan kepala Perangkat Daerah dan struktur di bawahnya. Beberapa kinerja perencanaan masih berorientasi output berupa ketersediaan dokumen perencanaan. Pemetaan permasalahan dalam fungsi perencanaan sebagai berikut:

Tabel 4.29
Permasalahan Pembangunan Daerah Unsur Penunjang Perencanaan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan	Belum terbangunnya sistem manajemen kinerja	Pembagian dan sinergi target kinerja antara kepala daerah dengan perangkat daerah belum terbangun
		Indikator kinerja masih banyak berorientasi level <i>output</i> belum <i>outcome/impact</i>
		Penetapan target kinerja dipengaruhi oleh ketersediaan anggaran
	Belum optimalnya kualitas pengendalian dan evaluasi kinerja	Belum terbangunnya sistem pengelolaan data kinerja yang baik
		Belum optimalnya sinergi antara perencanaan dan kinerja
		Pengendalian dan evaluasi belum mengawal capaian kinerja outcome
	Belum optimalnya implemmentasi perencanaan sektoral dan berbasis isu strategis	Belum terbangunnya instrumen pengendalian implementasi, misalnya perencanaan berupa Rencana Aksi Daerah (RAD)
		Perlunya kejelasan tugas dan fungsi antar bidang perencanaan dalam mengawal perencanaan sektoral

4.1.4.2 Keuangan

Kinerja keuangan daerah yang berkaitan dengan pendapatan dapat dilihat dari peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Data menunjukkan bahwa sejak tahun 2017 hingga tahun 2021 PAD di Kabupaten Banggai Kepulauan mengalami fluktuatif selama lima tahun. Tantangan untuk mengoptimalkan pendapatan tersebut khususnya yang bersumber dari pajak. Unsur penunjang pemerintahan keuangan

juga memiliki isu atau permasalahan urgen berupa capaian akuntabilitas keuangan yang yang pada tahun 2020 yaitu disclaimer, penetapan APBD pada tahun 2020 terjadi inkonsistensi tahapan dan jadwal penyusunan APBD sesuai dengan ketentuan sehingga penetapan APBD pada tahun 2020 tidak tepat waktu.

Tabel 4.30
Permasalahan Pembangunan Daerah Unsur Penunjang Keuangan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum Optimalnya pengelolaan Keuangan aset daerah dan potensi pendapatan	Masih adanya potensi pendapatan pajak yang tidak terealisasi	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber- sumber penerimaan masih perlu ditingkatkan
		Masih adanya objek pajak yang belum membayar pajak sesuai ketentuan
	Masih adanya potensi penurunan belanja modal	Integrasi perencanaan dan penganggaran Daerah melalui SIPD belum optimal
		transparansi pengelolaan keuangan daerah masih rendah
		pengamanan aset daerah belum optimal

4.1.4.3 Kepegawaian

Kepegawaian merupakan urusan krusial dalam upaya peningkatan tatakelola pemerintahan. Di Kabupaten Banggai Kepulauan, masalah pokok dari urusan kepegawaian, yaitu belum optimalnya kualitas kepegawaian yang disebabkan oleh manajemen kepegawaian yang belum maksimal. Beberapa persoalan mikro yang teridentifikasi antara lain tidak meratanya distribusi pegawai antara Perangkat Daerah, kurangnya SDM di beberapa posisi, serta proses mutasi yang seringkali tidak berjalan lancar dan tidak sesuai dengan basic pendidikan.

Tabel 4.31
Permasalahan Pembangunan Daerah Unsur Penunjang Kepegawaian

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya kualitas kepegawaian	Manajemen kepegawaian belum optimal	Tidak meratanya distribusi pegawai antar Perangkat Daerah

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		Kurangnya SDM di berbagai posisi, misalnya terdapat Kassubag/setaranya yang tidak memiliki staf
		Proses mutasi yang kadang tidak berjalan lancar

4.1.4.4 Pendidikan dan pelatihan

Belum optimalnya manajemen ASN, juga terkait belum optimalnya peningkatan kompetensi aparatur. Hal ini antara lain disebabkan oleh pelaksanaan pendidikan dan pelatihan masih terpusat, serta skala prioritas pelaksanaan diklat yang berubah. Pemetaan masalah terkait pendidikan dan pelatihan di Kabupaten Banggai Kepulauan sebagai berikut:

Tabel 4.32
Permasalahan Pembangunan Daerah Unsur Penunjang Pendidikan dan Pelatihan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya kompetensi ASN	Belum optimalnya peningkatan kompetensi ASN	pelaksanaan diklat belum menjadi prioritas pelaksanaan kegiatan perangkat daerah
		Permohonan diklat dari Perangkat Daerah seringkali tidak bisa terakomodir karena skala prioritas yang berubah

4.1.4.5 Penelitian dan Pengembangan

Pelaksanaan urusan penelitian dan pengembangan merupakan aspek krusial yang menjadi basis pengambilan kebijakan. Namun demikian, tujuan tersebut belum bisa terwujud karena minimnya ketersediaan hasil penelitian yang bisa dijadikan basis perumusan kebijakan. Hal ini disebabkan oleh lemahnya kapasitas untuk melakukan riset oleh Perangkat Daerah yang mengampu urusan penelitian dan pengembangan. Pada saat yang sama penelitian juga dilaksanakan secara terbagi-bagi/terpecah-pecah di tingkat Perangkat Daerah dengan koordinasi yang lemah.

Dalam perumusan kebijakan juga dibutuhkan kemampuan inovasi daerah. Hingga saat ini inovasi yang dihasilkan di Banggai Kepulauan masih perlu ditingkatkan.

Tabel 4.33
Permasalahan Pembangunan Daerah Unsur Penunjang Penelitian dan Pengembangan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Masih kurangnya pengembangan penelitian dan inovasi	Minimnya ketersediaan hasil penelitian untuk basis perumusan kebijakan	Masih minimnya kegiatan penelitian karena tidak adanya SDM fungsional peneliti
		Tidak adanya hasil penelitian yang terstruktur karena penelitian masih tersebar di tingkat Perangkat Daerah
		Belum optimalnya koordinasi kelitbangan

4.1.4.6 Pengawasan

Capaian fungsi pengawasan di Kabupaten Banggai Kepulauan belum memenuhi target nasional, yakni Maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP yang berada di Level 2. Capaian tersebut diperkuat dengan peningkatan integritas aparatur yang ditandai dengan transparansi kegiatan dan kepatuhan pelaporan harta kekayaan. Namun, terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian untuk penguatan fungsi pengawasan di masa depan, yaitu:

Tabel 4.34
Permasalahan Pembangunan Daerah Unsur Pengawasan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Masih perlunya penguatan sistem dan aparatur pengendalian intern pemerintah	Masih perlunya penguatan kelembagaan SPIP	Masih perlunya peningkatan kinerja satgas SPIP di level Kabupaten dan Perangkat Daerah
		Masih perlunya pemantauan tahapan penerapan SPIP
Masih perlunya penguatan integritas di lingkungan pemerintah daerah	Belum optimalnya Perangkat Daerah yang mencanangkan dan menerapkan zona integritas dan WBK/WBBM	Belum optimalnya asistensi kepada setiap Perangkat Daerah
	Masih perlunya penguatan akses dan tindak lanjut pengaduan masyarakat	Masih perlunya penguatan penerapan whistle blowing system

4.1.4.7 Sekretariat DPRD

DPRD merupakan mitra Bupati dan Wakil Bupati yang berkedudukan sama tetapi memiliki fungsi yang berbeda. Dalam melaksanakan fungsinya, DPRD difasilitasi oleh Sekretariat DPRD. Adapun tugas Sekretariat DPRD diantaranya menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan DPRD. Dalam pelaksanaan tugas fasilitasi masih mengalami beberapa kendala seperti manajemen internal di sekretariat DPRD, kinerja anggota Dewan serta koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait. Berikut adalah rumusan permasalahan terkait urusan Sekretariat DPRD di Kabupaten Banggai Kepulauan.

Tabel 4.35
Permasalahan Pembangunan Daerah Unsur Pendukung Sekretariat DPRD

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya fasilitasi anggota dewan	Belum optimalnya koordinasi antar bagian dalam proses pelayanan anggota dewan	Manajemen pembagian tugas yang kurang efektif
		Belum optimalnya fasilitasi peningkatan kapasitas anggota dewan berbasis kebutuhan daerah

4.1.4.8 Sekretariat Daerah

Fungsi yang dijalankan oleh Sekretariat Daerah terkait dengan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi kebijakan Bupati dan Wakil Bupati. Fungsi tersebut menopang kualitas tata kelola pemerintahan yang berjalan di Daerah. Beberapa capaian kinerja yang menandai kualitas tata kelola pemerintahan belum optimal, antara lain terkait Nilai Reformasi Birokrasi dan penerapan SAKIP. Tantangan yang masih dihadapi fungsi Sekretariat Daerah, yaitu:

Tabel 4.36
Permasalahan Pembangunan Daerah Unsur Pendukung Sekretariat Daerah

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya penerapan reformasi birokrasi	Belum optimalnya penerapan komponen pengungkit reformasi birokrasi	Belum optimalnya pelemagaan dan sinergi antar perangkat daerah dalam menjalankan reformasi birokrasi

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		Masih perlunya peningkatan pengendalian kualitas pelayanan publik
Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan penerapan kebijakan daerah	Belum optimalnya koordinasi antar perumus kebijakan/produk hukum daerah	Belum optimalnya koordinasi antar Perangkat Daerah
		Masih perlunya asistensi Setda kepada perangkat daerah pengusul kebijakan
	Belum optimalnya pengendalian kebijakan	Masih adanya tumpang tindih kewenangan antara struktur Bagian Setda dengan Perangkat Daerah teknis.
		Belum adanya instrumen pengendalian dan pengukuran keberhasilan kebijakan
	Belum optimalnya kualitas pelayanan <i>e-procurement</i>	Belum optimalnya monitoring dan evaluasi proses pengadaan barang dan jasa di setiap satuan kerja
		Standar pelayanan yang kurang sederhana
		Belum optimalnya kuantitas dan kompetensi petugas pelayanan
	Belum optimalnya diseminasi informasi publik	Belum optimalnya jumlah media sebagai sarana diseminasi informasi publik

4.1.4.9 Kewilayahan

Fungsi kewilayahan yang dijalankan oleh kecamatan, salah satunya dalam rangka menopang kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Adapun yang masih menjadi kendala terkait implementasi fungsi kecamatan, yakni dalam rangka asistensi pembangunan desa, terutama dalam menyusun database pembangunan desa. Beberapa permasalahan terkait fungsi kecamatan yang perlu menjadi perhatian sebagai berikut:

Tabel 4.37
Permasalahan Pembangunan Daerah Unsur Kewilayahan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Masih perlunya peningkatan kualitas pelayanan publik	Masih perlunya penerapan instrumen pengendalian kualitas pelayanan publik	Masih perlunya perbaikan kualitas pelayanan tingkat kecamatan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	Belum optimalnya pelayanan kependudukan di kecamatan baru	Belum optimalnya pendistribusian sarana dan prasarana pelayanan
Belum optimalnya pengembangan potensi kewilayahan	Belum optimalnya fungsi koordinasi kewilayahan	Belum optimalnya peran kecamatan sebagai instansi terdepan dalam menyusun peta masalah dan potensi kecamatan

4.1.4.10 Pemerintahan Umum- Kesatuan Bangsa dan Politik

Urusan pemerintahan umum terkait pelaksanaan unsur kesatuan bangsa dan politik, sehingga terkait upaya membangun kohesivitas sosial dan peningkatan demokrasi dan kehidupan politik yang kondusif di daerah. Pelaksanaan urusan pemerintahan umum di Kabupaten Banggai Kepulauan memiliki beberapa tantangan sebagai berikut:

Tabel 4.38
Permasalahan Pembangunan Daerah Unsur Pemerintahan Umum- Kesatuan Bangsa dan Politik

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Masih terdapatnya ancaman dan gangguan pada kohesivitas sosial masyarakat	Belum optimalnya deteksi dini dan kewaspadaan dini gangguan stabilitas wilayah	Minimnya SDM untuk deteksi dan kewaspadaan dini
		Belum optimalnya pendataan dan peran Ormas
		Pengembangan nilai-nilai kebangsaan dan multikulturalisme yang belum efektif

4.2 Isu- isu Strategis

Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, penentuan isu strategis sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional;
- b. Merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah;
- c. Dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat;
- d. Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah;
- e. Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani; dan
- f. Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan.

4.2.1 Isu Strategis Global/ International

a. Dampak Pandemi Covid-19

Pandemi COVID-19 (corona virus disease 2019) yang melanda dunia telah berdampak signifikan terhadap sebagian besar dunia. Tak bisa dipungkiri virus corona mengguncang peradaban manusia di dunia. Setiap negara melalui otoritasnya meminta rakyatnya untuk tetap di rumah, menjaga jarak baik secara fisik (*physical distancing*) maupun sosial (*social distancing*) bahkan melakukan lockdown (karantina wilayah) untuk menghambat penyebaran virus corona. Virus corona yang mewabah di berbagai penjuru dunia dan langkah-langkah preventif yang dilakukan tentu menimbulkan perubahan yang signifikan terhadap kehidupan masyarakat dunia.

Di samping dampak negatif yang terjadi, terdapat dampak lain pandemi, sebagai pembelajaran bersama. Masyarakat dunia pun belajar bahwa kesadaran masyarakat akan pola hidup bersih dan sehat meningkat signifikan. Di samping itu, dengan menurunnya proses produksi di masyarakat maka berdampak menurunnya polusi dan langit pun terlihat biru, kembali cerah sehingga seolah-olah memberikan kesempatan kepada alam untuk melakukan *recovery*.

b. Perubahan Iklim dan Pemanasan Global (*Global Warming/Climate Change*)

Perkembangan lingkungan pada era globalisasi pembangunan sekarang ini menunjukkan penurunan. Hal ini disebabkan pembangunan yang mengesampingkan faktor kelestarian lingkungan hidup sehingga menyebabkan kelestarian hidup yang buruk dengan akibat ancaman global warming. Global warming merupakan efek atau dampak dari rusaknya kelestarian ekosistem alam yang dapat mengakibatkan kekeringan, kelangkaan bahan pangan, hingga banjir dan bahkan mampu menjadi penyebab utama adanya bencana alam.

Perlu adanya antisipasi dari pemerintah dan masyarakat dunia dalam menyikapi global warming. Segala bentuk perencanaan pembangunan harus mempunyai strategi dalam menerapkan pembangunan yang ramah lingkungan. Hal ini dilakukan agar kelestarian alam dapat terjaga dan efek global warming dapat diminimalisir atau dapat dihindari namun tetap terlaksana pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.

c. Sustainable Development Goals (SDGs)

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan deklarasi internasional pada tanggal 25 September 2015 yang diselenggarakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menetapkan 17 TPB/SDGs yang terdiri atas 169 target untuk mengukur pencapaian target TPB/SDGs. Target TPB Kabupaten Banggai Kepulauan sebanyak 220 indikator.

Tiga tujuan mulia SDGs yakni pertama, diharapkan mengakhiri segala bentuk kemiskinan di semua negara di dunia ini. Kedua, SDGs bertujuan mengakhiri segala bentuk kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan meningkatkan gizi dan mendorong pertanian berkelanjutan. Ketiga, target SDGs adalah menjamin adanya kehidupan sehat, serta mendorong kesejahteraan untuk semua orang di dunia ini pada semua usia. Oleh karena itu, pencapaian SDGs diperlukan koordinasi, kerjasama, serta komitmen dan kebersamaan dari seluruh pemangku kepentingan terutama pemerintah dan masyarakat untuk bersama-sama memastikan kemajuan-kemajuan yang telah dicapai dalam tujuan pembangunan millennium (MDGs).

SDGs terdiri dari 17 tujuan, 169 target dengan 240 indikator. Adapun tujuan SDGs meliputi:

- a. Penghapusan Kemiskinan;
- b. Penghapusan Kelaparan;
- c. Kesehatan yang Baik dan Kesejahteraan;
- d. Pendidikan Berkualitas;
- e. Kesenjangan Gender;
- f. Air Bersih dan Sanitasi;
- g. Energi Bersih dan Terjangkau;

- h. Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan yang Layak;
- i. Infrastruktur tangguh, Industri inklusif, dan Inovatif;
- j. Penurunan Kesenjangan;
- k. Kota Inklusif Dan Berkelanjutan;
- l. Konsumsi Dan Produksi Berkelanjutan;
- m. Perubahan Iklim Dan Pengurangan Resiko Bencana;
- n. Pelestarian Dan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Bawah Laut;;
- o. Pelestarian Dan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Darat;
- p. Perdamaian, Keadilan, Dan Kelembagaan Yang Kokoh;
- q. Kemitraan Untuk Semua Tujuan Pembangunan.

d. Revolusi Industri 4.0

Istilah Industry 4.0 pertama kali digemakan pada Hannover Fair, 4-8 April 2011. Istilah ini digunakan oleh pemerintah Jerman untuk memajukan bidang industri ke tingkat selanjutnya, dengan bantuan teknologi. Revolusi Industri 4.0 merupakan upaya transformasi menuju perbaikan dengan mengintegrasikan dunia online dan lini produksi di industri, di mana semua proses produksi berjalan dengan internet sebagai penopang utama.

Pada level nasional, sejumlah sektor industri telah siap memasuki era Industry 4.0. Beberapa di antaranya seperti industri semen, petrokimia, otomotif, serta makanan dan minuman. Faktor penggerak yang harus diperkuat untuk menyambut Industry 4.0 di Indonesia adalah peningkatan otomatisasi, komunikasi machine- to- machine, komunikasi human- to- machine, AI, serta pengembangan teknologi berkelanjutan. Beberapa dasar faktor penggerak. Pertama adalah peningkatan volume data, daya komputasi, dan konektivitas. Peran SDM industri melalui pendidikan vokasi yang mengarah pada high skill serta meningkatkan keterampilan SDM industri yang dominan low/middle ke level high skill.

4.2.2 Isu Strategis Nasional di dalam RPJMN 2020-2024

Isu strategis nasional tidak lepas dari Arahan Presiden Republik Indonesia sebagai dasar penyusunan RPJMN Tahun 2020-2024, yaitu:

1. Pembangunan SDM: membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri.
2. Pembangunan Infrastruktur: melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendorong lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.
3. Penyederhanaan Regulasi: menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan omnibus law terutama menerbitkan 2 undang-undang, yaitu UU Cipta Kerja dan UU Pemberdayaan UMKM.
4. Penyederhanaan Birokrasi: memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi.
5. Transformasi Ekonomi: melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Lima Arah Presiden tersebut diinstrumentasikan ke dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan, yaitu:

1. **Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan**, peningkatan inovasi dan kualitas investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata. Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui:
 - a. Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan
 - b. Akselerasi peningkatan nilai tambah pertanian dan perikanan, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.
2. **Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan**, bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan harmonisasi rencana pembangunan dan

pemanfaatan ruang. Pembangunan wilayah yang mampu menciptakan keberlanjutan dan inklusif melalui :

- a. Pengembangan sektor/komoditas/kegiatan unggulan daerah;
- b. Penyebaran pusat-pusat pertumbuhan ke wilayah yang belum berkembang;
- c. Penguatan kemampuan SDM dan IPTEK berbasis keunggulan wilayah;
- d. Peningkatan infrastruktur dan pelayanan dasar secara merata; dan
- e. Peningkatan daya dukung lingkungan serta ketahanan bencana dan perubahan iklim.

3. **Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing:** manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. Peningkatan kualitas dan daya saing SDM yaitu manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui:

- a. Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan;
- b. Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;
- c. Peningkatan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
- d. Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
- e. Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
- f. Pengentasan kemiskinan; dan
- g. Peningkatan produktivitas dan daya saing.

4. **Revolusi mental dan pembangunan Kebudayaan:** revolusi mental sebagai gerakan kebudayaan memiliki kedudukan penting dan berperan sentral dalam pembangunan untuk mengubah cara pandang. Sikap, perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan kemoderenan. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan dilaksanakan secara terpadu melalui:

- a. Revolusi mental dan pembinaan ideologi pancasila;
- b. Pemajuan dan pelestarian kebudayaan;
- c. Moderasi beragama; dan
- d. Penguatan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas.

5. **Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar:** bertujuan mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional, melalui:

- a. Pembangunan infrastruktur pelayanan dasar;

- b. Pembangunan konektivitas multimoda untuk mendukung pertumbuhan ekonomi;
 - c. Pembangunan infrastruktur perkotaan;
 - d. Pembangunan energi dan ketenagalistrikan; dan
 - e. Pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK untuk transformasi digital.
6. **Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim:** pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim. Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim diarahkan melalui:
- a. Peningkatan kualitas lingkungan hidup;
 - b. Peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim; dan
 - c. Pembangunan rendah karbon.
7. **Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik:** negara wajib hadir dalam melayani dan melindungi segenap bangsa, serta menegakkan kedaulatan negara, melalui:
- a. Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas;
 - b. Penataan kapasitas lembaga demokrasi, penguatan kesetaraan dan kebebasan;
 - c. Perbaikan sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber;
 - d. Peningkatan akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi;
 - e. Peningkatan pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri; dan
 - f. Peningkatan rasa aman, penguatan kemampuan pertahanan dan industri pertahanan.

4.2.3 Isu Strategis Provinsi Sulawesi Tengah

Sesuai RPJMD Propinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 – 2026, isu-isu strategis Sulawesi Tengah mencakup hal-hal antara lain:

a. Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Tengah

Berdasarkan data BPS (2021), pada bulan September 2020, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Sulawesi Tengah mencapai 403.740 orang (13,06 persen), berkurang sebesar 3,06 ribu orang dibandingkan dengan kondisi September 2018 yang sebesar

413.490 orang (14,01 persen). Beberapa kabupaten yang menyumbangkan tingkat kemiskinan yang tinggi di Sulawesi Tengah antara lain Kabupaten Donggala, Parigi Moutong, dan Tojo Una-Una. Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada September 2017 sebesar 10,39 persen turun menjadi 10,15 persen pada Maret 2018. Sementara persentase penduduk miskin di daerah perdesaan pada September 2017 sebesar 15,59 persen turun menjadi 15,51 persen pada Maret 2018. Selama periode September 2017–Maret 2018, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan naik sebanyak 3,47 ribu orang (dari 81,56 ribu orang pada September 2017 menjadi 85,03 ribu orang pada Maret 2018), sementara di daerah perdesaan turun sebanyak 6,54 ribu orang (dari 341,72 ribu orang pada September 2017 menjadi 335,18 ribu orang pada Maret 2018).

b. Dilema Industrialisasi Tambang dan Lingkungan Hidup

Permasalahan utama industrialisasi berbasis tambang juga terkait langsung dengan mata pencaharian yang ‘tergusur’ terutama lingkungan pertanian. Hadirnya perusahaan tambang ini kemudian sering menjadi topik perbincangan semua pihak. Misalnya, 1) petani yang kini beralih profesi sebagai pekerja (buruh) tambang; 2) petani yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menjadi pekerja di perusahaan tambang; 3) upah yang tidak layak bagi para pekerja; 4) perekrutan Tenaga Kerja Asing dan Tenaga Kerja Indonesia (lokal), dll.

Selain apa yang telah disebutkan di atas, ada topik reklamasi pasca tambang yang tidak dilakukan oleh perusahaan. Reklamasi pasca tambang pada dasarnya adalah usaha untuk memperbaiki kondisi tanah setelah aktivitas pertambangan selesai. Reklamasi pasca tambang penting menjadi perhatian khusus dari berbagai pihak. Selain hal ini sudah pasti merusak lingkungan, ada hal-hal penting lainnya yang perlu dilihat lebih dalam. Misalnya, areal-areal bekas eksploitasi ketika kandungan mineralnya telah habis dikeruk, harus segera dilakukan kegiatan reklamasi untuk menghindari kemungkinan-kemungkinan yang berdampak pada bencana lingkungan, banjir dan longsor yang membahayakan kehidupan masyarakat di sekitar tambang.

c. Penanganan Pasca Gempa Bumi, Tsunami dan Liquefaksi

Peristiwa yang terjadi di Sulawesi Tengah tepatnya di Palu, Donggala, dan Sigi, pada Jumat malam, 28 September lalu, benar-benar membuat kondisi daerah tersebut lumpuh. Betapa tidak gempa yang diiringi dengan tsunami yang berkekuatan magnitudo

7,4 membuat rusak dan hancur seluruh sarana dan prasarana seperti bangunan, jalan, dan jembatan. Data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang dikeluarkan pada 21 Oktober lalu menunjukkan bencana alam di Palu menyebabkan 2.256 orang warga meninggal dunia, yang mengalami luka berat mencapai 4.612 orang, dan warga yang mengungsi sebanyak 223.751 orang. Untuk yang menghilang sebanyak 1.309 orang. Untuk bangunan yang terdampak bencana yakni sebanyak 68.451 rumah rusak, 265 sekolah rusak, 327 rumah ibadah rusak, dan 45 fasilitas kesehatan mengalami kerusakan.

Terkait penanganan pasca bencana alam ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memercayakan kepada BPIW untuk membuat rencana tapak dan ikut membuat rencana induk relokasi penduduk bersama Kementerian/Lembaga terkait. Rencana tapak ini berisi rancangan permukiman warga yang dilengkapi dengan fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos). Rancangan tersebut merupakan tindak lanjut dari pembuatan rencana induk. Fasum dan fasos yang disediakan seperti gedung sekolah SD, SMP, dan SMA. Kemudian juga akan dibangun posyandu dan puskesmas. Selain itu akan dibangun tempat peribadatan, pertokoan, dan pasar lingkungan. Selanjutnya akan dibangun ruang terbuka hijau, jalan, dan permukiman. Untuk total rumah yang akan dibangun diperkirakan mencapai 14 ribu unit dan total luas kawasan relokasi ini diperkirakan 82.192 ha atau mencapai 821.920 m². Ke depan, penduduk akan direlokasi di empat tempat yang sudah di survei, yakni kawasan Duyu yang berada di Kota Palu, Talise dan Tondo yang berada di Kota Palu, dan Pombewe yang berada di Kabupaten Sigi. Satu lokasi lagi berada di Kelurahan Petobo. Penduduk yang diprioritaskan untuk direlokasi adalah yang terkena bencana alam tersebut.

d. Revisi Tata Ruang Provinsi Sulawesi Tengah dan Mitigasi Bencana

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah sedang giatnya menginisiasi revisi Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013- 2033. Bukan tidak beralasan, inisiatif ini tentunya dilandasi oleh semangat untuk penyesuaian RTRW dengan situasi faktual terkait fenomena alam dengan tingkat kerentanan tinggi akan terjadinya bencana alam. Dalam kerangka revisi kebijakan RTRW ini, pemerintah provinsi kemudian melakukan kajian kebencanaan utamanya di wilayah Palu

Donggala Sigi dan Parigi Moutong (Padagimo). Tidak hanya itu, temuan-temuan dan hasil kajian dari tim ahli (konsultan) sebagai mitra Pemerintah semestinya diuji kualitas dan keakuratannya dan menyelaraskannya dengan bidang-bidang pembangunan yang lain guna mengarusutamakan aspek kebencanaan ke dalam perencanaan pembangunan secara umum dan secara khusus bagi kebijakan RTRW itu sendiri. Di samping untuk mendorong partisipasi pemangku kepentingan dan masyarakat luas, pemerintah perlu menerima masukan, saran kritik dari berbagai pihak agar kebijakan yang dihasilkan dapat dijalankan secara konsisten dan berkelanjutan mulai dari proses perumusan kebijakan, perencanaan, implementasi hingga proses monitoring dan evaluasi. Dalam konteks inilah peran aktif organisasi gerakan masyarakat sipil dibutuhkan.

e. Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus dan Industri Strategis Nasional di Provinsi Sulawesi Tengah

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus mendorong percepatan pembangunan kawasan industri di luar Jawa. Tahun ini ditargetkan dapat beroperasi delapan kawasan industri dan 10 kawasan industri lainnya masih tahap perencanaan terus dipacu agar dapat segera beroperasi. Berdasarkan catatan Kemenperin selama periode Tahun 2015-2017, sektor manufaktur yang telah menanamkan modalnya di seluruh kawasan industri di Indonesia mencapai Rp 126,5 triliun. Investasi selama tiga tahun tersebut terdiri dari penanaman modal asing (PMA) sebesar Rp 103 triliun dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) hingga Rp 23,5 triliun. Terdapat tiga kawasan industri (KI) di Indonesia timur ditargetkan mulai beroperasi Tahun 2017. Ketiga kawasan industri tersebut adalah Konawe di Sulawesi Tenggara, Bitung di Sulawesi Utara, dan Palu di Sulawesi Tengah. Pada akhir Tahun 2020, Pemerintah menetapkan sebanyak 18 kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus (KEK) masuk dalam sektor kawasan proyek strategis nasional (PSN) yang ditetapkan oleh Pemerintah. Penetapan kawasan ini sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan PSN yang diterbitkan pada 17 November 2020. Perlu diketahui, Pemerintah telah menetapkan 201 proyek dan 10 program yang mencakup 23 sektor dengan total nilai investasi sebesar Rp 4.809,7 triliun sebagai PSN. Salah satu Kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus (KEK) yang berada di Sulawesi Tengah adalah Kawasan Industri Morowali.

Kawasan Industri Morowali di Sulawesi Tengah yang merupakan salah proyek kawasan industri strategis nasional yang diprioritaskan dalam program pengembangan basis industri logam dasar terus dipacu pembangunannya sebagai wujud implementasi arahan Pemerintah Pusat untuk memfokuskan agenda pemerintah di Tahun 2017 pada pemerataan industri di luar Pulau Jawa yang berdampak positif bagi masyarakat. Selain itu, kawasan industri Morowali turut mendorong langkah pemerintah dalam program hilirisasi yang bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah bahan baku mineral di dalam negeri. Dalam waktu efektif sejak 2013 sampai dengan sekarang perkembangan industri di Morowali sangat pesat sekali.

Saat ini kawasan industri berbasis nikel yang dikelola PT. IMIP (Indonesia Morowali Industrial Park) di Kabupaten Morowali, merupakan satu-satunya yang terbesar di Indonesia. Selain kawasan industri yang dikelola oleh PT. IMIP ada tiga kawasan industri lainnya yang saat ini sedang dalam proses pembangunan, yaitu kawasan industri yang dikelola oleh PT Wanxiang Nickel Indonesia di desa Lele Kecamatan Bahodopi, direncanakan berproduksi pada Tahun 2021, kawasan industri yang dikelola oleh Transon Group/Transon Bumindo Resources di desa Laroenae Kecamatan Bungku Pesisir, serta Kawasan Agroindustri berbasis Sawit, PT. Tamako di Desa Ungkaya. Dengan fakta itu, peluang untuk menjadi kawasan industri berstatus obyek vital nasional terbuka lebar. Karenanya guna lebih memaksimalkan pengembangan industri di Morowali, maka dibutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) mumpuni, melalui Politeknik industri Morowali yang baru berjalan 1 tahun dengan jurusan teknik perawatan mesin, teknik listrik dan teknik kimia /material.

Diharapkan lulusan sekolah menengah atas (SMA) yang akan meneruskan perkuliahan di Politeknik tersebut umumnya berasal dari lulusan SMA daerah setempat. Lulusan dari politeknik ini nantinya akan diserap oleh pabrik-pabrik yang beroperasi di wilayah perindustrian Morowali. Politeknik Industri Logam Morowali juga diharapkan dapat memberdayakan masyarakat lokal agar memiliki kompetensi sesuai kebutuhan perusahaan-perusahaan yang berada di dalam Kawasan industri Morowali.

Keberadaan industri di kawasan ini juga akan memberikan efek berganda bagi perekonomian daerah dan nasional, melalui hilirisasi mineral. Kawasan ini akan

difokuskan pada pembangunan industri pengolahan dan pemurnian mineral logam dengan bahan dasar nikel. Penyerapan tenaga kerja yang dikelola PT. IMIP dapat direalisasikan apabila pabrik stainless steel berkapasitas 2 juta ton beroperasi. Kebutuhan tenaga kerja pelaksana di kawasan industri mencapai 11.257 orang dan tenaga kerja level supervisor sebanyak 1.577 orang. Pada tahap kedua 2017-2020 penambahan kebutuhan tenaga kerja pelaksana mencapai 10.800 orang dan tenaga kerja supervisor mencapai 1.620 orang.

f. Kesenjangan antar Wilayah Kepulauan dengan Wilayah Daratan

Gugusan pulau-pulau di Kepulauan Spermonde dan Kepulauan Menui yang secara administratif masing-masing merupakan wilayah Kecamatan Bungku Selatan dan Kecamatan Menui Kepulauan dalam berbagai hal (sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, air bersih, listrik, transportasi, dan pelayanan pemerintahan lainnya) mengalami kesenjangan yang sangat nyata dibandingkan dengan wilayah daratan Sulawesi Kabupaten Morowali. Kesenjangan dalam berbagai hal tersebut bermuara kepada kesenjangan kesejahteraan masyarakatnya. Sangat terbatasnya sarana dan prasarana transportasi berakibat tingginya biaya transpor sehingga harga-harga bahan makanan, termasuk air minum yang pada banyak desa harus membeli air mineral yang justru didatangkan dari Kendari, barang-barang dan jasa kebutuhan pokok lainnya seperti pendidikan, kesehatan, administrasi pemerintahan menjadi lebih mahal. Demikian pula pada wilayah Kabupaten Banggai Laut, terutama di Kecamatan Boka Kepulauan dan Bangkurung yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Kepulauan Sula dan Taliabu, Provinsi Maluku Utara. Di lain pihak, sumber pendapatan keluarga yang utama bertumpu pada usaha di sektor kelautan dan perikanan yang dilaksanakan sebagai nelayan dan budidaya rumput laut. Usaha perikanan pada umumnya masih dilaksanakan dengan peralatan sederhana dengan kapasitas yang sangat kecil yang hasilnya ditekan oleh biaya produksi/operasional yang tinggi dan harga jual hasil produksi yang rendah. Di gugusan Kepulauan Salabangka, usaha budidaya Rumput Laut yang sampai dengan Tahun 2012 masih merupakan sumber pendapatan yang cukup besar, terus mengalami penurunan luasan budidaya dan produksinya, satu sama lain ditengarai sebagai akibat dari rusaknya ekosistem perairan laut sekitar. Oleh karena itu, tidaklah aneh bila tingkat kemiskinan yang tinggi, angka putus sekolah yang tinggi, APK dan APM yang rendah,

derajat kesehatan masyarakat yang rendah berada di wilayah kepulauan ini. Kesenjangan taraf hidup masyarakat antar kedua wilayah ini (kepulauan dan daratan) menjadi isu strategis yang harus dijawab secara komprehensif, serius dan berkelanjutan.

g. Inkoneksitas antara Kegiatan Ekonomi Lokal dengan Kawasan industri

Keberadaan kawasan industri dengan puluhan ribu pekerja sesungguhnya adalah sebuah potensi pasar yang besar bagi produk-produk lokal seperti bahan makanan, pakaian seragam pekerja, usaha pemondokan/kos-kosan, rumah makan, cleaning service, dan lain-lainnya. Dari sekian banyak dan besar peluang pasar tersebut sebagian sudah dimanfaatkan yaitu jasa rumah makan/warteg, kos-kosan, toko/kios barang kebutuhan sehari-hari yang pada umumnya dilakukan oleh pendatang secara tidak teratur. Ketidakteraturan ini menimbulkan masalah baru berupa kemacetan arus lalu lintas, kesehatan lingkungan, dan keamanan. Di lain pihak, ketidakteraturan tersebut berakibat hilangnya potensi PAD bagi Pemerintah Daerah. Peluang lainnya seperti kebutuhan bahan makanan, pakaian seragam, cleaning service masih belum dimanfaatkan. Koneksitas antar Kawasan Industri dengan Pelaku Ekonomi Lokal (Petani, Nelayan, Peternak, Usaha Industri Garmen/Pejahitan dan lainnya) dalam memenuhi kebutuhan kawasan industri akan bahan makanan, dan lainnya yang belum terbangun secara baik harus segera diprogramkan secara baik dan berkelanjutan agar kawasan industri juga dapat berfungsi sebagai lokomotif ekonomi lokal secara nyata.

h. Pertanian dan Ketahanan Pangan

Isu penting dalam ketahanan pangan di Sulawesi Tengah adalah harga pangan yang kurang kompetitif. Harga menjadi pertimbangan penting ketika konsumen membeli bahan pangan/makanan. Harga rata-rata pangan lokal saat ini tidak kompetitif dibandingkan dengan beras dan terigu karena masih relatif lebih mahal. Di wilayah sentra produksi, harga pangan lokal mentah/segar relatif murah, namun dapat meningkat 2 – 3 kali lipat harganya di perkotaan, apalagi untuk pangan lokal yang telah diolah. Hal ini terjadi karena jumlah produksi rendah dan masih terbatas di wilayah tertentu saja sehingga harga bahan baku cenderung mahal. Harga bahan baku yang mahal menyebabkan olahan pangan lokal menjadi tidak murah. Harga pangan lokal dapat lebih kompetitif apabila produksi dapat ditingkatkan hingga

mencapai kapasitas produksi maksimumnya. Selain itu, biaya pengolahan produk pangan lokal juga cukup tinggi sehingga menyebabkan harga jual produk pangan lokal kurang kompetitif dibandingkan beras dan terigu.

Selain harga dan kemudahan akses, konsumsi juga dipengaruhi oleh selera dan preferensi masyarakat terhadap makanan. Preferensi masyarakat terhadap pangan lokal sebagai pangan pokok ternyata tidak setara dengan beras atau terigu. Walaupun di beberapa kabupaten seperti Donggala, Sigi, Tojo Una-Una, Buol dan Morowali, diversifikasi pangan antara beras, jagung, ubi kayu dan sagu berjalan cukup baik, sehingga tetap dipertahankan, dan jika perlu ditingkatkan seperti diperlukan upaya pengolahan untuk memperpanjang masa simpan dengan tetap menjaga nilai gizi.

Dari sisi ketersediaan pangan terutama beras, menurut laporan dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah, daerah ini masih surplus lebih kurang 90 ribu ton beras dengan asumsi konsumsi beras 118 kg per kapita pada Tahun 2020 atau saat pandemi covid-19 dimulai. Meskipun begitu ada beberapa wilayah di Sulteng karena kondisi lahannya yang kering sehingga tidak signifikan pada panen padi nanti seperti Banggai Laut, Banggai Kepulauan dan Tojo Una-Una. Kondisi itu selanjutnya, dapat disiasati petani dengan menanam komoditi pangan yang cocok dengan lahan kering seperti jagung atau dengan menerapkan sistem pertanian ladang. Pada akhir Tahun 2020 juga provinsi ini dihadapkan bencana alam seperti banjir di beberapa kabupaten. Berdasarkan data BPS (2021), luas panen padi pada 2020 sebesar 178,07 ribu hektar, mengalami penurunan sebanyak 8,03 ribu hektar atau 4,32 persen dibandingkan 2019 yang sebesar 186,10 ribu hektar. Produksi padi pada 2020 sebesar 792,25 ribu ton gabah kering giling (GKG), mengalami penurunan sebanyak 52,65 ribu ton atau 6,23 persen dibandingkan 2019 yang sebesar 844,90 ribu ton GKG. Jika dilihat menurut subround, terjadi penurunan produksi padi pada seluruh subround yaitu Januari-April, Mei-Agustus dan September-Desember 2020, masing-masing sebesar 8,02 ribu ton GKG (3,14 persen), 1,15 ribu ton GKG (0,45 persen) dan 43,49 ribu ton GKG (12,92 persen) dibandingkan subround yang sama pada 2019. Jika dikonversikan menjadi beras untuk konsumsi pangan penduduk, produksi beras pada 2020 sebesar 465,24 ribu ton, mengalami penurunan sebanyak 30,92 ribu ton atau 6,23 persen dibandingkan 2019 yang sebesar 496,16 ribu ton. Potensi produksi padi pada subround Januari-

April 2021 diperkirakan sebesar 301,83 ribu ton GKG, mengalami kenaikan sebanyak 54,33 ribu ton atau 21,95 persen dibandingkan subround yang sama pada 2020 yang sebesar 247,50 ribu ton GKG.

Kondisi ketahanan pangan di Provinsi Sulteng berada pada tingkat terendah di Pulau Sulawesi dengan nilai Indeks Ketahanan Pangan (IKP) sebesar 75,10 poin atau berada pada urutan ke 17 dari 34 provinsi di Indonesia. Sulteng memerlukan kebijakan pemanfaatan secara optimal ketersediaan lahan pangan pertanian dan berkelanjutan (LP2B) dengan upaya mendukung kebijakan pemerintah pusat berupa pembangunan Kawasan Pertanian Food Estate yang terintegrasi. Pemerintah Provinsi Sulteng menyiapkan lahan pertanian dalam Kawasan LP2B yang produktif untuk dikelola oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, masyarakat petani dan swasta dengan mekanisme pola kerja yang saling menguntungkan.

i. Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Sulawesi Tengah merupakan wilayah di Indonesia yang memiliki potensi penangkapan cukup besar karena menjadi satu-satunya provinsi yang memiliki empat wilayah pengelolana perikanan (WPP) yakni WPP NRI-713 Selat Makasar di sebelah barat, WPP NRI-716 Laut Sulawesi di sebelah Utara, WPP NRI-714 Teluk Tolo, dan Laut Banda sebelah Selatan, dan WPP NRI-715 Teluk Tomini Laut Maluku di di sebelah timur sehingga memiliki garis pantai yang panjang. Luas wilayah perairan laut Sulawesi Tengah diperkirakan 193.923,75 Km² terbagi atas 3 kelompok wilayah pengelolaan perikanan yang diistilahkan Cluster, yakni Cluster I (Selat Makasar/Laut Sulawesi meliputi Kota Palu, Kabupaten Donggala, Tolitoli dan Buol), Cluster II (Teluk Tomini meliputi Kabupaten Parigi Moutong, Poso, Tojo Una-Una dan sebagian Banggai), dan Cluster III (Teluk Tolo meliputi Kabupaten Banggai, Banggai Kepulauan, Banggai Laut dan Morowali/Morowali Utara).

Mengingat jumlah penduduk dan diikuti kebutuhan pangan ikan yang semakin meningkat, upaya untuk menumbuhkan kegiatan usaha perikanan guna peningkatan produktivitas usaha perikanan, pendapatan nelayan dan pembudidaya, kualitas gizi masyarakat dan penciptaan lapangan kerja serta pengurangan angka kemiskinan di kawasan pesisir masih memiliki peluang yang cukup besar. Terkait dengan keberadaan wilayah perairan tersebut, maka potensi sumberdaya kelautan dan perikanan di provinsi ini sangat besar baik potensi perikanan tangkap, perikanan

budidaya maupun bioteknologi kelautan. Selain itu, investasi Pemerintah di sektor kelautan perikanan dalam 10 tahun terakhir cukup signifikan mencapai Rp 200 miliar untuk pembangunan pelabuhan dan sarana, prasarana serta fasilitas untuk nelayan, belum termasuk pembangunan kapal-kapal penangkap ikan bertonase 30 GT.

Namun demikian, para nelayan yang menangkap ikan di laut Sulteng cenderung menjual hasil tangkapannya ke luar daerah, sehingga seolah-olah laut Sulteng ini tidak menghasilkan ikan? Salah satu sebabnya adalah harga ikan di daerah lain lebih menarik dibanding di Sulteng. Selain itu, sarana pendaratan ikan di Sulteng seperti dermaga yang menyediakan es balok, ruang pendingin dan pembekuan ikan masih sangat terbatas, apalagi di WPP Teluk Tolo. Gubernur Sulteng pernah mengeluarkan himbauan kepada nelayan agar membawa ikan hasil tangkapannya ke Sulteng karena hal itu penting untuk perekonomian daerah karena akan menjaga stabilitas harga ikan. Pihak Dinas Kelautan dan Perikanan Sulteng sendiri akan membuat kebijakan tidak akan menerbitkan surat izin melaut kepada kapal-kapal penangkap ikan bila tidak berkomitmen membawa hasil tangkapannya ke daratan Sulawesi Tengah. Para nelayan Donggala misalnya, kebanyakan membawa hasil tangkapannya ke Kalimantan Timur karena harga ikan di sana lebih tinggi. Hal ini menyebabkan stok ikan di pasaran Kota Palu sering langka sehingga memicu terjadinya inflasi. Dari sisi kebijakan program pengembangan perikanan di daerah ini, terdapat empat poin yang menjadi penekanan dalam rapat koordinasi antar bidang terkait dengan pemasaran hasil perikanan daerah yakni: (1) pelaku usaha agar terus meningkatkan kualitas hasil tangkapan budidaya maupun pengolahan; (2) pelaku usaha perikanan agar memanfaatkan pintu ekspor Sulawesi Tengah secara maksimal baik lewat udara maupun laut; (3) instansi/lembaga yang terkait agar membantu pelaku usaha dalam peningkatan volume dan frekuensi eksport perikanan Sulawesi Tengah ke mancanegara; dan (4) Pelaku usaha jasa pengangkutan baik itu maskapai penerbangan, perusahaan kapal pengangkut, ekspedisi dan kargo agar turut membantu ekspor perikanan dengan memastikan besaran harga jasa yang ditawarkan sudah sesuai ketentuan yang berlaku.

j. Inkoneksitas antara Kegiatan Ekonomi Lokal dengan Kawasan Industri

Keberadaan kawasan industri seperti Morowali, Banggai, dan KEK Kota Palu, dengan puluhan ribu pekerja sesungguhnya adalah sebuah potensi pasar yang besar

bagi produk-produk lokal seperti bahan makanan, pakaian seragam pekerja, usaha pemondokan/kos-kosan, rumah makan, cleaning service, dan lain-lainnya. Dari sekian banyak dan besar peluang pasar tersebut sebagian sudah dimanfaatkan yaitu jasa rumah makan/warteg, kos-kosan, toko/kios barang kebutuhan sehari-hari yang pada umumnya dilakukan oleh pendatang secara tidak teratur. Ketidakteraturan ini menimbulkan masalah baru berupa kemacetan arus lalu lintas, kesehatan lingkungan, dan keamanan. Di lain pihak, ketidakteraturan tersebut berakibat hilangnya potensi PAD bagi Pemerintah Daerah. Peluang lainnya seperti kebutuhan bahan makanan, pakaian seragam, cleaning service masih belum dimanfaatkan. Koneksitas antar Kawasan Industri dengan Pelaku Ekonomi Lokal (Petani penghasil pangan utama, nelayan untuk menyediakan ikan, Peternak untuk penyediaan kebutuhan daging, Usaha Industri Garmen/Pejahitan dan lainnya) dalam memenuhi kebutuhan kawasan industri akan bahan makanan, dan lainnya yang belum terbangun secara baik harus segera diprogramkan secara baik dan berkelanjutan agar kawasan industri juga dapat berfungsi sebagai lokomotif ekonomi lokal secara nyata. Selain itu, mendorong kegiatan transaksi less contact melalui adopsi teknologi digital dalam transaksi pembayaran pada kegiatan ekonomi lokal maupun di Kawasan industri untuk mengoptimalkan kontribusi sub sector tanaman pangan dan hortikultura, perikanan, perkebunan, peternakan, dan hasil hutan.

k. Potensi Geopark Sulawesi Tengah

Geopark sendiri adalah sebuah wilayah geografi tunggal atau gabungan, yang memiliki Situs Warisan Geologi (Geosite) dan bentang alam yang bernilai, terkait aspek Warisan Geologi (Geoheritage), Keragaman Geologi (Geodiversity), Keanekaragaman Hayati (Biodiversity), dan Keragaman Budaya (Cultural Diversity), serta dikelola untuk keperluan konservasi, edukasi, dan pembangunan perekonomian masyarakat secara berkelanjutan dengan keterlibatan aktif dari masyarakat dan Pemerintah Daerah, sehingga dapat digunakan untuk menumbuhkan pemahaman dan kepedulian masyarakat terhadap bumi dan lingkungan sekitarnya. Kondisi geologi Indonesia yang terletak pada pertemuan 3 (tiga) lempeng tektonik mengakibatkan Indonesia memiliki Keragaman Geologi (Geodiversity) yang bernilai, Keragaman Geologi (Geodiversity). Keragaman ini memiliki nilai Warisan Geologi (Geoheritage) yang terkait dengan Keanekaragaman Hayati (Biodiversity) dan

Keragaman Budaya (Cultural Diversity). Nilai-nilai inilah yang dapat dimanfaatkan melalui konsep pengembangan Taman Bumi (Geopark) yang berkelanjutan, utamanya dalam rangka pengembangan destinasi pariwisata, pengembangan Taman Bumi (Geopark) .

l. Disabilitas

Penyandang disabilitas adalah kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan yang dapat menghambat partisipasi dan peran serta mereka dalam kehidupan bermasyarakat. Penyandang disabilitas yang dalam percakapan sehari-hari disebut sebagai orang cacat, sering dianggap sebagai warga masyarakat yang tidak produktif, tidak mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sehingga hak-haknya pun diabaikan. Konvensi tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas yang telah ikut ditandatangani oleh Indonesia mengamanahkan Negara untuk mengambil kebijakan yang diperlukan untuk menjamin akses bagi penyandang disabilitas terhadap pelayanan kesehatan yang sensitif gender, termasuk rehabilitasi kesehatan. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa upaya pemeliharaan kesehatan penyandang cacat harus ditujukan untuk menjaga agar tetap hidup sehat dan produktif secara sosial, ekonomis, dan bermartabat. Pemerintah wajib menjamin ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan memfasilitasi penyandang cacat untuk dapat tetap hidup mandiri dan produktif secara sosial dan ekonomis.

Berdasarkan data Susenas pada 2018, ada 14,2 persen penduduk Indonesia yang menyandang disabilitas atau 30,38 juta jiwa. Prevalensi penduduk Indonesia dengan disabilitas sedang sampai sangat berat berdasarkan hasil Riskesdas Tahun 2013 adalah sebesar 11 persen. Provinsi dengan prevalensi disabilitas tertinggi adalah Sulawesi Selatan (23,8 persen), urutan kedua Sulawesi Tengah (19,6 persen) dan terendah adalah Papua Barat (4,6 persen).

m. Kekerasan Perempuan dan Perlindungan Anak

Terdapat lima (5) isu prioritas pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (P3A) adalah pertama, peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan. Kedua, peningkatan peran ibu dalam pendidikan anak. Ketiga, penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Keempat, penurunan pekerja anak. Kelima, pencegahan perkawinan anak. Upaya yang tengah dilakukan

Pembangunan pemberdayaan perempuan bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan gender di berbagai bidang pembangunan, dan melindungi perempuan dari berbagai tindak kekerasan. Sementara itu, pembangunan perlindungan anak bertujuan untuk memenuhi hak anak dan melindungi anak dari berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, diskriminasi dan perlakuan salah lainnya.

Berdasarkan data yang dihimpun Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Provinsi Sulawesi Tengah, jumlah kekerasan terhadap perempuan dan kasus anak sebanyak 246 kasus yang dihitung dari Januari hingga Oktober 2019. Dari 246 kasus tersebut, sebanyak 82 kasus atau sebesar 9,7 persen adalah kasus perkawinan anak di bawah umur. Selain perkawinan anak, kasus lain yang dialami para penyintas di hunian sementara (huntara) adalah kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Jumlah kasus KDRT pasca bencana selama satu tahun, terhitung sejak Oktober Tahun 2018 hingga Oktober 2019 sebanyak 76 kasus. Jenis kasus yang terjadi berupa kekerasan fisik, kekerasan non fisik seperti perselingkuhan, dan kekerasan ekonomi yaitu penelantaran anak dan istri. Menurut data Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Sulawesi Tengah, tingkat kekerasan perempuan dan anak di masa pandemi Covid-19 meningkat tiga kali lipat. Terhitung Februari hingga Juni 2020, jumlah kekerasan di Sulawesi Tengah mencapai 174 kasus. Terhitung Februari masih 67 kasus, April menjadi 123 kasus dan dibulan Juni sudah 174 kasus. kasus yang dilaporkan dengan jumlah terbanyak adalah Kabupaten Poso. Di urutan ke dua adalah Sigi dan Buol. Sementara Kota Palu berada di urutan ke empat dengan jumlah 15 kasus. Tempat kasus kekerasan terbanyak saat ini adalah rumah tangga, disusul fasilitas umum. Dari sisi pelaku kekerasan perempuan dan anak, terhitung sejak 2016 sampai dengan 2019 terdata 82 persen pelakunya adalah laki-laki dan 16 persen perempuan.

Indeks Pembangunan Gender (IPG) Provinsi Sulteng selama periode 2016-2020 mengalami penurunan dari 91,97 poin pada 2016 menjadi menjadi 91,87 poin pada 2020. Demikian pula pada periode 2019-2020 menurun dari 92,01 poin menjadi 91,87 poin. Secara historis, penurunan IPG dimulai dari Tahun 2014 yakni sebesar 92,69 poin menjadi 92,25 poin atau terjadi penurunan terbesar yakni 0,44 poin pada periode tersebut. Lalu pada periode 2015-2016 menurun lagi menjadi 91,91 poin atau menurun 0,34 poin, lalu menurun lagi menjadi 91,66 poin atau mengalami

penurunan sebesar 0,25 poin pada periode 2016-2017, sebelum meningkat lagi sebesar 0,42 poin menjadi 92,08 pada 2018

n. Reformasi Birokrasi

Reformasi Birokrasi konteks daerah Sulawesi Tengah tetap mengacu pada pada Road Map Reformasi Birokrasi yang ditetapkan oleh Kementerian Reformasi Birokrasi yakni bertumpu pada masalah-masalah mendasar yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Masalah-masalah mendasar yakni : Manajemen Perubahan Birokrasi, Organisasi yang gemuk, Peraturan Perundang-Undangan Overlapping, SDM Aparatur tidak Kompeten, Tumpang Tindih Kewenangan, Pelayanan Publik masih buruk, Pola pikir Rule-based dan Budaya kinerja belum terbangun. Namun dalam konteks Daerah Sulawesi Tengah disesuaikan dengan kondisi karakter Daerah, situasi Sosial politik, budaya dan kondisi ASN Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Untuk itu fokus Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dengan mengacu pada Visi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih Tahun 2021- 2024 menitik beratkan pada Reformasi Birokrasi yang dapat “bergerak cepat” melakukan perubahan-perubahan cepat dengan mempertimbangkan kemampuan mengantisipasi perubahan lingkungan Internasional, Nasional dan Daerah. Untuk itu Fokus Sentral Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah adalah : Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja, Perampingan- Penggabungan OPD sesuai Tugas dan Fungsi dan Penggunaan Teknologi Informasi serta Big Data dalam Pengambilan Keputusan dan Kebijakan.

Roadmap Reformasi Birokrasi Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2024 bergerak cepat melakukan Perubahan bersendi pada Kualitas Pelayanan Prima dengan prinsip pelayanan lebih implementatif, melibatkan banyak pihak dalam pengambilan keputusan dan Regulasi (vertikal dan horisontal serta program didesain sampai ke tingkat unit kerja. Dalam Road Map Reformasi Birokrasi 2021-2024 pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah asas yang akan dikedepankan adalah Fokus dan Prioritas. Fokus berarti bahwa upaya Reformasi Birokrasi akan dilakukan secara fokus pada akar masalah tata kelola pemerintahan. Prioritas berarti setiap instansi akan memilih prioritas perbaikan tata kelola pemerintahan sesuai dengan karakteristik sumber daya dan tantangan yang dihadapi. Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Sulawesi Tengah mengantisipasi juga Pemindahan Ibukota Negara Indonesia ke Kalimantan

Timur dengan mempersiapkan Birokrasi Pemerintah Sulawesi Tengah yang Responsif perubahan-perubahan dan mampu menjadi patner seimbang secara kualitatif dengan kebutuhan Ibukota Negara Baru.

o. Isu Kebudayaan

Pokok-Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Provinsi Sulteng merujuk pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan dan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan Strategi Kebudayaan. Dalam konteks ini, di Tahun 2021, telah disahkan Peraturan Daerah Nomor Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kebudayaan Daerah.

Dalam konteks ini, kinerja Pemerintah Provinsi Sulteng Periode 2021-2024 terletak pada tercapainya pelembagaan kebudayaan di Sulteng yang tercermin dari berdiri sendirinya Perangkat Daerah Kebudayaan yang berdiri sendiri sehingga secara kelembagaan pemajuan kebudayaan terintegrasi dan terwadahi dalam Lembaga Pemerintah yang saling sinergi dalam semangat Pentahelix Pemajuan Kebudayaan Sulteng.

p. Isu Stunting

Data elektronik Pencatatan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (ePPGBM) Dinas Kesehatan Provinsi Sulteng Tahun 2019-2020 menyebutkan bahwa Angka Stunting di Provinsi Sulteng menurun dari IV - 131 29.205 balita pada 2019 atau proporsinya mencapai 21,3 persen menjadi 25.500 balita pada 2020 atau proporsinya mencapai 16,2 persen. Selama periode tersebut, jumlah balita stunting terbanyak di Kabupaten Donggala mencapai 6.977 jiwa pada 2019 atau proporsinya sebesar 34,9 persen dari 19.983 jiwa balita terentry menjadi 4.370 jiwa balita stunting di Kabupaten Donggala atau proporsinya mencapai 27,1 persen dari total balita terentry yakni sebesar 16.096 jiwa. Jumlah balita stunting kedu tarbanyak berada di Kabupaten Parigi Moutong yakni 4.033 jiwa balita dari 18.733 jiwa balita terentry pada 2019 menjadi 3.805 jiwa balita atau proporsinya mencapai 11,4 persen pada 2020. Jumlah tersedikit balita stunting berada di Kabupaten Banggai Laut mencapai 541 jiwa balita pada 2019 dari 2.601 jiwa balita terentry. Sedangkan di Tahun 2020, jumlah balita stunting tersedikit berada di Kabupaten Morowali Utara mencapai 646 jiwa balita dari 3.706 jiwa balita terentry.

q. Daerah Tertinggal dan Kinerja Dana Desa

Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2020 menyatakan bahwa terdapat 62 daerah tertinggal di Indonesia. Dari 62 daerah tertinggal tersebut, satu-satunya provinsi di daratan Sulawesi yang masih memiliki daerah tertinggal adalah Provinsi Sulteng yakni Kabupaten Donggala, Kabupaten Sigi, Kabupaten Tojo Una-Una. Di Tahun 2020, Indeks Desa Membangun (IDM) Provinsi Sulteng mencapai 0.6484 poin berada pada posisi 21 nasional dan berada di bawah IDM nasional yang mencapai 0,693 poin. pada Selama periode 2016-2020, di Tahun 2016, dari 1.842 desa di Provinsi Sulteng, 204 desa berada pada kategori “Sangat Tertinggal” atau proporsinya mencapai 11,07 persen, “Desa Tertinggal” mencapai 1.100 desa atau proporsinya mencapai 59,72 persen, 523 desa termasuk kategori “Berkembang” atau proporsinya 28,39 persen, 15 desa berada pada kategori “Maju” atau proporsinya 0,81 persen, serta belum ada desa kategori “Mandiri”. Di Tahun 2020, jumlah desa kategori “Sangat Tertinggal” menurun drastis sebesar 37,56 persen atau proporsinya tinggal 1,68 persen, sedangkan desa “Tertinggal” berkurang lebih dari separuhnya dari 1.100 desa menjadi 436 atau berkurang 20,65 persen atau proporsinya tinggal 23,67 persen, selanjutnya desa “Berkembang” meningkat dari 523 desa menjadi 1.096 desa atau terjadi kenaikan sebesar 20,32 persen atau proporsinya di Tahun 2020 mencapai 59,50 persen, desa kategori “Maju” meningkat dari 15 desa menjadi 267 desa, mengalami kenaikan sebesar 105,40 persen. Selanjutnya, desa kategori “Mandiri” berjumlah 12 desa di Tahun 2020.

Berkurangnya desa kategori “Sangat Tertinggal” dan “Tertinggal” patut dipahami bahwa Pemerintah Provinsi Sulteng dengan 12 kabupaten masih mempunyai pekerjaan rumah dalam mendorong transformasi desa menuju “Mandiri”. Apalagi saat ini, Dana Desa (DD) yang disalurkan oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi meningkat dari Rp 500.301.180.000,- pada 2016 menjadi Rp 9.197.681.400.000,- atau terjadi kenaikan sebesar 107,07 persen belum sebandingkan dengan target membuat 1.842 desa berada dalam kategori “Mandiri”. Selain itu, dari 13.577 desa yang belum terakses signal internet di Indonesia, 465 desa di Provinsi Sulteng belum terakses internet sehingga akan berpengaruh bukan saja pada system pembelajaran jarak jauh (PJJ), tetapi digital farming juga terpengaruh.

r. Stabilitas dan Keamanan Daerah

Saat ini kita menghadapi dua isu strategis yang berkaitan dengan stabilitas keamanan nasional, yakni pertama: keragaman agama, suku, adat serta budaya yang dimiliki oleh Indonesia merupakan potensi dan aset yang sangat besar untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang besar dan maju, namun sebaliknya apabila kita sebagai anak bangsa tidak mampu membawa dan mengelolanya dengan bijak akan menjadi ancaman serta potensi kehancuran bangsa kita sendiri, masuknya paham radikalisme, terorisme serta gerakan intoleran tentunya berpotensi besar dalam mengganggu stabilitas nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Salah satu syarat dalam membangun iklim investasi adalah ketersediaan suprastruktur atau kondisi non fisik yang terbangun di suatu daerah. Hal ini dapat dirasakan melalui rasa aman dan nyaman bagi para investor untuk menanamkan modalnya di suatu daerah. Penciptaan rasa aman dan nyaman bagi investor dapat dilihat dari kondisi keamanan daerah, suhu politik dan kepastian hukum yang berlaku. Khusus keamanan di Provinsi Sulawesi Tengah, saat ini masih tergolong kurang menguntungkan bagi investor. Isu konflik yang sering terjadi khususnya Kabupaten Poso, Sigi dan bahkan Kota Palu menjadi sorotan nasional bahkan internasional. Stigma Sulawesi Tengah sebagai daerah yang belum aman sebagai konsekuensi dari konflik horizontal di Poso pada Tahun 2000 masih melekat setiap orang yang berasal dari luar Sulawesi Tengah ketika akan datang ke wilayah ini. Berita perkelahian antar desa yang sering terjadi di wilayah Sigi yang sering terjadi bahkan menimbulkan korban jiwa menjadikan penilaian negatif bagi investor yang akan menanamkan modalnya di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah, khususnya di Kota Palu.

s. Pengarusutamaan Transformasi Digital

Sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 34A dan 34B serta regulasi turunannya berupa Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran, maka isu strategis terkait pengarusutamaan transformasi digital adalah pertama, infrastruktur digital. Selain infrastruktur terkait konektivitas antar penduduk secara fisik berupa jalan, jembatan, pelabuhan, bandara maupun infrastruktur fisik lainnya berupa irigasi maupun Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU), infrastruktur digital menjadi sarana dan

prasarana yang menghubungkan antar penduduk sebagai wahana pembangunan berbasis pembangunan komunitas. Pemerintah Provinsi Sulteng wajib mendukung percepatan pembangunan infrastruktur telekomunikasi berupa percepatan penetrasi pita lebar, dukungan Pemerintah Provinsi Sulteng dalam memfasilitasi penyelenggara telekomunikasi dalam melakukan pembangunan infrastruktur telekomunikasi secara transparan, akuntabel, efisien. Infrastruktur dimaksud tidak hanya terbatas pada gorong-gorong (ducting), tetapi mencakup pula tiang telekomunikasi (tower) dan lubang kabel (manhole) untuk dapat digunakan secara Bersama dan terjangkau.

Kedua, Pemerintah Digital. Pemerintah Provinsi Sulteng perlu menyelenggarakan Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik (SPBE) melalui layanan administrasi pemerintah secara elektronik yang diimplementasikan melalui layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terhubung dengan system penghubung layanan. Ketiga, Ekonomi Digital. Satu dari beberapa pendorong daya saing ekonomi Sulteng adalah strategi memanfaatkan teknologi digital melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi, digital farming maupun sistem pembayaran digital melalui Penyedia Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) seperti QR code Indonesia Standard (QRIS) dalam transaksi non tunai maupun di sisi hulu melalui Drone Participatory Rural Appraisal dalam peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura, peternakan, perikanan termasuk memperkirakan potensi lestari perikanan dan kelautan sebagai implementasi Maximum Sustainability Yield (MSY), serta di sektor lainnya seperti pariwisata dan transportasi maupun jasa perdagangan.

Keempat, Masyarakat Digital. Implementasi pengarusutamaan transformasi digital dapat dilakukan dengan cara meningkatkan kompetensi ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulteng. Selain itu, sesuai Misi 1 Pemerintah Provinsi Sulteng Tahun 2021-2026, yakni Meningkatkan Kualitas Manusia Provinsi Sulawesi Tengah melalui Reformasi Sistem Pendidikan dan Kesehatan Dasar dan Misi 4 Mewujudkan Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah, Misi 8 Meningkatkan Pelayanan Publik bidang pendidikan dan kesehatan berbasis pada Teknologi Informasi yang integrasi dan dijalankan secara sistimatis dan digital dapat dilakukan melalui system Pendidikan untuk mendukung kesiapan tenaga kerja dalam era industri 4.0 melalui fasilitasi literasi digital pada masyarakat dan talenta digital.

t. Perkebunan dan Deforestasi

Subsektor perkebunan memainkan peran yang cukup penting dalam ekonomi nasional. Sekitar seperempat Produk Domestik Bruto (PDB) sektor pertanian disumbang oleh subsektor perkebunan. Subsektor ini juga memiliki kontribusi yang signifikan terhadap pemasukan devisa negara melalui ekspor produk-produk hasil pertanian. Hingga kini, subsektor perkebunan masih dihadapkan pada persoalan struktural seperti relatif rendahnya produktivitas tanaman perkebunan yang diusahakan perkebunan rakyat dibandingkan dengan perkebunan besar, baik yang dikelola perusahaan negara maupun swasta. Hal ini terlihat jelas pada komoditas kopi, kakao, dan tebu yang merupakan komoditas perkebunan strategis yang sebagian besar dibudidayakan oleh perkebunan rakyat. Selain itu, ketimpangan produktivitas lahan dan tenaga kerja yang cukup lebar juga terjadi antar wilayah.

Isu strategis lainnya terkait dengan pengembangan tanaman perkebunan adalah deforestasi terutama dari kelapa sawit. Realitanya Industri kelapa sawit nasional telah berkontribusi mengentaskan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja untuk lebih dari 16 juta pekerja. pada tahun 2021 ini Pemerintah juga tetap berkomitmen untuk melakukan peremajaan (replanting) sebanyak 180 ribu hektar kebun kelapa sawit milik petani. Upaya ini dilakukan dengan tujuan dapat meningkatkan produktivitas kebun sawit rakyat dengan umur tanaman tua yang produktivitasnya kurang dari 3-4 ton/ha. Replanting dilakukan dengan penggunaan bibit unggul dan penerapan Good Agriculture Practices (GAP), sehingga terjadi peningkatan produktivitas kebun kelapa sawit yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatannya secara optimal.

4.2.4 Isu Strategis Jangka Panjang Kabupaten Banggai Kepulauan dalam RPJPD Tahun 2005-2025.

Isu strategis jangka panjang Kabupaten Banggai Kepulauan yang tertuang di dalam dokumen Perubahan RPJPD 2005-2025 sebagai berikut:

1. Iklim investasi dan penanaman modal belum kondusif mengakibatkan pertumbuhan ekonomi Bangkep yang membaik belum menciptakan lapangan kerja yang luas;
2. Berlangsungnya degradasi lingkungan berdampak pada kerentanan dan bencana alam;
3. Rendahnya produksi dan pengolahan perikanan laut dan darat;

4. Pembangunan bidang pendidikan belum optimal dan derajat kesehatan masih rendah;
5. Infrastruktur daerah masih belum memadai;
6. Reformasi birokrasi belum optimal;
7. Baik angka absolut maupun persentasi kemiskinan masih tinggi di Provinsi Sulawesi Tengah;
8. Pengelolaan indstri pariwisata belum optimal, sehingga berdampak pada rendahnya kunjungan pariwisata.

4.2.5 Penetapan Isu Strategis Kabupaten Banggai Kepulauan

Daftar Panjang isu – isu strategis di atas kemudian di lakukan penapisan berdasarkan kontek isu yang di anggap sama, sepadan ataupun setara, sehingga di dapatkan daftar pendek isu strategis sebagaimana table berikut :

Tabel 4.39
Isu Strategis RPD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023-2026

No	Isu Strategis
1.	Melambatnya Pertumbuhan Ekonomi
2.	Belum Optimalnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
3.	Belum Optimalnya Kualitas Sumber Daya Manusia
4.	Kualitas Infrastruktur Belum Memadai
5.	Penanggulangan Kemiskinan
6.	Ancaman Keberlanjutan Lingkungan Hidup dan Potensi Bencana.

Selanjutnya di lakukan urutan isu strategis untuk menentukan isu strategis yang paling prioritas dan akan mempengaruhi rumusan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan dalam 1 (satu) periode kedepan. Prioritas isu dilakukan dengan menggunakan sejumlah kriteria dimana setiap kriteria memiliki bobot. Setiap isu strategis diberi nilai berdasarkan setiap kriteria dan akhirnya diperoleh nilai total masing-masing isu strategis.

Tabel 4.40
Kriteria dan Bobot Kriteria dalam menentukan Prioritas isu strategis

No	Kriteria	Bobot
1.	Memiliki Pengaruh yang besar/ signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional	15

No	Kriteria	Bobot
2.	Merupakan tugas dan tanggungjawab Pemerintah Daerah	15
3.	Dampak yang ditimbulkan terhadap daerah dan masyarakat	20
4.	Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah	15
5.	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani	15
6.	Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan	20
Total		100

Berdasarkan hasil penilaian dan pembobotan terhadap isu strategis sebagaimana di atas, maka di dapatkan prioritas isu RPD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 – 2026 sebagai berikut :

Tabel 4.41
Rata-rata skor dan Prioritas isu strategis RPD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023-2026

No	Isu Strategis	Total Skor	Rata-rata skor	Prioritas Isu
1.	Melambatnya Pertumbuhan Ekonomi	75,50	12,60	5
2.	Belum Optimalnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	88,90	14,98	1
3.	Belum Optimalnya Kualitas Sumber Daya Manusia	86,07	14,20	2
4.	Kualitas Infrastruktur Belum Memadai	85,03	14,05	3
5.	Penanggulangan Kemiskinan	80,18	13,25	4
6.	Ancaman Keberlanjutan Lingkungan Hidup dan Potensi Bencana.	75,26	12,45	6

Dari hasil analisis dengan menggunakan kriteria yang telah ditetapkan, maka isu strategis Kabupaten Banggai Kepulauan berdasarkan telaah kebijakan dan telaah permasalahan bidang urusan dapat digambarkan sebagai berikut:

4.2.5.1 Belum Optimalnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Banggai Kepulauan pada tahun 2020 adalah sebesar dengan kategori C. Kategori C memiliki interpretasi bahwa sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga perlu banyak perbaikan mendasar. Upaya yang dilakukan agar pencapaian sasaran pada tingkat unit kerja

meningkat adalah dengan memastikan bahwa setiap pegawai memahami tugas pokok dan fungsinya serta indikator kinerjanya.

Fokus Reformasi Birokrasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan terkait dengan meningkatkan sistem pengawasan internal dan pengendalian kebijakan Kepala Daerah melalui evaluasi tingkat maturitas SPIP maupun tingkat leveling kapabilitas APIP, meningkatkan integritas dan kapabilitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Peningkatan pengendalian dan pengelolaan keuangan dan aset daerah juga menjadi fokus lain dari pembenahan reformasi dan birokrasi di Kabupaten Banggai Kepulauan. Peningkatan reformasi birokrasi termasuk didalamnya adalah peningkatan pelayanan publik.

4.2.5.2 Belum Optimalnya Kualitas Sumber Daya Manusia

Indeks Pembangunan Manusia adalah ukuran kemajuan sosial ekonomi yang mebgacu pada 3 indeks komposit yaitu indeks kesehatan, indeks pendidikan dan indeks daya beli. Capain IPM Kabupaten Banggai Kepulauan setiap tahunnya cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2021 IPM Kabupaten Banggai Kepulauan berada pada kategori sedang dengan angka 65,61 atau tumbuh 0,29 persen (meningkat 0,19 poin) dibandingkan capaian tahun 2020. Namun dibandingkan dengan kabupaten/ kota lainnya, kabupaten Banggai Kepulauan masih berada pada urutan ke 12 se provinsi Sulawesi Tengah. Dimensi kesehatan diukur menggunakan angka harapan hidup (AHH). Pada tahun 2021, AHH mencapai 66,59 tahun. Pemerintah daerah selalu konsisten meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan melalui penyediaan sarana kesehatan dasar, tenaga kesehatan, serta pemerataan dan keterjangkauan akses. Faktor lain yang turut berpengaruh terhadap tingginya umur harapan hidup adalah pola hidup sehat masyarakat.

Dimensi pendidikan diukur menggunakan rata-rata lama sekolah (RLS) dan harapan lama sekolah (HLS). Pada tahun 2021, RLS mencapai 8,44 tahun dan HLS mencapai 13,07 tahun. Angka ini masih cukup rendah jika dibandingkan dengan kabupaten/ kota lain yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah.

Kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap upaya peningkatan pembangunan ekonomi daerah Kabupaten Banggai kepulauan. Sejalan dengan

berbagai kecenderungan global, sumber daya manusia yang perlu diperkuat tidak saja dilingkungan masyarakat, tetapi juga diinstitusi pemerintahan.

4.2.5.3 Kualitas Infrastruktur Belum Memadai

Pembangunan infrastruktur di Kabupaten Banggai Kepulauan masih perlu untuk terus ditingkatkan. Meskipun seluruh kecamatan sudah terhubung dengan jaringan jalan, kualitas jalan di Kabupaten Banggai Kepulauan masih perlu untuk ditingkatkan. Jika dilihat berdasarkan jenis permukaan, 656,65 km jalan di Kabupaten Banggai Kepulauan berupa aspal, 163,18 km berupa kerikil, 76,64 km berupa tanah, pada tahun 2020, sekitar 100,51 km dari total panjang jalan sudah dalam kondisi rusak dan rusak berat.

Terkait akses terhadap air, persentase penduduk yang terlayani penggunaan air baku pada tahun 2020 mencapai 89,90%. Meskipun demikian, persentase ketersediaan air baku masih mencapai 6,70%. Kondisi ini mengindikasikan bahwa hanya 6,70% dari total kebutuhan air baku daerah yang sudah terpenuhi. Ketersediaan air masih menjadi tantangan bagi sebagian wilayah di Kabupaten Banggai Kepulauan. Hal ini disebabkan oleh kondisi alam yang sebagian berupa tanah berbatu dan pasir dan bersifat porous. Di samping itu, pada tahun 2021 cakupan penduduk yang mengakses air minum layak dan berkelanjutan masih berada pada angka 86,27%, artinya belum mencapai target SDGs yaitu sebesar 100%.

4.2.5.4 Penanggulangan Kemiskinan

Masalah kemiskinan merupakan masalah yang kompleks dan bersifat multidimensional sehingga menjadi prioritas pembangunan. Pemerintah Indonesia khususnya masyarakat Banggai Kepulauan mempunyai perhatian besar serta cita - cita bersama terhadap tercapainya masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana yang diamanatkan dalam alinea ke empat Undang - Undang Dasar 1945. Program - program pembangunan yang selama ini dicanangkan oleh pemerintah masih tetap memberikan perhatian besar terhadap upaya pemberantasan kemiskinan, karena pada dasarnya program pemberantasan kemiskinan adalah nilai mutlak untuk mencapai cita - cita bersama sesuai yang diamanatkan oleh Undang - undang Dasar 1945.

Untuk mendukung strategi penanggulangan kemiskinan, diperlukan adanya data yang akurat akan kondisi real masyarakat yang didapatkan dari pengukuran yang terpercaya serta berpedoman penuh pada kaidah – kaidah interpretasi data yang dapat dipertanggungjawabkan. Data yang akurat, relevan, dan tepat waktu dipercaya dapat menjadi instrumen tangguh bagi pengambil kebijakan khususnya pemerintah dalam menentukan target pengentasan kemiskinan, maupun sebagai bahan evaluasi lanjutan atas program yang telah berjalan sebelumnya. Dengan target dan evaluasi yang tepat diharapkan kemiskinan di Indonesia khususnya Kabupaten Banggai Kepulauan dapat berkurang dan kesejahteraan penduduk makin membaik.

Secara umum, capaian Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan dalam menanggulangi kemiskinan sudah berjalan cukup baik. Kondisi tersebut ditunjukkan dengan menurunnya persentase penduduk miskin dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Persentase penduduk miskin pada tahun 2021 berada pada angka 13,72%, mengalami penurunan sebanyak 2,2% dari tahun 2017. Rata-rata penurunan penduduk miskin di Kabupaten Banggai Kepulauan per tahun mencapai 0,73%. Menurunnya persentase kemiskinan juga turut disertai dengan capaian positif indeks kedalaman dan indeks keparahan kemiskinan yang mengalami penurunan di setiap tahunnya.

Upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Banggai Kepulauan masih perlu ditingkatkan, mengingat jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) masih menunjukkan angka yang cukup tinggi, yaitu 6230 jiwa. Kondisi kemiskinan dapat menyebabkan terbatasnya pemenuhan kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan dan kesehatan.

Masalah lain yang perlu diselesaikan dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Banggai Kepulauan adalah terkait tumpang tindihnya data penduduk miskin. Kondisi ini menyebabkan terjadinya pemberian bantuan sosial yang tidak tepat sasaran. Pemutakhiran dan verifikasi data penduduk miskin menjadi penting untuk dilakukan dalam periode pembangunan yang akan datang, guna meningkatkan akurasi pemberian bantuan agar lebih tepat sasaran. Selain itu, intervensi yang lebih menyeluruh perlu dilakukan, tidak hanya pada pemberian bantuan sosial tetapi penanganan lintas sektor melalui pengembangan ekonomi dan peningkatan fasilitas dasar.

Perumusan dan implementasi program serta kegiatan yang tepat sasaran menjadi kunci keberhasilan dalam menyelesaikan permasalahan ini. Keberhasilan daerah dalam menanggulangi kemiskinan dan mengurangi tingkat kesenjangan akan turut serta berkontribusi dalam pengentasan kemiskinan dan kesenjangan di tingkat nasional.

4.2.5.5 Melambatnya Pertumbuhan Ekonomi

Hasil perhitungan pendapatan regional yang akurat dapat mencerminkan keadaan perekonomian yang sebenarnya dari suatu daerah, dan akan sangat berguna serta bermanfaat bagi para pemakai data sekaligus pengambil keputusan dalam merencanakan kebijakan pembangunan. Salah satu indikator yang sering dipakai untuk melihat secara umum gambaran kemampuan suatu daerah dalam mensuplai berbagai kebutuhan ekonomi masyarakatnya adalah tersedianya angka pertumbuhan ekonomi. Semakin besar gambaran tingkat pertumbuhan dari tahun ke tahun menggambarkan semakin membaiknya perkembangan usaha ekonomi yang dibuktikan dengan peningkatan angka riil pertambahan nilai barang dan jasa. Pembangunan secara luar baik level global, nasional, maupun daerah tidak lepas dari pembangunan bidang ekonomi. Dalam RPJMN 2020-2024, pertumbuhan ekonomi disinggung pada salah satu dari 7 Agenda Pembangunan nasional yaitu: Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, Pemerintah Pusat dengan gencar menarik investor dengan cara memperbaiki iklim investasi. Terlepas dari polemik yang muncul, hadirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang baru disahkan menggambarkan komitmen pemerintah dalam memotong mata rantai birokrasi yang rumit, meningkatkan ketersediaan infrastruktur penunjang, meningkatkan kualitas dan ketersediaan tenaga kerja, serta menyediakan dukungan stabilitas sosial politik untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi.

Upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Banggai Kepulauan juga tercantum dalam dokumen RPJPD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2005-2025 dan menjadi isu strategis, yaitu Iklim investasi dan penanaman modal belum kondusif mengakibatkan pertumbuhan ekonomi Bangkep yang membaik belum menciptakan lapangan kerja yang luas.

Pertumbuhan ekonomi masih menjadi pintu masuk bagi pengembangan ekonomi daerah. Berdasarkan data BPS, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banggai Kepulauan pada tahun 2020 tercatat sebesar -2,98% dan tahun 2021 menunjukkan pertumbuhan yang mengembirakan yaitu sebesar 5,07%. Pada tahun 2020 Pandemi COVID-19 telah berdampak pada menurunnya kinerja perekonomian daerah, hampir semua sektor usaha mengalami penurunan terutama sektor transportasi dan pergudangan, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum serta sektor konstruksi. Banyak dari kelompok masyarakat hanya bergantung pada satu sumber pendapatan tanpa adanya alternatif, sehingga saat terjadi kendala menjadi sulit untuk keluar dari jurang keterpurukan. Melemahnya kondisi perekonomian ini dirasakan oleh hampir seluruh masyarakat, baik di wilayah perkotaan yang didominasi oleh sektor jasa maupun di wilayah perdesaan yang didominasi oleh sektor basis.

4.2.5.6 Ancaman Keberlanjutan Lingkungan Hidup dan Potensi Bencana

Degradasi lingkungan atau penurunan kualitas lingkungan hidup dapat dilihat terjadi akibat pertumbuhan penduduk membawa konsekuensi terhadap peningkatan aktivitas manusia dan hasil yang dikeluarkan di lingkungan. Produk yang dihasilkan dari aktivitas dan dikeluarkan di lingkungan merupakan limbah dan sampah yang harus dikelola sehingga tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan. Kualitas lingkungan hidup tercermin dari capaian nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2021 sebesar 80,66 yaitu baik, IKLH dipengaruhi oleh kualitas air, udara dan tutupan lahan. Capaian kualitas air masih belum baik. Perlu upaya untuk meningkatkan capaian IKLH. Proporsi luas lahan kritis yang tertangani baru mencapai 5,5% dari luas lahan kritis seluas 477,75 ha. Terbatasnya lahan ruang terbuka hijau perkotaan, baru mencapai 14,34% sedangkan aturan dalam UU sebesar 20%.

Pembangunan berkesinambungan mengimplikasikan batas atau daya dukung lingkungan. Batas yang dimaksud bukan batas absolut akan tetapi batas yang ditentukan oleh organisasi sosial, kemampuan biosfer menyerap pengaruh- pengaruh kegiatan manusia, dan teknologi yang memberi jalan bagi era baru pertumbuhan ekonomi. Pembangunan berkelanjutan mengkaitkan tiga aspek utama yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan. Untuk menjamin keberlanjutan pembangunan ekonomi dan soaial budaya, ekosistem terpadu yang menopangnya harus tetap terjaga dengan baik. Oleh karena itu aspek lingkungan perlu diinternalisasikan kedalam

pembangunan ekonomi. Secara sosial, ekosistem ini harus dijaga hingga generasi yang akan datang sebagai sumber daya alam pendukung terutama menghadapi tantangan pertumbuhan penduduk tinggi yang memacu produksi dan konsumsi.

Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan secara umum merupakan wilayah dengan resiko bencana tinggi. Dalam paradigma pengurangan resiko, resiko suatu daerah atau masyarakat terhadap bencana merupakan interaksi tiga unsur utama yaitu bagaimana cara mengurangi ancaman (hazards) dan kerentanan (vulnerability) yang dimiliki, serta meningkatkan kemampuan (capacity) masyarakat dalam menghadapi setiap ancaman.

BAB V

TUJUAN DAN SASARAN

Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses penyusunan tahapan-tahapan pembangunan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu, sebagaimana prinsip Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2005-2025, Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023 – 2026 merupakan tahapan keempat atau tahapan terakhir pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Banggai Kepulauan. Dalam Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 disebutkan bahwa penentuan tujuan dan sasaran pada penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi/ Kabupaten/ Kota Tahun 2023-2026 didasarkan pada visi misi RPJPD Provinsi/Kabupaten/Kota, analisa sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahap Keempat, dan isu strategis aktual.

5.1 Telaah RPJPD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2005-2025

Sebagaimana diamanatkan dalam RPJPD Tahun 2005-2025 disebutkan bahwa Tahapan dan skala prioritas pembangunan daerah berisikan tekanan upaya pembangunan dan permasalahan yang akan diselesaikan dalam mencapai arah pembangunan yang telah ditetapkan, tanpa mengabaikan permasalahan dan upaya pembangunan lainnya. Olehnya itu skala prioritas pada masing – masing tahapan pembangunan akan berbeda, akan tetapi berkesinambungan dari satu periode ke periode berikutnya.

Visi RPJPD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2005-2025 yang telah ditetapkan adalah **“Mewujudkan Kabupaten Banggai Kepulauan yang Berdaya Saing, Sejahtera dan Merata”**. Visi ini merupakan hasil ekstraksi dari segenap

pemikiran, keinginan, harapan dan cita-cita seluruh masyarakat Kabupaten Banggai Kepulauan untuk dapat menjadi daerah yang memiliki daya saing, baik secara regional maupun nasional, sehingga tercipta kondisi masyarakat yang adil, aman dan makmur, untuk terwujudnya pemerataan hasil pembangunan diseluruh wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Tabel 5.1**Keterkaitan Visi Nasional, Provinsi dan Kabupaten dalam RPJPD**

Visi Nasional		Visi Sulteng		Visi Kab. Bangkep
RPJPN	RPJMN	RPJPD	RPJMD	RPJPD
2005-2025	2020-2024	2005- 2025	2021-2026	2005- 2025
Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur	Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berdasarkan Gotong Royong	Sulawesi Tengah Yang Maju, Mandiri, Sejahtera, Aman dan Berkeadilan	Gerak Cepat Menuju Sulteng Lebih Sejahtera dan Lebih Maju	Mewujudkan Kabupaten Banggai Kepulauan yang berdaya saing, sejahtera dan merata

Adapun misi RPJPD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2005-2025 yaitu:

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan baik (good governance) dan reformasi birokrasi daerah yang melayani;

Pemerintahan Kabupaten Banggai Kepulauan menerapkan dasarnya delapan karakteristik yakni: partisipasi aktif; tegaknya hukum (rule of law); transparansi; responsif; musyawarah untuk memperoleh konsensus berorientasi; keadilan dan perlakuan yang sama bagi semua orang; serta efektif dan ekonomis dapat dipertanggungjawabkan. Dimana dengan berlakunya karakteristik good governance tersebut di Kabupaten Banggai Kepulauan untuk menjamin: meminimalkan korupsi; pandangan minoritas diwakili dan dianggap; pandangan dan pendapat yang paling rentan didengar dalam pengambilan keputusan.

Reformasi birokrasi di Kabupaten Banggai Kepulauan pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap model dan sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur sebagaimana amanah dari pemerintah pusat. Good governance dapat dipahami, bahwa Pemerintahan Kabupaten Banggai Kepulauan menerapkan dasarnya delapan karakteristik yakni: partisipasi aktif; tegaknya hukum (rule of law); transparansi; responsif; musyawarah untuk memperoleh konsensus berorientasi; keadilan dan perlakuan yang sama bagi semua orang; serta efektif dan ekonomis dapat dipertanggungjawabkan. Dimana dengan berlakunya karakteristik good governance tersebut di Kabupaten Banggai Kepulauan untuk menjamin: meminimalkan korupsi; pandangan minoritas diwakili dan dianggap; pandangan dan pendapat yang paling rentan didengar dalam pengambilan keputusan.

Reformasi birokrasi di Kabupaten Banggai Kepulauan pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap model dan sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur sebagaimana amanah dari pemerintah pusat. Berbagai permasalahan/ hambatan yang mengakibatkan sistem penyelenggaraan pemerintahan tidak berjalan atau diperkirakan tidak akan berjalan dengan baik harus ditata ulang atau diperharui. Reformasi birokrasi di Kabupaten Banggai Kepulauan dilaksanakan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Dengan kata lain, reformasi birokrasi adalah langkah strategis untuk membangun aparatur sipil negara (ASN) agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan daerah. Selain itu dengan sangat pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan komunikasi serta perubahan lingkungan strategis menuntut birokrasi pemerintahan untuk direformasi dan disesuaikan dengan dinamika tuntutan masyarakat. Oleh karena itu harus segera diambil langkah-langkah yang bersifat mendasar, komprehensif, dan sistematis, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien.

2. Mewujudkan Kuantitas dan kualitas SDM daerah yang Berdaya Saing (competitiveness) melalui Pendidikan dan kesehatan yang merata;
Berdaya Saing dalam pengertian, bahwa Kabupaten Banggai Kepulauan memiliki tingka produktivitas yang tinggi karena adanya kuantitas dan kualitas SDM yang andal, atau suatu keunggulan pembeda terdiri dari keunggulan komparatif (comparative advantage) dan keunggulan kompetitif (competitive advantage) dibandingkan dengan daerah atau kabupaten lainnya. Dimana, daya saing daerah Kabupaten Banggai Kepulauan adalah kemampuan perekonomian daerah di Banggai Kepulauan untuk menggapai suatu pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi serta berkelanjutan tanpa menutup pintu persaingan dengan wilayah atau daerah lainnya.
3. Meningkatkan pemeratan pembangunan dan konektivitas melalui peningkatan infrastruktur daerah (regional infrastructure) yang maju;
Pembangunan dan pemerataan infrastuktur daerah di Kabupaten Banggai Kepulauan ditujukan untuk memberikan dampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah, termasuk meningkatkan konektivitas antarwilayah. Selain itu, pembangunan infrastruktur daerah untuk mengatasi ketimpangan antara wilayah kecamatan dan desa, serta peningkatan ketersediaan infrastruktur daerah untuk dapat meringankan dan menurunkan biaya produksi menjadi lebih murah.
4. Mewujudkan perekonomian daerah yang inklusif dan peningkatan kesejahteraan masyarakat (social-economy welfare);
Perekonomian yang inklusif di Kabupaten Banggai Kepulauan diimplementasi melalui tiga pilar utama yaitu: pertama, pertumbuhan yang tinggi dan berkelanjutan untuk menciptakan dan memperluas peluang ekonomi; kedua, perluasan akses untuk menjamin masyarakat dapat berpartisipasi dan mendapatkan manfaat dari pertumbuhan; dan ketiga, jaring pengaman sosial untuk mencegah kerugian lebih luas.
Kesejahteraan masyarakat (people welfare) di Kabupaten Banggai Kepulauan merupakan tujuan utama dari seluruh perencanaan pembangunan daerah. Pemerintah daerah Kabupaten Banggai Kepulauan di dalam mengimplementasikan strategi dan kebijakan selalu menjadikan kesejahteraan sebagai tujuan utama yang hendak dicapai (prime goal). Kebijakan pemerintah

melalui otonomi daerah dan desentralisasi fiskal diharapkan dapat memberikan kesempatan bagi masyarakat daerah puncak dalam mencapai kesejahteraan sosial ekonomi (social economi welfare) secara bersama-sama. Melalui desentralisasi daerah, Kabupaten Banggai Kepulauan diberikan keleluasaan dan peluang secara luas oleh pemerintah pusat untuk membangun dan memprakarsai pembangunan daerahnya sendiri, dan juga lebih mendekatkan kesejahteraan kepada masyarakat daerah menjadi lebih baik dan lebih maju.

5. Mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam dan Lingkungan yang berkelanjutan (sustainable approach).

Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan yang mengikuti prinsip-prinsip atau pendekatan berkelanjutan, yaitu: pertama, pembangunan harus memenuhi kebutuhan masa kini, tanpa mengorbankan hak pemenuhan kebutuhan generasi yang akan datang; kedua, pembangunan harus tetap memperhatikan ekosistem yang ada, sesuai dengan kemampuan daya dukungnya, sehingga tetap terjaga dan kualitas lingkungan tidak mengalami penurunan (lestari); ketiga, setiap aktivitas pembangunan harus selalu mewujudkan kepentingan kelompok atau masyarakat lain di manapun berada, serta mengindahkan keberadaan kehidupan sekarang maupun kehidupan masa datang; dan keempat, pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dalam segala aspek baik fisik, rohani, sosial dan budaya dalam jangka panjang (long run), dengan tidak memboroskan dan tidak merusak sumber daya alam yang ada, serta tidak melampaui kapasitas daya dukungnya.

Sasaran Pokok Pembangunan yang tertuang dalam RPJPD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2005-2025 seperti pada tabel berikut:

Tabel 5.2

Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2005-2025

VISI	MISI	SASARAN POKOK
1	2	3
"BANGKEP Berdaya	MISI 1 : Mewujudkan Tatakelola Pemerintahan Baik (Good	Meningkatnya Kesadaran ASN dalam penerapan disiplin
		Menurunnya Kasus Hukum

VISI	MISI	SASARAN POKOK
Saing, Sejahtera dan Merata”	Governance) Dan Reformasi Birokrasi Daerah Yang Melayani.	Meningkatnya kapabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah
		Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan aset
		Meningkatnya kualitas layanan publik (public service quality)
		Penurunan jumlah konflik
	MISI 2 : Mewujudkan Kuantitas Dan Kualitas Sumberdaya Manusia Yang Daya Saing Daerah Melalui Pendidikan Dan Kesehatan Yang Merata.	Meningkatnya Kualitas Sumberdaya Manusia
		Makin tingginya rata-rata pendidikan masyarakat Bangkep
		terwujudnya harapan dan kualitas pendidikan Bangkep
		kualitas hidup masyarakat Bangkep makin baik
		Menurunnya angka Stunting setiap periode
		Meningkatnya Indeks Daya Saing Daerah
	MISI 3 : Meningkatkan Konektivitas Dan Pemeratan Pembangunan Melalui Peningkatan Infrastruktur Daerah	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur jalan kondisi baik dan sedang
		Meningkatnya Sanitasi layak masyarakat
		Meningkatnya elektrifikasi, pasokan listrik dan cadangan listrik
		Meningkatnya akses masyarakat pada layanan komunikasi
		Meningkatnya kualitas jaringan komunikasi di seluruh wilayah

VISI	MISI	SASARAN POKOK
		Bangkep
		Terlaksananya kondisi jaringan irigasi kondisi baik
		Bertambahnya rumah layak huni di setiap periode
		Meningkatnya akses masyarakat Bangkep pada air minum
		makin rendahnya areal kawasan kumuh
		Bertambahnya pasar tradisional di setiap periode yang beraktivitas rutin
		Bertambahnya jumlah terminal
		Bertambahnya jumlah Pelabuhan
		Meningkatnya status Pelabuhan laut
	MISI 4 : Mewujudkan Perekonomian Daerah Inklusif Dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	Stabilitas pertumbuhan ekonomi daerah setiap periode dan makin berkualitas
		PDRB Per Kapita
		Makin Menurunnya angka Pengangguran
		Meningktanya Kesejahteraan Masyarakat setiap periode kepemimpinan
		Berkurangnya Desa Tertinggal
		Status Kabupaten diakhir periode RPJPD terentaskan dari ketertinggalan
		Pangan Harapan meningkat setiap periode kepemimpinan
		Pariwisata sebagai lokomotif

VISI	MISI	SASARAN POKOK
		pertumbuhan ekonomi meningkat peranya
		Berkembangnya Industri Kecil berbasis masyarakat
		peningkatan jumlah UMKM Produktif
		Berkembangnya ekonomi perdesaan
		Meningktanya Kesejahteraan Petani dan Nelayan
		Meningkatnya Produktivitas Perikanan
	MISI 5 : Mewujudkan Pengelolaan Sumberdaya Alam Dan Lingkungan Yang Berkelanjutan;	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup
		Meningkatnya kewaspadaan dan mitigasi terhadap bencana
		Daya Dukung dan Tampung Lingkungan
		Terjaganya wilayah hutan
		Meningkatnya ketersediaan sarana publik
		Berkurangnya lahan kritis

Selanjutnya arah kebijakan Pembangunan dalam RPJPD Kabupaten Banggai Kepulauan periode ke empat (tahun 2020-2025) yaitu :

1. Mendorong pelayanan publik yang prima;
2. Mewujudkan sumber daya manusia yang berdaya saing;
3. Mempercepat pembangunan infrastruktur strategis daerah untuk memperkuat struktur ekonomi daerah dan masyarakat yang tanggap bencana.

5.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan Sasaran yang ingin dicapai dalam pembangunan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan selama Periode 2023 – 2026 adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5.3
Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023-2026

Tujuan	Sasaran
1. Meningkatkan kualitas tata kelola Penyelenggaraan pemerintahan	1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah; 2. Meningkatnya akuntabilitas keuangan daerah; 3. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah; 4. Meningkatnya profesionalitas ASN; 5. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan; 6. Meningkatnya indeks inovasi daerah; 7. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.
2. Meningkatkan kualitas Pembangunan Manusia	1. Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat; 2. Meningkatnya kualitas dan pemerataan akses pendidikan; 3. Meningkatnya standar hidup masyarakat; 4. Meningkatnya pelayanan perpustakaan literasi; 5. Meningkatnya kesetaraan gender serta perlindungan perempuan dan anak.
3. Meningkatnya pemerataan dan	1. Meningkatnya pemerataan dan

Tujuan	Sasaran
kualitas pembangunan infrastruktur	kualitas pembangunan jalan dan jembatan untuk konektivitas wilayah; 2. Meningkatnya cakupan akses air minum; 3. Meningkatnya Jumlah Rumah Layak Huni dan berkurangnya kawasan kumuh; 4. Meningkatnya cakupan rumah tangga memiliki sanitasi layak; 5. Terbangunnya jaringan telekomunikasi dan informasi; 6. Tersedianya pelabuhan laut yang memenuhi standar.
4. Meningkatnya Perekonomian Daerah	1. Meningkatnya kesejahteraan petani/ nelayan; 2. Meningkatnya PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan; 3. Meningkatnya ketahanan pangan; 4. Meningkatnya pertumbuhan sektor pariwisata terhadap perekonomian; 5. Meningkatnya pertumbuhan sektor perindustrian terhadap perekonomian; 6. Meningkatnya daya saing daerah.
5. Menurunnya angka kemiskinan	1. Menurunnya tingkat pengangguran; 2. Meningkatnya standar hidup masyarakat;
6. Terwujudnya pembangunan berwawasan lingkungan melalui pengelolaan potensi sumber daya alam dan ketahanan bencana	1. Terwujudnya keseimbangan pembangunan antara manusia dan lingkungan secara berkelanjutan; 2. Meningkatnya ketahanan bencana daerah melalui peningkatan kapasitas



Tujuan	Sasaran
	pemda dan masyarakat dalam penanggulangan bencana.

Berdasarkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 – 2026, sebagaimana di atas, ditetapkan indikator dan target sasaran pembangunan daerah Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2023 – 2026 Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana tabel berikut

Tabel 5.4
RUMUSAN TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR RPD KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2023-2026

Tujuan/ sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2021)	Target Kinerja Tahun				Kondisi Kinerja Pada akhir periode RPD
				2023	2024	2025	2026	
Tujuan 1.1 Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	Indeks		B	B	BB	BB	BB
Sasaran 1.1.1 Meningkatnya akuntabilitas keuangan daerah	Opini BPK	Opini		WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Sasaran 1.1.2 Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Kategori		Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
Sasaran 1.1.3 Meningkatnya profesionalitas ASN	Indeks Profesionalitas Pegawai	Indeks (interval)		61-70	71-80	71-80	81-90	81-90
Sasaran 1.1.4 Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Nilai Sakip	Angka		B	B	B	BB	BB
Sasaran 1.1.5 Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	Kategori		Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi
Sasaran 1.1.6 Meningkatnya indeks inovasi daerah	Indeks Inovasi Daerah	Kategori (Nilai)		Inovatif	Inovatif	Inovatif	Inovatif	Inovatif

Tujuan/ sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2021)	Target Kinerja Tahun				Kondisi Kinerja Pada akhir periode RPD
				2023	2024	2025	2026	
Sasaran 1.1.7 Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	N/A	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
Tujuan 1.2 Meningkatnya kualitas Pembangunan Manusia	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	65,61	67,39	68,07	68,75	69,44	69,44
Sasaran 1.2.1 Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	66,31	67,31	67,71	68,12	68,53	68,53
Sasaran 1.2.2 Meningkatnya kualitas dan pemerataan akses pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	8,44	8,76	8,89	9,01	9,14	9,14
Sasaran 1.2.3 Meningkatnya standar hidup masyarakat	Pengeluaran Per Kapita	Rupiah	7.453.000	8.198.300	9.010.100	9.519.900	9.911.000	9.911.000
Sasaran 1.2.4 Meningkatnya pelayanan perpustakaan literasi	Cakupan Pelayanan Perpustakaan Literasi	Persen	N/A					
Sasaran 1.2.5 Meningkatnya kesetaraan gender serta perlindungan perempuan dan anak	Indeks Pemberdayaan Gender (IPG)	Indeks	71,79	76,35	77,56	78,76	79,97	79,97
Tujuan 1.3								

Tujuan/ sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2021)	Target Kinerja Tahun				Kondisi Kinerja Pada akhir periode RPD
				2023	2024	2025	2026	
Meningkatnya pemerataan dan kualitas pembangunan infrastruktur	Indeks Infrastruktur Daerah	Indeks	60,57	62,41	63,56	64,71	65,99	65,99
Sasaran 1.3.1 Meningkatnya pemerataan dan kualitas pembangunan jalan dan jembatan untuk konektivitas wilayah	Persentase tingkat kemantapan jalan kabupaten	Persen	58	66,12	70,18	74,24	78,83	78,83
Sasaran 1.3.2 Meningkatnya cakupan akses air minum	Persentase penduduk berakses air minum	Persen	50,46	60,55	65,6	70,64	75,69	75,69
Sasaran 1.3.3 Meningkatnya Jumlah Rumah Layak Huni dan berkurangnya kawasan kumuh	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	Persen	75,40	78,42	79,92	81,43	82,94	82,94
	Persentase luas kawasan kumuh yang tertangani	Persen	-	4	6	8	10	10
Sasaran 1.3.4 Meningkatnya cakupan rumah tangga memiliki sanitasi layak	Persentase rumah tinggal bersanitasi	Persen	61,81	67,99	71,08	74,17	77,25	77,25
Sasaran 1.3.5 Terbangunnya jaringan dan telekomunikasi informasi	Cakupan Layanan Telekomunikasi	Persen	76	79,04	80,56	82,08	83,6	83,6

Tujuan/ sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2021)	Target Kinerja Tahun				Kondisi Kinerja Pada akhir periode RPD
				2023	2024	2025	2026	
Sasaran 1.3.6 Tersedianya Pelabuhan Laut yang memenuhi standar	Jumlah Pelabuhan Laut	Jumlah	13	13	13	14	14	14
Tujuan 1.4 Meningkatnya Perekonomian Daerah	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	-2,98	2,84	2,95	3,07	3,19	3,19
Sasaran 1.4.1 Meningkatnya kesejahteraan petani/ nelayan	Nilai Tukar Petani	Nilai	N/A					
Sasaran 1.4.2 Meningkatnya PDRB sektor pertanian, Kehutanan dan perikanan	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, kehutanan dan perikanan	Persen	3,41	3,75	4,13	4,54	4,99	4,99
Sasaran 1.4.3 Meningkatnya ketahanan pangan	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	61,9	76	80	85	90	90
Sasaran 1.4.4 Meningkatnya pertumbuhan sektor pariwisata terhadap perekonomian	Pertumbuhan PDRB sektor pariwisata	Persen	12,35	13,59	14,94	16,44	18,08	18,08
Sasaran 1.4.5 Meningkatnya pertumbuhan sektor perindustrian terhadap perekonomian	Pertumbuhan PDRB sektor perindustrian	Persen	2,55	2,81	3,09	3,39	3,73	3,73
Sasaran 1.4.6								

Tujuan/ sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2021)	Target Kinerja Tahun				Kondisi Kinerja Pada akhir periode RPD
				2023	2024	2025	2026	
Meningkatnya daya saing daerah	Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)	Indeks	1,028	1,48	1,86	2,23	2,61	2,61
Tujuan 1.5 Menurunnya angka kemiskinan	Tingkat Kemiskinan	Persen	14,04	10,43	9,63	8,97	8,44	8,44
Sasaran 1.5.1 Menurunnya tingkat pengangguran	Tingkat pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	2,47	2,26	2,2	2,14	2,08	2,08
Sasaran 1.5.2 Meningkatnya standar hidup masyarakat	Pendapatan perkapita	Juta Rupiah	21,7	23,8	25,2	27,8	28,2	28,2
Sasaran 1.5.3 Menurunnya tingkat ketimpangan pendapatan	Gini Rasio	Indeks	0,29	0,29	0,29	0,28	0,27	0,27
	Tingkat Inflasi	Persen	2,10	2,06	2,04	2,02	2,00	2,00
Tujuan 1.6 Terwujudnya pembangunan berwawasan lingkungan melalui pengelolaan potensi sumber daya alam dan ketahanan bencana	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	80,66	81,74	82,25	82,77	82,88	82,88
Sasaran 1.6.1 Terwujudnya keseimbangan pembangunan antara manusia dan lingkungan secara berkelanjutan	Indeks Kualitas Air (IKA)	Indeks	67,78	68,5	69	70	79	79
	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Indeks	94,06	94,5	95	95,5	96	96

Tujuan/ sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2021)	Target Kinerja Tahun				Kondisi Kinerja Pada akhir periode RPD
				2023	2024	2025	2026	
	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKLH)	Indeks	68,13	68,5	69	69,5	70	70
Sasaran 1.6.2 Meningkatnya ketahanan bencana daerah melalui peningkatan kapasitas pemda dan masyarakat dalam penanggulangan bencana	Indeks Resiko Bencana	Indeks	163	163	144	144	144	144

BAB VI

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan mencapai tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut agar dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam periode waktu tertentu. Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focussed management*). Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Arah kebijakan merupakan pengejawantahan dari strategi pembangunan daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan. Arah Kebijakan dalam Rencana Pembangunan Daerah ini menjelaskan tahapan pembangunan tahunan Kabupaten Banggai Kepulauan untuk Tahun 2023 - 2026.

Tabel. 6.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023-2026

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya kualitas tata kelola Penyelenggaraan pemerintahan	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Peningkatan Pengawasan, akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah	▪ Peningkatan Implementasi SAKIP; ▪ Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP); ▪ Peningkatan Kapabilitas aparat pengawasan Intern Pemerintah (APIP)
	Meningkatnya akuntabilitas keuangan daerah	Peningkatan akuntabilitas kinerja keuangan daerah	▪ Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan Daerah;
	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah		▪ Peningkatan Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah; ▪ Peningkatan Kualitas Pengelolaan pendapatan Daerah.
	Meningkatnya Profesionalitas ASN	Meningkatkan profesionalitas ASN	▪ Peningkatan disiplin ASN; ▪ Peningkatan pembinaan pegawai; ▪ Peningkatan kompetensi teknis, manajerial, dan fungsional; ▪ Penempatan jabatan berbasis sistem merit.
	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan	Peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	▪ Peningkatan sinergitas perencanaan di tingkat Daerah dengan perangkat Daerah; ▪ Pengembangan instrumen pengendalian dan evaluasi perencanaan; ▪ Peningkatan partisipasi masyarakat dalam

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			perencanaan pembangunan daerah.
	Meningkatnya Indeks Inovasi Daerah	Peningkatan indeks inovasi daerah	▪ Pemanfaatan hasil penelitian; ▪ penguatan kembali Laboratorium Inovasi daerah
	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Peningkatan kualitas sistem pelayanan publik	▪ Peningkatan kualitas pelayanan publik kecamatan; ▪ Peningkatan kapasitas ASN tingkat kecamatan, kelurahan, dan desa.
		Penguatan kualitas pelayanan kependudukan dan catatan sipil	▪ Peningkatan database kependudukan dan catatan sipil yang valid dan update; ▪ Peningkatan kesadaran masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan dan catatan sipil.
Meningkatnya Kualitas Pembangunan Manusia	Meningkatnya Kualitas Kesehatan	Penguatan layanan kesehatan yang merata, terjangkau dan bermutu	▪ Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kesehatan; ▪ Peningkatan ketersediaan obat dan logistik kesehatan; ▪ Peningkatan capaian SPM Kesehatan; ▪ Penyediaan tenaga kesehatan dan pendistribusian yang merata di seluruh wilayah.
	Meningkatkan kualitas dan pemerataan akses pendidikan	Percepatan penyelenggaraan program pendidikan anak usia dini dan wajib belajar 9 tahun	▪ Peningkatan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); ▪ Peningkatan program wajib belajar 9 tahun

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		Meningkatkan kompetensi dan kesejahteraan tenaga pendidik	▪ Peningkatan kompetensi, kualifikasi dan kesejahteraan pendidik
	Meningkatnya standar hidup masyarakat		
	Meningkatnya kesetaraan gender serta perlindungan perempuan dan anak	Penguatan peran perempuan dalam kesetaraan gender	▪ Peningkatan peran perempuan dalam kesetaraan gender serta perlindungan perempuan dan anak.
Meningkatnya pemerataan dan kualitas pembangunan infrastruktur.	Meningkatnya pemerataan dan kualitas pembangunan jalan dan jembatan untuk konektivitas wilayah	Meningkatkan pemerataan aksesibilitas dan kualitas jalan dan jembatan melalui pemantauan kondisi jalan secara berkala untuk konektivitas wilayah serta penanganan pemeliharaan secara responsive	▪ Peningkatan pemerataan aksesibilitas dan kualitas jalan dan jembatan pada semua wilayah; ▪ Pengembangan infrastruktur dan layanan angkutan laut/pelayaran untuk mendukung konektivitas antar wilayah
	Meningkatnya cakupan akses air minum	meningkatkan cakupan akses air minum melalui peningkatan pelayanan PDAM, PAMSIMAS	▪ peningkatan cakupan akses ketersediaan air minum bagi rumah tangga pada semua wilayah
	Meningkatnya Jumlah Rumah Layak Huni dan berkurangnya kawasan kumuh	Menyediakan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah	▪ penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah
		Penataan kawasan kumuh perkotaan	▪ penataan kawasan kumuh perkotaan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	Meningkatnya cakupan rumah tangga memiliki sanitasi layak	Meningkatkan sanitasi layak disetiap rumah melalui pembangunan Sistem Pembuangan Air Limbah (SPAL), serta pemberian sosialisasi tentang sanitasi layak	▪ Peningkatan kepemilikan sanitasi layak pada semua rumah tangga
	Terbangunnya jaringan telekomunikasi dan informasi	Meningkatkan penyediaan BTS jaringan telekomunikasi dan informasi diseluruh wilayah yang masih mengalami <i>blank spot</i>	▪ Peningkatan koordinasi penyediaan BTS jaringan telekomunikasi dan informasi diseluruh wilayah yang masih mengalami <i>blank spot</i>
	Tersedianya pelabuhan laut yang memenuhi standar	Menyediakan pelabuhan laut yang memenuhi standar	▪ Pengembangan infrastruktur dan layanan angkutan laut/ pelayaran untuk mendukung konektivitas antar wilayah ▪ Peningkatan penyediaan perlengkapan transportasi laut ▪ Peningkatan koordinasi perizinan pembangunan pelabuhan laut
Meningkatnya Perekonomian Daerah	Meningkatnya kesejahteraan petani/ nelayan	Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kesejahteraan petani/ nelayan	▪ Peningkatan kapasitas SDM sektor pertanian ▪ Peningkatan peran dan fungsi kelembagaan sektor pertanian ▪ Peningkatan pembinaan kelompok petani/ nelayan.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	Meningkatnya PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan	Meningkatkan pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan	
	Meningkatnya ketahanan pangan		
	Meningkatnya pertumbuhan sektor pariwisata	Meningkatkan pengembangan destinasi dan promosi pariwisata serta penguatan kelembagaan pariwisata	▪ Peningkatan promosi destinasi wisata ▪ Peningkatan SDM kepariwisataan dan ekonomi kreatif ▪ Pengembangan Masyarakat sadar wisata
	Meningkatnya pertumbuhan sektor perindustrian	Meningkatkan pertumbuhan sektor industri	▪ Peningkatan jumlah industri kecil menengah (IKM)
	Meningkatnya daya saing daerah		
Menurunnya angka kemiskinan	Menurunnya tingkat pengangguran	Meningkatkan angka partisipasi kerja	▪ Perluasan kesempatan kerja ▪ Penyediaan balai latihan kerja
	Meningkatnya standar hidup masyarakat		
	Menurunnya tingkat ketimpangan pendapatan	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa	▪ Penguatan kelembagaan BUMDES
Terwujudnya pembangunan berwawasan lingkungan melalui pengelolaan	Terwujudnya keseimbangan pembangunan antara manusia dan lingkungan secara berkelanjutan	▪ Melakukan pemantauan sumber pencemar air (point source) ▪ Melakukan pemantauan	▪ Pemantauan sumber pencemar air sungai (point source) ▪ Pemantauan sumber pencemar udara (point source)



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
potensi sumber daya alam dan ketahanan bencana		sumber pencemar udara (point source) ▪ Melakukan pemantauan luasan tutupan lahan	▪ Pemantauan luasan tutupan lahan ▪ Peningkatan daya tampung dan daya dukung lingkungan hidup
	Meningkatnya ketahanan bencana daerah melalui peningkatan kapasitas pemda dan masyarakat dalam penanggulangan bencana	Meningkatkan kapasitas pemda dan masyarakat dalam menanggulangi bencana	▪ Peningkatan kapasitas pemda dan masyarakat dalam menanggulangi bencana ▪ Peningkatan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi bencana ▪ Peningkatan penanggulangan bahaya kebakaran melalui penyiapan sarana dan prasarana, pencegahan dan penyelamatan kebakaran dan non kebakaran.

Berdasarkan Strategi dan arah Kebijakan sebagaimana di atas, akan mengarahkan Tema, fokus dan prioritas pembangunan tahunan daerah yang termuat dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) pada setiap Tahun Anggaran berjalan. Pembangunan Tahunan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan secara indikatif dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 6.1: Tema Pembangunan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023-2026

6.1 PROGRAM PRIORITAS DAERAH TAHUN 2023-2026

Program pembangunan daerah merupakan program perangkat daerah yang memiliki kontribusi besar terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah sebagaimana dituangkan dalam RPD. Program prioritas di RPJMD secara umum bagian dari janji politik kepala daerah beserta visi dan misinya. Jika tidak ada program prioritas sebagai janji politik, maka cara merumuskan program prioritas di dalam dokumen RPD berdasarkan rumusan tujuan dan sasaran RPD. Berikut adalah seluruh program prioritas daerah yang dapat dilihat keselarasannya dengan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah

Tabel 6.2
Program Prioritas Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023-2026

Sasaran	Indikator Kinerja	Kondisi Awal 2021	Kondisi Awal 2026	Strategi dan Arah Kebijakan	Program Prioritas	Perangkat Daerah
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP	Belum ada penilaian untuk tahun 2021	BB	Strategi: Peningkatan Pengawasan, akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah. Arah Kebijakan: ▪ Peningkatan Implementasi SAKIP; ▪ Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP); ▪ Peningkatan Kapabilitas aparat pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	▪ Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota ▪ Program Penyelenggaraan Pengawasan ▪ Program Perumusan Kebijakan, pendampingan dan asistensi.	✓ Seluruh Perangkat Daerah; ✓ Inspektorat ✓ Inspektorat
Meningkatnya akuntabilitas keuangan daerah	Opini BPK	Belum ada penilaian untuk tahun 2021	WTP	Strategi: Peningkatan akuntabilitas kinerja keuangan daerah Arah Kebijakan: ▪ Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan Daerah; ▪ Peningkatan Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah; ▪ Peningkatan Kualitas Pengelolaan pendapatan Daerah.	▪ Program pengelolaan keuangan daerah ▪ Program pengelolaan barang milik daerah ▪ Program pengelolaan pendapatan daerah	✓ BPKAD ✓ BPKAD ✓ Bapenda
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	N/A	Baik	▪ Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan Daerah; ▪ Peningkatan Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah; ▪ Peningkatan Kualitas Pengelolaan pendapatan Daerah.	▪ Program kepegawaian daerah ▪ Program pengembangan sumber daya manusia	✓ BKPSDM ✓ BKPSDM
Meningkatnya Profesionalitas ASN	Indeks Profesionalitas Pegawai	Belum ada penilaian untuk tahun 2021	81-90	Strategi: Meningkatkan profesionalitas ASN Arah Kebijakan: ▪ Peningkatan disiplin ASN; ▪ Peningkatan pembinaan pegawai; ▪ Peningkatan kompetensi teknis, manajerial, dan fungsional; ▪ Penempatan jabatan berbasis sistem merit.	▪ Program kepegawaian daerah ▪ Program pengembangan sumber daya manusia	✓ BKPSDM ✓ BKPSDM
Meningkatnya Kualitas	Indeks Perencanaan	N/A	Tinggi	Strategi: Peningkatan kualitas perencanaan,	▪ Program perencanaan, pengendalian dan	✓ Bappeda dan Litbang

Sasaran	Indikator Kinerja	Kondisi Awal 2021	Kondisi Awal 2026	Strategi dan Arah Kebijakan	Program Prioritas	Perangkat Daerah
Perencanaan Pembangunan	Pembangunan Daerah			pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah. Arah Kebijakan: - Peningkatan sinergitas perencanaan di tingkat Daerah dengan perangkat Daerah; - Pengembangan instrumen pengendalian dan evaluasi perencanaan; - Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah.	evaluasi pembangunan daerah Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	✓ Bappeda dan Litbang ✓ Bappeda dan Litbang
Meningkatnya Indeks Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah	Inovatif	Inovatif	Strategi: Peningkatan indeks inovasi daerah Arah Kebijakan: - Pemanfaatan hasil penelitian; - penguatan kembali Laboratorium Inovasi daerah	Program penelitian dan pengembangan daerah	✓ Bappeda dan Litbang
Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	N/A	Baik	Strategi: - Peningkatan kualitas sistem pelayanan publik - Penguatan kualitas pelayanan kependudukan dan catatan sipil Arah Kebijakan: - Peningkatan kualitas pelayanan publik pada perangkat daerah. - Peningkatan kapasitas ASN tingkat kecamatan, kelurahan, dan desa. - Peningkatan database kependudukan dan catatan sipil yang valid dan update; - Peningkatan kesadaran masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan dan catatan sipil.	- Program penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik - Program pendaftaran penduduk - Program pencatatan sipil - Program Pelayanan Penanaman Modal - Program Informasi Dan Komunikasi Publik	✓ Kecamatan ✓ Disdukcapil ✓ Diskominfo ✓ DPMP2TSP
Meningkatnya Kualitas Kesehatan	Angka Harapan Hidup (AHH)	66,31	68,53	Strategi: Penguatan layanan kesehatan yang merata, terjangkau dan bermutu. Arah Kebijakan:	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	✓ Dinkes

Sasaran	Indikator Kinerja	Kondisi Awal 2021	Kondisi Awal 2026	Strategi dan Arah Kebijakan	Program Prioritas	Perangkat Daerah
				▪ Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kesehatan; ▪ Peningkatan ketersediaan obat dan logistik kesehatan; ▪ Peningkatan capaian SPM Kesehatan; ▪ Penyediaan tenaga kesehatan dan pendistribusian yang merata di seluruh wilayah.	▪ Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman ▪ Program pemberdayaan masyarakat kesehatan	✓ Dinkes ✓ Dinkes
Meningkatkan kualitas dan pemerataan akses pendidikan	Rata-rata lama sekolah (RLS)	8,44	9,14	Strategi: ▪ Percepatan penyelenggaraan program pendidikan anak usia dini dan wajib belajar 9 tahun. ▪ Meningkatkan kompetensi dan kesejahteraan tenaga pendidik Arah Kebijakan: ▪ Peningkatan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); ▪ Peningkatan program wajib belajar 9 tahun ▪ Peningkatan kompetensi, kualifikasi dan kesejahteraan pendidik	▪ Program pengelolaan pendidikan ▪ Program pengembangan kurikulum ▪ Program pendidik dan tenaga kependidikan	✓ Dikbud ✓ Dikbud ✓ Dikbud
Meningkatnya kesetaraan gender serta perlindungan perempuan dan anak	Indeks Pemberdayaan Gender (IPG)	71,79	79,97	Strategi: Penguatan peran perempuan dalam kesetaraan gender serta perlindungan perempuan dan anak Arah Kebijakan:	▪ Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan	✓ DP3
Meningkatnya pemerataan dan kualitas pembangunan jalan dan jembatan untuk konektivitas wilayah	Persentase tingkat kemandapan jalan kabupaten	58	78,83	Strategi: Meningkatkan pemerataan aksesibilitas dan kualitas jalan dan jembatan melalui pemantauan kondisi jalan secara berkala untuk konektivitas wilayah serta penanganan pemeliharaan secara responsive. Arah Kebijakan: ▪ Peningkatan pemerataan aksesibilitas dan	▪ Program penyelenggaraan jalan	✓ Dinas PUPR

Sasaran	Indikator Kinerja	Kondisi Awal 2021	Kondisi Awal 2026	Strategi dan Arah Kebijakan	Program Prioritas	Perangkat Daerah
				kualitas jalan dan jembatan pada semua wilayah;		
Meningkatnya cakupan akses air minum	Persentase Penduduk berakses air minum	50,46	75,69	Strategi: meningkatkan cakupan akses air minum melalui peningkatan pelayanan PDAM, PAMSIMAS Arah Kebijakan: peningkatan cakupan akses ketersediaan air minum bagi rumah tangga pada semua wilayah	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	✓Dinas PUPR
Meningkatnya Jumlah Rumah Layak Huni dan berkurangnya kawasan kumuh	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	75,40	82,94	Strategi: - Menyediakan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah - Penataan kawasan kumuh perkotaan Arah Kebijakan: - penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah - penataan kawasan kumuh perkotaan	- Program pengembangan perumahan - Program perumahan dan kawasan permukiman kumuh	Dinas Perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan
Meningkatnya cakupan rumah tangga memiliki sanitasi layak	Persentase rumah tinggal bersanitasi	61,81	77,25	Strategi: Meningkatkan sanitasi layak disetiap rumah melalui pembangunan Sistem Pembuangan Air Limbah (SPAL), serta pemberian sosialisasi tentang sanitasi layak Arah Kebijakan: Peningkatan kepemilikan sanitasi layak pada semua rumah tangga	Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	✓Dinas PUPR
Terbangunnya jaringan telekomunikasi dan informasi	Cakupan layanan telekomunikasi	76	83,6	Strategi: Meningkatkan penyediaan BTS jaringan telekomunikasi dan informasi diseluruh wilayah yang masih mengalami <i>blank spot</i> Arah Kebijakan: Peningkatan koordinasi penyediaan BTS jaringan telekomunikasi dan informasi	Program informasi dan komunikasi publik	✓ Diskominfo

Sasaran	Indikator Kinerja	Kondisi Awal 2021	Kondisi Awal 2026	Strategi dan Arah Kebijakan	Program Prioritas	Perangkat Daerah
				diseluruh wilayah yang masih mengalami <i>blank spot</i>		
Tersedianya pelabuhan laut yang memenuhi standar	Jumlah pelabuhan laut	13	14	Strategi: Menyediakan pelabuhan laut yang memenuhi standar Arah Kebijakan: ▪ Pengembangan infrastruktur dan layanan angkutan laut/ pelayaran untuk mendukung konektivitas antar wilayah ▪ Peningkatan penyediaan perlengkapan transportasi laut ▪ Peningkatan koordinasi perizinan pembangunan pelabuhan laut	▪ Program pengelolaan pelayaran	✓ Dishub
Meningkatnya kesejahteraan petani	Nilai Tukar petani	N/A		Strategi: Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kesejahteraan petani/ nelayan Arah Kebijakan: ▪ Peningkatan kapasitas SDM sektor pertanian ▪ Peningkatan peran dan fungsi kelembagaan sektor pertanian ▪ Peningkatan pembinaan kelompok petani/ nelayan.	▪ Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian; ▪ Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian; ▪ Program Penyuluhan Pertanian ▪ Program Pengelolaan Perikanan Tangkap ▪ Program Pengelolaan Perikanan Budidaya; ▪ Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	✓ Dinas Pertanian ✓ Dinas Perikanan
Meningkatnya PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, kehutanan dan perikanan			Strategi: Meningkatkan pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan Arah Kebijakan: Peningkatan pertumbuhan PDRB pada sector Pertanian dan perikanan	▪ Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian; ▪ Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian;	✓ Dinas Pertanian ✓ Dinas Perikanan

Sasaran	Indikator Kinerja	Kondisi Awal 2021	Kondisi Awal 2026	Strategi dan Arah Kebijakan	Program Prioritas	Perangkat Daerah
					- Program Penyuluhan Pertanian - Program Pengelolaan Perikanan Tangkap - Program Pengelolaan Perikanan Budidaya; - Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	
Meningkatnya ketahanan pangan	Indeks Ketahanan Pangan	61,9	90	Strategi: Meningkatkan ketersediaan, akses pangan masyarakat, kualitas, keragaman dan keamanan pangan Arah Kebijakan: Peningkatan ketersediaan, penguatan cadangan, distribusi, akses, dan penganeekaragaman pangan serta keamanan konsumsi pangan masyarakat dan penanganan daerah rawan pangan	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	✓Dinas Ketahanan Pangan
Meningkatnya pertumbuhan sektor pariwisata	Pertumbuhan PDRB sektor pariwisata	12,35	18,08	Strategi: Meningkatkan pengembangan destinasi dan promosi pariwisata serta penguatan kelembagaan pariwisata Arah Kebijakan: - Peningkatan promosi destinasi wisata - Peningkatan SDM kepariwisataan dan ekonomi kreatif - Pengembangan Masyarakat sadar wisata	- Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata - Program pemasaran pariwisata - Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	✓Dinas Pariwisata
Meningkatnya pertumbuhan sektor perindustrian	Pertumbuhan PDRB sektor perindustrian	2,55	3,73	Strategi: Meningkatkan pertumbuhan sektor industri Arah Kebijakan: Peningkatan jumlah industri kecil menengah (IKM)	- Program perencanaan dan pengembangan industri - Program pengendalian izin usaha industri kabupaten/ kota	✓Disperindagkop

Sasaran	Indikator Kinerja	Kondisi Awal 2021	Kondisi Awal 2026	Strategi dan Arah Kebijakan	Program Prioritas	Perangkat Daerah
					Program pengelolaan sistem informasi industri nasional	
Meningkatnya daya saing daerah	Indeks daya saing daerah	1,028	2,61	Strategi: - Meningkatkan ekonomi perdesaan - Meningkatkan sistem dan jaringan distribusi barang, pengembangan pasar dan perlindungan konsumen Arah Kebijakan: - Dukungan pembangunan jalan di sentra pertanian, wisata dan industri. - Pengembangan sistem transportasi laut dan angkutan lainnya	Program penyelenggaraan jalan	✓ Dinas PUPR
Menurunnya tingkat pengangguran	Tingkat pengangguran Terbuka (TPT)	2,40	2,08	Strategi: Meningkatkan angka partisipasi kerja Arah Kebijakan: - Perluasan kesempatan kerja - Penyediaan balai latihan kerja	- Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja - Program penempatan tenaga kerja	✓ Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Meningkatnya standar hidup masyarakat	Pendapatan per kapita (jt rupiah)	21,7	28,2			
Menurunnya tingkat ketimpangan pendapatan	Gini Rasio	0,29	0,27	Strategi: Meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa Arah Kebijakan: Penguatan kelembagaan BUMDES		
Terwujudnya keseimbangan pembangunan antara manusia dan lingkungan secara berkelanjutan	Indeks Kualitas air	67,78	79	Strategi: - Melakukan pemantauan sumber pencemar air (point source) - Melakukan pemantauan sumber pencemar udara (point source) - Melakukan pemantauan luasan tutupan lahan Arah Kebijakan: - Pemantauan sumber pencemar air sungai (point source)	- Program perencanaan lingkungan hidup - Program pengendalian pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup - Program pengelolaan keanekaragaman hayati (kehati)	✓ DLH
	Indeks Kualitas Udara	94,06	96			
	Indeks Kualitas tutupan lahan	68,13	70			

Sasaran	Indikator Kinerja	Kondisi Awal 2021	Kondisi Awal 2026	Strategi dan Arah Kebijakan	Program Prioritas	Perangkat Daerah
				▪ Pemantauan sumber pencemar udara (point source) ▪ Pemantauan luasan tutupan lahan ▪ Peningkatan daya tampung dan daya dukung lingkungan hidup		
Meningkatnya ketahanan bencana daerah melalui peningkatan kapasitas pemda dan masyarakat dalam penanggulangan bencana	Indeks Resioko bencana	163	144	Strategi: Meningkatkan kapasitas pemda dan masyarakat dalam menanggulangi bencana Arah Kebijakan: ▪ Peningkatan kapasitas pemda dan masyarakat dalam menanggulangi bencana ▪ Peningkatan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi bencana ▪ Peningkatan penanggulangan bahaya kebakaran melalui penyiapan sarana dan prasarana, pencegahan dan penyelamatan kebakaran dan non kebakaran.	▪ Program penanggulangan bencana ▪ Program penanganan bencana ▪ Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	✓ BPBD ✓ Satpol PP

Tabel 6.3
Program Prioritas Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023-2026 disertai pagu indikatif

KODE			Tujuan/Sasaran/ Program Prioritas	Indikator Kinerja	Kondisi Awal RPD (2021)	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir RPD (Tahun 2026)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2023		2024		2025		2026				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
			Tujuan 1.1													
			Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah	Indeks Reformasi dan Birokrasi		B	597.466.462.234	B	637.300.705.119	BB	681.938.035.173	BB	729.403.108.973	BB	729.403.108.973	
			Sasaran 1.1.1													
			Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah	Nilai Sakip		B	424.468.663.949	B	464.617.966.594	B	509.092.789.504	BB	556.521.525.704	BB	556.521.525.704	
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100	100	421.849.026.449	100	462.048.329.094	100	506.523.152.004	100	553.951.888.204	100	553.951.888.204	Seluruh Perangkat Daerah
			Program Penyelenggaraan Pengawasan	Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah			2.269.637.500		2.269.637.500		2.269.637.500		2.269.637.500		2.269.637.500	Inspektorat
			Program Perumusan Kebijakan, Pedampingan dan Asistensi	Persentase penurunan Temuan Hasil pengawasan		100	350.000.000	100	300.000.000	100	300.000.000	100	300.000.000	100	300.000.000	Inspektorat
			Sasaran 1.1.2													
			Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan Daerah	Opini BPK		WTP	167.985.995.650	WTP	167.985.995.650	WTP	167.985.995.650	WTP	168.019.949.769	WTP	168.019.949.769	
			Sasaran 1.1.3													

KODE			Tujuan/Sasaran/ Program Prioritas	Indikator Kinerja	Kondisi Awal RPD (2021)	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir RPD (Tahun 2026)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2023		2024		2025		2026				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
			Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)		Baik		Baik		Baik		Baik				
			Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Penyusunan Rancangan APBD dan APBD Perubahan yang tepat waktu, tepat proses, tepat isi		100	166.490.290.950	100	166.490.290.950	100	166.490.290.950	100	166.490.290.950	BPKAD		
			Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Barang milik Daerah yang memiliki Bukti Dokumen kepemilikan		100	495.704.700	100	495.704.700	100	495.704.700	100	529.658.819		529.658.819	
			Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase peningkatan pendapatan asli daerah		100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	Bapenda		
			Sasaran 1.1.4													
			Meningkatnya profesionalitas ASN	Indeks Profesionalitas Pegawai		61-70	2.021.633.500	71-75	2.021.633.500	76-80	1.921.633.500	81-85	2.021.633.500	2.021.633.500		
			Program kepegawaian daerah	Persentase kualitas data, layanan kepegawaian dan kinerja pegawai			1.721.633.500		1.721.633.500		1.721.633.500		1.721.633.500	BKPSDM		
			Program pengembangan sumber daya manusia	Persentase kompetensi sumber daya aparatur			300.000.000		300.000.000		200.000.000		300.000.000		300.000.000	
			Sasaran 1.1.5													
			Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah		Tinggi	2.520.000.000	Tinggi	2.105.109.375	Tinggi	2.420.000.000	Tinggi	2.320.000.000	2.320.000.000		
			Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan pembangunan yang tepat waktu, tepat		100	1.220.000.000	100	985.109.375	100	1.300.000.000	100	1.200.000.000	1.200.000.000	Bappeda dan Litbang	

KODE			Tujuan/Sasaran/ Program Prioritas	Indikator Kinerja	Kondisi Awal RPD (2021)	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir RPD (Tahun 2026)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2023		2024		2025		2026				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				proses dan tepat isi												
			Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	Persentase Renja PD Mitra Yang Di Susun Tepat Waktu, Tepat Proses Dan Tepat Isi		100	1.300.000.000	100	1.120.000.000	100	1.120.000.000	100	1.120.000.000	100	1.120.000.000	
			Sasaran 1.1.6													
			Meningkatnya indeks inovasi daerah	Indeks Inovasi Daerah		Inovatif	350.169.135	Inovatif	450.000.000	Inovatif	397.616.519	Inovatif	400.000.000	Inovatif	400.000.000	
			Program penelitian dan pengembang an daerah	Persentase Hasil kelitbangan yang diitindaklanj uti/ dimanfaatka n oleh Perangkat Daerah			350.169.135		450.000.000		397.616.519		400.000.000		400.000.000	Bappeda dan Litbang
			Sasaran 1.1.7													
			Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		Baik	790.069.000	Baik	819.597.000	Baik	852.067.690	Baik	813.219.681	Baik	813.219.681	
			Program penyelenggar aan pemerintah dan pelayanan publik	Persentase penyelenggar aan tugas- tugas pemerintah an kewenangan kecamatan dan pelayanan publik yang dilimpahkan kepada camat		100	120.000.000	100	123.960.000	100	128.304.000	100	124.452.000	100	124.452.000	Kecamatan
			Program Pendaftaran penduduk	Persentase kepemilikan KTP			128.320.000		141.152.000		155.267.200		138.434.542		138.434.542	Capil

KODE			Tujuan/Sasaran/ Program Prioritas	Indikator Kinerja	Kondisi Awal RPD (2021)	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir RPD (Tahun 2026)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2023		2024		2025		2026				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				elektronik												
			Program pencatatan sipil	Persentase Kepemilikan Akte Pencatatan Sipil			127.369.000		140.105.000		154.116.490		136.253.139		136.253.139	
			Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Presentase Layanan Publik yang diselenggara kan secara online dan terintegrasi			250.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000	Kominfo
			Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Penyelesaian Perizinan dan Non Perizinan sesuai SOP			164.380.000	100	164.380.000	100	164.380.000	100	164.380.000	100	164.380.000	DPMPSTP
			Tujuan 1.2													
			Meningkatnya kualitas Pembangunan Manusia	Indeks Pembanguna n Manusia (IPM)	65,61	67,39	96.931.789.744	68,07	96.119.189.744	68,75	90.119.189.744	69,44	87.726.776.394	69,44	87.726.776.394	
			Sasaran 1.2.1													
			Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH)	66,31	67,31	69.612.858.615	67,71	69.612.858.615	68,12	66.612.858.615	68,53	65.609.858.615	68,53	65.609.858.615	
			Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Capaian SPM bidang Kesehatan		100	58.583.590.615	100	58.583.590.615	100	55.583.590.615	100	53.580.590.615	100	53.580.590.615	Dinkes
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan		100	11.029.268.000	100	11.029.268.000	100	11.029.268.000	100	12.029.268.000	100	12.029.268.000	
			Sasaran 1.2.2													
			Meningkatnya kualitas dan pemerataan akses pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	8,44	8,76	22.389.413.350	8,89	22.576.813.350	9,01	19.576.813.350	9,14	18.187.400.000	9,14	18.187.400.000	

KODE			Tujuan/Sasaran/ Program Prioritas	Indikator Kinerja	Kondisi Awal RPD (2021)	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir RPD (Tahun 2026)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2023		2024		2025		2026				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
			Program pengelolaan pendidikan	Persentase pencapaian SPM Pendidikan Dasar		100	18.389.413.350	100	18.389.413.350	100	15.389.413.350	100	14.000.000.000	100	14.000.000.000	Dikbud
				Tingkat Partisipasi warga negara usia 5-6 tahun dalam Pendidikan Usia Dini												
				Tingkat Partisipasi warga negara usia 7-12 tahun dalam Pendidikan Dasar	97,96	99,5		99,75		99,8		100		100		
				Tingkat Partisipasi warga negara usia 12-15 tahun dalam Pendidikan Menengah Pertama	68,86	72,59		74,37		76,15		77,93		77,93		
			Program pendidik dan tenaga kependidikan	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan Yang memiliki ijazah Diploma (D.IV), S1, dan sertifikat pendidik pada satuan pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Non formal/ Kesetaraan		85	4.000.000.000	90	4.187.400.000	95	4.187.400.000	100	4.187.400.000	100	4.187.400.000	
			Sasaran 1.2.3													
			Meningkatnya standar hidup masvarakat	Pengeluaran Per Kapita	7.453.000	8.198.300	4.000.000.000	9.010.100	3.000.000.000	9.519.900	3.000.000.000	9.911.000	3.000.000.000	9.911.000	3.000.000.000	

KODE			Tujuan/Sasaran/ Program Prioritas	Indikator Kinerja	Kondisi Awal RPD (2021)	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir RPD (Tahun 2026)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2023		2024		2025		2026				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
			Program Pemerintahan dan Kesejahteraan rakyat	Persentase Fasilitas Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum		100	4.000.000.000	100	3.000.000.000	100	3.000.000.000	100	3.000.000.000	100	3.000.000.000	Sekretariat Daerah
			Sasaran 1.2.4													
			Meningkatnya pelayanan perpustakaan literasi	Cakupan Pelayanan Perpustakaan Literasi			729.517.779		729.517.779		729.517.779		729.517.779		729.517.779	
			Program pembinaan perpustakaan	Persentase ketermanfaatan perpustakaan oleh masyarakat	82,62	83,09	729.517.779	83,56	729.517.779	84,5	729.517.779	85,91	729.517.779	85,91	729.517.779	Dispursip
			Sasaran 1.2.5													
			Meningkatnya kesetaraan gender serta perlindungan perempuan dan anak	Indeks Pemberdayaan Gender (IPG)	71,79	76,35	150.750.000	77,56	150.750.000	78,76	150.750.000	79,97	150.750.000	79,97	150.750.000	
			Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan	Persentase Focal Point yang terbentuk di Daerah		100	150.750.000	100	150.750.000	100	150.750.000	100	150.750.000	100	150.750.000	DP3AP2KB
			Tujuan 1.3													
			Meningkatnya pemerataan dan kualitas pembangunan infrastruktur	Indeks Infrastruktur Daerah	60,57	62,41		63,56		64,71		65,99		65,99		
			Sasaran 1.3.1													
			Meningkatnya pemerataan dan kualitas pembangunan jalan dan jembatan untuk konektivitas wilayah	Persentase tingkat kemantapan jalan kabupaten			46.593.911.750		42.568.000.000		40.000.000.000		25.500.000.000		25.500.000.000	
			Program penyelenggaraan jalan	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten			46.593.911.750		42.568.000.000		40.000.000.000		25.500.000.000		25.500.000.000	Dinas PUPR

[illegible]

KODE			Tujuan/Sasaran/ Program Prioritas	Indikator Kinerja	Kondisi Awal RPD (2021)	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir RPD (Tahun 2026)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2023		2024		2025		2026				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
			Tersedianya Pelabuhan Laut yang memenuhi standar	Jumlah Pelabuhan Laut		12.678.950.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000							
			Program pengelolaan pelayaran	Presentase Sarana dan Prasarana Perhubungan Laut yg laik fungsi	100	12.678.950.000	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	Perhubungan	
			Tujuan 1.4													
			Meningkatnya Perekonomian Daerah	Laju Pertumbuhan Ekonomi	-2,98	2,84	2,95		3,07		3,19		3,19			
			Sasaran 1.4.1													
			Meningkatnya kesejahteraan petani/ nelayan	Nilai Tukar Petani		1.085.697.480	1.085.697.480	1.085.697.480	1.085.697.480		1.085.697.480		1.085.697.480			
			Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Jumlah Produksi hasil olahan hasil perikanan yang sesuai SSOP dan GMP	11,7 Ton	11,9 Ton	1.085.697.480	12,1 Ton	1.085.697.480	12,3 Ton	1.085.697.480	12,3 Ton	1.085.697.480	Dinas Perikanan		
			Sasaran 1.4.2													
			Meningkatnya PDRB sektor pertanian, Kehutanan dan perikanan	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, kehutanan dan perikanan	3,41	15.690.666.552	15.190.666.552	15.690.666.552	15.940.477.500		17.260.666.552					
			Program pengelolaan perikanan tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	10202,70 Ton	11248,48 Ton	2.427.487.585	11810,90 Ton	2.927.487.585	12401,45	3.427.487.585	13641,60 Ton	3.997.487.585	Dinas Perikanan		
			Program pengelolaan perikanan budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	439678	614345,19	2.926.626.179	644062,45	2.926.626.179	676955,58	2.926.626.179	744651,14 Ton	2.926.626.179	Dinas Perikanan		
			Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Persentase Produksi Pertanian	100	100	2.820.189.052	100	2.820.189.052	100	2.820.189.052	100	2.500.000.000	100	2.820.189.052	Dinas Pertanian

KODE			Tujuan/Sasaran/ Program Prioritas	Indikator Kinerja	Kondisi Awal RPD (2021)	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir RPD (Tahun 2026)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2023		2024		2025		2026				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
			Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Persentase Prasarana Pertanian Yang Digunakan	100	100	7.373.826.476	100	6.373.826.476	100	6.373.826.476	100	6.373.826.476	100	7.373.826.476	Dinas Pertanian
			Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Persentase Peningkatan Pencegahann Penyakit hewan / Ternak	100	100	142.537.260	100	142.537.260	100	142.537.260	100	142.537.260	100	142.537.260	Dinas Pertanian
			Sasaran 1.4.3													
			Meningkatnya ketahanan pangan	Indeks Ketahanan Pangan	61,9	76	2.334.287.070	80	1.720.003.950	85	1.570.003.950	90	1.605.003.950	90	1.605.003.950	
			Program pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Persentase Penyediaan Sarana pada Daerah Rawan Pangan		263,112897	1.114.283.120	118,0638	500.000.000	82,64463	350.000.000	90,90909	385.000.000	90,90909	385.000.000	Dinas Ketahanan Pangan
			Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Presentase Ketersediaan Pangan		100	1.220.003.950	100	1.220.003.950	100	1.220.003.950	100	1.220.003.950	100	1.220.003.950	Dinas Ketahanan Pangan
				Skor Pola Pangan Harapan (PPH)		75,1		82,6		90,9		100		100		
			Sasaran 1.4.4													
			Meningkatnya pertumbuhan sektor pariwisata terhadap perekonomian	Pertumbuha n PDRB sektor pariwisata	12,35		7.800.000.000		4.330.000.000		4.130.000.000		3.600.000.000		3.600.000.000	
			Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Persentase Peningkatan Jumlah Kunjungan wisatawan Mancanegara dan Wisatawan	81,79	100	3.830.000.000	100	3.530.000.000	100	3.530.000.000	100	3.000.000.000	100	3.000.000.000	Dinas Pariwisata

KODE			Tujuan/Sasaran/ Program Prioritas	Indikator Kinerja	Kondisi Awal RPD (2021)	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir RPD (Tahun 2026)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2023		2024		2025		2026				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				Nusantara												
			Program pemasaran pariwisata	Persentase Pemasaran Produk Parawisata didalam dan Luar Negeri	99,89	100	2.910.000.000	100	500.000.000	100	300.000.000	100	300.000.000	100	300.000.000	Dinas Pariwisata
			Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase Peningkatan Kualitas Sumber Daya Kepariwisatan dan EKRAF	96,37	100	1.060.000.000	100	300.000.000	100	300.000.000	100	300.000.000	100	300.000.000	Dinas Pariwisata
			Sasaran 1.4.5													
			Meningkatnya pertumbuhan sektor perindustrian terhadap perekonomian	Pertumbuhan PDRB sektor perindustrian	2,55		3.570.000.000		1.641.600.000		1.655.760.000		1.671.336.000		1.671.336.000	
			Program perencanaan dan pembangunan industri	Presentase Zona kawasan Industri potensial yang telah direncanakan		50	3.452.000.000	75	1.500.000.000	90	1.500.000.000	100	1.500.000.000	100	1.500.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
			Program pengendalian izin usaha industri kabupaten/kota	Persentase izin usaha industri yang diproses sesuai SOP		100	5.000.000	100	6.000.000	100	6.600.000	100	7.260.000	100	7.260.000	
			Program pengelolaan sistem informasi industri nasional	Presentase industri yang teridentifikasi melalui SIINAS		50	113.000.000	75	135.600.000	90	149.160.000	100	164.076.000	100	164.076.000	
			Sasaran 1.4.5													
			Meningkatnya daya saing daerah	Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)	1,028	1,48		1,86		2,23		2,61		2,61		

[illegible]

KODE			Tujuan/Sasaran/ Program Prioritas	Indikator Kinerja	Kondisi Awal RPD (2021)	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir RPD (Tahun 2026)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2023		2024		2025		2026				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
			Menurunnya tingkat ketimpangan pendapatan	Gini rasio	0,29	0,29		0,28		0,28		0,27		0,27		
				Tingkat inflasi	2,1	2,06	1.670.000.000	2,04	783.921.900	2,02	783.921.900	2	783.921.900	2	783.921.900	
			Program Perekonomian Dan Pembangunan	Persentase Fasilitas dan koordinasi peningkatan perekonomian rakyat		100	1.670.000.000	100	783.921.900	100	783.921.900	100	783.921.900	100	783.921.900	Sekretariat Daerah
			Tujuan 1.6													
			Terwujudnya pembangunan berwawasan lingkungan melalui pengelolaan potensi sumber daya alam dan ketahanan bencana	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	80,66	81,74	3.511.826.222	82,25	3.479.136.722	82,77	3.286.918.672	82,88	3.495.478.817	82,88	3.495.478.817	
			Sasaran 1.6.1													
			Terwujudnya keseimbangan pembangunan antara manusia dan lingkungan secara berkelanjutan	Indeks kualitas air	67,78	68,5	810.732.500	69	770.968.500	70	770.968.500	79	770.968.500	79	770.968.500	
				Indeks kualitas udara	94,06	94,5		95		95,5		96		96		
				Indeks kualitas tutupan lahan	68,13	68,5		69		69,5		70		70		
			Program perencanaan lingkungan hidup	Persentase Dokumen Perencanaan Lingkungan yang Disusun tepat Waktu, Tepat Proses, Tepat Isi	100	100	460.978.500	100	460.978.500	100	460.978.500	100	460.978.500	100	460.978.500	DLH

KODE			Tujuan/Sasaran/ Program Prioritas	Indikator Kinerja	Kondisi Awal RPD (2021)	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir RPD (Tahun 2026)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2023		2024		2025		2026				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
			Program pengendalian pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup	Persentase Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	100	100	159.990.000	100	159.990.000	100	159.990.000	100	159.990.000			
			Program pengelolaan keanekaragaman hayati (kehati)	Persentase Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	100	100	189.764.000	100	150.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000			
			Sasaran 1.6.2													
			Meningkatnya ketahanan bencana daerah melalui peningkatan kapasitas pemda dan masyarakat dalam penanggulangan bencana	Indeks resiko bencana	163	163	3.457.943.722	163	3.263.018.222	144	3.332.800.172	144	3.541.360.317			
			Program penanggulangan bencana	Persentase Penanganan Bencana alam tuntas	100	100	2.585.198.722	100	2.585.198.722	100	2.385.198.722	100	2.585.198.722	BPBD		
			Program penanganan bencana	Persentase Korban Bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten		78	70.745.000	85	77.819.500	90	85.601.450	95	94.161.595	Dinas Sosial		
			Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dalam waktu tanggap yang ditentukan	100	100	802.000.000	100	600.000.000	100	862.000.000	100	862.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja		



KODE			Tujuan/Sasaran/ Program Prioritas	Indikator Kinerja	Kondisi Awal RPD (2021)	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir RPD (Tahun 2026)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2023		2024		2025		2026				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	

BAB VII

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

7.1 Kerangka Pendanaan Pembangunan

Kerangka pendanaan pembangunan dan program Perangkat Daerah (PD) Kabupaten Banggai Kepulauan berisi skema dan asumsi kapasitas kemampuan pendanaan daerah dan program-program baik mencapai tujuan dan sasaran pembangunan maupun untuk pemenuhan layanan PD dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Adapun pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pagu indikatif selanjutnya dijadikan sebagai acuan PD dalam penyusunan Rencana Strategis PD, termasuk dalam menjabarkannya ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya.

Pencapaian target kinerja program (*outcome*) di masing-masing urusan sesungguhnya tidak hanya didukung oleh pendanaan yang bersumber dari APBD Kabupaten Banggai Kepulauan. Namun juga oleh sumber pendapatan lainnya (APBN, APBD Propinsi Sulawesi Tengah dan sumber - sumber pendanaan lainnya). Namun demikian, pencantuman pendanaan di dalam Tabel 7.1 hanya yang bersumber dari APBD Kabupaten Banggai Kepulauan.

Besaran kebutuhan pendanaan untuk kebutuhan 2023-2026 sangat menentukan besaran anggaran untuk membiayai setiap program pembangunan, olehnya proyeksi terhadap kebutuhan pendanaan dihitung dengan mempertimbangkan sejumlah informasi yang berkaitan dengan dinamika komponen realisasi pada pendapatan dan belanja. Proyeksi besaran kebutuhan pendanaan dan besaran kapasitas riil sebagaimana tercantum dalam bab 3 (tiga) dokumen RPD ini.

7.2 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan pada RPD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023-2026

Sub bab 7.2 menguraikan sejumlah program yang disajikan berdasarkan klasifikasi urusan yang menjadi kewenangan Kabupaten Banggai Kepulauan dalam rangka mewujudkan tujuan-sasaran-staregi dan arah kebijakan untuk periode perencanaan 2023-2026.

Uraian program pada sub bab 7.2 mempertimbangkan sejumlah program pembangunan yang menjadi kewenangan Kabupaten Banggai Kepulauan yang disusun, diklasifikasikan berdasarkan tujuan dari masing-masing urusan dan mempertimbangkan tujuan dari pembangunan berkelanjutan dan menyertakan target pencapaian pada tahun terakhir dokumen perencanaan disertai rincian target untuk setiap tahunnya. Penyajian sejumlah program pembangunan berdasarkan klasifikasi urusan dan program penunjang urusan pemerintah pada dokumen RPD Kabupaten Banggai Kepulauan periode 2023-2026 dapat dilihat pada Tabel 7.1 berikut.

Tabel 7.1
Indikasi Rencana Program Perangkat Daerah disertai Kebutuhan Pendanaan
Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023-2026

KODE				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Awal RPD (2021)	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir RPD (Tahun 2026)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
							2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			441.016.255.709		458.746.590.239		447.901.902.339		444.772.943.343				
1	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			179.242.745.650		195.342.978.880		202.440.448.812		210.197.467.235				
1	01	01		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ kota	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100	100	156.628.332.300	100	172.291.165.530	100	182.628.635.462	100	191.760.067.235	100	208.472.310.291	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02		Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase pencapaian SPM Pendidikan Dasar		100	18.389.413.350	100	18.389.413.350	100	15.389.413.350	100	14.000.000.000	100	14.000.000.000	
					Tingkat Partisipasi warga negara usia 5-6 tahun dalam Pendidikan Usia Dini												
					Jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang belum berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	2577	644		650		660		623		623		
					Tingkat Partisipasi warga negara usia 7-15 tahun dalam Pendidikan sekolah Dasar	97.96	99,5		99,75		99,8		100		100		
					Jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan Dasar	18079	4000		4479		4600		5000		5000		
					Rata-rata kemampuan literasi siswa SD berdasarkan asesmen nasional	1,55	1,65		1,75		1,85		1,95		1,95		
					Rata-rata kemampuan numerasi siswa SD berdasarkan asesmen nasional	1,45	1,65		1,75		1,85		1,95		1,95		
					Tingkat Partisipasi warga negara usia 12-15 tahun dalam Pendidikan Menengah Pertama	68,86	72,59		74,37		76,15		77,93		77,93		
					Rata-rata kemampuan literasi siswa SMP berdasarkan asesmen nasional	1,74	1,04		2,04		2,14		2,24		2,24		
					Rata-rata kemampuan numerasi siswa SMP berdasarkan asesmen nasional	1,59	1,69		1,79		1,89		1,99		1,99		

KODE			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Awal RPD (2021)	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir RPD (Tahun 2026)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2023		2024		2025		2026				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	1948	99,33		99,5		99,75		100		100		
				rata- rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan asesmen nasional	26,69	45,02		63,35		81,68		100		100		
1	01	03	Program Pengembangan Kurikulum	Jumlah Satuan Pendidikan Dasar yang menerapkan Kurikulum Muatan Lokal	0	24	200.000.000	72	400.000.000	110	200.000.000	220	200.000.000	220		200.000.000
1	01	04	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan Yang memiliki ijazah Diploma (D.IV), S1, dan sertifikat pendidik pada satuan pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Non formal/ Kesetaraan		85	4.000.000.000	90	4.187.400.000	95	4.187.400.000	100	4.187.400.000	100		4.187.400.000
				Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	48,72	48,78		48,82		48,87		48,92		48,92		
				Pertumbuhan proporsi guru PAUD formal dengan kualifikasi s1/DIV	20,85	23,77		24,74		25,66		26,59		26,59		
				Rasio pengawas dan penilik PAUD	0	3,20		3,40		3,60		3,80		3,80		
1	01	06	Program Pengembangan Bahasa Dan Sastra	persentase sekolah yang efektif mengembangkan bahasa dan sastra melalui kurikulum muatan lokal		10,91	25.000.000	32,73	75.000.000	50,00	35.000.000	100	50.000.000		50.000.000	
1	02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				123.573.887.668		128.689.990.573		131.537.703.769		133.750.946.027		133.750.946.027	
1	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ kota	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100	100	53.161.029.053	100	58.477.131.958	100	64.324.845.154	100	67.541.087.412	100	67.541.087.412	Dinas Kesehatan
1	02	02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Capaian SPM bidang Kesehatan		100	58.583.590.615	100	58.583.590.615	100	55.583.590.615	100	53.580.590.615	100	53.580.590.615	
1	02	03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan		60	11.029.268.000	70	11.029.268.000	80	11.029.268.000	90	12.029.268.000	90	12.029.268.000	

KODE			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Awal RPD (2021)	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir RPD (Tahun 2026)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2023		2024		2025		2026				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	02	04	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Persentase pemenuhan sediaan farmasi, alat kesehatan, makanan dan minuman		100	500.000.000	100	500.000.000	100	500.000.000	100	500.000.000	100	500.000.000	
1	02	05	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Upaya Promotif dan Preventif		100	300.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	
1	03		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			104.093.227.787		98.995.589.843		76.518.834.994		61.545.964.634				
1	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ kota	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100	100	8.386.020.873	100	9.224.622.960	100	9.962.592.797	100	10.460.722.437	100	10.460.722.437	Dinas pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	02	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi		100	5.092.800.000	100	3.000.000.000	100	3.000.000.000	100	2.029.000.000	100	2.029.000.000	
1	03	03	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	presentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan dan Bukan Jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga	86,27	100	15.777.420.253	100	14.777.420.253	100	10.047.842.567	100	10.047.842.567	100	10.047.842.567	
1	03	04	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase prasarana pengolahan persampahan yang tersedia	0	0		50	10.000.000.000	75	2.000.000.000	100	2.000.000.000	100	2.000.000.000	
1	03	05	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase rumah tinggal bersanitasi	79,21	100	4.899.947.000	100	3.899.947.000	100	1.500.000.000	100	1.500.000.000	100	1.500.000.000	
1	03	06	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Drainase berfungsi Baik		100	1.500.000.000	100	1.500.000.000	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	
1	03	07	Program Pengembangan Permukiman	Persentase jalan lingkungan/ setapak berfungsi baik kawasan pemukiman		80	2.017.200.000	85	2.017.200.000	90	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	
1	03	08	Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase bangunan yang memiliki persetujuan bangunan gedung		100	15.104.076.880	100	10.000.000.000	100	6.000.000.000	100	5.000.000.000	100	5.000.000.000	
1	03	10	Program Penyelenggaraan Jalan	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten	77,73	100	46.593.911.750	100	42.568.000.000	100	40.000.000.000	100	25.500.000.000	100	25.500.000.000	
1	03	11	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Rasio tenaga operator/teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi		100	920.000.000	100	1.008.399.630	100	1.008.399.630	100	1.008.399.630	100	1.008.399.630	

KODE			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Awal RPD (2021)	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir RPD (Tahun 2026)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2023		2024		2025		2026				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	03	12	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang	100	100	3.801.851.031	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	2.000.000.000	100	2.000.000.000	
1	04		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				14.490.310.378		15.120.907.586		15.552.520.944		15.858.538.750		15.858.538.750	
1	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ kota	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100	100	5.058.145.554	100	5.563.960.109	100	6.120.356.120	100	6.426.373.926	100	6.426.373.926	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1	04	02	Program Pengembangan Perumahan	cakupan penerapan SPM Bidang Perumahan Rakyat	100	100	511.741.000	100	511.741.000	100	511.741.000	100	511.741.000	100	511.741.000	
1	04	03	Program Kawasan Permukiman	Persentase penyediaan perencanaan kawasan permukiman	100	100	5.087.646.477	100	5.087.646.477	100	5.087.646.477	100	5.087.646.477	100	5.087.646.477	
1	04	04	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	luas Kawasan Permukiman Kumuh kewenangan kabupaten yang ditangani	100	100	2.060.000.000	100	2.060.000.000	100	2.060.000.000	100	2.060.000.000	100	2.060.000.000	
1	04	05	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	Presentase Perumahan yang sudah dilengkapi PSU	100	100	1.772.777.347	100	1.897.560.000	100	1.772.777.347	100	1.772.777.347	100	1.772.777.347	
1	05		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				12.730.286.928		13.648.873.748		14.459.319.251		15.622.420.134		15.622.420.134	
1	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ kota	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100	100	5.644.203.900	100	6.067.132.290	100	6.602.608.519	100	7.196.165.201	100	7.196.165.201	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	02	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Presentase gangguan transtibun yang dapat diselesaikan	100	100	644.800.000	100	1.037.050.000	100	914.070.000	100	914.070.000	100	914.070.000	
	05	04	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dalam waktu tanggap yang ditentukan	100	100	802.000.000	100	600.000.000	100	862.000.000	100	862.000.000	100	862.000.000	
	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ kota	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100	100	3.054.084.306	100	3.359.492.736	100	3.695.442.010	100	4.064.986.211	100	4.064.986.211	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	03	Program Penanggulangan Bencana	Persentase Penanganan Bencana alam tuntas	100	100	2.585.198.722	100	2.585.198.722	100	2.385.198.722	100	2.585.198.722	100	2.585.198.722	
1	06		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				6.885.797.298		6.948.249.608		7.393.074.569		7.797.606.564			

KODE			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Awal RPD (2021)	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir RPD (Tahun 2026)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2023		2024		2025		2026				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ kota	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran		100	3.503.118.280	100	3.853.430.108	100	4.238.773.119	100	4.577.874.969	100	4.577.874.969	Dinas Sosial
1	06	02	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase PSKS dan KAT yang diberdayakan dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial		86	1.561.900.000	92	1.500.000.000	96	1.500.000.000	95	1.500.000.000	95	1.500.000.000	
1	06	04	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya		84	1.280.034.018	90	1.000.000.000	95	1.000.000.000	95	1.000.000.000	95	1.000.000.000	
1	06	05	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase Fakir Miskin yang tertangani Yang mandiri		80	470.000.000	85	517.000.000	95	568.700.000	95	625.570.000	95	625.570.000	
1	06	06	Program Penanganan Bencana	Persentase Korban Bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten		78	70.745.000	85	77.819.500	90	85.601.450	95	94.161.595	95	94.161.595	
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				78.265.815.895		67.289.861.310		71.613.265.659		75.930.694.103			
2	07		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				3.928.848.012		4.246.234.028		4.583.312.524		4.890.542.188			
1	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ kota	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100	100	3.173.860.162	100	3.491.246.178	100	3.840.370.796	100	4.147.600.460	100	4.147.600.460	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07	03	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	70,77	71,18	400.000.000	71,38	400.000.000	74,95	387.953.878	78,70	387.953.878	78,70	387.953.878	
2	07	04	Program Penempatan Tenaga Kerja	Presentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah Kabupaten	100	100	254.987.850	100	254.987.850	100	254.987.850	100	254.987.850	100	254.987.850	
2	07	05	Program Hubungan Industrial	Persentase Kasus hubungan industrial yang diselesaikan	100	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	
2	08		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				5.042.727.115		5.526.999.826		6.059.699.808		6.528.475.794		6.528.475.794	
1	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ kota	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran		100	4.241.727.115	100	4.725.999.826	100	5.258.699.808	100	5.727.475.794	100	5.727.475.794	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pengendalian

KODE			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Awal RPD (2021)	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir RPD (Tahun 2026)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2023		2024		2025		2026				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
2	08	02	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Focal Point yang terbentuk di Daerah		25%	150.750.000	40%	150.750.000	55%	150.750.000	80%	150.750.000	80%	150.750.000	Penduduk dan Keluarga Berencana
2	08	03	Program Perlindungan Perempuan	Rasio kekerasan terhadap perempuan	100	100	150.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	
2	08	04	Program Peningkatan Kualitas Keluarga			35%	100.250.000	40%	100.250.000	50%	100.250.000	60%	100.250.000	60%	100.250.000	
2	08	05	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Persentase ketersediaan data gender dan anak	25%	30%	150.000.000	40%	150.000.000	55%	150.000.000	70%	150.000.000	70%	150.000.000	
2	08	06	Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	Nilai indikator kabupaten layak anak	15%	25%	100.000.000	40%	100.000.000	50%	100.000.000	75%	100.000.000	75%	100.000.000	
2	08	07	Program Perlindungan Khusus Anak	Presentase anak korban kekerasan yang ditangani	100	100	150.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	
2	09		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN				6.212.067.725		5.920.562.671		6.125.618.543		6.473.067.710		6.473.067.710	
1	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ kota	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100	100	3.227.780.655	100	3.550.558.721	100	3.905.614.593	100	4.218.063.760	100	4.218.063.760	Dinas Ketahanan Pangan
2	09	02	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Persentase Penyediaan Sarana pada Daerah Rawan Pangan		263	1.114.283.120	118	500.000.000	83	350.000.000	91	385.000.000	91	423.500.000	
2	09	03	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Presentase Ketersediaan Pangan		100	1.220.003.950	100	1.220.003.950	100	1.220.003.950	100	1.220.003.950	100	1.220.003.950	
				Skor Pola Pangan Harapan (PPH)		75		83		91		100		100		
2	09	04	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Presentase Daerah Rentan Rawan Pangan yang ditangani		75	500.000.000	83	500.000.000	91	500.000.000	100	500.000.000	100	500.000.000	
2	09	05	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Cakupan Pengawasan Keamanan Pangan		75	150.000.000	83	150.000.000	91	150.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	
2	10		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN				1.801.020.100		286.020.100		286.020.100		286.020.100		286.020.100	
2	10	05	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Persentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan		100	1.500.000.000	100		100		100		100		Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
2	10	10	Program Penatagunaan Tanah	Persentase layanan penatagunaan tanah Dalam kurun waktu tertentu		100	136.020.100	100	136.020.100	100	136.020.100	100	136.020.100	100	136.020.100	
2	10	12	Program Pengurusan Hak Hak Atas Tanah	Persentase layanan pengurusan hak atas tanah		100	25.000.000	100	25.000.000	100	25.000.000	100	25.000.000	100	25000000	
2	10	13	Program Survei, Pengukuran Dan Pemetaan	Persentase pengukuran dan pemetaan tanah milik pemerintah daerah		100	75.000.000	100	75.000.000	100	75.000.000	100	75.000.000	100	75.000.000	

KODE			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Awal RPD (2021)	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir RPD (Tahun 2026)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2023		2024		2025		2026				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
2	10	17	Program Penanganan Konflik, Sengketa Dan Perkara Pertanahan	Persentase penanganan konflik sengketa dan perkara pertanahan milik pemerintah daerah		100	65.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50000000	
2	11		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				5.713.827.130		5.719.984.473		6.006.953.070		6.241.485.436		4.241.485.436	
1	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ kota	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100	100	2.608.805.430	100	2.869.685.973	100	3.156.654.570	100	3.409.186.936	100	3.409.186.936	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	02	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase Dokumen Perencanaan Lingkungan yang Disusun tepat Waktu, Tepat Proses, Tepat Isi	100	100	460.978.500	100	460.978.500	100	460.978.500	100	460.978.500	100	460.978.500	
2	11	03	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	100	100	159.990.000	100	159.990.000	100	159.990.000	100	159.990.000	100	159.990.000	
2	11	04	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	100	100	189.764.000	100	150.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	
2	11	05	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LIMBAH B3) yang dikendalikan	100	100	20.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000	100	2.000.000	100	2000000	
2	11	06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	Persentase pemenuhan ketentuan pengelolaan lingkungan terhadap izin lingkungan dan IPPLH yang diterbitkan	100	100	14.850.000	100	14.850.000	100	14.850.000	100	14.850.000	100	14.850.000	
2	11	07	Program pengakuan keberadaan masyarakat hokum adat (MHA), kearifan local dan hak MHA yang terkait dengan PPLH	Persentase data dan informasi MHA serta Jenis Kearifan Lokal yang di Akui		100	30.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	
2	11	08	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	100	100	44.480.000	100	44.480.000	100	44.480.000	100	44.480.000	100	44.480.000	
2	11	09	Program penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	Persentase Masyarakat yang memperoleh Penghargaan Lingkungan Hidup		100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	
2	11	10	Program penanganan pengaduan lingkungan hidup	Persentase pengaduan permasalahan lingkungan hidup yang tertangani		100	20.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000	
2	11	11	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase Pengelolaan Sampah di wilayah Kabupaten	100	100	2.154.959.200	100	1.940.000.000	100	1.940.000.000	100	1.940.000.000	100	1.940.000.000	

Dinas Lingkungan Hidup

KODE			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Awal RPD (2021)	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir RPD (Tahun 2026)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2023		2024		2025		2026				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
2	1	2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				4.162.164.400		4.570.880.840		5.020.468.924		5.416.106.438		5.416.106.438	
1	0	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ kota	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100	100	3.707.915.400	100	4.078.706.940	100	4.486.577.634	100	4.935.235.397	100	4.935.235.397	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2	1	2	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase kepemilikan KTP elektronik	96,84	100	128.320.000	100	141.152.000	100	155.267.200	100	138.434.542	100	138.434.542	
2	1	2	Program Pencatatan Sipil	Persentase Kepemilikan Akte Pencatatan Sipil		100	127.369.000	100	140.105.000	100	154.116.490	100	136.253.139	100	136.253.139	
2	1	2	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Tingkat keserasian database yang valid	100	100	123.560.000	100	135.916.000	100	149.507.600	100	131.183.360	100	131.183.360	
2	1	2	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase peningkatan ketersediaan data profil sesuai ketentuan	100	100	75.000.000	100	75.000.000	100	75.000.000	100	75.000.000	100	75.000.000	
2	1	3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				5.471.683.742		5.805.805.158		6.173.338.715		6.496.768.246			
1	0	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ kota	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100	100	3.341.214.159	100	3.675.335.575	100	4.042.869.132	100	4.366.298.663	100	4.366.298.663	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
2	1	3	Program Penataan Desa	Persentase Peningkatan tata Kelola Desa Yang Baik												
2	1	3	Program Peningkatan Kerja Sama Desa	Persentase Kerjasama antar Desa	-	50	50.000.000	70	50.000.000	95	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	
2	1	3	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Administrasi Pemerintahan Desa yang Tertib, Transparan dan Akuntabel	100	100	1.361.474.851	100	1.361.474.851	100	1.361.474.851	100	1.361.474.851	100	1.361.474.851	
2	1	3	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif	25	50	718.994.732	75	718.994.732	90	718.994.732	100	718.994.732	100	718.994.732	
2	1	4	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				4.066.494.000		3.122.065.300		3.122.065.300		3.122.065.300		3.122.065.300	
2	1	4	Program Pengendalian Penduduk	Menurunnya Angka Kelahiran Total (TFR)	0,80%	0,80%	122.065.300	0,8%	122.065.300	0,8%	122.065.300	0,8%	122.065.300	0,8%	122.065.300	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	1	4	Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (mCPR)	73,81%	75%	2.858.548.700	76%	2.000.000.000	80%	2.000.000.000	85%	2.000.000.000	85%	2.000.000.000	
2	1	4	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	Persentase keluarga pra sejahtera ke keluarga sejahtera	81%	81%	1.085.880.000	81%	1.000.000.000	81%	1.000.000.000	81%	1.000.000.000	81%	1.000.000.000	
2	1	5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				19.490.175.925		8.239.510.843		8.710.624.252		9.125.204.052			

KODE			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Awal RPD (2021)	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir RPD (Tahun 2026)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2023		2024		2025		2026				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ kota	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran		100	4.282.849.175	100	4.711.134.093	100	5.182.247.502	100	5.596.827.302	100	5.596.827.302	Dinas Perhubungan
2	15	02	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	Tingkat Kelancaran Keamanan dan Keselamatan bagi Pengguna Jalan		100	2.528.376.750	100	2.528.376.750	100	2.528.376.750	100	2.528.376.750	100	2.528.376.750	
2	15	03	Program Pengelolaan Pelayaran	Presentase Sarana dan Prasarana Perhubungan Laut yg laik fungsi		100	12.678.950.000	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	
2	16		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				4.890.851.298		5.167.482.925		5.471.777.715		5.739.557.130			
1	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ kota	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100	100	2.766.316.273	100	3.042.947.900	100	3.347.242.690	100	3.615.022.105	100	3.615.022.105	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	02	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Presentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	0	100	250.000.000	100	250.000.000	100	250.000.000	100	250.000.000	100	250.000.000	
2	16	03	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Presentase Perangkat Daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan kominfo	23,07	100	1.874.535.025	100,0	1.874.535.025	100,00	1.874.535.025	100	1.874.535.025	100	1.874.535.025	
2	17		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				4.792.821.086		5.020.153.195		5.484.883.514		5.893.846.195			
	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ kota	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100	100	4.224.821.086	100	4.647.303.195	100	5.112.033.514	100	5.520.996.195	100	5.520.996.195	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM
2	17	02	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam yang diterbitkan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota												
2	17	03	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Kabupaten	100	100	150.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	
2	17	04	Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usip Koperasi	Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannyauntuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	100	100		100		100		100		100		
2	17	05	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten	100	100	68.000.000	100	68.000.000	100	68.000.000	100	68.000.000	100	68.000.000	

KODE			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Awal RPD (2021)	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir RPD (Tahun 2026)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2023		2024		2025		2026				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
2	17	06	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Persentase jumlah anggota Koperasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasianuntuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	100	100		100		100		100		100		
2	17	07	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkh)	Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	100	100	200.000.000	100	79.850.000	100	79.850.000	100	79.850.000	100	79.850.000	
2	17	08	Program Pengembangan Umkm	Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	100	100	150.000.000	100	75.000.000	100	75.000.000	100	75.000.000	100	75.000.000	
2	18		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				4.694.805.650		5.085.893.765		5.436.056.692		5.894.663.987			
1	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ kota	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100	100	3.910.881.150	100	4.301.969.265	100	4.732.166.192	100	5.110.739.487	100	5.110.739.487	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	02	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Presentase peningkatan investasi	100	100	76.890.500	100	76.890.500	100	76.890.500	100	76.890.500	100	76.890.500	
2	18	03	Program Promosi Penanaman Modal	Kegiatan Pameran Penanaman Modal	100	100	77.000.000	100	77.000.000	100	77.000.000	100	77.000.000	100	77.000.000	
2	18	04	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Penyelesaian Perizinan dan Non Perizinan sesuai SOP	100	100	164.380.000	100	164.380.000	100	150.000.000	100	164.380.000	100	164.380.000	
2	18	05	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Perusahaan yang taat melaporkan LKPM	100	100	465.654.000	100	465.654.000	100	400.000.000	100	465.654.000	100	465.654.000	
2	18	06	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Cakupan Pemanfaatan IT untuk Layanan Perizinan dan Non Perizinan												
2	19		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				3.713.685.848		3.994.854.480		4.204.140.326		4.576.311.212			
1	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ kota	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran		100	2.811.686.325	100	3.092.854.957	100	3.402.140.453	100	3.674.311.689	100	3.674.311.689	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	19	02	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri			349.999.650		349.999.650		250.000.000		349.999.650		349.999.650	
2	19	03	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase Sarana dan Prasarana Olah Raga yang Berstandarisasi			531.999.873		531.999.873		531.999.873		531.999.873		531.999.873	
2	19	04	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persentase Jumlah Kegiatan pramuka yang difasilitasi		100	20.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000	
2	20		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000			

KODE			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Awal RPD (2021)	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir RPD (Tahun 2026)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2023		2024		2025		2026				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
2	2	0	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Presentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah		100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	2	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				-		-		-		-			
2	2	0	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Tingkat keamanan informasi pemerintah												Dinas Komunikasi dan Informatika
2	2	2	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan				219.740.000		219.740.000		219.740.000		219.740.000			
2	2	0	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang telah dikembangkan			19.740.000		19.740.000		19.740.000		19.740.000		19.740.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	2	0	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase Kesenian Tradisional yang telah dikembangkan												
2	2	0	Program Pembinaan Sejarah	Persentase sejarah lokal yang telah dikembangkan												
2	2	0	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase Cagar Budaya yang dikelola dan dilestarikan			200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000	
2	2	0	Program Pengelolaan Permuseuman	Persentase pengelolaan Permuseuman yang telah dikembangkan												
2	2	3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN				3.864.903.865		4.178.442.473		4.523.334.943		4.826.840.316			
1	0	0	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ kota	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100	100	3.135.386.086	100	3.448.924.694	100	3.793.817.164	100	4.097.322.537	100	4.097.322.537	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	2	0	Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase ketermanfaatan perpustakaan oleh masyarakat	82,62	83,09	729.517.779	83,56	729.517.779	84,50	729.517.779	85,91	729.517.779	85,91	729.517.779	
2	2	0	Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	persentase koleksi nasional dan naskah kuno yang dilestarikan												
2	2	4	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN				100.000.000		85.231.234		85.231.234		100.000.000			
2	2	0	Program Pengelolaan Arsip	tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban		100	100.000.000	100	85.231.234	100	85.231.234	100	100.000.000	100	100.000.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
				Persentase penerapan arsip secara baku	10	20		26		36		46		46		

KODE			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Awal RPD (2021)	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir RPD (Tahun 2026)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2023		2024		2025		2026				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
2	24	03	Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	tingkat perlindungan dan penyelamatan arsip statis sesuai NSPK												
2	24	04	Program Perizinan Penggunaan Arsip	cakupan penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan oleh lembaga kearsipan kabupaten yang sesuai NSPK												
3	24		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			47.936.990.465		43.111.447.590		45.342.750.428		46.404.803.342				
3	25		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN			10.697.547.536		11.623.321.165		12.591.672.157		13.573.821.030				
1	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ kota	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100	100	4.257.736.292	100	4.683.509.921	100	5.151.860.913	100	5.564.009.786	100	5.564.009.786	Dinas Perikanan
3	25	03	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	10202,70 Ton	11248,48 Ton	2.427.487.585	11810,90 Ton	2.927.487.585	12401,45	3.427.487.585	13641,60 Ton	3.997.487.585	13641,60 Ton	3.997.487.585	
3	25	04	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	439.678	614345,19	2.926.626.179	644062,45	2.926.626.179	676955,58	2.926.626.179	744651,14 Ton	2.926.626.179	744651,14 Ton	2.926.626.179	
3	25	06	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah Produksi hasil olahan hasil perikanan yang sesuai SSOP dan GMP	11,7 Ton	11,9 Ton	1.085.697.480	12,1 Ton	1.085.697.480	12,3 Ton	1.085.697.480	12,3 Ton	1.085.697.480	12,3 Ton	1.085.697.480	
3	26		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA			12.115.084.651		8.319.593.116		8.498.552.427		8.176.980.049				
1	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ kota	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100	100	3.445.084.651	100	3.789.593.116	100	4.168.552.427	100	4.376.980.049	100	4.376.980.049	Dinas Pariwisata
3	26	02	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase Peningkatan Jumlah Kunjungan wisatawan Mancanegara dan Wisatawan Nusantara	81,79	100	3.830.000.000	100	3.530.000.000	100	3.530.000.000	100	3.000.000.000	100	3.000.000.000	
3	26	03	Program Pemasaran Pariwisata	Persentase Pemasaran Produk Parawisata didalam dan Luar Negeri	99,89	100	2.910.000.000	100	500.000.000	100	300.000.000	100	300.000.000	100	300.000.000	
3	26	04	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persentase Peningkatan Kualitas Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	0	100	870.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	
3	26	05	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Persentase Peningkatan Kualitas Sumber Daya Kepariwisataan dan EKRAF	96,37	100	1.060.000.000	100	300.000.000	100	300.000.000	100	300.000.000	100	300.000.000	

KODE			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Awal RPD (2021)	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir RPD (Tahun 2026)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2023		2024		2025		2026				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
3	2	7	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				20.339.360.396		20.311.935.427		21.381.767.961		21.767.668.381			
1	0	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ kota	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran		100	9.725.750.308	100	10.698.325.339	100	11.768.157.873	100	12.474.247.345	100	12.474.247.345	Dinas Pertanian
3	2	7	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Produksi Pertanian	100	100	2.820.189.052	100	2.820.189.052	100	2.820.189.052	100	2.500.000.000	100	2.820.189.052	
3	2	7	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Prasarana Pertanian Yang Digunakan	100	100	7.373.826.476	100	6.373.826.476	100	6.373.826.476	100	6.373.826.476	100	7.373.826.476	
3	2	7	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Peningkatan Pencegahann Penyakit hewan / Ternak	100	100	142.537.260	100	142.537.260	100	142.537.260	100	142.537.260	100	142.537.260	
3	2	7	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Fasilitas Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian												
3	2	7	Program Perizinan Usaha Pertanian	Persetase Peningkatan Jasa Usaha Pertanian												
3	2	7	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase Pendampingan Penyuluhan Terhadap Pelaksanaan Intervensi Kegiatan Pemberdayaan Bagi Petani	100	100	277.057.300	100	277.057.300	100	277.057.300	100	277.057.300	100	277.057.300	
3	3	0	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				1.214.997.883		1.214.997.883		1.214.997.883		1.214.997.883			
3	3	0	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin												Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM
3	3	0	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Sarana Distribusi yang tertata dan memadai		100	1.096.149.000	100	1.096.149.000	100	1.096.149.000	100	1.096.149.000	100	1.096.149.000	
3	3	0	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Persentase koefisien variasi harga antar waktu		100	78.848.883	100	78.848.883	100	78.848.883	100	78.848.883	100	78.848.883	
3	3	0	Program Pengembangan Ekspor	Persentase Pertumbuhan Produk yang diekspor												
3	3	0	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku		100	40.000.000	100	40.000.000	100	40.000.000	100	40.000.000	100	40.000.000	
3	3	0	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase Produk Dalam Negeri yang dikonsumsi/ digunakan oleh Masyarakat												

KODE				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Awal RPD (2021)	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir RPD (Tahun 2026)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
							2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
3	3	1		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN			3.570.000.000		1.641.600.000		1.655.760.000		1.671.336.000				
3	3	1	0	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Presentase Zona kawasan Industri potensial yang telah direncanakan	50	3.452.000.000	75	1.500.000.000	90	1.500.000.000	100	1.500.000.000	100	2.000.000.000	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM	
3	3	1	0	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Persentase izin usaha industri yang diproses sesuai SOP	100	5.000.000	100	6.000.000	100	6.600.000	100	7.260.000	100	7.986.000		
3	3	1	0	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Presentase industri yang teridentifikasi melalui SIINAS	50	113.000.000	75	135.600.000	90	149.160.000	100	164.076.000	100	180.483.600		
3	3	2		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI													
3	3	2	0	Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Persentase Kawasan Transmigrasi yang direncanakan											Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
3	3	2	0	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persentase Transmigran Yang Dibina Dan Dilatih												
3	3	2	0	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Persentase Kawasan Transmigrasi yang dikembangkan												
4				UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			70.376.013.704		71.432.984.667		77.337.769.539		80.234.927.554				
4	0	1		SEKRETARIAT DAERAH			42.176.117.285		42.940.100.900		46.855.718.800		49.440.026.614				
	0	1	0	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ kota	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100	36.506.117.285	100	39.156.179.000	100	43.071.796.900	100	45.656.104.714	100	45.656.104.714	Sekretariat Daerah	
4	0	1	0	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Fasilitas Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	100	4.000.000.000	100	3.000.000.000	100	3.000.000.000	100	3.000.000.000	100	3.000.000.000		
4	0	1	0	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Persentase Fasilitas dan koordinasi peningkatan perkeonomian rakyat	100	1.670.000.000	100	783.921.900	100	783.921.900	100	783.921.900	100	783.921.900		
4	0	1		Sekretariat Dprd			28.199.896.419		28.492.883.767		30.482.050.739		30.794.900.940		30.794.900.940		
	0	1	0	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ kota	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100	100	17.097.229.768	100	17.236.789.769	100	18.830.737.089	100	18.015.060.790	100	18.015.060.790	Sekretariat DPRD
4	0	1	0	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	Persentase Rapat rapat Dewan yang tepat waktu, tepat tindak lanjut dan tepat sasaran	100	100	11.102.666.650	100	11.256.093.998	100	11.651.313.650	100	12.779.840.150	100	12.779.840.150	
5				UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			205.270.979.300		207.999.532.941		211.725.289.997		214.246.018.302				

KODE			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Awal RPD (2021)	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir RPD (Tahun 2026)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2023		2024		2025		2026				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
5	0	1	PERENCANAAN				7.910.110.688		8.034.231.131		8.942.033.932		9.233.355.968		9.233.355.968	
1	0	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ kota	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100	100	5.390.110.688	100	5.929.121.756	100	6.522.033.932	100	6.913.355.968	100	6.913.355.968	Bappeda dan Litbang
5	0	2	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan pembangunan yang tepat waktu, tepat proses dan tepat isi	100	100	1.220.000.000	100	985.109.375	100	1.300.000.000	100	1.200.000.000	100	1.200.000.000	
5	0	1	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Renja PD Mitra Yang Di Susun Tepat Waktu, Tepat Proses Dan Tepat Isi	100	100	1.300.000.000	100	1.120.000.000	100	1.120.000.000	100	1.120.000.000	100	1.120.000.000	
5	0	2	KEUANGAN				190.757.120.402		192.838.528.177		195.343.351.900		197.263.135.440			
1	0	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ kota	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100	100	17.262.862.707	100	18.989.148.978	100	20.888.063.876	100	22.141.347.708	100	22.141.347.708	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	0	2	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Penyusunan Rancangan APBD dan APBD Perubahan yang tepat waktu, tepat proses, tepat isi	100	100	166.490.290.950	100	166.490.290.950	100	166.490.290.950	100	166.490.290.950	100	166.490.290.950	
5	0	3	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Barang milik Daerah yang memiliki Bukti Dokumen kepemilikan	100	100	495.704.700	100	300.000.000	100	300.000.000	100	300.000.000	100	300.000.000	
	0	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ kota	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100	100	5.508.262.045	100	6.059.088.250	100	6.664.997.074	100	7.331.496.782	100	7.331.496.782	Badan Pendapatan Daerah
5	0	4	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase peningkatan pendapatan asli daerah	100	100	1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000	
5	0	3	KEPEGAWAIAN				5.953.579.075		6.376.773.633		6.842.287.646		7.149.526.894			
1	0	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ kota	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100	100	4.231.945.575	100	4.655.140.133	100	5.120.654.146	100	5.427.893.394	100	5.427.893.394	Badan Kepegawaian dan Pengembara

KODE			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Awal RPD (2021)	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir RPD (Tahun 2026)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2023		2024		2025		2026				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
5	03	02	Program Kepegawaian Daerah	Persentase kualitas data, layanan kepegawaian dan kinerja pegawai		100	1.721.633.500	100	1.721.633.500	100	1.721.633.500	100	1.721.633.500	100	1.721.633.500	n Sumber Daya Manusia
5	04		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				300.000.000	-	300.000.000	-	200.000.000	-	200.000.000			
5	04	02	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase kompetensi sumber daya aparatur			300.000.000		300.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	05		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				350.169.135		450.000.000		397.616.519		400.000.000			
5	05	02	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Persentase Hasil kelitbangan yang diitindaklanjuti/ dimanfaatkan oleh Perangkat Daerah			350.169.135		450.000.000		397.616.519		400.000.000		400.000.000	Bappeda dan Litbang
6			UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN				7.687.185.150		8.143.939.915		8.701.370.157		9.069.274.116			
6	01		INSPEKTORAT DAERAH				7.687.185.150		8.143.939.915		8.701.370.157		9.069.274.116			
1	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ kota	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100	100	5.067.547.650	100	5.574.302.415	100	6.131.732.657	100	6.499.636.616	100	6.499.636.616	Inspektorat
6	01	02	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah	100	100	2.269.637.500	100	2.269.637.500	100	2.269.637.500	100	2.269.637.500	100	2.269.637.500	
6	01	03	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Persentase penurunan Temuan Hasil pengawasan	100	100	350.000.000	100	300.000.000	100	300.000.000	100	300.000.000	100	300.000.000	
7			UNSUR KEWILAYAHAN				30.252.000.000		31.254.000.000		32.376.000.000		31.376.000.000			
7	01		KECAMATAN				30.252.000.000		31.254.000.000		32.376.000.000		31.376.000.000			
	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ kota	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100	100	27.171.000.000	100	28.071.327.000	100	29.081.930.000	100	28.180.773.000	100	28.180.773.000	Kecamatan
7	01	02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan kewenangan kecamatan dan pelayanan publik yang dilimpahkan kepada camat	100	100	120.000.000	100	123.960.000	100	128.304.000	100	124.452.000	100	124.452.000	

KODE			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Awal RPD (2021)	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir RPD (Tahun 2026)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2023		2024		2025		2026				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
7	01	03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan	100	100	2.685.000.000	100	2.773.605.000	100	2.870.686.000	100	2.784.563.000	100	2.784.563.000	
7	01	04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase peningkatan ketenteraman dan ketertiban masyarakat	100	100	84.000.000	100	86.772.000	100	89.808.000	100	87.108.000	100	87.108.000	
7	01	05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan berdasarkan penugasan kepala daerah	100	100	96.000.000	100	99.168.000	100	102.636.000	100	99.552.000	100	99.552.000	
7	01	06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase peningkatan kinerja pemerintahan desa	100	100	96.000.000	100	99.168.000	100	102.636.000	100	99.552.000	100	99.552.000	
8			UNSUR PEMERINTAHAN UMUM				5.819.384.378		5.966.980.660		6.267.701.926		6.552.102.004		6.552.102.004	
8	01		Kesatuan Bangsa Dan Politik				5.819.384.378		5.966.980.660		6.267.701.926		6.552.102.004		6.552.102.004	
	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ kota	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100	100	3.719.384.378	100	3.866.980.660	100	4.167.701.926	100	4.452.102.004	100	4.452.102.004	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	02	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Wawasan Kebangsaan	100	100	250.000.000	100	250.000.000	100	250.000.000	100	250.000.000	100	250.000.000	
8	01	03	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pendidikan politik	100	100	1.350.000.000	100	1.350.000.000	100	1.350.000.000	100	1.350.000.000	100	1.350.000.000	
8	01	04	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase organisasi kebudayaan dan kemasyarakatan yang aktif	100	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	
8	01	05	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Cakupan Pelaksanaan Pencegahan Penyakit Masyarakat (PEKAT)	100	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	
8	01	06	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik Sosial	100	100	300.000.000	100	300.000.000	100	300.000.000	100	300.000.000	100	300.000.000	
Total Anggaran							886.624.624.601		893.945.337.323		901.266.050.044		908.586.762.765			



BAB VIII

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Berdasarkan Permendagri 86 Tahun 2017 bahwa penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.

Sesuai dengan surat edaran bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 050/3499/SJ dan Nomor 3 Tahun 2021 tentang penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024, dilakukan penyelarasan indikator makro yang dimaksudkan untuk menjamin sinergi dukungan pemerintah daerah dengan pencapaian target indikator makro nasional. Hal ini bertujuan untuk mendorong daerah merumuskan dan menyelaraskan pencapaian target yang mendukung pencapaian target nasional dengan mempertimbangkan karakteristik dan potensi setiap daerah.

Tabel 8.1
Penyelarasan Target Indikator Makro RPD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023-2026, RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 dan RPJMN Tahun 2020-2024

No	Indikator Pembangunan	RPJMN Tahun 2020-2024					Indikator Pembangunan	RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah 2022-2026					Indikator Pembangunan	RPD Kab. Banggai Kepulauan Tahun 2020-2024			
		Target						Target						Target			
		2020	2021	2022	2023	2024		2022	2023	2024	2025	2026		2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,60	5,80	5,90	6,10	6,20	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,88	6,56	7,08	7,92	8,77	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	2,84	2,95	3,07	3,19
2	Tingkat Kemiskinan (%)	9,81	9,43	9,00	8,55	8,15	Persentase Penduduk Miskin	12,18	10,84	9,65	8,69	7,9	Tingkat Kemiskinan (%)	10,43	9,63	8,97	8,44
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,20	4,00	3,80	3,40	3,10	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,07	2,84	2,54	2,08	1,47	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	2,26	2,20	2,14	2,08
4	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)						Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	69,74	69,87	70,00	70,26	70,39	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	67,39	68,07	68,75	69,44
5	Rasio Gini						Rasio Gini	0,24	0,22	0,19	0,18	0,32	Rasio Gini	0,27	0,26	0,25	0,24
6	Penurunan Emisi GRK (%)						Penurunan emisi gas rumah kaca (% BI)	20	22	24	26	29					

Guna lebih mempertegas pencapaian Tujuan dan Sasaran dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Banggai Kepulauan 2023 – 2026 ini, di tetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan yang diambil dari sebagian Indikator Kinerja Daerah, baik indikator tujuan maupun indikator sasaran daerah. Adapun IKU daerah yang ditetapkan dapat dilihat pada tabel 8.2 dibawah ini:

Tabel 8.2
Indikator Kinerja Utama Kabupaten Banggai Kepulauan
Tahun 2023-2026

No	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal (2021)	Target Kinerja Tahun				Kondisi Akhir
				2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	6	7	8	9	10
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks		B	B	BB	BB	BB
2	Opini BPK	Opini		WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
3	Indeks Profesionalitas Pegawai	Indeks (Interval)		61-70	71-75	75-80	81-85	81-85
4	Nilai SAKIP	Angka (kategori)		B	B	B	BB	BB
5	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	Kategori		Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi
6	Indeks Inovasi Daerah	Kategori (nilai)	Inovatif	Inovatif	Inovatif	Inovatif	Inovatif	Inovatif
7	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Kategori	N/A	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
8	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	65,61	67,39	68,07	68,75	69,44	69,44
9	Indeks Pemberdayaan Gender (IPG)	Indeks	71,79	76,35	77,56	78,76	79,97	79,97
10	Indeks Infrastruktur Daerah	Indeks	60,57	62,41	63,56	64,71	65,99	65,99
11	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,07	2,84	2,95	3,07	3,19	3,19
12	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, kehutanan dan perikanan	Persen	3,41	3,75	4,13	4,54	4,99	4,99
13	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	61,9	76	80	85	90	90
14	Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)	Indeks	1,03	1,48	1,86	2,23	2,61	2,61
15	Tingkat Kemiskinan	Persen	13,72	10,43	9,63	8,97	8,44	8,44
16	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	2,47	2,26	2,20	2,14	2,08	2,08
17	Rasio Gini	Indeks	0,28	0,27	0,26	0,25	0,24	0,24
18	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	80,66	81,74	82,25	82,77	82,88	82,88
19	Indeks Resiko Bencana	Indeks	163	163	163	144	144	144

Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan ukuran capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. IKK ini diambil dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Pada setiap urusan pemerintahan memiliki indikator kinerja masing-masing, namun tidak semua indikator urusan masuk sebagai indikator kinerja daerah yang tercantum di RPD. Indikator kinerja yang masuk di RPD adalah indikator kinerja yang bersifat strategis, makro dan memiliki daya ungkit yang tinggi dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Adapun IKK Kabupaten Banggai Kepulauan yang ditetapkan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 8.3
Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023-2026

No	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal (2021)	Target Kinerja Tahun				Kondisi Akhir Periode RPD
				2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	6	7	8	9	10
A	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT							
1.	Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi							
1.1	PDRB Harga Berlaku 2020	Miliar Rupiah	4.128,83	4489,541	4676,054	4862,567	5049,08	5049,08
1.2	PDRB Harga Konstan 20120	Miliar Rupiah	273.524	2.811,28	2.864,12	2.916,97	2.969,81	2.969,81
1.3	Pertumbuhan PDRB	Persen	5,07	2,84	2,95	3,07	3,19	3,19
1.4	Inflasi	Point	0,83	2,06	2,04	2,02	2	2
1.5	PDRB Per Kapita ADHB	Juta Rp	33,93	35,88	37,95	40,14	42,45	42,45
1.6	PDRB Per Kapita ADHK	Juta Rp						
1.7	Indeks Gini	Indeks	0,28	0,27	0,26	0,25	0,24	0,24
1.8	Garis Kemiskinan	Rupiah	378.799	Rp427.297	Rp448.700	Rp470.102	Rp491.505	Rp491.505
1.9	Jumlah Penduduk Miskin	Jiwa	16.330	14.906	14.264	13.622	12.980	12.980
1.10	Presentase Penduduk Miskin	Persen	13,72	11,99	11,15	10,26	9,33	9,33
1.11	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	65,61	67,39	68,07	68,75	69,44	69,44
2	Fokus Kesejahteraan Sosial							
2.1	Pendidikan							
2.1.1	Angka Melek Huruf	Persen	96,38	99,52	100	100	100	100
2.1.2	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	11,61	11,65	11,71	11,75	11,8	12
2.1.3	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	8,2	8,5	8,75	8,8	9	9
2.1.4	Angka Partisipasi Kasar (APK)							
a	SD/MI	Persen	110,21	110,3	110,41	110,52	110,61	110,61
b	SMP/MTs	Persen	79,77	79,82	79,86	79,91	79,95	79,95
c	SMA/MA	Persen						
2.1.5	Angka Partisipasi Murni (APM)							
a	SD/MI	Persen	97,96	99,5	99,75	99,8	100	100
b	SMP/MTs	Persen	68,86	72,59	74,37	76,15	77,93	77,93
c	SMA/MA	Persen						

No	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal (2021)	Target Kinerja Tahun				Kondisi Akhir Periode RPD
				2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	6	7	8	9	10
2.1.6	Angka Pendidikan yang ditamatkan (APT)							
a	SD/MI	Persen						
b	SMP/MTs	Persen						
c	SMA/MA	Persen						
2.2	Kesehatan							
2.2.1	Angka Kelangsungan Hidup Bayi	Hari	992,2	992,2	992,2	992,2	992,2	992,2
2.2.2	Angka Usia Harapan Hidup	Tahun	66,31	67,31	67,71	68,12	68,53	68,53
2.2.3	Angka Kematian Ibu	Per 100.000 KH	176	107,5	73	38,5	24	24
2.2.4	Angka Kematian Bayi	Per 1.000 KH	0,19	0	0	0	0	0
2.2.5	Angka Kematian Balita	Per 1.000 KH	0	0	0	0	0	0
2.2.6	stunting	Persen	21,8%	16,04%	13,7%	11%	8,3%	8,3%
2.3	Tenaga Kerja							
2.3.1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persen	71,98	70,98	71,18	71,38		
2.3.2	Tingkat Pengangguran	Persen	2,47	2,26	2,20	2,14	2,08	2,08
3.	Fokus Seni Budaya dan Olah Raga							
3.1	Kebudayaan							
3.1.1	Jumlah grup kesenian	Grup						
3.1.2	Jumlah gedung kesenian	Buah	-					
3.1.3	Museum	Buah	-					
3.1.4	Pusat Kebudayaan	Buah						
3.2	Olah Raga							
3.2.1	Jumlah klub olah raga	Klub						
3.2.2	Jumlah gedung olah raga	Buah	-					
B.	ASPEK PELAYANAN UMUM							
1.	Fokus Layanan Urusan Wajib							
1.1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar							
1.1.1	Pendidikan							
1.1.1.1	Angka Partisipasi Sekolah (APS)							

No	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal (2021)	Target Kinerja Tahun				Kondisi Akhir Periode RPD
				2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	6	7	8	9	10
a	SD/MI	Persen	99,7	99,75	99,8	100	100	100
b	SMP/MTs	Persen	94,1	95,2	97,5	98,75	100	100
c	SMA/SMK/MA	Persen						
1.1.1.2	Rasio Ketersediaan Sekolah							
a	SD/MI	Per 10.000 Penduduk Usia 7-12 Tahun	180,8	184,1	186,3	188,5	190,2	190,2
b	SMP/MTs	Per 10.000 Penduduk Usia 7-12 Tahun	140,2	142,8	145,22	148,65	150,05	150,05
c	SMA/SMK/MA	Per 10.000 Penduduk Usia 16-19 Tahun						
1.1.1.3	Rasio Guru/Murid							
a	SD/MI	Per 10.000 Penduduk Usia 7-12 Tahun	696,2	697,62	698,25	699,5	700	700
b	SMP/MTs	Per 10.000 Penduduk Usia 7-12 Tahun	597,85	598,35	591,8	593,65	595,08	595,08
c	SMA/SMK/MA	Per 10.000 Penduduk Usia 16-19 Tahun						
1.1.1.4	Fasilitas Pendidikan							
a	Persentase SD/MI Kondisi Bangunan Baik	Persen	88,199	93,2	96,3	98,53	100	100
b	Persentase SMP/MTs Kondisi Bangunan Baik	Persen	89,83	93,4	96,81	99,12	100	100
c	Persentase SMA/MA Kondisi Bangunan Baik	Persen						
1.1.1.5	Angka Kelulusan							
a	SD/MI	Persen	100	100	100	100	100	100
b	SMP/MTs	Persen	100	100	100	100	100	100

No	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal (2021)	Target Kinerja Tahun				Kondisi Akhir Periode RPD
				2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	6	7	8	9	10
c	SMA/SMK/MA	Persen						
1.1.1.6	Persentase Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persen	4160	4180	4190	4200	4410	4410
1.1.2	Kesehatan							
1.1.2.1	Angka kelangsungan hidup bayi	Persen	99,78	99,93	99,98	100	100	100
1.1.2.2	Angka kematian balita	per 1000 kelahiran	1,07	0,4	0,3	0,2	0,1	0,1
1.1.2.3	Angka kematian neonatal	per 1000 kelahiran hidup	8,10	7,32	6,98	6,64	6,3	6,3
1.1.2.4	Angka kematian ibu	per 100.000 kelahiran hidup	176	107,5	73	38,5	24	24
1.1.2.5	Angka Kelangsungan Hidup Bayi	Persen	99,78	99,93	99,98	100	100	100
1.1.2.6	Rasio dokter per 1.000 satuan penduduk	per 1.000 satuan penduduk	0,22	0,31	0,31	0,30	0,30	0,30
1.1.2.7	Rasio tenaga medis per 1.000 satuan penduduk	per 1.000 satuan penduduk	5,54	6,05	6,35	6,6	6,86	6,86
1.1.2.8	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	Persen	28,97	34,75	35,73	36,71	37,69	37,69
1.1.2.9	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	Persen	76	100	100	100	100	100
1.1.2.10	Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	Persen	88,5	100	100	100	100	100
1.1.2.11	Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	Persen	100	100	100	100	100	100
1.1.2.12	Persentase anak usia 1 Tahun yang di imunisasi campak	Persen	100	100	100	100	100	100

No	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal (2021)	Target Kinerja Tahun				Kondisi Akhir Periode RPD
				2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	6	7	8	9	10
1.1.2.1 3	Non polio AFP rate	per 100.000 penduduk	0,35	0,2	0,15	0,05	0	0
1.1.2.1 4	Cakupan balita pneumonia yang ditangani	Persen	13,8	75	80	100	100	100
1.1.2.1 5	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	Persen	43,5	80,76	77,38	73,36	68,5	68,5
1.1.2.1 6	Tingkat prevalensi Tuberkulosis	Per 100.000 penduduk	193	107,83	67,33	26,83	13,67	13,67
1.1.2.1 7	Prevalensi Gizi Buruk	Persen	100	100	100	100	100	100
1.1.2.1 8	Prevalensi Balita Kurang Gizi	Persen	100	100	100	100	100	100
1.1.2.1 9	Tingkat kematian karena tuberkulosis	Per 100.000 penduduk	2,33	0,16	0	0	0	0
1.1.2.2 0	Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS	Persen	43,51	49,02	50,39	51,78	53,16	53,16
1.1.2.2 1	Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS	Persen	84,3	78,91	79,39	78,87	80,36	80,36
1.1.2.2 2	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	Persen	100	100	100	100	100	100
1.1.2.2 3	Penderita diare yang ditangani Semua Umur	Persen	83,64	100	100	100	100	100
1.1.2.2 4	Angka kejadian malaria	Persen	0,83	0	0	0	0	0
1.1.2.2 5	Tingkat kematian akibat malaria	Persen	0	0	0	0	0	0
1.1.2.2 6	Proporsi anak balita dengan demam yang diobati dengan obat anti malaria yang tepat	Persen	0	100	100	100	100	100
1.1.2.2 7	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	Persen	0,01	0	0	0	0	0

No	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal (2021)	Target Kinerja Tahun				Kondisi Akhir Periode RPD
				2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	6	7	8	9	10
1.1.2.2.8	Cakupan pelayanan Kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	Persen	80,65	100	100	100	100	100
1.1.2.2.9	Cakupan kunjungan bayi	Persen	99	100	100	100	100	100
1.1.2.3.0	Cakupan pembantu puskesmas	Persen	30	31	32	33	34	34
1.1.2.3.1	Cakupan kunjungan Ibu Hamil K4	Persen	75	100	100	100	100	100
1.1.2.3.2	Cakupan pelayanan nifas	Persen	81	100	100	100	100	100
1.1.2.3.3	Cakupan neonates dengan komplikasi yang ditangani	Persen	27	40	48	55	63	63
1.1.2.3.4	Cakupan pelayanan anak balita	Persen	94	100	100	100	100	100
1.1.2.3.5	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6- 24 bulan keluarga miskin	Persen	75,5	75	80	85	90	90
1.1.2.3.6	Cakupan penjangkaran Kesehatan siswa SD dan setingkat	Persen	85	90	90,1	90,2	90,3	90,3
1.1.2.3.7	Cakupan pelayanan Kesehatan dasar masyarakat miskin	Persen	80,65	100	100	100	100	100
1.1.2.3.8	Cakupan desa / kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	Persen	100	100	100	100	100	100
1.1.2.3.9	Cakupan penderita hipertensi yang mendapat pelayanan sesuai standar	Persen	42	60	70	80	90	90
1.1.2.4.0	Cakupan penderita diabetes yang mendapat pelayanan sesuai standar	Persen	42	60	70	80	90	90

No	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal (2021)	Target Kinerja Tahun				Kondisi Akhir Periode RPD
				2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	6	7	8	9	10
1.1.2.4 1	Cakupan Orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat yang mendapat pelayanan kesehatan	Persen	80	100	100	100	100	100
1.1.3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang							
1.1.3.1	Proporsi panjang jaringan Jalan Kabupaten dalam kondisi baik	Persen	73,56	3,35	83,67	87,04	90,41	90,41
1.1.3.2	Persentase penduduk berakses air minum	Persen	86,27	87,27	88,91	90,54	92,18	92,18
1.1.3.3	Persentase rumah tinggal bersanitasi	Persen	79,21	83,12	85,22	87,33	89,43	89,43
1.1.3.4	Rasio Panjang Jalan dengan jumlah Penduduk	Per Jumlah Penduduk	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
1.1.3.5	Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik	Persen	79,51	80,76	81,51	82,26	83,01	83,01
1.1.4	Perumahan dan Kawasan Permukiman							
1.1.4.1	Rumah Tangga Pengguna Listrik	Persen	76,94	78,89	79,86	80,83	81,8	81,8
1.1.4.2	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	Rasio	75,4	78,9	80,6	82,3	84	84
1.1.4.3	Persentase luas kawasan kumuh yang tertangani	Persen	N/A	4	6	8	10	10
1.1.4.4	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	Persen	N/A	72,92	76,39	79,86	83,33	83,33
1.1.5	Urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat							
1.1.5.1	Persentase Penegakan PERDA	Persen	83,33%	100%	100%	100%	100%	100%
1.1.5.2	Persentase Patroli siaga Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat	Persen	190 Kali	300 hari	300 hari	300 hari	300 hari	1200 hari
1.1.5.3	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%

No	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal (2021)	Target Kinerja Tahun				Kondisi Akhir Periode RPD
				2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	6	7	8	9	10
1.1.5.4	Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.1.5.5	Cakupan petugas perlindungan masyarakat	Persen	89%	100%	100%	100%	100%	100%
1.1.5.6	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi	Persen	0,17%	41%	66%	91%	100%	100%
1.1.5.7	Jumlah Mobil Pemadam Kebakaran diatas 3000 - 5000 Liter pada WMK	Unit	2	1	-	1	-	4
1.1.6	Sosial							
1.1.6.1	Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi		1 panti	3 panti	3 panti	3 panti	3 panti	3 panti
1.1.6.2	Persentase PMKS yg memperoleh bantuan sosial	Persen	12,11	20	45	66	80	80
1.1.6.3	Presentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tertangani.	Persen	12,11	20	45	66	80	80
1.2	Layanan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar							
1.2.1	Ketenagakerjaan							
1.2.1.1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persen	71,98	72	72,3	72,98	73,6	73,6
1.2.1.2	Angka sengketa pengusaha pekerja per tahun	Persen	0	20	20	20	20	20
1.2.1.3	Pencari kerja yang ditempatkan	Persen	1,457	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.1.4	Tingkat pengangguran terbuka	Persen	2,47	2,26	2,2	2,14	2,08	2,08
1.2.1.5	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah	Persen	0	20	20	20	20	20
	Pelatihan berdsarkan klaster	Orang	12	48	48	48	48	48

No	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal (2021)	Target Kinerja Tahun				Kondisi Akhir Periode RPD
				2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	6	7	8	9	10
	kopetensi							
	Pemberian perlindungan melalui jaminan sosial dan fasilitasi kegiatan sosial	Orang	1.433	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							
1.2.2.1	Persentase partisipasi perempuan dilembaga pemerintah	Persen	6,46	6,5	7	7,5	8	8
1.2.2.2	Partisipasi Perempuan dilembaga swasta	Persen	1,3	1,5	2	2,5	3	3
1.2.2.3	Jumlah kursi DPRD yang diduduki perempuan	Orang	4	5	6	7	8	8
1.2.2.4	Jumlah total kursi di keanggotaan DPRD	Kursi	25	25	25	25	25	25
1.2.2.5	Jumlah KDRT	KDRT	5	5	5	4	4	4
1.2.2.6	Jumlah pekerja usia 5 tahun keatas	Orang	58,503	58,607	58,701	58,808	58,901	58,901
1.2.2.7	Partisipasi angkatan kerja perempuan	Orang	24,336	24,436	24,546	24,636	24,750	24,750
1.2.2.8	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	Persen	100	100	100	100	100	100
1.2.3	Pangan							
1.2.3.1	Regulasi ketahanan pangan	Ada/tidak	ada	ada	ada	ada	ada	ada
1.2.3.2	Ketersediaan pangan utama	Persen	129,29	100	100	100	100	100
1.2.3.3	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Persen	85,09	90	93,05	95	100	100
1.2.3.4	Penanganan Daerah Rawan Pangan	Desa	44	8	8	9	9	9
1.2.4	Pertanahan							
1.2.4.1	Jumlah Lahan PEMDA yang bersertifikat	Sertifikat						

No	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal (2021)	Target Kinerja Tahun				Kondisi Akhir Periode RPD
				2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	6	7	8	9	10
1.2.4.2	Penyelesaian Kasus Tanah Negara	Persen	100	100	100	100	100	100
1.2.4.3	Penyelesaian Izin Lokasi	Persen	100	100	100	100	100	100
1.2.5	Lingkungan Hidup							
1.2.5.1	Indeks kualitas lingkungan hidup	Indeks	80,66	81,74	82,25	82,77	82,28	82,28
1.2.5.2	Indeks kualitas air	Indeks	67,78	68,5	69	69,5	70	70
1.2.5.3	Indeks kualitas udara	Indeks	94,06	94,5	95	95,5	96	96
1.2.5.4	Indeks kualitas tutupan lahan	Indeks	68,13	68,5	69	69,5	70	70
1.2.5.5	Persentase jumlah sampah yang ditangani	Ton/tahun	35	40	45	50	55	55
1.2.6	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil							
1.2.6.1	Rasio penduduk ber KTP	per satuan penduduk	0,995	0,905	0,997	0,997	0,997	0,997
1.2.6.2	Rasio bayi berakte kelahiran	Rasio	0,32	0,47	0,57	0,70	0,87	0,87
1.2.6.3	Rasio pasangan berakte nikah	Rasio	0,32	0,33	0,35	0,38	0,43	0,43
1.2.6.4	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah
1.2.6.5	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk	Persen	99,54	100	100	100	100	100
1.2.6.6	Cakupan penerbitan akta kelahiran	Persen	39,6	46,7	57,47	70,54	86,05	86,05
1.2.7	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa							
1.2.7.1	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintah desa yang baik	Persen	89	94	96	97	100	100
1.2.7.2	Rata-rata jumlah kelompok binaan Lembaga pemberdayaan masyarakat	Persen	2	2	3	4	5	5
1.2.7.3	Persentase LPM Berprestasi	Persen						
1.2.7.4	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	Persen	100	100	100	100	100	100

No	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal (2021)	Target Kinerja Tahun				Kondisi Akhir Periode RPD
				2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	6	7	8	9	10
1.2.7.5	Persentase PKK Aktif	Persen	100	100	100	100	100	100
1.2.7.6	Persentase Posyandu aktif	Persen	100	100	100	100	100	100
1.2.7.7	Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat	Persen	Rp.6,627,000,000	Rp.6,850,000,000	Rp.7,000,000,000	Rp.7,150,000,000	Rp.7,500,000,000	Rp.7,500,000,000
1.2.7.8	Pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat	Persen						
1.2.8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana							
1.2.8.1	Rata-rata jumlah anak per keluarga	Persen	3,98	3,70	3,68	3,65	3,50	3,50
1.2.8.2	Rasio akseptor KB	Persen	91,52	93,00	94,00	95,00	96,00	96,00
1.2.8.3	Cakupan peserta KB aktif	Persen	73,18	75,00	76,00	80,00	85,00	85,00
1.2.8.4	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera							
	Keluarga Pra Sejahtera	Persen	18,40	18,10	18,00	17,80	17,70	17,70
	Keluarga Sejahtera	Persen	81	81,25	81,35	81,40	81,45	81,45
1.2.9	Perhubungan							
1.2.9.1	Jumlah arus penumpang angkutan umum	Orang	164522	179566	187088	194610	202132	202132
1.2.9.2	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	Pelabuhan	13	13	13	14	14	14
1.2.9.3	Persentase Angkutan darat	Persen	8,76	9,28	9,54	9,8	10,06	10,06
1.2.9.4	Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR)	Hari						
1.2.9.5	Rasio Pemasangan Rambu-rambu	Persen						
1.2.10	Komunikasi dan Informatika							
1.2.10.1	Cakupan layanan telekomunikasi	Persen	76	80	82	84	86	86
1.2.11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah							
1.2.11.1	Jumlah Koperasi Aktif	Unit	100	103	104	105	107	107

No	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal (2021)	Target Kinerja Tahun				Kondisi Akhir Periode RPD
				2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	6	7	8	9	10
1.2.11.2	Jumlah Koperasi RAT (Rapat Anggota Tahunan)	Unit	4	6	8	10	12	12
1.2.11.3	Persentase Usaha Mikro menjadi usaha kecil	Persen						
1.2.12	Penanaman Modal							
1.2.12.1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	PMDN/PMA	28	43	54	67	83	83
1.2.12.2	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Rp	9.050.000.000	10.950.500.000	12.045.500.000	13.250.050.000	14.575.100.000	14.575.100.000
1.2.12.3	Rasio daya serap tenaga kerja	Persen	1,35	1,27	1,2	1,17	1,13	1,13
1.2.12.4	Jumlah tenaga kerja bekerja pada perusahaan PMA/PMDN	Orang	38	55	66	79	94	94
1.2.12.5	jumlah seluruh PMA/PMDN	PMA/PMDN	28	43	54	67	83	83
1.2.13	Kepemudaan dan Olah Raga							
1.2.13.1	Jumlah klub olahraga	Klub						
1.2.13.2	Jumlah Gedung olahraga	Gedung						
1.2.13.3	Persentase organisasi kepemudaan	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.2.13.4	Persentase Wirausaha Pemuda	Persen	20%	25%	25%	25%	25%	25%
1.2.13.5	Cakupan pelatih yang bersertifikat	Persen	11%(3 Orang)	25% (7 Orang)	42%(12Orang)	61%(17Orang)	79%(22Orang)	79%(22Orang)
1.2.13.6	cakupan pembinaan atlet muda	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.2.13.7	Jumlah atlet berprestasi	Atlet	0	1	2	2	2	2
1.2.13.8	Cakupan pembinaan olahraga	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.2.13.9	Jumlah prestasi olahraga	Cabang olahraga	3	4	4	6	6	6
1.2.14	Statistik							

No	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal (2021)	Target Kinerja Tahun				Kondisi Akhir Periode RPD
				2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	6	7	8	9	10
1.2.14.1	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	Ada/tidak	Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
1.2.14.2	Buku "kabupaten dalam angka"	Ada/tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
1.2.14.3	Buku "PDRB kabupaten"	Ada/tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
1.2.15	Persandian							
1.2.15.1	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	Persen						
1.2.16	Kebudayaan							
1.2.16.1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Kali	1	4	4	4	4	4
1.2.16.2	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Persen	4	4	4	4	4	4
1.2.17	Perpustakaan							
1.2.17.1	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun (orang)	Orang	5043	5993	6793	7793	7600	7600
1.2.17.2	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	Per Jumlah Koleksi	21644	22344	23144	24044	25044	25044
1.2.17.3	Rasio perpustakaan	per 1000 penduduk	213	214	215	217	220	220
1.2.17.4	Jumlah Koleksi Judul Buku Perpustakaan	Judul Buku	172	372	622	752	1132	1132
1.2.17.5	Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis dan Penilai yang memiliki sertifikat	Orang						
1.2.18	Kearsipan							
1.2.18.1	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	Persen	10	20	26	36	46	46
2.	Fokus Layanan Urusan Pilihan							

No	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal (2021)	Target Kinerja Tahun				Kondisi Akhir Periode RPD
				2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	6	7	8	9	10
2.1	Kelautan dan Perikanan							
2.1.1	Produksi perikanan							
2.1.1.1	Produksi Perikanan Tangkap	Ton/tahun	10.210,00	14.702,40	17.642,88	21.171,46	25.405,75	25.405,75
2.1.1.2	Produksi perikanan budidaya							
a.	- Budidaya Ikan	Ton/tahun	12.958,00	18.658,84	22.391,17	31.385,47	37.662,56	37.662,56
b.	- Budidaya Rumput Laut	Ton/tahun	4.420,99	6.366,23	7.639,48	9.167,38	11.000,86	11.000,86
2.1.1.3	Produksi Perikanan yang diolah	Ton/tahun	11,7	11,9	12,1	12,3	12,3	12,3
2.1.1.4	Konsumsi Ikan	Ton/tahun	60,59	87,25	104,70	125,64	150,77	150,77
2.2	Pariwisata							
2.2.1	Kunjungan wisata	Orang	115.260	121.023	127.074	133.428	140.100	140.100
2.2.2	Lama Kunjungan Wisata	Hari	1-2	1-2	1-2	1-2	1-2	1-2
2.2.3	PAD Sektor Pariwisata	Persen	0	12.180.000	16.740.000	20.040.000	24.360.000	24.360.000
2.2.4	Nilai Tambah Ekonomi Kreatif	Rupiah	-	1.250.000	1.450.000	1.600.000	2.000.000	2.000.000
2.3	Pertanian							
2.3.1	Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan Terhadap PDRB	Persen	49,01	49,05	49,10	49,16	49,23	49,23
2.3.2	Kontribusi sektor pertanian (palawija)/tanaman pangan terhadap PDRB	Persen	2,53	2,60	2,64	2,67	2,71	2,71
2.3.3	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB	Persen	13,98	14,13	14,21	14,28	14,36	14,36
2.3.6	Cakupan bina kelompok petani	Persen	-	400	280	200	120	120
2.3.7	Tanaman Pangan	Ton	16.050,52	17.655,57	19.421,12	21.363,24	23.499,56	23.499,56
2.3.8	Produksi Tanaman Holtikultura	Ton	1.255,63	1.384,32	1.453,44	1.526,11	1.602,42	1.602,42
2.3.9	Tanaman Perkebunan	Ton	11.449,24	13.853,58	15.238,94	16.762,83	229.565	229.565
2.3.10	Peternakan	Ekor	221.865	224.917	226.465	228.015	229.565	229.565
2.4	Perdagangan							
2.4.1	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	Rp	725.450.400	849.510.460	882.543.940	915.577.420	948.610.900	948.610.900

No	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal (2021)	Target Kinerja Tahun				Kondisi Akhir Periode RPD
				2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	6	7	8	9	10
2.4.2	Jumlah pasar	unit	32	32	32	32	32	32
2.5	Perindustrian							
2.5.1	Cakupan kelompok pengrajin industri	Kelompok	310	280	288	296	304	304
2.5.2	Jumlah IKM	Kelompok	1136	1340	1421	1502	1582	1582
2.6	Transmigrasi							
2.6.1	Jumlah lokasi yang di tata sarana dan prasarannya	lokasi	2	2	2	2	2	2
2.6.2	Jumlah transmigran yang dibina	KK	230	76	77	77	0	0
4.	Unsur Pendukung/Penunjang Urusan Pemerintahan							
4.1	Perencanaan							
4.1.1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan PERDA	Ada/tidak	Ada	ada	ada	ada	ada	ada
4.1.2	Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan PERDA	Ada/tidak	Ada	ada	ada	ada	ada	ada
4.1.3	Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan PERDA	Ada/tidak	Ada	ada	ada	ada	ada	ada
4.1.4	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan PERDA	Ada/tidak	Ada	ada	ada	ada	ada	ada
4.1.5	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Ke dalam RKPD	Persen		100	100	100	100	100
4.1.6	Penjabaran Konsistensi Program RKPD Ke dalam APBD	Persen		100	100	100	100	100
4.2	Keuangan							
4.2.1	Opini BPK terhadap laporan keuangan	Opini		WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
4.2.2	Waktu Penetapan APBD	Tepat waktu/tidak	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
4.2.3	waktu penetapan dokumen perubahan	Tepat waktu/tidak	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu

No	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal (2021)	Target Kinerja Tahun				Kondisi Akhir Periode RPD
				2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	6	7	8	9	10
	APBD							
4.2.5	Tingkat ketepatan waktu pelaporan Barang Milik Daerah	Ya/tidak	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
4.2.6	Presentase SILPA	Persen						
4.2.9	Pendapatan Pajak Daerah	Rupiah	5.630.410.617,25	6.506.389.013,55	7.294.911.686,24	8.083.434.358,92	8.871.957.031,60	8.871.957.031,60
4.2.10	Hasil Retribusi Daerah	Rupiah	16.216.053.738,00	24.827.081.467,90	26.618.751.085,36	28.410.420.704,83	30.202.090.323,29	30.202.090.323,29
4.2.11	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	Rupiah	2.588.375.499,55	2.561.400.236,46	2.988.300.275,87	3.415.200.315,28	3.842.100.354,69	3.842.100.354,69
4.2.12	Lain-lain PAD yang Sah	Rupiah	4.333.300.642,54	3.058.569.040,13	3.568.330.546,82	4.078.092.053,50	4.587.853.560,19	4.587.853.560,19
4.3	Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan							
4.3.1	Persentase CPNS yang direkrut sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan	Persen	100	100	100	100	100	100
4.3.2	Rata-rata lama pegawai mendapatkan Pendidikan dan pelatihan	Hari	0	20	20	20	20	20
4.3.3	Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan formal	Persen	2%	5%	8%	12%	15%	15%
4.3.4	Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti Pendidikan dan pelatihan struktural	Persen	29%	31%	32%	34%	35%	35%
4.3.5	Persentase pegawai yang ditempatkan sesuai dengan standar kompetensi	Persen	0%	68%	69%	71%	73%	73%
4.3.6	Persentase pegawai yang capaian kinerjanya sesuai target	Persen	15%	16%	16%	16%	16%	16%

No	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal (2021)	Target Kinerja Tahun				Kondisi Akhir Periode RPD
				2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	6	7	8	9	10
4.3.7	Persentase pejabat struktural yang mengikuti Diklat Kepemimpinan sesuai eselonnya	Persen						
4.3.8	Persentase seleksi terbuka untuk jabatan struktural	Persen	0%	3%	2.4%	1.94%	1.73%	1.73%
4.3.9	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah		36	36	36	36	36	36
4.3.10	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah		172	172	172	172	172	172
4.3.11	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah		1655	1655	1655	1655	1655	1655
4.4	Penelitian dan Pengembangan							
4.4.1	Jumlah penelitian yang dilaksanakan	Penelitian	2	4	2	2	4	4
4.4.2	Persentase implementasi rencana kelitbangan	Persen	30	100	100	100	100	100
4.4.3	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	Persen	100	100	100	100	100	100
4.4.4	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	Persen	78	100	100	100	100	100
4.4.5	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan	Persen	34	50	70	80	90	90
4.4.6	Jumlah Inovasi Perangkat Daerah	PD	17	23	30	36	42	42
4.5	Sekretariat Dewan							
4.5.1	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap alat-alat kelengkapan DPRD	Ada/tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
4.5.2	Tersusun dan terintegrasinya Program/Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi	Ada/tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

No	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal (2021)	Target Kinerja Tahun				Kondisi Akhir Periode RPD
				2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	6	7	8	9	10
	Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)							
4.5.3	Terintegrasi program program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan dokumen anggaran setwa DPRD	Ada/tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
4.6	Sekretariat Daerah							
4.6.1	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	Persen						
4.6.2	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan dengan metode tender	Persen						
4.6.3	Persentase Rancangan Perda yang diharmonisasi	Persen		100	100	100	100	100
5.	Unsur Pengawasan							
5.1	Inspektorat Daerah							
5.1.1	Maturitas SPIP	Level	2,3	2	2	2	3	3
5.1.2	Kapabilitas APIP	Level	2,5	2	3	3	3	3
5.1.3	Persentase Tindak Lanjut Temuan	Persen	20,66	51	55	60	75	75
5.1.4	Jumlah Temuan BPK	Temuan	21	-	-	-	-	-
6.	Unsur Pemerintahan Umum							
6.1	Kesatuan Bangsa dan Politik							
6.1.1	Kejadian Konflik IPLESOSBUDHANKAM	Angka	268 Kasus	250 Kasus	200 Kasus	150 Kasus	100 Kasus	100 Kasus

No	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal (2021)	Target Kinerja Tahun				Kondisi Akhir Periode RPD
				2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	6	7	8	9	10
6.1.2	Angka Kejadian Konflik SARA	Angka	1 Konflik sara	1 Konflik sara	1 Konflik sara	1 Konflik sara	1 Konflik sara	1 Konflik sara
C. ASPEK DAYA SAING								
1. Fokus Kemampuan Ekonomi								
1.1	Konsumsi Rumah Tangga							
a.	ADHB	Miliar Rp	2613,69	3062,495	3229,825	3397,155	3564,485	3564,485
b.	ADHK	Miliar Rp	1638,16	1732,90	1767,62	1802,33	1837,05	1837,05
2.1 Perhubungan								
2.1.1	Rasio Panjang Jalan	Per Jumlah Kendaraan	896,47/784	896,47/919	896,47/987	896,47/1055	896,47/1123	896,47/1123
2.1.2	Jumlah Orang melalui dermaga/bendara/terminal	Orang	126.358,00	143.032,00	150.870,00	158.707,00	166.545,00	166.545,00
2.1.3	Jumlah Barang melalui dermaga/bendara/terminal	Barang	126.358,00	143.032,00	150.870,00	158.707,00	166.545,00	166.545,00
2.2 Penataan Ruang								
2.2.1	Rasio Luas Wilayah Perkotaan	Persen	12,56	12,56	12,56	12,56	12,56	12,56
2.2.2	Jumlah Hotel	Buah	3	3	4	4	5	5
2. Fokus Iklim Berinvestasi								
2.1	Angka Kriminalitas	Jumlah						
2.2	Lama Proses Perizinan	Hari						
3. Fokus Sumber Daya Manusia								
3.1 Kualitas Tenaga Kerja								
3.1.1	Rasio Lulusan S1/S2/S3	Per 10.000						
3.1.2	Rasio Ketergantungan	Persen	49,66	47,82	44,73	40,89	35,64	35,64

BAB IX

PENUTUP

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Banggai Kepulauan 2023-2026 disusun sebagai upaya untuk mencapai tujuan pembangunan Kabupaten Banggai Kepulauan selama kurun waktu 4 (empat) tahun mendatang, terhitung mulai dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2026. Penyusunan RPD ini akan menjadi pedoman dan arahan bersama bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Banggai Kepulauan. RPD Kabupaten Banggai Kepulauan 2023-2026 merupakan dokumen perencanaan yang terpadu dan searah dengan RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah dan RPJMN.

Sebagai tanggung jawab bersama, pencapaian tujuan, sasaran dan indikator kinerja, perlu dikembangkan peran aktif seluruh stakeholder dalam pelaksanaan dan evaluasi pembangunan. Keberhasilan pelaksanaan pembangunan perlu peran aktif seluruh masyarakat Banggai Kepulauan, swasta dan sikap mental, tekad dan semangat aparatur pemerintah daerah kabupaten Banggai Kepulauan, dukungan DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah maupun Pemerintah Pusat. Dengan didukung dan kerjasama semua pihak, diharapkan Kabupaten Banggai Kepulauan dapat semakin meningkatkan kualitas kinerja dalam melayani seluruh masyarakat Banggai Kepulauan.

9.1 Pedoman Transisi

Pedoman transisi dalam penyusunan RPD ini adalah :

1. RPD menjadi pedoman penyusunan RKPD dan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas dan Plafon Anggaran serta APBD masa transisi yaitu tahun pertama pada masa kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih;
2. RPD sebagai pedoman penyusunan perencanaan dan penganggaran tahunan untuk menyelesaikan permasalahan yang belum dapat terselesaikan pada RPJMD sebelumnya dan masalah yang dihadapi pada periode RPD Tahun 2023-2026;

3. RKPD masa transisi pada tahun pertama merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari RPD periode 2023-2026.

9.2 Kaidah Pelaksanaan

RPD merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2023-2026 dengan berpedoman pada RPJP Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2005-2025. RPD juga sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dan menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan, serta melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum dalam RPD Tahun 2023- 2026, kaidah-kaidah pelaksanaan adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan RPD Tahun 2023-2026 diarahkan dan dikendalikan langsung oleh penjabat (Pj) Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;
2. Dalam menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah, Pj. Bupati Banggai Kepulauan dibantu oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan (Bappeda dan Litbang) Kabupaten Banggai Kepulauan;
3. Seluruh perangkat daerah yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan agar melaksanakan program-program dalam RPD Tahun 2023-2026 dengan sebaik-baiknya;
4. Setiap perangkat daerah, baik yang berbentuk badan, dinas, sekretariat, dan perangkat daerah lainnya, berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, arah Kebijakan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah yang disusun dengan berpedoman pada RPD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023-2026;
5. Penjabaran lebih lanjut RPD Tahun 2023-2026 untuk setiap tahunnya harus dilakukan melalui penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banggai Kepulauan;

6. Penyusunan RKPD Kabupaten Banggai Kepulauan harus dilakukan melalui proses musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan secara berjenjang, yaitu mulai dari Musrenbang Desa, Musrenbang Kecamatan, Forum Perangkat Daerah, dan Musrenbang Kabupaten;
7. RKPD Kabupaten Banggai Kepulauan harus menjadi acuan bagi setiap perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) yang disusun dengan pendekatan berbasis kinerja;
8. Dalam hubungannya dengan keuangan daerah, keberadaan RKPD Kabupaten Banggai Kepulauan merupakan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) terutama sebagai rujukan dalam penyusunan Kebijakan Umum (KUA) APBD, serta penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS);
9. Renja Perangkat Daerah yang disusun dengan pendekatan berbasis kinerja harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD);
10. Dalam pelaksanaan RPD Tahun 2023-2026, setiap perangkat daerah perlu mengupayakan pengaturan peran stakeholders dalam mendukung pelaksanaan RPD Tahun 2023-2026 ini, dan melakukan sosialisasi baik kepada seluruh komponen aparat yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan, instansi terkait maupun masyarakat luas;
11. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPD Tahun 2023-2026, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPD Tahun 2023-2026, sebagai berikut:
 - a. Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dilakukan oleh masing-masing Pimpinan Perangkat Daerah;
 - b. Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan menghimpun dan menganalisis hasil pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing Pimpinan Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya;
 - c. Kepala Perangkat Daerah melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan perangkat daerah periode sebelumnya;

- d. Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada huruf (c);
 - e. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf (d) menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya.
12. Dalam hal terjadi perkembangan yang berpengaruh terhadap target sasaran, kebutuhan pembiayaan dan lain-lain dalam RPD, maka penyesuaiannya dilakukan melalui penyusunan RKPD, KUA, PPAS serta APBD setiap tahunnya.
 13. Dengan mempertimbangkan berbagai hal yang diluar kendali Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan dan diperkirakan dapat menghambat pelaksanaan RPD, maka berbagai strategi, arah kebijakan dan program yang telah dikembangkan dapat ditinjau kembali dan hasilnya harus dikonsultasikan kepada DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan untuk mendapatkan pertimbangan lebih lanjut dalam proses pelaksanaannya.
 14. Rencana pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 dapat dilakukan perubahan apabila:
 - a. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara asumsi perencanaan dengan kondisi eksisting;
 - b. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara target dan pencapaian kinerja sampai dengan tahun berjalan;
 - c. Terjadi perubahan yang mendasar;
 - d. Perubahan rencana pembangunan daerah tahun 2023-2026 dapat dilakukan tanpa melalaui tahapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan, dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.